



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 mengamanatkan Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Daerah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup laporan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan memperhatikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian pelayanan dasar dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Penulisan LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mengacu pada sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, yang memuat Penjelasan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum.
2. **Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

3. **Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**, yang memuat dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan, gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
4. **Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum**, yang memuat urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; dan Program & Kegiatan.
5. **Bab V Penutup**.

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada Tanggal 1 Juli 2004;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Standar Minimal (SPM);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4).

8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 723);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120.04/6976/OTDA Tanggal 31 Desember Tahun 2019 Perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019.

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia, mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada tanggal 1 Juli 2004 yang dipusatkan di Kota Batam dan kemudian setahun kemudian berangsur pindah ke Ibukota Provinsi di Kota Tanjungpinang. Saat ini Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau berada di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.

b. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km², terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.

**Tabel 1.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Permendagri Nomor 72 Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1.	Kabupaten Karimun	912,75
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21

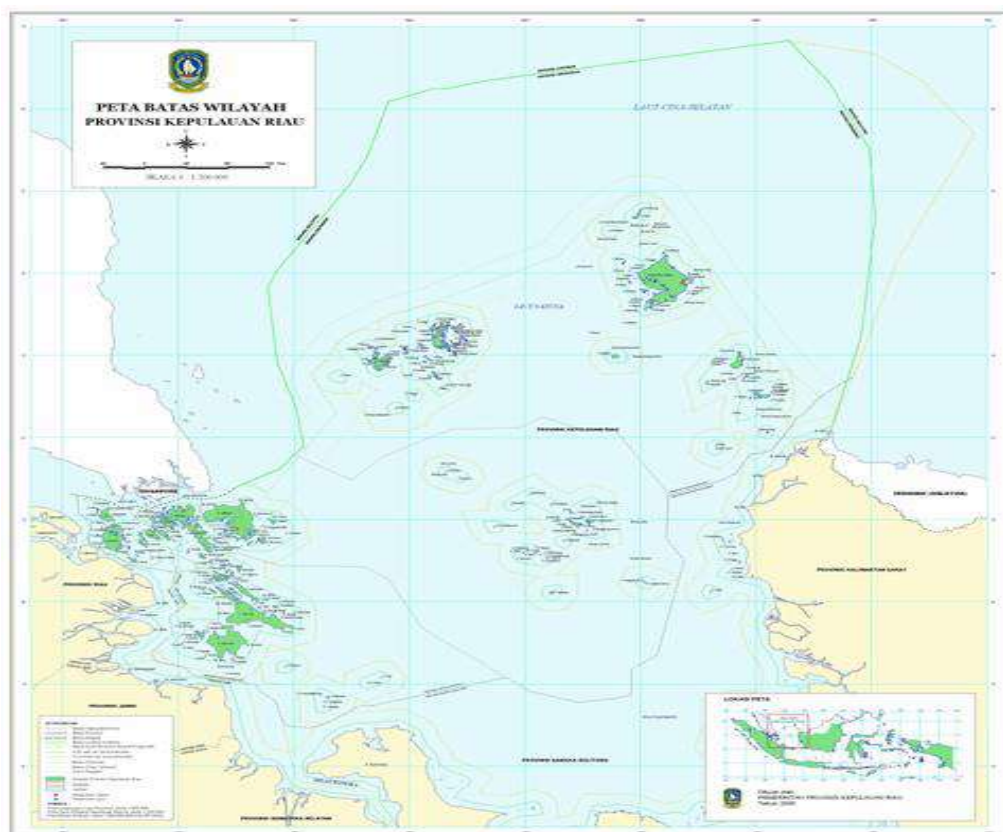
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
Total		8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau



Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 1.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan

Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	Total	417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

Setelah terbitnya Undang–Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi

air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Hasil verifikasi Tim Nasional setelah ditambah Pulau Berhala terdapat 1.796 pulau yang sudah bernama, hal ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, dengan perincian terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Tabel 1.4 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
2	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
3	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,
5	Kota Batam	4	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
	Jumlah	22	

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Di samping itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar.

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan database Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan Pencatatan Sipil per-Juni Tahun 2022 sebanyak 2.101.215 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.068.834 atau 51% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.032.381 jiwa atau 49%.

Pada tahun 2022, rasio jenis kelamin penduduk provinsi Kepulauan Riau sebesar 103,53 artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, dengan luas daratan provinsi Kepulauan Riau sebesar 8,2 ribu km² maka kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 256,25 jiwa/km. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni pada tahun 2022 sebanyak 1.207.082 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 48.084 jiwa.

Tabel 1.5

**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022**

N o	Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
1.	Bintan	86.872	82.575	169.447	105,20	128,54
2.	Karimun	134.030	128.045	262.075	104,67	287,13
3.	Natuna	42.369	40.455	82.824	104,73	41,23
4.	Lingga	52.725	49.425	102.150	106,68	45,06
5.	Kep. Anambas	24.695	23.389	48.084	105,58	81,48
6.	Batam	612.671	594.411	1.207.082	103,07	1.257,05
7.	Tanjungpinang	115.472	114.081	229.553	101,22	1.597,94
8.	Provinsi Kepri	1.068.834	1.032.381	2.101.215	103,53	256,25

Sumber: DPMDDUKCAPIL 2022

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau hampir 96% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota

provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km².

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000.

Tabel 1.6

Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 mengacu pada Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 4 Tahun 2021 yang terdiri atas 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 43 Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah OPD baik berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas dan Badan maupun Cabang Dinas.



Tabel 1.7
31 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah UPT
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2 UPT
2	DINAS PERHUBUNGAN	4 UPT
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6 UPT
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3 UPT
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 UPT
6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA	-
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-
8	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	2 UPT
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	2 UPT
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1 UPT
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-
12	DINAS PENDIDIKAN	1 UPT 5 CABDIS
13	DINAS KEBUDAYAAN	5 CABDIS
14	DINAS ESDM	-
15	DINAS KESEHATAN	-
16	DINAS PARIWISATA	-
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-
18	DINAS SOSIAL	1 UPT
19	DINAS PM DESA, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	-
20	DINAS PM DAN PTSP	-
21	DINAS KOP UKM	
22	DISPERINDAG	
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9 UPT
24	BKD DAN KORPRI	-
25	BADAN PENGEMBANGAN SDM	
26	BAPPEDA	-
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-
28	BADAN KESBANG DAN POLITIK	-
29	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN	
30	BADAN PENGHUBUNG	
31	INSPEKTORAT	-
32	SATPOL PP DAN DAMKAR	-
33	SEKRETARIAT DAERAH	
34	SEKRETARIAT DPRD	-
35	RUMAH SAKIT UMUM RAJA AHMAD THABIB	-
36	RUMAH SAKIT UMUM ENGKU HAJI DAUD	-

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan
Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Desember 2021

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	1.343	1.894	3.237
Fungsional Umum	653	636	1.289
Struktural	323	137	460
Eselon IV	139	74	213
Eselon III	145	58	203
Eselon II	38	5	43
Eselon I	1	-	1
Jumlah	2.319	2.667	4.986

Sumber : Badan Kepegawaian dan Korpri Desember 2022

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sampai dengan SD	7
2	SLTP/Sederajat	6
3	SMA/Sederajat	357
4	Diploma I, II/Akta I, II	11
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	492
6	Tingkat Sarjana/Diploma IV/Doktor/Ph.D	4.113
	Jumlah	4.986

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri-Desember 2022

Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2022

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. I/A (Juru Muda)	1	-	0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	-	2
3. I/C (Juru)	3	-	3
4. I/D (Juru Tingkat I)	2	-	2
Golongan I	8	-	8
5. II/A (Pengatur Muda)	14	1	15
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	33	7	40
7. II/C (Pengatur)	90	81	171
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	147	117	264
Golongan II	284	206	490
9. III/A (Penata Muda)	197	253	450
10. III/B (Penata Muda Tingkat 1)	402	499	901
11. III/C (Penata)	463	595	1.058
12. III/D (Penata Tingkat I)	508	715	1.223
Golongan III	1.570	2.062	3.632
13. IV/A (Pembina)	289	299	588
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	114	94	208
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	31	3	34
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	21	3	24
17. IV/E (Pembina Utama)	2	-	2
Golongan IV	457	399	856
Jumlah	2.319	2.667	4986

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri-Desember 2022

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp

817.898.806.329,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 797.275.277.188,36 atau sebesar (97,48%).

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pendidikan					
Urusan Pendidikan		817.898.806.329,00	797.275.277.188,36	97,48	Dinas Pendidikan
Program pengelolaan Pendidikan		343.849.050.681	330.797.920.707,36	96,20	
	1. angka partisipasi sekolah (aps) sma/smk				
	2. angka partisipasi kasar (apk) sma/ma/smk				
	3. angka partisipasi kasar (apk) slb				
	4. angka partisipasi murni (apm) sma/smk/ma/mak				
	5. angka putus sekolah sma/smk				
	6. ruang kelas sma/smk/slb dalam kondisi baik				
	7. angka melanjutkan (am) dari smp ke sma/smk				
	8. rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah				
Pengelolaan pendidikan sekolah Menengahatas		183.690.074.285	176.036.573.361,25	95,83	
	Persentase siswa sma yang diterima Di perguruan tinggi				
	Persentase ruang kelas sma dalam kondisi baik				
	Persentase angka putus sekolah sma				
	Jumlah Ruang kelas SMA yang dibangun				



	Jumlah utilitas SMA yang tersedia				
	Persentase Tenaga Pendidik SMA yang Bersertifikasi				
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15.938.283.936	15.768.174.483	98,93	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10.484.136.200	10.449.513.764	99,67	
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	1.969.636.600	1.967.719.935	99,90	
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	5.606.991.600	5.598.477.875	99,85	
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	4.736.383.902	4.730.072.577	99,87	
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	1.436.882.600	1.431.903.410	99,65	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4.214.395.800	4.201.059.075	99,68	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.058.914.600	1.057.824.075	99,90	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6.003.052.581	5.666.923.348	94,40	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2.294.873.600	2.292.898.875	99,91	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2.235.626.600	2.234.286.075	99,94	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	764.134.600	754.988.765	98,80	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	217.800.000	217.595.000	99,91	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	337.985.600	337.548.445	99,87	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	247.350.600	246.857.675	99,80	



Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	142.165.000	141.960.000	99,86	
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	170.122.000	169.917.000	99,88	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8.378.816.700	8.241.420.586	98,36	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	189.572.000	182.575.400	96,31	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8.035.871.200	8.031.150.309	99,94	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	6.231.533.929	5.653.596.713	90,73	
Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik				
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	267.610.000	253.207.372	94,62	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	328.892.200	299.144.687	90,96	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	78.628.000	51.127.440	65,02	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	432.030.000	386.670.000	89,50	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	101.888.384.437	95.669.960.477,25	93,89	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah		146.924.996.066	141.945.854.225.34	96,61	
Menengah Kejuruan					
	Persentase siswa SMK Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri				
	Persentase Ruang kelas SMK dalam kondisi baik				



	Persentase Angka Putus Sekolah SMK				
	Jumlah Ruangkelas SMK yang dibangun				
	Jumlah UtilitasSMK yang tersedia				
	Persentase Tenaga Pendidik SMK yang Bersertifikasi				
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	29.680.550.255	29.594.503.596	99,71	
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	8.241.552.607	8.171.704.138	99,15	
Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	1.366.900.000	1.354.050.000	99,06	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.893.480.000	1.858.260.000	98,14	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3.774.462.414	3.573.927.937	94,69	
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	769.287.000	731.007.000	95,02	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4.316.375.200	4.260.047.936	98,70	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	310.894.905	190.991.750	61,43	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan	900.035.000	900.000.000	100,00	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	74.063.059.785	70.560.598.019,34	95,27	
Pengelolaan Pendidikan Khusus		13.233.980.330	12.815.493.120,77	96,83	
	Persentase Ruang kelas SLB dalam kondisi baik				
	Persentase Angka Putus Sekolah SLB				
	Jumlah Ruang kelas SLB yang dibangun				
	Jumlah Utilitas SLB yang tersedia				



	Persentase Tenaga Pendidik SLB yang Bersertifikasi				
	Persentase siswaSLB Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri				
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1.174.441.200	1.161.530.800	98,90	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Terbangun	370.621.400	358.062.400	96,61	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	219.924.600	214.196.200	97,40	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	230.793.100	219.481.829	95,10	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.454.642.000	1.449.687.600	99,66	
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	324.253.650	324.124.000	99,96	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	309.796.200	298.937.850	96,50	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	579.798.200	561.153.500	96,78	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	128.497.800	89.209.404	69,42	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	306.454.500	241.812.816	78,91	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	356.493.680	302.108.850	84,74	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	7.778.264.000	7.595.187.871,77	97,65	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	9. Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	19.974.000	9.663.102	48,38	
	10. Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum				



	11. Jumlah SMK yang Terevitalisasi				
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Menengah	9.987.000	0	0	
	Jumlah Kurikulum SMK yang link and match dengan DUDI				
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	9.987.000	0	0	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus	9.987.000	9.663.102	96,76	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	9.987.000	9.663.102	96,76	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	12. Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	795.960.700	766.615.950	96,31	
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri	795.960.700	766.615.950	96,31	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	279.043.500	271.770.750	97,39	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	516.917.200	494.845.200	95,73	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	13. Persen ta se SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	29.926.000	7.831.336	26,17	
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	19.939.000	0	0	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul	19.939.000	0	0	



Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	9.987.000	7.831.336	78,42	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9.987.000	7.831.336	78,42	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	14. Perse ntase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	473.203.894.948,00	465.693.246.093,00	98,41	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	1.174.182.616,00	1.086.022.521,00	92,49	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	905.064.300,00	843.003.926,00	93,14	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	115.809.500,00	102.699.795,00	88,68	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pendidikan	114.858.816,00	109.661.500,00	95,48	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	38.450.000,00	30.657.300,00	79,73	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gajidan Tunjangan Pegawai serta Administrasi melaksanakan Tugas	370.375.814.084,00	365.277.596.486,00	98,62	
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	367.996.008.414,00	363.208.701.493,00	98,70	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.526.447.000,00	1.314.328.000,00	86,10	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	836.278.670,00	738.226.993,00	88,28	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang disusun	17.080.000,00	16.340.000,00	95,67	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan	277.300.000,00	262.615.700,00	94,70	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	277.300.000,00	262.615.700,00	94,70	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai Dinas Pendidikan	1.148.680.575,00	883.686.532,00	76,93	
	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan				
	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai Dinas Pendidikan (BTIKP)				
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan se-Provinsi Kepri	894.196.900,00	660.758.414,00	73,89	
	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan se-Provinsi Kepri (BTIKP)				
Realisasi Kinerja SKPD					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	54.091.000,00	53.975.000,00	99,79	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	344.822.900,00	327.049.922,00	94,85	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis	458.665.100,00	446.642.500,00	97,38	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan Dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	4.897.962.108,00	4.872.531.756,00	99,48	
	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan				



	Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	354.126.000,00	351.006.050,00	99,12	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	400.252.158,00	399.078.806,00	99,71	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	4.143.583.950,00	4.122.446.900,00	99,49	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	844.156.400,00	842.394.500,00	99,79	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	386.631.900,00	384.905.000,00	99,55	
Realisasi Kinerja SKPD					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	54.091.000,00	53.975.000,00	99,79	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	344.822.900,00	327.049.922,00	94,85	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis	458.665.100,00	446.642.500,00	97,38	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan Dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara	4.897.962.108,00	4.872.531.756,00	99,48	
	Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	354.126.000,00	351.006.050,00	99,12	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	400.252.158,00	399.078.806,00	99,71	



Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	4.143.583.950,00	4.122.446.900,00	99,49	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	844.156.400,00	842.394.500,00	99,79	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	386.631.900,00	384.905.000,00	99,55	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya	126.989.500,00	126.989.500,00	100,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	330.535.000,00	330.500.000,00	99,99	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan	91.607.666.115,00	89.794.230.304,00	98,02	
	Jumlah layanan surat menyurat, komunikasi, sumber daya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan (BTIKP)				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.570.000,00	4.497.000,00	98,40	
	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat (BTIKP)				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.513.145.390,00	1.415.500.252,00	93,55	
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BTIKP)				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	448.435.000,00	137.635.000,00	30,69	
	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BTIKP)				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.641.515.725,00	88.236.598.052,00	98,43	
	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan				

2. Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT), dan RSUD Engku Haji Daud (EHD) dengan perincian diuraikan dibawah ini :

a. Dinas Kesehatan

Alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 80.940.668.237,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 80.456.829.338,00 atau sebesar (99,40%) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2.1
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada
Urusan Wajib Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kesehatan		434.310.791.570,00	410.810.258.730,68	94,59	
Dinas Kesehatan		80.940.668.237,00	80.456.829.338,00	99,40	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		43.604.502.357,00	43.162.025.665,00	98,99	
	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup				
	2. Angka KematianBayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup				
	3. Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita				
	4. Persentase warga negara yang terdampakkrisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan				
	5. Persentase warganegara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan				
	6. Jumlah Kabupaten/kota sehat(KKS)				



	7. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)				
	8. Capaian ODHA yang mendapatkan ARV				
	9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)				
	10. Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap				
	11. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas				
	12. Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS				
	13. Persentase Puskesmas terakreditasi				
	14. Persentase Rumah Sakit terakreditasi				
	15. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.810.108.586,00	9.739.461.305,00	99,28	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.000.200.000,00	4.000.198.900,00	100,00	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan	2.250.000.000,00	2.210.430.000,00	98,24	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.559.908.586,00	3.528.832.405,00	99,13	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	33.528.312.654,00	33.167.192.520,00	98,92	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Persentase warga negarayang terdampak krisis kesehatan akibat	128.629.000,00	123.249.194,00	95,82	



Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	bencana dan/atau berpotensi bencana				
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	2.777.710.316,00	2.643.341.962,00	95,16	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan (PF)	961.848.100,00	922.744.092,00	95,93	
	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3)				
	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	408.690.400,00	404.716.400,00	99,03	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting (gizikurang dan gizi buruk) pada balita	672.383.530,00	623.036.366,00	92,66	
	Prevalensi stunting				
	Persentase Bumil KEK				
	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif				
	Persentase Kabkota Melaksanakan surveilans gizi				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja				
	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan Olahraga				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa/kelurahan Stop	254.577.700,00	253.230.100,00	99,47	
	Buang air besar Sembarangan (SBS)				
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)				
	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar				
	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar				



	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar				
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan	1.273.408.103,00	1.238.191.512,00	97,23	
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	67.110.000,00	66.678.690,00	99,36	
	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional integrasi				
	Persentase kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi				
	Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB pada Bumil dan Pengobatan Hep C sesuai dengan therapy	642.639.220,00	622.917.225,00	96,93	
	Persentase wanita usia 30 - 50 tahun. Yang dilakukan skrining kanker payudara dan kanker serviks				
	Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Posbindu				
	Puskesmas yang melakukan Pelayanan Terpadu PTM				
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)				
	Persentase puskesmas yang mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok				
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis/ Success Rate (SR)				
	Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana Pneumonia sesuai Standar				



	Insidensi HIV Per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)				
	Persentase ODHA baruditemukan yang				
	memulai pengobatan ARV				
	Persentase Kab/Kota yang mencapai API Malaria < 1 /per 1,000 penduduk				
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap				
	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk				
Pengelolaan PelayananKesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatanjemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	30.628.000,00	30.628.000,00	100,00	
Pengelolaan PelayananKesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ Beratyang mendapatkan layanan	17.946.000,00	17.504.000,00	97,54	
Pengelolaan PelayananKesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase Penyalahgunaan NAPZayang mendapatkan rehabilitasi medis	17.878.000,00	17.860.000,00	99,90	
Pengelolaan PelayananKesehatan Khusus	Jumlah Laporan Pengelolaan PelayananKesehatan Khusus	1.456.300.000,00	1.454.191.000,00	99,86	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pendudukdengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	24.471.396.485,00	24.449.240.679,00	99,91	
Koordinasi dan Sinkronisasi PenerapanSPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pemenuhan pelaksanaanintervensi PIS PK di Puskesmas	347.167.800,00	299.663.300,00	86,32	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	201.394.417,00	190.829.340,00	94,75	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Data Kesehatan	201.394.417,00	190.829.340,00	94,75	
Penerbitan Izin RumahSakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas Bdan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	64.686.700,00	64.542.500,00	99,78	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi	18.000.000,00	17.955.800,00	99,75	



Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi RSUD	46.686.700,00	46.586.700,00	99,79	
	Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota				
	Jumlah pendampingan akreditasi klinik				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN		13.166.451.551,00	13.159.976.396,00	99,95	
	16. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar				
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.604.415.151,00	12.600.170.596,00	99,97	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan	12.604.415.151,00	12.600.170.596,00	99,97	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	562.036.400,00	559.805.800,00	99,60	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Provinsi dengan sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang diterbitkan tahun berjalan	421.037.200,00	419.056.500,00	99,53	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk jabatan fungsional kesehatan	140.999.200,00	140.749.300,00	99,82	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN		27.866.000,00	27.866.000,00	100,00	
	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar				
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha	27.866.000,00	27.866.000,00	100,00	
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut .Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat	Persentase sarana distribusi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara distribusi yang baik (CDAKB)	27.866.000,00	27.866.000,00	100,00	



kesehatan(PAK)					
PROGRAM PEMBERDAYAAN		1.032.277.200,00	1.025.545.180,00	99,35	
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
	17. Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)				
		819.928.600,00	814.516.500,00	99,34	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan	819.928.600,00	814.516.500,00	99,34	
Pelaksanaan Komunikasi Informasidan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi	212.348.600,00	211.028.680,00	99,38	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	212.348.600,00	211.028.680,00	99,38	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		23.109.571.129,00	23.081.416.097,00	99,88	
	18. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	288.013.645,00	281.581.100,00	97,77	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	187.485.045,00	184.339.600,00	98,32	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.528.600,00	97.241.500,00	96,73	



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.790.603.875,00	17.780.010.994,00	99,94	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan	17.004.567.875,00	16.993.974.994,00	99,94	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Administrasi Pelaksana Tugas Kegiatan Setiap Tahunnya	786.036.000,00	786.036.000,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.117.785.109,00	1.116.547.570,00	99,89	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	10.000.000,00	9.890.600,00	98,91	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	147.458.249,00	147.458.249,00	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor	65.744.000,00	64.852.911,00	98,64	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	174.675.160,00	174.675.160,00	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.778.000,00	12.704.000,00	99,42	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksannnya Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.439.500,00	32.370.700,00	99,79	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653.561.500,00	653.467.250,00	99,99	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis	21.128.700,00	21.128.700,00	100,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	323.868.000,00	323.803.000,00	99,98	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.468.000,00	248.403.000,00	99,97	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya	75.400.000,00	75.400.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.155.830.500,00	3.146.033.033,00	99,69	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.300.000,00	156.808.533,00	97,82	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	71.500.000,00	70.720.000,00	98,91	



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	2.924.030.500,00	2.918.504.500,00	99,81	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.470.000,00	433.440.400,00	99,99	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan	421.350.000,00	421.348.600,00	100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12.120.000,00	12.091.800,00	99,77	

b. RSUD Raja Ahmad Tabib

Alokasi anggaran pada RSUD Raja Ahmad Tabib pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 267.625.721.929,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 244.346.764.014,68 atau sebesar (91,30%), disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2.2.2
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
RSUD Raja Ahmad Tabib		267.625.721.929,00	244.346.764.014,68	91,30	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	237.911.547.995,00	220.798.669.151,00	92,81	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	67.381.086.493,00	63.368.615.403,00	94,05	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Penyediaan Gaji (12 Bulan, Gaji 13 dan 14 PNS) dan Tunjangan ASN pada RSUD Raja Ahmad Tabib	66.622.222.493,00	62.623.971.403,00	94,00	-



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Penatausahaan Keuangan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	743.864.000,00	730.944.000,00	98,26	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan Internal/Eksternal RSUD Raja	15.000.000,00	13.700.000,00	91,33	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pada RSUD Raja Ahmad Tabib	25.868.900,00	25.170.000,00	97,30	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Jabatan, Fungsi dan Tugas	25.868.900,00	25.170.000,00	97,30	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	1.714.645.165,00	1.592.571.080,00	92,88	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD Raja Ahmad Tabib	75.000.000,00	74.995.200,00	99,99	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop, Komputer, UPS, Printer, Infocus, Perlengkapan Zoom, Mesin Cetak/Fotocopy pada RSUD Raja Ahmad Tabib	404.071.816,00	385.847.499,00	95,49	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pendukung Operasional Rumah Singgah dan Mesjid di RSUD Raja Ahmad Tabib	100.000.000,00	94.515.283,00	94,52	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Habis Pakai Kantor, Belanja Form, Resep, stiker dll, Alat Pos Prangko/Materai/Ampl op/dll pada RSUD Raja Ahmad Tabib	543.855.000,00	535.504.748,00	98,46	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Cetakan dan Penggandaan Pendukung Pelayanan RSUD	150.000.000,00	147.421.000,00	98,28	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu, Penginapan Tamu, Transportasi Tamu dan	31.920.000,00	30.225.700,00	94,69	-



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjadin Dalam dan Luar Daerah, Makan dan Minum	409.798.349,00	324.061.650,00	79,08	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	16.815.031.300,00	16.405.373.431,00	97,56	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa dan Perlengkapan Surat Menyurat dan Jasa Pengiriman	50.000.000,00	38.891.000,00	77,78	Pemanfaatan belanja pengiriman tidak maksimal karena pembayaran harus tunai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pemenuhan Jasa Komunikasi (Telp, Internet dan TV Berbayar), Sumber Daya Air dan Listrik pada RSUD RAT	6.440.761.500,00	6.237.568.052,00	96,85	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Sewa Mesin Fotocopy dan Mesin Lainnya; Tersedianya Sewa Rumah Dinas dan sewa gudang	118.427.530,00	117.000.000,00	98,79	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	10.205.842.270,00	10.011.914.379,00	98,10	
					-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	358.553.800,00	237.818.255,00	66,33	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (2 Direktur, 3 Wadir, 4 Pejabat Eselon Lainnya dan 1 Ketua Komite Medik	58.553.800,00	24.978.585,00	42,66	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan (2 Pick Up, 5 Ambulance, 2 Mobil Jenazah, 7 Motor Operasional)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan (2 Pick Up, 5 Ambulance, 2 Mobil Jenazah, 7 Motor Operasional)	300.000.000,00	212.839.670,00	70,95	



Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	151.616.362.337,00	139.169.120.982,00	91,79	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	151.616.362.337,00	139.169.120.982,00	91,79	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		13.691.419.281,00	12.671.692.943,68	92,55	
	2. Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib				
	3. Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib				
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8.491.463.974,00	7.728.455.488,00	91,01	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Jasa Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS dan Area Sekitar RS pada 1 Tahun RSUD Raja Ahmad Tabib	1.004.002.520,00	955.338.670,00	95,15	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Ketersediaan Alkes dan Alat Penunjang	3.983.757.045,00	3.949.440.000,00	99,14	
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Medik Rumah Sakit Tipe B di RSUD Raja Ahmad Tabib				
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Ketersediaan Kalibrasi Alkes pada RSUD Raja Ahmad Tabib	918.502.908,00	671.619.974,00	73,12	
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Tersedianya Bahan Habis Pakai Non Medis pendukung Kegiatan Laundry , pengadaan Linen pada RSUD RAT	400.000.000,00	399.000.100,00	99,75	
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Ketersediaan Pemeliharaan Alkes dan Alat Penunjang Rumah Sakit Tipe B di RSUD Raja Ahmad	474.759.005,00	417.192.019,00	87,87	



	Tabib				
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ketersediaan Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pasien di RSUD Raja Ahmad Tabib	1.710.442.496,00	1.335.864.725,00	78,10	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	5.156.521.507,00	4.914.480.075,68	95,31	
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	1.113.621.689,00	880.676.573,00	79,08	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Ketersediaan Pengadaan Bahan, Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan RSUD Raja Ahmad Tabib	4.042.899.818,00	4.033.803.502,68	99,78	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	8.433.800,00	8.257.380,00	97,91	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Manajemen Rumah Sakit yang Terintegrasi dengan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan	8.433.800,00	8.257.380,00	97,91	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas	Terlaksananya Penertiban Izin	35.000.000,00	20.500.000,00	58,57	
B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Modernisasi RSUD Raja Ahmad Tabib Menjadi RS Rujukan Tertentu (RS Kardiovaskuler)	35.000.000,00	20.500.000,00	58,57	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA		16.022.754.653,00	10.876.401.920,00	67,88	



KESEHATAN					
	5. Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib				
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	15.594.347.153,00	10.457.976.260,00	67,06	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya luran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja; Tersedianya Insentif Kondisi atau Kejadian atau Kasus Luar Biasa bagi Karyawan RSUD Raja Ahmad Tabib	15.594.347.153,00	10.457.976.260,00	67,06	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	428.407.500,00	418.425.660,00	97,67	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Karyawan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan (Dokter, Perawat, Bidan, Radiografer, Laboratorium Operator dan Tenaga Kesehatan Pendukung Lainnya) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	266.167.500,00	257.960.000,00	96,92	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perawat dan Bidan yang Memiliki Sertifikasi pada Area Khusus (IBS, IGD, ICU, PICU, NICU) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	162.240.000,00	160.465.660,00	98,91	

c. RSUD Engku Haji Daud

Alokasi anggaran pada RSUD Engku Haji Daud pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 85.744.401.404,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 86.006.665.378,00 atau sebesar (100,31%), disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2.2
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan
Wajib Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
RSUD Engku Haji Daud		85.744.401.404,00	86.006.665.378,00	100,31	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		5.686.488.605,00	5.176.242.207,00	91,03	
	1. Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud				
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4.800.158.605,00	4.363.572.607,00	90,90	
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1.409.838.523,00	1.289.278.040,00	91,45	
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	215.347.663,00	211.332.000,00	98,14	
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	34.617.600,00	33.830.000,00	97,72	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2.221.898.000,00	2.059.896.248,00	92,71	
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	918.456.819,00	769.236.319,00	83,75	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		800.700.300,00	777.687.000,00	97,13	



Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		800.700.300,00	777.687.000,00	97,13	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		85.629.700,00	34.982.600,00	40,85	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		85.629.700,00	34.982.600,00	40,85	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		15.791.564.000,00	14.818.648.522,00	93,84	
	3. Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud				
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		15.715.064.000,00	14.773.048.522,00	94,01	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15.715.064.000,00	14.773.048.522,00	94,01	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		76.500.000,00	45.600.000,00	59,61	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	76.500.000,00	45.600.000,00	59,61	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	64.266.348.799,00	66.011.774.649,00	102,72	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		104.186.900,00	103.155.100,00	99,01	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.452.900,00	79.121.100,00	99,58	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	24.734.000,00	24.034.000,00	97,17	



	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		37.482.900.601,00	37.046.201.343,00	98,83	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36.913.076.601,00	36.516.680.343,00	98,93	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	521.664.000,00	494.004.000,00	94,70	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	48.160.000,00	35.517.000,00	73,75	
Keluaran Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Administrasi Umum Perangkat Daerah		467.546.300,00	446.325.819,00	95,46	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	149.991.300,00	149.991.300,00	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	54.334.000,00	48.194.500,00	88,70	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	75.000.000,00	74.996.400,00	100,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	71.100.000,00	69.800.000,00	98,17	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.121.000,00	103.343.619,00	88,24	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		994.705.000,00	978.995.785,00	98,42	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	994.705.000,00	978.995.785,00	98,42	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1.826.187.900,00	1.622.755.169,00	88,86	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan	109.645.000,00	62.271.923,00	56,79	
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	199.743.400,00	70.491.300,00	35,29	



Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	200.000.000,00	199.454.346,00	99,73	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	7.921.600,00	7.000.000,00	88,37	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	968.864.000,00	968.861.600,00	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	340.013.900,00	314.676.000,00	92,55	
Peningkatan Pelayanan BLUD		23.390.822.098,00	25.814.341.433,00	110,36	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23.390.822.098,00	25.814.341.433,00	110,36	Penggunaan ambang batas BLUD

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alokasi anggaran untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 419.838.108.064,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 386.418.211.322,95 atau sebesar (92,04%), disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.2.1
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan
Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		419.838.108.064,00	386.418.211.322,95	92,04	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		21.614.698.123,00	20.799.234.908,24	96,23	
	1. Jumlah Titik Rawan Banjir				
	2. Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian				
	Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)				
	3. Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)				



Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Saluran Utama yang Terbangun	10.400.456.158,00	10.129.896.278,57	97,40	
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai terbangun	5.542.956.492,00	5.407.814.414,67	97,56	
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Normalisasi Sungai/Saluran Utama Lainnya	1.473.400.096,00	1.256.408.498,00	85,27	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	173.006.250,00	128.723.842,00	74,40	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi terbangun	681.469.200,00	681.469.200,00	100,00	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi terbangun	681.469.200,00	681.469.200,00	100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1.204.198.347,00	1.130.553.186,00	93,88	
	4. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	1.204.198.347,00	1.130.553.186,00	93,88	
Penyusunan Rencana,	Rencana, Kebijakan, Strategi	902.033.927,00	885.216.029,00	98,14	
Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	dan Teknis SPAM yang tersusun				
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang diperbaiki	204.695.620,00	182.668.557,00	89,24	
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Terselenggaranya Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	97.468.800,00	62.668.600,00	64,30	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		17.943.594,00	17.781.940,00	99,10	
	5. Cakupan Pelayanan Persampahan (%)				



Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	17.943.594,00	17.781.940,00	99,10	
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	17.943.594,00	17.781.940,00	99,10	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		144.806.125,00	92.095.756,00	63,60	
	6. Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	144.806.125,00	92.095.756,00	63,60	
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	144.806.125,00	92.095.756,00	63,60	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		357.848.100,00	322.315.820,23	90,07	
	7. Cakupan Pelayanan Drainase (%)				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	357.848.100,00	322.315.820,23	90,07	
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang drainase perkotaan terbangun	357.848.100,00	322.315.820,23	90,07	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		88.188.423.257,00	79.507.311.760,54	90,16	
	8. Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)				
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/	88.188.423.257,00	79.507.311.760,54	90,16	
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah				
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun untuk kepentingan strategis daerah	88.188.423.257,00	79.507.311.760,54	90,16	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		19.656.606.256,00	17.114.234.382,58	87,07	



	9. Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	19.656.606.256,00	17.114.234.382,58	87,07	
Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan lingkungan yang ditata	19.656.606.256,00	17.114.234.382,58	87,07	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		257.452.861.926,00	238.803.576.437,37	92,76	
	10. Persentase jalan kondisibaik (%)				
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan kondisi baik (%)	257.452.861.926,00	238.803.576.437,37	92,76	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	9.645.185.033,00	9.358.679.201,00	97,03	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	9.724.523.794,00	8.382.603.524,00	86,20	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Survey	1.772.388.537,00	1.759.998.986,00	99,30	
Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun	100.211.577.842,00	95.717.089.895,84	95,52	
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan yang dilebarkan menambah lajur	24.988.336.947,00	24.507.088.303,00	98,07	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	12.934.103.096,00	9.592.751.327,00	74,17	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	8.218.685.775,00	7.953.371.376,71	96,77	
Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan terbangun	13.726.671.827,00	13.035.140.269,82	94,96	
Pembangunan Flyover	Jumlah flyover terbangun	60.946.369.000,00	54.547.084.588,00	89,50	



Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	167.875.400,00	167.875.400,00	100,00	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	3.047.357.952,00	3.037.216.099,00	99,67	
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah penanggulangan bencana/ tanggap darurat	2.431.054.428,00	2.319.755.512,00	95,42	
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah kabupaten/kota	2.600.021.572,00	1.828.129.776,00	70,31	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah pengawasan teknis	7.038.710.723,00	6.596.792.179,00	93,72	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		1.676.518.770,00	1.331.681.949,00	79,43	
	11. Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang				
	Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli				
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	1.042.726.125,00	786.716.931,00	75,45	
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	622.303.575,00	430.370.583,00	69,16	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	256.000.000,00	225.303.645,00	88,01	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah pertemuan	164.422.550,00	131.042.703,00	79,70	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	377.198.115,00	329.928.629,00	87,47	
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	135.160.106,00	110.126.621,00	81,48	
1.03.11.1.02.02 Penyediaan Perangkat	Terselenggaranya Penyediaan Perangkat	111.072.259,00	103.932.027,00	93,57	
Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	130.965.750,00	115.869.981,00	88,47	
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan	256.594.530,00	215.036.389,00	83,80	



	Jasa Konstruksi yang tersusun				
Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Rancangan/Draf Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	85.969.670,00	70.585.983,00	82,11	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terselenggaranya Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	170.624.860,00	144.450.406,00	84,66	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		3.309.030.188,00	2.135.671.126,00	64,54	
	12. Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)				
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	162.417.800,00	73.301.296,00	45,13	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	162.417.800,00	73.301.296,00	45,13	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	2.521.291.650,00	1.505.360.096,00	59,71	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Tersusunnya Materi Teknis dan Ranperda Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau	2.183.410.698,00	1.348.001.414,00	61,74	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan	Terselenggaranya Evaluasi Ranperda tentang RTRW dan RTRR Kab Kota	337.880.952,00	157.358.682,00	46,57	
RTRR Kabupaten/Kota					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang	178.274.800,00	150.586.333,00	84,47	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	178.274.800,00	150.586.333,00	84,47	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	447.045.938,00	406.423.401,00	90,91	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan	447.045.938,00	406.423.401,00	90,91	



	Penataan Ruang				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI		26.215.173.378,00	25.163.754.057,00	95,99	
	13. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan	442.077.640,00	267.086.582,00	60,42	
Perangkat Daerah	evaluasi kinerja yang tersusun				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	90.749.600,00	73.201.636,00	80,66	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.787.500,00	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	37.025.300,00	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	246.377.300,00	133.759.546,00	54,29	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja tersusun	66.137.940,00	60.125.400,00	90,91	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.932.514.097,00	16.743.396.638,00	98,92	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.503.933.457,00	15.327.104.038,00	98,86	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.358.126.000,00	1.353.327.200,00	99,65	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.454.640,00	62.965.400,00	89,37	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.735.700.674,00	2.196.352.817,00	80,28	



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.052.000,00	14.953.480,00	87,69	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.972.932,00	843.125.840,00	97,47	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.272.500,00	77.165.380,00	96,13	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.500.700,00	187.480.796,00	95,90	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.273.500,00	88.008.000,00	96,42	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.907.542,00	27.540.000,00	36,77	
Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.570.000,00	132.618.000,00	95,70	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.540.000,00	31.352.500,00	83,52	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.235.611.500,00	794.108.821,00	64,27	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.064.620.970,00	2.034.041.548,00	98,52	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.000.000,00	344.539.000,00	93,12	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	967.957.000,00	966.162.500,00	99,81	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	69.064.900,00	68.970.000,00	99,86	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	607.599.070,00	605.370.048,00	99,63	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.635.189.997,00	3.527.692.882,00	97,04	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.280.200,00	7.499.000,00	61,07	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.346.407,00	444.362.169,00	90,99	



Penyediaan Jasa Peralatandan PerlengkapanKantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	113.612.000,00	91.403.700,00	80,45	
Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.020.951.390,00	2.984.428.013,00	98,79	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan	390.070.000,00	380.183.590,00	97,47	
PemerintahanDaerah	PemerintahanDaerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	156.815.000,00	150.756.590,00	96,14	
Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	219.022.000,00	216.416.000,00	98,81	
PemeliharaanAset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.230.000,00	8.030.000,00	87,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.003.000,00	4.981.000,00	99,56	

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran untuk Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 220.358.678.160 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 215.926.288.743 atau sebesar (97,99%),. Pada urusan wajib Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman		220.358.678.160,00	215.926.288.742,54	97,99	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		674.204.000,00	671.599.994,00	99,61	



	ersentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				
	ersentase warganegara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi				
	yediaan rumah yang layak huni				
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000,00	297.395.994,00	99,13	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	150.000.000,00	149.006.397,00	99,34	
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	150.000.000,00	148.389.597,00	98,93	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi Yang Terbangun dan Terehabilitasi	374.204.000,00	374.204.000,00	100,00	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang direhabilitasi	374.204.000,00	374.204.000,00	100,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		1.921.151.995,00	1.822.700.097,00	94,88	
	3. Persentase RTL yang dibenahi				
	4. Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani				
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		209.649.000,00	125.874.097,00	60,04	
	Persentase RTL yang dibenahi				
	Persentase luas kawasan kumuh 10 -15 ha yang ditangani				
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusunnya dokumen penyusunan / review / legalisasi kebijakan bidang PKP	9.649.000,00	5.795.667,00	60,06	Tidak Tersusunnya Dokumen Kebijakan Bidang PKP di Tahun 2022, dikarenakan Menunggu Revisi Perda RTRW Provinsi Kepri
1.04.03.1.01.09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan	200.000.000,00	120.078.430,00	60,04	



Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman				
Peningkatan Kualitas Kawasan		1.711.502.995,00	1.696.826.000,00	99,14	
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					
	Persentase RTL yang dibenahi				
	Persentase luas kawasan kumuh 10 -15 ha yang ditangani				
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	227.320.000,00	222.992.000,00	98,10	
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah kawasan pemugaran/peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.484.182.995,00	1.473.834.000,00	99,30	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		202.382.884.666,00	198.894.965.261,54	98,28	
	5. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)				
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	202.382.884.666,00	198.894.965.261,54	98,28	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah kebutuhan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang terbangun	202.382.884.666,00	198.894.965.261,54	98,28	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		15.380.437.499,00	14.537.023.390,00	94,52	
	6. Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				



Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	1.001.607.171,00	983.388.392,00	98,18	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Tersusun	447.275.800,00	439.747.980,00	98,32	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumenevaluasi kinerja perangkat daerah	554.331.371,00	543.640.412,00	98,07	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi	8.038.452.299,00	7.888.481.105,00	98,13	
Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	7.419.202.299,00	7.276.821.105,00	98,08	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	619.250.000,00	611.660.000,00	98,77	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	447.569.144,00	362.083.532,00	80,90	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kebutuhan pengamanan barangmilik daerah SKPD	163.250.000,00	122.400.000,00	74,98	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	184.558.000,00	169.546.434,00	91,87	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kebutuhan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.761.144,00	70.137.098,00	70,31	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhanadministrasi Kepegawaian	809.294.768,00	683.828.187,00	84,50	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan	217.452.000,00	196.392.825,00	90,32	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kebutuhan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	531.842.768,00	427.435.362,00	80,37	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	2.268.648.917,00	1.875.330.838,00	82,66	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	230.137.500,00	228.970.550,00	99,49	
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	95.612.000,00	99,60	
Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.251.900,00	44.233.270,00	69,93	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.217.600,00	149.638.610,00	90,57	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan	59.574.220,00	54.465.250,00	91,42	



	Penggandaan				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.160.000,00	35.520.000,00	80,43	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.185.000,00	-	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.088.672.025,00	840.774.765,00	77,23	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kebutuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	153.793.144,00	106.431.385,00	69,20	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	365.657.528,00	319.685.008,00	87,43	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.712.700,00	864.689.000,00	97,85	
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	86.780.000,00	86,78	
Pengadaan Mebel	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Mebel	145.895.000,00	145.246.000,00	99,56	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	637.817.700,00	632.663.000,00	99,19	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.324.775.000,00	1.306.812.531,00	98,64	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.600.000,00	205.530.531,00	95,77	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.100.175.000,00	1.095.282.000,00	99,56	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.377.500,00	572.409.805,00	94,40	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.560.000,00	75.692.950,00	90,59	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	53.830.000,00	46.792.700,00	86,93	

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.800.000,00	22.771.800,00	55,81	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.050.000,00	165.000.000,00	99,97	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	263.137.500,00	262.152.355,00	99,63	

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan uraian sebagai berikut

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Alokasi anggaran untuk Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp 21.611.534.265,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 21.417.990.423,00 atau sebesar (99,10%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program sebesar 100% (kategori sangat tinggi). Jumlah indikator program sebanyak 5 indikator dengan capaian semua indikator program kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan wajib Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2.5.1

**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja		21.611.534.265,00	21.417.990.423,00	99,10	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2.083.448.800,00	2.029.694.254,00	97,42	
	1. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkadadi Provinsi				
	2. Persentase Penegakan pelanggaran pelanggaran Perdata/atau Perkada				
	3. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1.493.875.950,00	1.460.020.972,00	97,73	
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan				
	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan satlinmas				
	Persentase SM aparaturnya Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah prov kepri	878.844.200,00	862.083.750,00	98,09	



Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan atau Kerusuhan Massa	264.517.300,00	263.681.300,00	99,68	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	89.413.572,00	88.748.070,00	99,26	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur yang mendapatkan peningkatan SDM	222.607.308,00	216.427.652,00	97,22	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	33.793.570,00	29.080.200,00	86,05	
Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari	4.700.000,00	-	-	
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	penegakan hukumperda dan perkada				
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan pelanggaran Perdadadan/atau Perkada	315.059.300,00	299.666.700,00	95,11	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah perda/perkadayang dilakukan pengawasan	264.517.300,00	264.297.300,00	99,92	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah danPeraturan Gubernur	50.542.000,00	35.369.400,00	69,98	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Provinsi kepri yang terbina	274.513.550,00	270.006.582,00	98,36	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan karier kapasitas	274.513.550,00	270.006.582,00	98,36	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA		246.907.500,00	242.295.331,00	98,13	



N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN					
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
	4. Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya				
Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya	99.342.500,00	99.042.700,00	99,70	
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	99.342.500,00	99.042.700,00	99,70	
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yg dilakukan pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	147.565.000,00	143.252.631,00	97,08	
	Penyelamatan Non Kebakaran				
Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	147.565.000,00	143.252.631,00	97,08	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		19.281.177.965	19.146.000.838	99,30	
	5. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.126.244,00	128.728.146,00	97,43	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	25.935.740,00	23.684.435,00	91,32	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta kaitar	106.190.504,00	105.043.711,00	98,92	



Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD yang disusun				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.582.566.851	12.519.109.609	99,50	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12.139.238.851	12.079.721.609	99,51	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya apembayaran Tunjangan Pengelolaan Keuangan	443.328.000	439.388.000	99,11	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.516.645,00	281.609.406,00	99,33	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.141.240,00	5.942.900,00	96,77	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.001.000,00	9.734.200,00	97,33	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.715.837,00	26.868.041,00	96,94	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Pemenuhan Barang Cetak	14.995.000,00	14.505.100,00	96,73	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.303.568,00	215.199.165,00	99,95	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	199.336.700,00	99,67	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000,00	199.336.700,00	99,67	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.738.909.125,00	5.674.966.327,00	367,32	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	194.142.000,00	193.589.000,00	99,72	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	135.000.000,00	92.351.452,00	68,41	



	Listrik				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.048.000,00	14.985.000,00	99,58	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.394.719.125,00	5.374.040.875,00	99,62	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	344.059.100,00	342.250.650,00	99,47	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara, dan terbayar pajak	42.237.400,00	42.204.400,00	99,92	
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara, dan terbayar pajak	74.126.200,00	74.036.600,00	99,88	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Mako dan Pos Terpadu Pol PP	26.761.000,00	26.400.000,00	98,65	
Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, perlengkapan kantor dan pos terpadu pos PP	200.934.500,00	199.609.650,00	99,34	

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran untuk Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 16.231.184.408,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 15.116.165.401,17 atau sebesar (193,13%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program sebesar 93,54% (kategori sangat tinggi). Jumlah indikator program sebanyak 4 indikator dengan capaian sebanyak 3 indikator program memiliki capaian sangat tinggi dan 1 indikator program dengan capaian rendah. Indikator yang memiliki status rendah yaitu Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Selengkapannya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan wajib Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.5.2
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		16.231.184.408,00	15.116.165.401,17	93,13	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		7.536.276.556,00	6.559.982.425,68	87,05	
	Nilai Prioritas Pencegahan Bencana				Pada Prioritas Penguatan Kesiapsiagaandan Penanganan Darurat Bencana. Rencana Kontijensi per jenis Bencana, Sistem Peringatan Diniserta Perbaikan Darurat Bencana belumdapat dilaksanakan
	Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana				
	Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana				
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase wilayah dengan potensi tinggi yang terlayani informasi bencana	401.943.748,00	397.965.470,00	99,01	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/ Kota (Per jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	401.943.748,00	397.965.470,00	99,01	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	1.130.961.070,00	858.885.205,68	75,94	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan	495.310.400,00	271.109.702,00	54,74	



	bencana yang dilegalisasi				
Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	57.526.100,00	51.991.288,00	90,38	
Penanganan Pasca bencana Provinsi	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana (jitu pasna) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (r3p)	232.725.800,00	212.824.904,68	91,45	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	345.398.770,00	322.959.311,00	93,50	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	5.953.956.338,00	5.258.337.502,00	88,32	
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	SK penetapan status darurat bencana dan skpdb yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5.636.528.688,00	4.947.448.261,00	87,77	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	317.427.650,00	310.889.241,00	97,94	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	49.415.400,00	44.794.248,00	90,65	
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	49.415.400,00	44.794.248,00	90,65	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		8.694.907.852,00	8.556.182.975,49	98,40	
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.954.181,00	303.826.651,00	97,39	



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	185.292.500,00	181.098.357,00	97,74	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.039.231,00	41.933.666,00	97,43	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.622.450,00	80.794.628,00	96,62	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.615.495.839,00	5.541.499.819,00	98,68	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.254.511.839,00	5.184.065.819,00	98,66	
Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	360.984.000,00	357.434.000,00	99,02	
Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	768.854.644,00	722.241.872,00	93,94	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	156.155.200,00	156.050.379,00	99,93	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79.422.544,00	77.417.875,00	97,48	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.969.500,00	6.692.000,00	83,97	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.689.900,00	31.596.900,00	99,71	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	493.617.500,00	450.484.718,00	91,26	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.179.473.201,00	1.170.981.943,00	99,28	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	127.001.120,00	119.524.568,00	94,11	



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.130.000,00	44.756.250,00	99,17	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.007.342.081,00	1.006.701.125,00	99,94	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.129.987,00	673.632.690,49	99,78	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Telaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.460.900,00	137.346.325,00	99,92	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3.388.000,00	3.388.000,00	100,00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	534.281.087,00	532.898.365,49	99,74	

6. Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Alokasi anggaran untuk Urusan Sosial pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.365.908.990,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 25.162.428.091 atau sebesar (99,20%). Pada urusan wajib Sosial tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Sosial Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
SOSIAL		25.365.908.990,00	25.162.428.091,00	99,20	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		2.987.842.506,00	2.973.692.964,00	99,53	
	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial				



	yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapatpembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi				
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		2.987.842.506,00	2.973.692.964,00	99,53	
	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang				
	mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi				
	Jumlah tenaga kesejahteraansosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi				
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		50.103.600,00	50.103.600,00	100,00	
	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas				
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		196.363.400,00	196.322.000,00	99,98	
	Jumlah tenaga kesejahteraansosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi				
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		2.741.375.506,00	2.727.267.364,00	99,49	
	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yangmendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		3.832.042.379,00	3.736.695.202,00	97,51	
	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi				



	sosial didalam panti				
	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia				
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial didalam panti				
	Persentase gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		1.625.966.031,00	1.601.381.824,00	98,49	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		1.625.966.031,00	1.601.381.824,00	98,49	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi				
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		866.807.858,00	843.422.451,00	97,30	
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				



	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasisosial anak terlantar yang tersedia				
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		290.641.556,00	278.261.270,00	95,74	
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasisosial anak yang tersedia				
	Jumlah ABH dan AMPK yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		576.166.302,00	565.161.181,00	98,09	
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial anakterlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi				
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1.133.181.088,00	1.091.778.926,00	96,35	
	Jumlah lanjut usia terlantaryang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		1.133.181.088,00	1.091.778.926,00	96,35	
	Jumlah lanjut usia terlantaryang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasisosial di				



	dalam panti				
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan sosial lanjut usia terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		22.575.200,00	22.543.200,00	99,86	
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti				
Pemulangan ke DaerahAsal		22.575.200,00	22.543.200,00	99,86	
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti				
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang		183.512.202,00	177.568.801,00	96,76	
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					
	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		99.270.000,00	93.514.900,00	94,20	
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasisosial di dalam panti				
Pemulangan ke Daerah Asal		84.242.202,00	84.053.901,00	99,78	
	Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti				
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		5.643.752.928,00	5.596.350.933,00	99,16	
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif				



	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan				
	kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		5.643.752.928,00	5.596.350.933,00	99,16	
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan				
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		2.852.554.883,00	2.815.991.474,00	98,72	
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan				



	bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
	Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra				
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		277.655.103,00	272.322.014,00	98,08	
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan				
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		2.513.542.942,00	2.508.037.445,00	99,78	
Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan				
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		2.852.554.883,00	2.815.991.474,00	98,72	
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial				



Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	lainnya				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
	Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra				
		277.655.103,00	272.322.014,00	98,08	
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan				
		2.513.542.942,00	2.508.037.445,00	99,78	
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP				
Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP				
		482.283.123,00	481.096.400,00	99,75	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah				
	Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah				



	Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16.229.900,00	16.229.900,00	100,00	
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		47.185.950,00	46.627.200,00	98,82	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		207.350.649,00	206.766.700,00	99,72	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		211.516.624,00	211.472.600,00	99,98	
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.779.923.567,00	8.759.445.264,00	99,77	
	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.239.815.567,00	8.219.337.264,00	99,75	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		540.108.000,00	540.108.000,00	100,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		58.001.700,00	57.806.900,00	99,66	
	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		58.001.700,00	57.806.900,00	99,66	



	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				
		17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
Administrasi Umum Perangkat Daerah		895.493.536,00	895.238.535,00	99,97	
	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20.895.750,00	20.891.000,00	99,98	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		31.574.500,00	31.574.500,00	100,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		86.872.100,00	86.872.100,00	100,00	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		78.057.100,00	78.026.200,00	99,96	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				
Fasilitasi Kunjungan Tamu		16.802.850,00	16.593.850,00	98,76	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		650.491.236,00	650.480.885,00	100,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		174.126.763,00	174.026.763,00	99,94	
	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		58.090.000,00	58.090.000,00	100,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		116.036.763,00	115.936.763,00	99,91	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		857.127.134,00	851.761.240,00	99,37	
	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		19.267.000,00	19.200.000,00	99,65	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		62.655.886,00	57.727.789,00	92,13	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		775.204.248,00	774.833.451,00	99,95	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		332.629.164,00	326.631.650,00	98,20	

	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		163.284.950,00	157.295.050,00	96,33	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		57.285.614,00	57.278.000,00	99,99	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		112.058.600,00	112.058.600,00	100,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehab				

7. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Alokasi anggaran untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30.789.687.932 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 30.109.215.763 atau sebesar (97,79%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 90,24% (kategori tinggi). Jumlah indikator program pada urusan Tenaga Kerja sebanyak 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 Indikator program kategori sangat tinggi, sebanyak 2 indikator program kategori tinggi, sebanyak 1 indikator program kategori sedang, 1 indikator program kategori rendah dan sebanyak 1 indikator program kategori sangat rendah. Indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Indikator yang memiliki kinerja kategori rendah yaitu Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja. Indikator program yang memiliki kategori sedang yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Tenaga Kerja tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2.2.2
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib
Tenaga Kerja Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Urusan Tenaga Kerja		30.789.687.932,00	30.109.215.763,00	97,79	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		5.182.342.800,00	5.045.297.449,00	97,36	
	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				
	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru				
	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja				
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5.152.342.800,00	5.016.947.249,00	97,37	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang dilaksanakan	657.195.900,00	643.251.055,00	97,88	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK PP)	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang dilaksanakan	4.495.146.900,00	4.373.696.194,00	97,30	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang diukur tingkat	30.000.000,00	28.350.200,00	94,50	



	kompetensi dan produktivitasnya				
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah perusahaan yang mendapat pengukuran dan pembinaan produktivitas	30.000.000,00	28.350.200,00	94,50	
Program Penempatan Tenaga Kerja		65.161.000,00	51.285.368,00	78,71	
	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase PMI Memperoleh Pelayanan dan Perlindungan (Pra dan Purna Penempatan)	35.161.000,00	29.996.968,00	85,31	
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah calon pekerja migran yang terlayani	35.161.000,00	29.996.968,00	85,31	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja melalui informasi pasar kerja	30.000.000,00	21.288.400,00	70,96	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah data informasi pasar kerja di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau	30.000.000,00	21.288.400,00	70,96	
Program Hubungan Industrial		400.825.600,00	365.809.100,00	91,26	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				a.
	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam				
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	180.557.300,00	160.553.100,00	88,92	



Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah laporan hasil mediasi	11.540.000,00	6.237.600,00	54,05	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama tripartit daerah provinsi	169.017.300,00	154.315.500,00	91,30	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan	220.268.300,00	205.256.000,00	93,18	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen rekomendasi hasil penetapan upah minimum provinsi	87.597.200,00	80.400.500,00	91,78	
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen rekomendasi hasil penetapan upah minimum kabupaten/kota	132.671.100,00	124.855.500,00	94,11	
Program Pengawasan Ketenagakerjaan		716.160.500,00	670.463.918,00	93,62	
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)				
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan				
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani				
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan	716.160.500,00	670.463.918,00	93,62	



Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan yang diawasi	216.674.000,00	195.914.329,00	90,42	
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (UPT PK Batam)	Jumlah Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan yang diawasi	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Fasilitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan yang dilaksanakan	146.883.900,00	139.016.700,00	94,64	
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	60.097.600,00	56.355.639,00	93,77	
Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	166.505.000,00	153.177.250,00	92,00	
Program Perencanaan Tenaga kerja		57.456.000,00	51.311.377,00	89,31	
	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas				
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kab/kota yang menyusun perencanaan ketenagakerjaan	57.456.000,00	51.311.377,00	89,31	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah yang tersusun	57.456.000,00	51.311.377,00	89,31	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		24.367.742.032,00	23.925.048.551,00	98,18	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	21.742.254.532,00	21.506.857.945,00	98,92	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi)	Jumlah pembayarangaji dan tunjangan ASN	21.156.094.532,00	20.939.897.945,00	98,98	



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	586.160.000,00	566.960.000,00	96,72	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	83.200.000,00	83.000.000,00	99,76	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	83.200.000,00	83.000.000,00	99,76	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	173.710.000,00	164.892.882,00	94,92	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.250.000,00	155.432.882,00	94,63	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	9.460.000,00	9.460.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.668.897.112,00	1.552.669.633,00	93,04	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa suratmenyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	373.533.596,00	322.986.934,00	86,47	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD BLK PP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	44.320.000,00	37.167.700,00	83,86	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.475.800,00	16.340.696,00	93,50	



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.732.116,00	40.611.678,00	78,50	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000,00	29.985.000,00	99,95	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PK Batam)	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.400.000,00	14.257.000,00	99,01	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.546.000,00	889.434.625,00	97,79	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD BLK PP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.835.000,00	94.484.250,00	93,70	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.219.600,00	25.173.750,00	99,82	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.835.000,00	81.228.000,00	80,56	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	25.580.000,00	23.455.200,00	91,69	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	15.580.000,00	14.700.200,00	94,35	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10.000.000,00	8.755.000,00	87,55	
Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	111.324.000,00	110.395.980,00	99,17	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				
Pengadaan Mebel (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah mebel yang diadakan	75.000.000,00	74.840.000,00	99,79	
Pengadaan Mebel (UPT PK Batam)	Jumlah mebel yang diadakan	3.500.000,00	2.955.980,00	84,46	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	



Transmigrasi)					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD BLK PP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PK Karimun)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2.574.000,00	2.350.000,00	91,30	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	562.776.388,00	483.776.911,00	85,96	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.983.000,00	13.613.780,00	97,36	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD BLK PP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.931.200,00	1.931.200,00	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.352.600,00	1.352.600,00	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.916.000,00	1.702.000,00	58,37	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	24.978.000,00	23.964.389,00	95,94	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD BLK PP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	1.105.200,00	1.063.200,00	96,20	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	1.760.900,00	1.760.900,00	100,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	3.651.000,00	2.930.300,00	80,26	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	63.482.750,00	59.512.600,00	93,75	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	7.150.000,00	6.126.770,00	85,69	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan	14.427.738,00	12.869.326,00	89,20	



Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	penggandaan				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	856.000,00	513.600,00	60,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	5.371.000,00	3.051.000,00	56,81	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.632.000,00	400.000,00	24,51	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	353.163.000,00	296.508.446,00	83,96	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD BLK PP)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8.213.000,00	5.892.700,00	71,52	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PK Karimun)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24.803.000,00	19.300.600,00	77,82	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PK Batam)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13.280.000,00	12.563.000,00	94,60	

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 22.091.909.994 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 21.704.535.894 atau sebesar (98,25%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 118,81%. Jumlah indikator program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 8 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 Indikator program kategori sangat tinggi, dan sebanyak 2 indikator program kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2.2.2
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan
Wajib Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		22.091.909.994,00	21.704.535.894,00	98,25	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	3.397.104.498,00	3.326.787.432,00	97,93	
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan				
	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen				
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG)	61.115.057,00	59.276.620,00	96,99	
Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	Dokumen Perencanaan OPD yang Responsif Gender	61.115.057,00	59.276.620,00	96,99	



Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi					
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.234.350.415,00	2.180.332.310,00	97,58	
	Jumlah Organisasi Perempuan yang terbina				
	Jumlah Perempuan Politik yang ditingkatkan kapasitasnya				
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Politik yang ditingkatkan kapasitasnya	516.947.793,00	512.963.173,00	99,23	
	Jumlah Organisasi Perempuan yang terbina				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya di bidang ekonomi	1.717.402.622,00	1.667.369.137,00	97,09	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mengikuti sekolah perempuan	1.101.639.026,00	1.087.178.502,00	98,69	
	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya				
	Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mengikuti sekolah perempuan	203.879.010,00	199.872.716,00	98,03	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Industri Rumah Tangga yang ditingkatkan kapasitasnya	897.760.016,00	887.305.786,00	98,84	
Program Perlindungan Perempuan					
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan	801.025.500,00	758.974.586,00	94,75	



	Orang (TPPO)				
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	350.279.300,00	341.438.774,00	97,48	
Koordinasi dan Sinkronisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat	350.279.300,00	341.438.774,00	97,48	
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	terkait perlindungan perempuan termasuk TPPO				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya	127.553.700,00	122.803.128,00	96,28	
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya Bantuan Spesifik kepada Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	98.132.500,00	96.550.653,00	98,39	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan penguatan jejaring gugus tugas PPTPO dan SPPT PKKTP	29.421.200,00	26.252.475,00	89,23	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terlayani	323.192.500,00	294.732.684,00	91,19	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi	Persentase Pengaduan Kekerasan yang	193.192.500,00	186.140.000,00	96,35	
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	ditindaklanjuti UPTD P2TP2A Prov. Kepri				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya operasional layanan korban kekerasan	130.000.000,00	108.592.684,00	83,53	



Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	2.623.371.027,00	2.579.093.315,00	98,31	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ditingkatkan kapasitasnya	2.281.514.202,00	2.243.121.015,00	98,32	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	409.350.900,00	400.484.795,00	97,83	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas Lifeskill	1.872.163.302,00	1.842.636.220,00	98,42	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk	Jumlah Perempuan yang terlatih untuk peningkatan	341.856.825,00	335.972.300,00	98,28	
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	ketahanan dan kualitas keluarga				
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan keterampilan / life skill	341.856.825,00	335.972.300,00	98,28	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	26.904.655,00	11.808.676,00	43,89	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi	26.904.655,00	11.808.676,00	43,89	
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Data Terpilah Gender dan Anak di Provinsi Kepri	26.904.655,00	11.808.676,00	43,89	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1.153.618.092,00	1.139.351.687,00	98,76	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Forum Anak yg dibina	652.147.392,00	649.138.900,00	99,54	



	Jumlah Puspaga yangdibina dan dikembangkan				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Puspaga yang dibina dan dikembangkan	652.147.392,00	649.138.900,00	99,54	
pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah forum anakyang dibina dan dikembangkan	501.470.700,00	490.212.787,00	97,76	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terciptanya ligkungan yang aman dan responsifterhadap anak	264.580.200,00	254.671.472,00	96,25	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kapasitasorangtua terhadap pemenuhan hak anak melalui media publikasi	139.725.000,00	139.286.600,00	99,69	
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yangterbentuk	97.165.500,00	96.254.715,00	99,06	
Program Perlindungan Khusus Anak					
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	939.493.000,00	874.917.772,00	93,13	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang	Persentase PenyediaanLayanan bagi anak	132.044.000,00	106.753.052,00	80,85	
Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase pendampingan anak yangmemerlukan perlindungankhusus	132.044.000,00	106.753.052,00	80,85	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi anak yang ditingkatkan kapasitasnya	76.806.000,00	73.597.825,00	95,82	



Kabupaten/Kota					
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitasSDM lembaga penanganan anak	76.806.000,00	73.597.825,00	95,82	
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan yang terbentuk PATBM	730.643.000,00	694.566.895,00	95,06	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	Terlaksananya PelatihanPATBM	549.826.000,00	514.355.250,00	93,55	
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rapat sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak	180.817.000,00	180.211.645,00	99,67	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	13.150.393.222,00	13.013.602.426,00	98,96	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	58.440.000,00	58.440.000,00	100,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan PengamananBarang Milik Daerah SKPD	58.440.000,00	58.440.000,00	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Pegawai	60.900.000,00	60.550.000,00	99,43	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	60.900.000,00	60.550.000,00	99,43	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	9.269.114.342,00	9.199.091.131,00	99,24	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gajidan tunjangan ASN	8.787.296.342,00	8.736.249.131,00	99,42	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	466.818.000,00	451.028.000,00	96,62	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan	15.000.000,00	11.814.000,00	78,76	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	929.907.644,00	905.705.826,00	97,40	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.924.000,00	13.120.000,00	94,23	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.662.800,00	74.190.000,00	98,05	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	56.405.144,00	53.430.658,00	94,73	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	91.784.800,00	88.951.612,00	96,91	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	248.210.500,00	236.428.900,00	95,25	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.980.000,00	26.880.000,00	89,66	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	413.940.400,00	412.704.656,00	99,70	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	560.657.700,00	542.495.704,00	96,76	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa	71.260.000,00	69.172.000,00	97,07	
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	184.023.600,00	179.817.300,00	97,71	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Kebutuhan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	23.670.000,00	22.830.000,00	96,45	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	281.704.100,00	270.676.404,00	96,09	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber	2.248.094.337,00	2.224.209.065,00	98,94	

	daya air dan listrik				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.310.905,00	181.726.338,00	91,64	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTT dan THL)	144.100.000,00	137.808.000,00	95,63	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	1.905.683.432,00	1.904.674.727,00	99,95	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.279.199,00	23.110.700,00	99,28	

9. Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 21.498.941.309,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp20.928.008.445,00 atau sebesar (97,34%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 125,22%. Jumlah indikator program pada urusan Pangan sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian semua Indikator program kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Pangan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.9
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Pangan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pangan		21.498.941.309,00	20.928.008.445,00	97,34	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.104.175.750,00	934.840.588,00	84,66	



	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan				
	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen				
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	846.000.550,00	705.927.879,00	83,44	
Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	114.808.550	107.628.388	93,75	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang dikembangkan	731.192.000,00	598.299.491,00	81,83	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan	130.000.000,00	122.275.557,00	94,06	
	Persentase ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) terhadap daerah rentan pangan				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan yang di kembangkan	100.000.000,00	92.951.600,00	92,95	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Lumbung yang dipelihara	30.000.000,00	29.323.957,00	97,75	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Kelompok yang menerapkan pola B2SA	128.175.200,00	106.637.152,00	83,2	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	128.175.200,00	106.637.152,00	83,2	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		42.879.000	31.407.900	73,25	
	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan				



Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Total Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan	42.879.000	31.407.900	73,25	
	Persentase daerah yang dilakukan pemantauan situasi ketahanan pangan dan gizi (SKPG)				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi	42.879.000	31.407.900	73,25	
	Jumlah Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan				
Program Pengawasan Keamanan Pangan		199.800.000,00	193.724.900,00	96,96	
	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman				
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	199.800.000,00	193.724.900,00	96,96	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah dokumen pendukung kelembagaan keamanan pangan	199.800.000,00	193.724.900,00	96,96	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		20.152.086.559,00	19.768.035.057,00	98,09	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	117.082.324,00	94.115.968,00	80,38	
Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.023.400,00	21.824.000,00	72,69	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	87.058.924,00	72.291.968,00	83,04	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	16.233.252.307,00	16.055.068.595,00	98,90	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan PNS	15.669.924.307,00	15.507.573.675,00	98,96	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	563.328.000,00	547.494.920,00	97,19	



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	787.222.260,00	678.280.538,00	86,16	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.207.100,00	13.675.701,00	96,26	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.457.900,00	204.820.524,00	98,26	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	11.994.000,00	11.290.920,00	94,14	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	15.994.500,00	15.385.190,00	96,19	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	12.254.150,00	94,26	
Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00	
Peraturan Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan				
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Fasilitas Tamu	10.900.000,00	10.864.000,00	99,67	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	359.317.260,00	262.358.454,00	73,02	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang	2.555.347.272,00	2.521.487.986,00	98,67	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	309.713.840,00	287.378.518,00	92,79	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi Kantor	2.194.133.432,00	2.182.609.468,00	99,47	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	459.182.396,00	419.081.970,00	91,27	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Operasional	325.701.636,00	296.296.008,00	90,97	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	113.639.100,00	103.510.492,00	91,09	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	19.841.660,00	19.275.470,00	97,15	

10. Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alokasi anggaran untuk Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 189.052.848,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 91.384.131,00 atau sebesar (48,34%), pada urusan wajib Pertanahan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.10
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib
Pertanahan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pertanahan		189.052.848,00	91.384.131,00	48,34%	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	189.052.848,00	91.384.131,00	48,34%	
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi	189.052.848,00	91.384.131,00	48,34%	
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah OPD/Kab/Kota yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi	189.052.848,00	91.384.131,00	48,34%	

11. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 28.445.718.115,00 dengan penyerapan anggaran

pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 27.887.635.771,00 atau sebesar (98,04%),
pada urusan Lingkungan Hidup tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.10
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Lingkungan Hidup		28.445.718.115,00	27.887.635.771,00	98,04	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	441.652.000,00	395.423.224,00	89,53	
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Laporan Dokumen Lingkungan Hidup	441.652.000,00	395.423.224,00	89,53	
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko LH	441.652.000,00	395.423.224,00	89,53	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		444.314.800,00	370.455.645,00	83,38	
	Indeks Kualitas Air Laut				
	Indeks Kualitas Air				
	Indeks Kualitas Udara Ambien				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	394.914.800,00	321.055.645,00	81,30	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut	100.000.000,00	90.950.100,00	90,95	



Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	Terlaksananya: (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim	200.000.000,00	190.140.968,00	95,07	
Adaptasi Perubahan Iklim					
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	94.914.800,00	39.964.577,00	42,11	
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00	
Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkelolanya Limbah Sludge Oil di Kawasan Pesisir	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	150.000.000,00	132.325.948,00	88,22	
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau	150.000.000,00	132.325.948,00	88,22	
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Terlaksananya Pengawasan Tingkat Ketaatan Peraturan LH	150.000.000,00	132.325.948,00	88,22	
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		75.000.000,00	70.946.600,00	94,60	
	Persentase Pengurangan Sampah				
	Persentase Penanganan Sampah				
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST	Jumlah Penanganan Sampah di TPA/TPST	75.000.000,00	70.946.600,00	94,60	



Regional					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penyediaan Prasarana dan Sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau	75.000.000,00	70.946.600,00	94,60	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	27.334.751.315,00	26.918.484.354,00	98,48	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD.	78.368.150,00	75.925.282,00	96,88	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya rencana kerja OPD	40.437.000,00	38.023.282,00	94,03	
	Tersedianya Lakip OPD				
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	37.931.150,00	37.902.000,00	99,92	
	Tersedianya website Lingkungan Hidup				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN	24.434.333.858,00	24.072.578.622,00	98,52	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN	24.008.563.858,00	23.656.642.622,00	98,53	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	425.770.000,00	415.936.000,00	97,69	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasi an Kantor	477.220.259,00	468.361.102,00	98,14	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	20.724.000,00	20.423.600,00	98,55	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Alat- alat Pelindung Diri	157.491.300,00	152.511.290,00	96,84	



Kantor	Covid 19				
	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor				
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TPI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor	57.900.000,00	55.560.000,00	95,96	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Pemenuhan Bahan Bacaan Kantor	20.520.000,00	20.520.000,00	100,00	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	24.392.000,00	23.917.400,00	98,05	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.792.959,00	191.543.812,00	99,87	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Penata Usahaan Arsip	4.400.000,00	3.885.000,00	88,30	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kantor	1.835.717.048,00	1.826.620.060,00	99,50	
Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rutinitas Kantor	3.000.000,00	2.942.500,00	98,08	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Air Bersih	15.180.000,00	9.557.500,00	62,96	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.817.537.048,00	1.814.120.060,00	99,81	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	209.112.000,00	205.981.200,00	98,50	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	185.310.000,00	184.283.200,00	99,45	

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23.802.000,00	21.698.000,00	91,16	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan	300.000.000,00	269.018.088,00	89,67	
Perangkat Daerah	pelatihan Pegawai				
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi(UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Terlaksananya Pelatihan/ In House Training SDM Laboratorium Lingkungan	300.000.000,00	269.018.088,00	89,67	

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alokasi anggaran untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.382.791.649,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 1.247.197.636,00 atau sebesar (90,19%), pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.01.12
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.382.791.649,00	1.247.197.636,00	90,19	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan datapelayanan pendaftaran penduduk	374.988.500,00	319.729.609,00	85,26	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapat pengawasan, pembinaan dan	374.988.500,00	319.729.609,00	85,26	

	bimbingan terkait administrasi kependudukan				
Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait	374.988.500,00	319.729.609,00	85,26	
terkait Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk				
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	265.000.000,00	246.297.445,00	92,94	
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait administrasi Pencatatan Sipil	265.000.000,00	246.297.445,00	92,94	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	265.000.000,00	246.297.445,00	92,94	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	742.803.149,00	681.170.582,00	91,70	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Kab/Kota dengan Database Kependudukan yang valid dan akurat	742.803.149,00	681.170.582,00	91,70	
Fasilitasi terkait pengelolaan informasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan	742.803.149,00	681.170.582,00	91,70	

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 32.229.370.116,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 31.690.621.855,00 atau sebesar (98,33%), pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.01.13
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		32.229.370.116,00	31.690.621.855,00	98,33	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTA HANDESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desayang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	45.027.000,00	44.805.396,00	99,51	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	45.027.000,00	44.805.396,00	99,51	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	45.027.000,00	44.805.396,00	99,51	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan	21.006.149.125,00	20.625.606.711,00	98,19	
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	peningkatan kapasitas				
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/ Kota yang mendapat pembinaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa	21.006.149.125,00	20.625.606.711,00	98,19	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	17.471.595.200,00	17.122.549.658,00	98,00	



Lembaga kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	224.719.300,00	222.723.200,00	99,11	
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	750.194.900,00	749.748.290,00	99,94	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	736.318.725,00	729.735.349,00	99,11	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.823.321.000,00	1.800.850.214,00	98,77	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	11.178.193.991,00	11.020.209.748,00	98,59	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	299.737.000,00	299.271.939,00	99,84	



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.383.000,00	16.345.000,00	99,77	
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.376.400,00	37.154.480,00	99,41	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.977.600,00	245.772.459,00	99,92	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terpenuhi Hak Keuangannya	8.394.419.116,00	8.272.824.495,00	98,55	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.963.103.116,00	7.864.218.495,00	98,76	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	431.316.000,00	408.606.000,00	94,73	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya peningkatan profesionalis meaparatur	4.500.000,00	3.050.000,00	67,78	terkena refocusing anggaran
Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00	3.050.000,00	67,78	terkena refocusing anggaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	881.389.275,00	859.983.219,00	97,57	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5.004.000,00	5.001.000,00	99,94	
/Penerangan Bangunan Kantor	Liastrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	112.730.600,00	112.538.761,00	99,83	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.852.000,00	46.879.900,00	92,19	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	80.000.000,00	79.960.000,00	99,95	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.450.000,00	12.439.000,00	99,91	



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620.352.675,00	603.164.558,00	97,23	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang Diadakan	179.709.700,00	179.543.400,00	99,91	
Pengadaan dan Peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	179.709.700,00	179.543.400,00	99,91	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan	1.230.800.900,00	1.222.943.305,00	99,36	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	8.584.960,00	95,39	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	28.330.000,00	28.330.000,00	100,00	
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	30.420.900,00	30.420.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.163.050.000,00	1.155.608.345,00	99,36	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	187.638.000,00	182.593.390,00	97,31	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162.098.000,00	157.124.540,00	96,93	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25.540.000,00	25.468.850,00	99,72	

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk Urusan Pember Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 387.453.675,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp359.989.801,00 atau sebesar (92,91%), pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.01.14

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		387.453.675,00	359.989.801,00	92,91	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Contraceptive Prevalence Rate	10.000.000,00	8.252.780,00	82,53	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersusunnya dokumen terkait penyerasian kebijakan pembangunan daerah dengan program KKBPK	10.000.000,00	8.252.780,00	82,53	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand	Jumlah dokumen grand design	10.000.000,00	8.252.780,00	82,53	
Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	pembangunan kependudukan (GDPK) yang tersusun dan termanfaatkan				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA					
	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	377.453.675,00	351.737.021,00	93,19	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah mitra dan organisasi dan kemasyarakatan yang	309.233.775,00	286.251.021,00	92,57	

Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok yang mendapatkan pemberdayaan Ekonomi keluarga	122.145.775,00	104.838.831,00	85,83	
Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga di kampung KB	187.088.000,00	181.412.190,00	96,97	
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Terlatih	68.219.900,00	65.486.000,00	95,99	
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Pelaksanaan fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	68.219.900,00	65.486.000,00	95,99	

15. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 88.823.574.588,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 83.524.434.815,51 atau sebesar (94,03%), pada urusan Perhubungan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.15
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perhubungan		88.823.574.588,00	83.524.434.815,51	94,03	



PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1.627.000.406,00	1.610.878.002,93	99,01	
	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)				
Penyediaan Perengkapan Jalandi Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.351.696.406,00	1.337.412.254,93	98,94	
Penyediaan Perengkapan Jalandi Jalan Provinsi	Tersedianya perengkapan jalan di jalan provinsi	1.194.868.000,00	1.184.610.552,78	99,14	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Fasilitas prasarana jalan dalam kondisi baik	156.828.406,00	152.801.702,15	97,43	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	137.504.000,00	136.755.875,00	99,46	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	69.068.000,00	68.439.067,00	99,09	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	68.436.000,00	68.316.808,00	99,83	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	68.966.000,00	67.879.300,00	98,42	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	68.966.000,00	67.879.300,00	98,42	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68.834.000,00	68.830.573,00	100,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	68.834.000,00	68.830.573,00	100,00	
Program Pengelolaan Pelayaran		69.542.448.062,0 0	64.693.358.607,10	93,03	
	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga				



	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan				
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Izin Usaha Angkutan Laut Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	92.462.500,00	92.106.760,00	99,62	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	92.462.500,00	92.106.760,00	99,62	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	7.720.351.000,00	7.567.426.713,00	98,02	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	7.720.351.000,00	7.567.426.713,00	98,02	
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	246.591.500,00	246.362.581,00	99,91	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	246.591.500,00	246.362.581,00	99,91	



Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	92.441.500,00	92.373.998,00	99,93	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	92.441.500,00	92.373.998,00	99,93	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Komersial/Niaga Terbangun/Meningkat Kapasitasnya	60.573.655.938,00	55.878.142.931,10	92,25	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.694.292.300,00	1.689.661.531,00	99,73	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Regional terbangun	51.685.510.111,00	47.671.780.142,17	92,23	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (DINAS)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	7.193.853.527,00	6.516.701.257,93	90,59	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPT 1-BATAM)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPT 2-KARIMUN)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPT 3-TPI BINTAN)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPT 4-	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				



NATUNA ANAMBAS)					
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional(UPT 5- LINGGA)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				
Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri(TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan PengumpanRegional	Tersedianya dokumen Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	816.945.624,00	816.945.624,00	100,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbayarnya Hutang Belanja	816.945.624,00	816.945.624,00	100,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		17.654.126.120,0 0	17.220.198.205,48	97,54	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	407.797.755,00	398.329.620,00	97,68	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	46.652.664,00	43.580.077,00	93,41	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	121.364.500,00	118.209.171,00	97,40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan dokumen koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	84.494.000,00	82.464.189,00	97,60	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	155.286.591,00	154.076.183,00	99,22	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.449.236.869,0 0	11.318.124.745,00	98,85	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	10.522.889.478,0 0	10.398.229.833,00	98,82	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	832.292.147,00	831.796.000,00	99,94	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.842.500,00	44.194.400,00	94,35	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester anyang tersusun	47.212.744,00	43.904.512,00	92,99	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.000.000,00	90.396.000,00	98,26	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	92.000.000,00	90.396.000,00	98,26	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	109.759.136,00	103.672.866,00	94,45	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	63.302.880,00	59.292.166,00	93,66	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	46.456.256,00	44.380.700,00	95,53	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	434.689.000,00	420.750.530,00	96,79	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibuat	132.800.000,00	132.409.680,00	99,71	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kerja Pegawai yang Tersusun	135.889.000,00	135.720.850,00	99,88	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24.000.000,00	13.120.000,00	54,67	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	142.000.000,00	139.500.000,00	98,24	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.669.365.215,00	1.483.898.121,00	88,89	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.000,00	14.209.105,00	71,06	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	354.642.500,00	335.472.237,00	94,59	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	162.013.700,00	111.188.700,00	68,63	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	38.880.000,00	38.840.000,00	99,90	



Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	135.300.000,00	93.319.500,00	68,97	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	958.534.015,00	890.868.579,00	92,94	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.484.350,00	166.121.000,00	99,78	
Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang diadakan	91.484.350,00	91.121.000,00	99,60	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.599.089.625,00	2.549.437.564,00	98,09	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.000.000,00	25.118.307,00	73,88	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	151.128.500,00	121.718.657,00	80,54	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan	192.000.000,00	191.488.000,00	99,73	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	2.221.961.125,00	2.211.112.600,00	99,51	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	725.704.170,00	689.467.759,48	95,01	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	494.688.970,00	464.296.652,00	93,86	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	108.730.000,00	108.155.600,00	99,47	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordandan Bangunan Lainnya terpelihara/terehab	72.285.200,00	67.201.740,00	92,97	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terehab	50.000.000,00	49.813.767,48	99,63	

16. Komnuikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 48.318.047.462,00 dengan penyerapan

anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 48.006.023.659,00 atau sebesar (99,35%), pada urusan Komunikasi Dan Informatika tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.16
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib
Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Komunikasi dan Informatika		48.318.047.462,00	48.006.023.659,00	99,35	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		28.940.694.975,00	28.834.142.995,00	99,63	
	Nilai keterbukaan informasi publik				
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	28.940.694.975,00	28.834.142.995,00	99,63	
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan				
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan monitoring dan aspirasi publik	267.771.570,00	253.497.512,00	94,67	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	Jumlah dokumen konten media komunikasi publik	2.078.673.352,00	2.067.638.475,00	99,47	



Publik	yang diproduksi				
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang telah terkelola dengan baik	2.007.222.799,00	1.991.148.112,00	99,2	
Layanan hubungan media	Jumlah layanan hubungan media	17.571.965.329,00	17.549.991.471,00	99,87	
Pelayanan Informas Publik	Jumlah perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	210.143.200,00	199.506.704,00	94,94	
Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah mitra strategis Pemda termasuk media lokal yang melaksanakan	5.123.744.785,00	5.113.569.968,00	99,8	
	diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah				
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah laporan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	50.000.000,00	49.348.500,00	98,7	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan tata kelola komisi informasi Daerah	895.173.940,00	873.442.253,00	97,57	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dukungan administratif, keuangan dan tata kelola KPID Provinsi Kepri	736.000.000,00	736.000.000,00	100	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		7.008.802.658,00	6.876.411.406,00	98,11	
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung				
	dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi yang diselenggarakan	4.563.825.354,00	4.552.081.844,00	99,74	



daerah provinsi	secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara				
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar				
Penatalaksanaan dan Pengawasan	Jumlah laporan Penatalaksanaan dan pengawasan kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi yang diselenggarakan	57.817.060,00	55.813.668,00	96,53	
Penyelenggaraan memanfaatkan Pemerintah Daerah domain instansi		4.506.008.294,00	4.496.268.176,00	99,78	
	penyelenggara Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah				
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kegiatan Pengelolaan e - government di lingkup pemerintahan Provinsi	Persentase	2.444.977.304,00	2.324.329.562,00	95,07	



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan ekosistem SPBE	128.052.200,00	117.743.770,00	91,95	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12.368.549.829,00	12.295.469.258,00	99,41	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.942.925.531,00	8.888.547.360,00	99,39	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.416.589.531,00	8.382.971.360,00	99,60	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas	526.336.000,00	505.576.000,00	96,06	
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsi	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.429.716,00	676.648.230,00	99,74	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.721.800,00	9.626.052,00	99,02	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	27.244.000,00	27.136.843,00	99,61	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	78.775.100,00	78.694.963,00	99,90	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.660.600,00	38.546.862,00	97,19	
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan kunjungan tamu	49.150.000,00	48.980.000,00	99,65	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	473.878.216,00	473.663.510,00	99,95	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.015.768,00	114.586.250,00	97,92	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	99.909.768,00	98.224.850,00	98,31	



Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Dinas Jabatan yang				
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	17.106.000,00	16.361.400,00	95,65	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Telsaksanakan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.000.000,00	177.649.647,00	98,69	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	180.000.000,00	177.649.647,00	98,69	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.266.647.400,00	2.257.160.950,00	99,58	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	2.266.647.400,00	2.257.160.950,00	99,58	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat Daerah	166.531.414,00	163.876.821,00	98,41	
	Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah				
	Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	78.591.014,00	77.893.100,00	99,11	
Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	87.940.400,00	85.983.721,00	97,77	

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Alokasi anggaran untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 21.468.333.653,00

dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 19.948.617.207,00 atau sebesar (92,92%), pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.17

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan menengah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		21.468.333.653,00	19.948.617.207,00	92,92	
PROGRAM PELAYANAN IZINUSAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	104.000.000,00	98.143.287,00	94,37	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Yang mendapatkan fasilitas penerbitan izin usaha	104.000.000,00	98.143.287,00	94,37	
Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan KantorKas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah KSP/USP yang mendapatkan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.000.000,00	98.143.287,00	94,37	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	jumlah koperasi yang diberikan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	



Restrukturisasi Usaha	Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah koperasi yang diberikan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah Koperasi yang mendapatkan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	#VALUE!	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	1.174.442.375,00	1.050.993.790,00	89,49	
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha Baru	1.174.442.375,00	1.050.993.790,00	89,49	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	1.174.442.375,00	1.050.993.790,00	89,49	
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan,	Jumlah Wirausaha Baru	1.174.442.375,00	1.050.993.790,00	89,49	



Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan ParaPemangku Kepentingan					
MenumbuhkembangkanUMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah wirausaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha	1.174.442.375,00	1.050.993.790,00	89,49	
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang dikembangkan	5.167.484.041,00	4.222.508.831,00	81,71	Target terlalu tinggi, Anggaran kurang memadai.
2.17.08.1.01 Pengembangan UsahaKecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dikembangkan	5.167.484.041,00	4.222.508.831,00	81,71	Target terlalu tinggi, Anggaran kurang memadai.
2.17.08.1.01.01 Produksi dan	jumlah UMKM yang mendapatkan	5.167.484.041,00	4.222.508.831,00	81,71	Anggaran yang kurang memadai
Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	dukungan dan fasilitasi peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain danTeknologi				
Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	dukungan dan fasilitasi peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain danTeknologi				
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	2.819.964.000,00	2.621.740.156,00	92,97	
	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan				
2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan	1.090.200.000,00	987.974.895,00	90,62	
2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	jumlah koperasi yang mendapatkanfasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	1.090.200.000,00	987.974.895,00	90,62	



Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
2.17.05.1.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	1.729.764.000,00	1.633.765.261,00	94,45	
2.17.05.1.02.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.729.764.000,00	1.633.765.261,00	94,45	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	101.424.500,00	98.411.500,00	97,03	
2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	101.424.500,00	98.411.500,00	97,03	
2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	101.424.500,00	98.411.500,00	97,03	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	50.000.000,00	39.716.300,00	79,43	
2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah koperasi yang mendapatkan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	50.000.000,00	39.716.300,00	79,43	
2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	50.000.000,00	39.716.300,00	79,43	



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	11.641.892.335,00	11.422.187.778,00	98,11	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	49.850.284,00	49.615.984,00	99,53	
Penyusunan Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	49.850.284,00	49.615.984,00	99,53	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	83.705.000,00	79.973.000,00	95,54	
Pengadaan PakaianDinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	58.705.000,00	55.200.000,00	94,03	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas danFungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	25.000.000,00	24.773.000,00	99,09	
Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah	7.790.339.155,00	7.683.548.350,00	98,63	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	7.273.429.155,00	7.170.124.625,00	98,58	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas	436.910.000,00	434.290.000,00	99,40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan danSemester	80.000.000,00	79.133.725,00	98,92	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	1.465.877.338,00	1.379.344.304,00	94,10	
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan untuk kantor	10.000.000,00	9.986.226,00	99,86	
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor	647.690.816,00	618.624.710,00	95,51	
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor	15.210.000,00	15.202.560,00	99,95	
Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.364.095,00	115.735.795,00	96,96	
Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan / penggandaan	38.000.000,00	37.770.525,00	99,40	
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	561.612.427,00	508.647.088,00	90,57	



Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang dioperasikan	74.000.000,00	73.377.400,00	99,16	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang	221.139.800,00	217.589.460,00	98,39	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan	196.369.800,00	193.365.780,00	98,47	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	24.770.000,00	24.223.680,00	97,79	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang disewa	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	1.877.734.518,00	1.862.737.980,00	99,20	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	322.300.000,00	319.020.000,00	98,98	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	8.804.800,00	48,92	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.489.434.518,00	1.486.913.180,00	99,83	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	126.246.240,00	122.378.700,00	96,94	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	70.460.320,00	68.093.200,00	96,64	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Dinas	55.785.920,00	54.285.500,00	97,31	

18. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Alokasi anggaran untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 15.581.297.692,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 15.478.726.814,00 atau sebesar (99,34%), pada urusan Penanaman Modal tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.18
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib
Penanaman Modal Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Penanaman Modal		15.581.297.692,00	15.478.726.814,00	99,34	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	236.103.575,00	234.076.261,00	99,14	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi Pemberian insentif dan kemudahan berusaha	137.920.124,00	137.920.124,00	97,94	
Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	137.920.124,00	137.920.124,00	100,00	
	Jumlah Peserta Konsultasi Publik				
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	98.183.451,00	96.156.137,00	97,94	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah	98.183.451,00	96.156.137,00	97,94	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	336.645.130,00	328.240.254,00	97,50	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri	336.645.130,00	328.240.254,00	97,50	



Provinsi					
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Media Publikasi	62.849.630,00	58.977.122,00	93,84	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Business Meeting yang Diikuti / Diselenggarakan	273.795.500,00	269.263.132,00	98,34	
	Jumlah Video Promosi Digital				
Program Pelayanan Penanaman Modal		864.840.114,00	856.200.597,00	99,00	
	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP				
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas				
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perizinan dan Non perizinan yang dilayani dengan SOP	141.579.406,00	140.253.068,00	99,06	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	100.000.000,00	99.037.339,00	99,04	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Non Perizinan	41.579.406,00	41.215.729,00	99,13	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perizinan dan Non perizinan yang dilayani dengan SOP	723.260.708,00	715.947.529,00	98,99	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	314.756.047,00	313.468.100,00	99,59	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Perizinan	110.300.741,00	109.027.310,00	98,85	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Konsultasi	256.882.920,00	253.653.119,00	98,74	



Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	dan Informasi Layanan				
Perizinan dan non Perizinan					
	Jumlah Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP Provinsi Kepulauan Riau				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	41.321.000,00	39.799.000,00	96,32	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	796.567.200,00	748.070.892,00	93,91	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	796.567.200,00	748.070.892,00	93,91	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan Penanaman Modal	547.052.000,00	507.292.863,00	92,73	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	249.515.200,00	240.778.029,00	96,50	
	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM				
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	124.527.260,00	119.857.879,00	96,25	
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi	Data/Informasi Perizinan dan non	124.527.260,00	119.857.879,00	96,25	
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik				
Pengolahan, Penyajiandan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data / Informasi Terkait Penanaman Modal Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	124.527.260,00	119.857.879,00	96,25	
	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Data dan Informasi yang Dilaksanakan				



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	13.222.614.413,00	13.192.280.931,00	99,77	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah yang tersedia	72.051.840,00	71.403.556,00	99,10	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	13.222.614.413,00	13.192.280.931,00	99,77	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah yang tersedia	72.051.840,00	71.403.556,00	99,10	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.396.032,00	12.915.800,00	96,42	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.613.216,00	14.509.900,00	99,29	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.042.592,00	43.977.856,00	99,85	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan	686.482.400,00	10.093.953.368,00	99,77	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	9.609.137.438,00	9.587.085.368,00	99,77	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	508.368.000,00	506.868.000,00	99,70	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	29.220.000,00	29.220.000,00	100,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29.220.000,00	29.220.000,00	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase disiplin pegawai	59.837.200,00	59.747.000,00	99,85	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	53.277.200,00	53.187.000,00	99,83	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMPSTSP Provinsi Kepri	6.560.000,00	6.560.000,00	100,00	



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	553.289.454,00	552.870.427,00	99,92	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.167.691,00	6.165.400,00	99,96	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	50.901.600,00	50.638.300,00	99,48	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	17.926.000,00	17.925.000,00	99,99	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.696.672,00	38.590.000,00	99,72	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.335.076,00	37.290.000,00	99,88	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	402.262.415,00	402.261.727,00	100,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	895.530.652,00	893.339.264,00	99,76	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	458.100.000,00	458.100.000,00	100,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	437.430.652,00	435.239.264,00	99,50	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.980.800,00	103.700.400,00	99,73	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	8.756.000,00	8.756.000,00	100,00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	

19. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan Dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Alokasi anggaran untuk Urusan Kepemudaan Dan Olahraga pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 39.400.521.549,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 38.478.000.156,00 atau sebesar (112,53%), pada urusan Kepemudaan Dan Olahraga tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.19
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib
Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kepemudaan dan Olahraga		39.400.521.549,00	38.478.000.156,00	97,66	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		2.426.900.540,00	2.354.930.077,00	97,03	
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan				
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan	2.426.900.540,00	2.354.930.077,00	97,03	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	658.812.800,00	657.804.400,00	99,85	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kapasitas Daya Saing Kewirausahaan	170.450.000,00	166.664.370,00	97,78	
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi dan Pasukan Pengibar Bendera yang dikirim ke Tingkat Nasional	1.317.664.400,00	1.308.982.799,00	99,34	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan	Jumlah Tenaga Kepemudaan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang	271.124.740,00	212.629.908,00	78,43	



PelayananKepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Difasilitasi dalam Pembahasan Rumusan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan				
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang difasilitasi Dalam Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan	8.848.600,00	8.848.600,00	100,00	
Program Pengembangan Daya Saing Olahraga		22.828.156.682,00	22.544.364.791,00	98,76	
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda				
	Cakupan Pembinaan Olahraga				
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat				
	Peningkatan Prestasi Olahraga				
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet muda berprestasi dan jumlah prestasi olahraga pendidikan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.	4.734.841.466,00	4.588.330.388,00	96,91	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pembinaan Atlet Provinsi Kepulauan Riau	2.164.696.056,00	2.057.100.283,00	95,03	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia	2.570.145.410,00	2.531.230.105,00	98,49	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Event yang diselenggarakan	3.247.361.970,00	3.136.139.501,00	96,57	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Olahraga Tingkat Provinsi	3.247.361.970,00	3.136.139.501,00	96,57	
Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah penerima penghargaan keolahragaan	40.304.480,00	35.468.202,00	88,00	
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih yang diberikan Penghargaan	18.451.200,00	15.968.502,00	86,54	
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Ilmu Keolahragaan	21.853.280,00	19.499.700,00	89,23	



Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahragayang aktif	14.805.648.766,00	14.784.426.700,00	99,86	
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Peserta Senam Sehat dan bersepeda Bersama	14.805.648.766,00	14.784.426.700,00	99,86	
PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	927.170.000,00	924.095.900,00	99,67	
Pembinaan dan Pengemban gan Organisasi Kepramukaa n	Jumlah kwartir yang mengikutkegiatan kepramukaan				
Penyelenggar aan Kegiatan Kepramukaa n Provinsi	Jumlah Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	927.170.000,00	924.095.900,00	99,67	
PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	13.218.294.327,00	12.654.609.388,00	95,74	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.520.000,00	13.343.200,00	65,03	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.009.000,00	7.146.400,00	59,51	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun	8.511.000,00	6.196.800,00	72,81	
Administrasi KeuanganPrangkat Daerah		8.881.103.597,00	8.506.485.944,00	95,78	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi pelaksanaantugas ASN yang Tersusun	717.778.000,00	544.652.000,00	75,88	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	8.155.321.597,00	7.956.074.344,00	97,56	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	8.004.000,00	5.759.600,00	71,96	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		255.057.000,00	229.400.000,00	89,94	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pembayaran Gaji Pengamanan Barang Milik Daerah	255.057.000,00	229.400.000,00	89,94	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		897.373.522,00	849.747.677,00	94,69	



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah	249.604.042,00	209.379.100,00	83,88	
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.000.000,00	23.730.000,00	98,88	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	141.349.187,00	140.219.187,00	99,20	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan logistik kantor	74.396.200,00	70.059.240,00	94,17	
Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	28.209.893,00	28.153.000,00	99,80	
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	379.814.200,00	378.207.150,00	99,58	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		197.371.900,00	197.371.900,00	100,00	
Pengadaan Mabel	Terpeliharanya barang milikdaerah	197.371.900,00	197.371.900,00	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.111.278.000,00	2.012.382.306,00	95,32	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	81.075.000,00	69.892.850,00	86,21	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	151.000.000,00	145.862.500,00	96,60	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji PTT	1.662.741.000,00	1.634.501.125,00	98,30	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	216.462.000,00	162.125.831,00	74,90	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		855.590.308,00	845.878.361,00	98,86	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang dipelihara	517.346.000,00	510.892.050,00	98,75	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor	93.334.308,00	93.334.308,00	100,00	

	Jumlah pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	244.910.000,00	241.652.003,00	98,67	

20. Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Statistik pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 132.658.334,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 132.360.772,00 atau sebesar (99,78%), pada urusan Statistik tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.120
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Statistik Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Statistik		132.658.334,00	132.360.772,00	99,78	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		132.658.334,00	132.360.772,00	99,78	
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	132.658.334,00	132.360.772,00	99,78	Kesadaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kompilasi statistik
	Persentase survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS				
	Persentase kelengkapan metadata indikator				

	statistik sektoral				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang dikompilasi datanya	132.658.334,00	132.360.772,00	99,78	

21. Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Persandian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 187.922.353 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 181.402.024 atau sebesar (96,53 %), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 107,75%, pada urusan wajib Persandian tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.21
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Persandian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Persandian		187.922.353,00	181.402.024,00	96,53	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	187.922.353,00	181.402.024,00	96,53	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	126.342.753,00	121.053.187,00	95,81	
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah titik teramankan berdasarkan jumlah titik pada pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	126.342.753,00	121.053.187,00	95,81	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi	61.579.600,00	60.348.837,00	98,00	
Pemerintah Daerah Provinsi	dan/atau aplikasi persandian				

	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal				
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah				
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aplikasi atau website yang diaudit security assesment dan kontra penginderaan	61.579.600,00	60.348.837,00	98,00	

22. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 17.040.930.929,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 16.684.932.501,00 atau sebesar (97,91%), pada urusan wajib Kebudayaan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.22
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kebudayaan		17.040.930.929,00	16.684.932.501,00	97,91	
Program Pengembangan Kebudayaan		2.163.487.714,00	2.161.302.970,00	99,90	
	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi				
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni				
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni				
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1.692.006.996,00	1.690.767.016,00	99,93	



Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	jumlah opk yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	563.994.748,00	562.841.774,00	99,80	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah sdm yang di bina	1.128.012.248,00	1.127.925.242,00	99,99	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	471.480.718,00	470.535.954,00	99,80	
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	keterlibatan penduduk sebagai pelaku dan menonton pertunjukkan seni secara langsung	471.480.718,00	470.535.954,00	99,80	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	1.506.034.870,00	1.305.722.740,00	86,70	
	(terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)				
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksana dan meningkatnya jumlah penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	1.506.034.870,00	1.305.722.740,00	86,70	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia bidang kesenian	83.549.796,00	83.023.394,00	99,37	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.422.485.074,00	1.222.699.346,00	85,96	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	1.585.773.614,00	1.534.216.768,00	96,75	
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	1.585.773.614,00	1.534.216.768,00	96,75	



Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	114.248.968,00	113.742.055,00	99,56	
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Datad dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	524.222.080,00	502.565.473,00	95,87	
Fasilitasi Peningkatan	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah	947.302.566,00	917.909.240,00	96,90	
Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	531.508.428,00	528.904.311,00	99,88	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	410.413.300,00	409.924.114,00	99,88	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	310.195.200,00	310.106.600,00	99,97	
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	100.218.100,00	99.817.514,00	99,60	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari	121.095.128,00	118.980.197,00	98,25	
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	121.095.128,00	118.980.197,00	98,25	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	345.663.616,00	344.962.381,00	99,80	
Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang dikelola	345.663.616,00	344.962.381,00	99,80	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Meningkatnya pengelolaan Koleksi Museum Provinsi Kepulauan Riau	345.663.616,00	344.962.381,00	99,80	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	10.908.462.687,00	10.809.823.331,00	99,10	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan,	151.573.032,00	142.561.924,00	94,05	



Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.475.300,00	9.391.630,00	64,88	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	100.519.048,00	100.233.574,00	99,72	
Realisasi Kinerja OPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.578.684,00	32.936.720,00	90,04	
administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	7.979.877.075,00	7.918.151.290,00	99,23	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	7.458.855.575,00	7.400.149.790,00	99,21	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	521.021.500,00	518.001.500,00	99,42	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor	935.961.930,00	934.733.154,00	99,87	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.249.000,00	16.249.000,00	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	181.842.800,00	181.645.506,00	99,89	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	412.941.460,00	412.226.000,00	99,83	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.700.000,00	29.400.000,00	98,99	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Keluar dan Dalam Daerah	295.228.670,00	295.212.648,00	99,99	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	55.828.560,00	55.794.500,00	99,94	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket peralatan mesin yang Disediakan	55.828.560,00	55.794.500,00	99,94	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.580.013.898,00	1.556.474.521,00	98,51	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.660.144,00	97.226.487,00	92,02	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	446.631.508,00	437.666.438,00	97,99	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.403.150,00	30.297.500,00	99,65	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	997.319.096,00	991.284.096,00	99,39	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	205.208.192,00	202.107.942,00	98,49	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42.350.000,00	39.696.370,00	93,73	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29.910.000,00	29.498.000,00	98,62	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantord an Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	132.948.192,00	132.913.572,00	99,97	

23. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19.329.776.913 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 18.684.275.004 atau sebesar (96,66%), pada urusan wajib Perpustakaan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.23
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib
Perpustakaan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perpustakaan		19.329.776.913,00	18.684.275.004,00	96,66	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2.356.489.180,00	2.088.815.236,00	88,64	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2.085.379.946,00	1.845.263.936,00	88,49	
	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat				
	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk				
	4. Persentase Perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan				
	5. Keterlibatan masyarakat dalam KIE				
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	198.808.400,00	197.266.986,00	99,22	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	88.800.000,00	88.657.000,00	99,84	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	193.627.600,00	-	0,00	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	9.000.096,00	8.700.000,00	96,67	



	Tingkat Daerah Provinsi				
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1.482.143.850,00	1.453.189.700,00	98,05	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	113.000.000,00	97.450.250,00	86,24	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat gemar membaca	271.109.234,00	243.551.300,00	89,84	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan	171.109.234,00	156.120.700,00	91,24	
pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kegemaran Membacatan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	100.000.000,00	87.430.600,00	87,43	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DANNASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	676.665.814,00	591.855.893,00	87,47	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				
	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	514.065.814,00	488.295.393,00	94,99	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	327.620.994,00	313.024.150,00	95,54	
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	186.444.820,00	175.271.243,00	94,01	



Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terklola dengan baik	162.600.000,00	103.560.500,00	63,69	
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	162.600.000,00	103.560.500,00	63,69	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	16.296.621.919,00	16.003.603.875,00	98,20	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Provinsi Kepulauan Riau	28.582.248,00	28.125.090,00	98,40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.582.248,00	28.125.090,00	98,40	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai serata Administrasi melaksanakan Tugas	12.133.470.553,00	11.875.477.939,00	97,87	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.709.602.053,00	11.456.571.939,00	97,84	
Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	423.868.500,00	418.906.000,00	98,83	
Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.998.200,00	9.306.100,00	93,08	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	9.998.200,00	9.306.100,00	93,08	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	719.530.219,00	703.017.658,00	97,71	



	Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.993.200,00	7.496.000,00	75,01	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT)	2.788.000,00	2.620.000,00	93,97	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26.522.000,00	25.926.000,00	97,75	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT)	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT)	25.201.425,00	24.840.000,00	98,57	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	258.641.955,00	249.296.592,00	96,39	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT)	18.883.710,00	18.745.960,00	99,27	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21.291.000,00	20.900.000,00	98,16	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (UPT)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT)	7.102.600,00	7.097.000,00	99,92	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9.879.800,00	9.850.000,00	99,70	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan (UPT)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT)	3.756.000,00	3.437.000,00	91,15	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.060.600,00	239.391.151,00	99,31	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	94.410.000,00	93.417.955,00	98,95	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik,	3.155.969.175,00	3.143.576.360,00	99,61	



	Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT)	402.660,00	400.000,00	99,34	
Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	760.999.765,00	759.366.841,00	99,79	
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT)	51.684.160,00	48.829.769,00	94,48	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.340.285.250,00	2.332.479.750,00	99,67	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	249.071.453,00	244.100.728,00	98,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41.452.135,00	40.150.500,00	96,86	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	112.071.918,00	111.913.000,00	99,86	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT)	7.644.000,00	7.610.000,00	99,56	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86.283.000,00	82.837.228,00	96,01	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan	1.620.400,00	1.590.000,00	98,12	
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				



Bangunan Lainnya (UPT)	yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT)				
------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

24. Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 657.143.850,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 604.131.445,00 atau sebesar (91,93%), pada urusan wajib Kearsipan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.24
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Kearsipan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kearsipan		657.143.850,00	604.131.445,00	91,93	
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	555.842.050,00	508.399.907,00	91,46	
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	168.205.600,00	163.074.605,00	96,95	
	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	9.866.500,00	9.331.350,00	94,58	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	158.339.100,00	153.743.255,00	97,10	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	123.277.150,00	110.957.209,00	90,01	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	123.277.150,00	110.957.209,00	90,01	
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	264.359.300,00	234.368.093,00	88,66	
Nasional Tingkat Provinsi					

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	9.771.800,00	5.802.450,00	59,38	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	254.587.500,00	228.565.643,00	89,78	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	101.301.800,00	95.731.538,00	94,50	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabungkan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	101.301.800,00	95.731.538,00	94,50	
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	101.301.800,00	95.731.538,00	94,50	

25. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 68.621.133.733 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 66.879.259.486,36 atau sebesar (97,46%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 168,89%. Jumlah indikator program pada urusan kelautan dan perikanan sebanyak 8 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 Indikator program kategori sangat tinggi dan sebanyak 1 indikator program kategori sangat rendah yaitu Kawasan Konservasi yang Dikelola, Selengkapanya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.25
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kelautan dan Perikanan		68.621.133.733,00	66.879.259.486,36	97,46	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi yang Dikelola	193.182.800,00	179.373.598,00	92,85	



Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		147.097.100,00	138.609.120,00	94,23	
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Relokasi Sarang Penyu di Natuna	147.097.100,00	138.609.120,00	94,23	
	Relokasi Sarang Penyu di Natuna				
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		46.085.700,00	40.764.478,00	88,45	
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	46.085.700,00	40.764.478,00	88,45	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		20.669.630.942,00	20.121.596.778,19		
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				
	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		20.162.679.506,00	19.677.322.523,19	97,59	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap	123.567.792,00	115.528.200,00	93,49	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; Jumlah Sarana peningkatan usaha perikanan tangkap skala kecil (bot pancung, mesin tempel, mesin ketinting, sampian bahan fibre glass, sampian dayung kayu dan peralatan pendukung lainnya Jumlah unit kapal / perahu Penangkap ikan	20.039.111.714,00	19.561.794.323,19	97,62	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		221.129.346,00	193.838.225,00	87,66	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas	Jumlah Petugas Cek Fisik Kapal yang dilatih Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	221.129.346,00	193.838.225,00	87,66	



10 GT sampai dengan 30 GT					
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		99.162.500,00	82.951.226,00	83,65	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Pembangunan Check Point Pelabuhan Tambatan Perahu Baran Pembangunan Tambatan Kapal/Perahu di karimun Pengembangan Pelabuhan Antang Tarempa Pengembangan Pelabuhan Batu Duyung Pengembangan Pelabuhan Pering Natuna Pusat Logistik di Natuna	72.196.400,00	56.175.564,00	77,81	
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbina dan terlayani	26.966.100,00	26.775.662,00	99,29	
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air		186.659.590,00	167.484.804,00	89,73	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi		125.669.050,00	101.673.625,00	80,91	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pergub SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya	125.669.050,00	101.673.625,00	80,91	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		8.481.154.714,00	8.198.896.547,17	96,67	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang berisi data dan informasi tentang keragaan perikanan budidaya (luasan pemanfaatan lahan dan sarana prasarana perikanan budidaya, produksi, dll)	5.687.000,00			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia	2.717.150.454,00	2.640.367.100,20	97,17	
	Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha				



Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya	3.077.102.054,00	2.976.966.157,65	96,75	
	Bibit Ikan kerapu Cantang				
	Bibit Rumput Laut				
	Jumlah paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya				
	Pakan Ikan Air Laut (Pallet)				
	Pakan Udang dan Bandeng				
	Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI di Air Putih, Kec. Siantan Timur				
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah	22.709.000,00	17.613.300,00	77,56	
	unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan Jumlah kelompok yang terbina melalui peningkatan kualitas teknis dan manajemen usaha (kelompok)				
	Jumlah kelompok yang terbina melalui peningkatan kualitas teknis dan manajemen usaha				
Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok yang terbina melalui peningkatan kualitas teknis dan manajemen usaha kelompok Jumlah klaster perikanan budidaya yg terbentuk Jenis/ kawasan Jumlah klaster perikanan budidaya yg terbentuk Jenis/ kawasan	2.658.506.206,00	2.563.949.989,32	96,44	
	Jumlah klaster perikanan budidaya yg terbentuk Jenis/ kawasan				
	Jumlah klaster perikanan budidaya yg terbentuk Jenis/ kawasan				
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan	1.447.000.233,00	1.378.262.669,00	95,25	



Perikanan	perikanan yang diselesaikan				
Pengawasan Sumber DayKelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		1.447.000.233,00	1.378.262.669,00	95,25	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil	1.447.000.233,00	1.378.262.669,00	95,25	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	2.848.703.435,00	2.753.529.763,00	96,66	
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi		527.893.200,00	486.475.386,00	92,15	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Pergub, Juknis, Juklak dan SOP	220.770.000,00	220.770.000,00	100,00	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (Rekomendasi SIPPHP) yang diterbitkan "Rekomendasi GMP"	165.530.600,00	146.281.892,00	88,37	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan tersedia	141.592.600,00	119.423.494,00	84,34	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		368.321.450,00	350.175.727,00	95,07	
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	368.321.450,00	350.175.727,00	95,07	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah		1.952.488.785,00	1.916.878.650,00	98,18	



Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi					
Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan yang terlaksana	1.952.488.785,00	1.916.878.650,00	98,18	
	Terlaksananya Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan				
	Terlaksananya Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		34.855.792.559,00	34.145.926.506,00	97,96	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		358.175.166,00	301.556.245,00	84,19	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	162.689.600,00	141.729.500,00	87,12	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	134.532.766,00	112.469.085,00	83,60	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	60.952.800,00	47.357.660,00	77,70	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21.592.795.311,00	21.423.444.990,00	99,22	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	20.445.199.311,00	20.280.168.990,00	99,19	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pemenuhan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	1.147.596.000,00	1.143.276.000,00	99,62	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		169.000.000,00	168.847.750,00	99,91	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	169.000.000,00	168.847.750,00	99,91	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya Peraturan terkait	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.763.483.925,00	2.531.000.165,00	91,59	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	876.584.410,00	866.525.960,00	98,85	



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan kantor	72.712.700,00	65.149.900,00	89,60	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.716.715,00	187.476.665,00	90,26	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.237.100,00	31.881.924,00	93,12	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	314.760.000,00	306.838.000,00	97,48	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	22.996.000,00	20.180.000,00	87,75	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1.209.543.000,00	1.034.919.472,00	85,56	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penataan arsip OPD	24.934.000,00	18.028.244,00	72,30	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		185.500.000,00	172.181.000,00	92,82	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	185.500.000,00	172.181.000,00	92,82	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.903.055.607,00	8.720.369.198,00	97,95	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	21.367.150,00	21.366.000,00	99,99	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	969.282.095,00	810.579.684,00	83,63	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	253.618.500,00	253.618.500,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.658.787.862,00	7.634.805.014,00	99,69	
Pemeliharaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		813.782.550,00	758.527.158,00	93,21	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	623.800.550,00	576.845.929,00	92,47	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	81.592.000,00	79.434.729,00	97,36	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin	33.790.000,00	27.706.000,00	81,99	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	74.600.000,00	74.540.500,00	99,92	

26. Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Alokasi anggaran untuk Urusan Pariwisata pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 25.762.662.217,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 25.022.244.987,00 atau sebesar (97,13%), pada urusan Pariwisata tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.26
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan
Pariwisata Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pariwisata		25.762.662.217,00	25.022.244.987,00	97,13	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1.698.721.000,00	1.626.685.235,00	95,76	
	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara				
	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.				
3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	168.280.000,00	154.768.705,00	91,97	
3.26.02.1.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang ditetapkan	168.280.000,00	154.768.705,00	91,97	
3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	1.218.860.000,00	1.184.005.830,00	97,14	
3.26.02.1.02.01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	171.176.000,00	163.876.680,00	95,74	
3.26.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	1.047.684.000,00	1.020.129.150,00	97,37	



Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pariwisata Provinsi				
3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	171.590.000,00	160.483.250,00	93,53	
3 26 02 1.03 01 Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	171.590.000,00	160.483.250,00	93,53	
3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	139.991.000,00	127.427.450,00	91,03	
3 26 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi	49.892.000,00	49.333.100,00	98,88	
3 26 02 1.04 05 Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Standarisasi	90.099.000,00	78.094.350,00	86,68	
Program Pemasaran Pariwisata					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	10.801.556.710,00	10.693.590.044,00	99,00	
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara				
	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau				
3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	10.801.556.710,00	10.693.590.044,00	99,00	
3 26 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	8.495.301.518,00	8.447.380.679,00	99,44	
3 26 03 1.01 02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah stakeholder pariwisata yang diberi insentif	1.887.142.000,00	1.855.617.105,00	98,33	
26 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	Jumlah Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri yang disediakan	419.113.192,00	390.592.260,00	93,19	
Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri					
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					



	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	394.899.500,00	352.571.600,00	89,28	
3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	196.202.000,00	172.396.400,00	87,87	
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya				
3 26 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan kompetensinya	1.700.000,00	1.360.000,00	80,00	
3 26 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang difasilitasi sertifikasi kompetensi	194.502.000,00	171.036.400,00	87,94	
3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	198.697.500,00	180.175.200,00	90,68	
3 26 05 1.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan	98.697.500,00	82.594.300,00	83,68	
3 26 05 1.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Bidang Ekonomi Kreatif yang distandarisasi dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang disertifikasi Profesi	100.000.000,00	97.580.900,00	97,58	
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					
	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	329.513.200,00	324.887.102,00	98,60	
3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarannya	176.413.200,00	174.218.150,00	98,76	
3 26 04 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	176.413.200,00	174.218.150,00	98,76	
3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	153.100.000,00	150.668.952,00	98,41	
3 26 04 1.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah media yang digunakan dalam pemasaran produk ekraf	106.160.000,00	105.324.052,00	99,21	



3 26 04 1.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem EkonomiKreatif yang dimonitoring dan dievaluasi	46.940.000,00	45.344.900,00	96,60	
Program PenunjangUrusan					
Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12.537.971.807,00	12.024.511.006,00	95,90	
3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	266.585.675,00	250.625.250,00	94,01	
3.26.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah yang disusun	87.758.900,00	81.026.950,00	92,33	
3.26.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangdisusun	50.730.375,00	46.111.000,00	90,89	
3.26.01.1.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.096.400,00	123.487.300,00	96,40	
3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	9.540.742.763,00	9.373.613.448,00	98,25	
3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gajidan tunjangan ASN	9.063.440.763,00	8.900.570.568,00	98,20	
3.26.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	Jumlah pembayaran Administrasi PelaksanaanTugas ASN	452.302.000,00	451.752.000,00	99,88	
3.26.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	25.000.000,00	21.290.880,00	85,16	
Pelaporan Keuangan AkhirTahun SKPD					
3.26.01.1.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.057.956.600,00	804.887.718,00	76,08	
3 26 01 1.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistikKantor	164.898.400,00	131.555.235,00	79,78	
3 26 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	156.402.000,00	116.146.800,00	74,26	
3 26 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	736.656.200,00	557.185.683,00	75,64	



3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya PeralatanMesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	122.509.300,00	113.783.000,00	92,88	
3 26 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang diadakan	122.509.300,00	113.783.000,00	92,88	
3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	1.298.401.469,00	1.291.621.230,00	99,48	
3 26 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
3 26 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	89.200.000,00	85.520.000,00	95,87	
3 26 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasapelayanan umum kantor	1.201.701.469,00	1.198.601.230,00	99,74	
3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yangterpelihara sesuai rencana kebutuhan	251.776.000,00	189.980.360,00	75,46	
3 26 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah pemenuhan jasapemeliharaan dan pajakkendaraan dinas jabatan	41.780.000,00	35.402.300,00	84,74	
3 26 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	154.576.000,00	112.218.060,00	72,60	
3 26 01 1.09 06 PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan peralatan danmesin lainnya	55.420.000,00	42.360.000,00	76,43	

27. Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pertanian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9.009.404.895 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 8.083.914.595 atau sebesar (89,73%), urusan Pilihan Pertanian tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.27
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan
Pertanian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pertanian		9.009.404.895,00	8.083.914.595,00	89,73	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		6.159.755.595,00	5.755.560.902,00	93,44	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak				
	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian				
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Yang di adakan	5.257.732.415,00	4.885.805.155,00	92,93	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Mesin Pertanian dan sarana pendukung pertanian yang diadakan	5.257.732.415,00	4.885.805.155,00	92,93	
	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan				
	Jumlah Pupuk dan Pestisida cair yang diadakan				
	Jumlah laporan pengawasan peredaran alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida				
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi	722.474.000,00	703.673.645,00	97,40	



Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih / Bibit Tanaman Pertanian yang diterbitkan	38.320.000,00	37.709.500,00	98,41	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Jumlah Produksi Bibit / Benih Tanaman Hortikultura	527.072.000,00	509.318.585,00	96,63	
Benih/Bibit Hortikultura					
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Produksi Bibit / Benih Tanaman Perkebunan	157.082.000,00	156.645.560,00	99,72	
	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran benih perkebunan				
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Akseptor yang di IB (Inseminasi Buatan)	179.549.180,00	166.082.102,00	92,50	
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bibit Ternak yang dihasilkan	179.549.180,00	166.082.102,00	92,50	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		2.290.363.500,00	1.818.464.005,00	79,40	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan				



	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura				
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan				
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian	2.290.363.500,00	1.818.464.005,00	79,40	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan	Luas Lahan tanaman pangan dan hortikultura yang di Optimalisasi	1.790.363.500,00	1.342.089.593,00	74,96	
	Luas Lahan Perkebunan yang di remajakan/di perluas				
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah pengadaan pembangunan gedung UPTD Pertanian	500.000.000,00	476.374.412,00	95,27	
Komoditas Pertanian					
Program Pengendalian Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner		242.785.800,00	217.389.688,00	89,54	
	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit				
	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat				
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah	Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis	203.255.800,00	184.142.455,00	90,60	



Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Pengendalian Risiko dan Penanggulang anPenyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan pengendalian	203.255.800,00	184.142.455,00	90,60	
	Jumlah Hewan Satwayang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan				
	Jumlah Sampel hewanyang diperiksa				
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji	39.530.000,00	33.247.233,00	84,11	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel Hewandan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji	39.530.000,00	33.247.233,00	84,11	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		316.500.000,00	292.500.000,00	92,42	
	Nilai Tukar Petani(NTP)				
	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya				
Pengembang anPenerapan Penyuluh an Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian	316.500.000,00	292.500.000,00	92,42	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaa n Petani	Jumlah Penyuluh yang melakukan penyuluhan pertanian	9.009.404.895,00	8.083.914.595,00	89,73	

	Jumlah Petani/Orang yang telah mendapatkan pemberdayaan	6.159.755.595,00	5.755.560.902,00	93,44	
--	---	------------------	------------------	-------	--

28. Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kehutanan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 783.229.900,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 463.745.683,00 atau sebesar (59,21%), pada urusan wajib Kehutanan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.28
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan kehutanan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kehutanan		783.229.900,00	463.745.683,00	59,20	
Program Pengelolaan Hutan		683.229.900,00	386.757.600,00	56,60	
	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan				
	Rehabilitasi Lahan Kritis				
3.28.03.1.07 Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	
3.28.03.1.07.02 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan terhadap Pemegang Izin Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	



3.28.03.1.01 Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau	367.661.900,00	273.799.600,00	74,46	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT I KARIMUN)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	48.117.800,00	24.736.886,00	51,41	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHL UNIT II BATAM)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	80.313.200,00	64.513.093,00	80,33	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT III LINGGA)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	48.922.000,00	25.312.080,00	51,67	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	56.251.900,00	43.169.649,00	76,74	
Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT IV BINTAN- TPI)					
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT V NATUNA)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	53.494.000,00	42.080.392,00	78,66	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	80.563.000,00	73.987.500,00	91,84	



Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT VI ANAMBAS)					
3.28.03.1.05 Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutandi Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHL UNIT II BATAM)	Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	50.000.000,00	49.958.000,00	99,92	
3.28.03.1.05.01 Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL UNIT II BATAM)	Terlaksananya Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	50.000.000,00	49.958.000,00	99,92	
3.28.03.1.04 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar kawasan Hutan Negara	202.568.000,00			
3.28.03.1.04.08 Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	202.568.000,00			
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		100.000.000,00	76.988.083,00	76,99	
	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				
3.28.05.1.01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	100.000.000,00	76.988.083,00	76,99	

dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Masyarakat di Bidang Kehutanan				
3.28.05.1.01.02 Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	37.908.632,00	75,82	
3.28.05.1.01.03 Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	50.000.000,00	39.079.451,00	78,16	

29. Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Alokasi anggaran untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 24.284.599.147,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 23.746.405.669,92 atau sebesar (97,78%), pada urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.29
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Energi dan Sumberdaya Mineral		24.284.599.147,00	23.746.405.669,92	97,78	
PROGRAM PENGELOLA ANASPEK KEGEOLOGIAN					
	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	210.612.400,00	135.626.500,00	64,40	
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam	85.145.800,00	49.453.100,00	58,08	



Tanah dalam Daerah Provinsi	Daerah Provinsi				
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau	85.145.800,00	49.453.100,00	58,08	
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Data(dokumen) Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	125.466.600,00	86.173.400,00	68,68	
Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuandan Peraturan yang berlaku	60.373.800,00	33.084.550,00	54,80	
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Tertib pemanfaatan airtanah	65.092.800,00	53.088.850,00	81,56	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN					
	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	3.050.329.680,00	3.014.180.640,63	98,81	
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	3.050.329.680,00	3.014.180.640,63	98,81	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya data, peraturan, kebijakan daerah terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	72.070.050,00	71.238.650,00	98,85	
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpeliharanya aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	2.754.313.630,00	2.742.121.590,63	99,56	
	Tersedianya sistem data energi				
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	155.324.000,00	132.950.800,00	85,60	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	68.622.000,00	67.869.600,00	98,90	



Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		8.268.692.888,00	8.051.613.329,29	97,37	
	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan				
	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik				
	Rasio Elektrifikasi				
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	16.940.000,00	14.981.200,00	88,44	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	16.940.000,00	14.981.200,00	88,44	
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	104.845.000,00	82.443.000,00	78,63	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	50.000.000,00	38.361.000,00	76,72	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	54.845.000,00	44.082.000,00	80,38	



Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	65.715.000,00	47.734.866,00	72,64	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	37.500.000,00	22.647.700,00	60,39	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	28.215.000,00	25.087.166,00	88,91	
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,	Persentase Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di	8.081.192.888,00	7.906.454.263,29	97,84	
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Kepulauan Riau				
Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	1.705.405.863,00	1.631.220.943,00	95,65	
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	47.438.000,00	33.039.400,00	69,65	



Pembangunan SaranaPenyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	6.170.672.025,00	6.091.280.836,29	98,71	
	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau				
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan SaranaPenyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	157.677.000,00	150.913.084,00	95,71	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Persentase terlaksananya kegiatanpenunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12.754.964.179,00	12.544.985.200,00	98,35	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi PerangkatDaerah	149.040.600,00	144.449.500,00	96,92	
Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	149.040.600,00	144.449.500,00	96,92	
Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Persentase terlaksananya kegiatanpenunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	9.758.605.350,00	9.657.186.877,00	98,96	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	9.312.799.850,00	9.218.902.677,00	98,99	
Penyediaan Administrasi	Terpenuhinya Penyediaan AdministrasiASN	291.548.000,00	289.409.200,00	99,27	
Pelaksanaan TugasASN					



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	154.257.500,00	148.875.000,00	96,51	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	94.800.000,00	77.400.000,00	81,65	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.800.000,00	36.800.000,00	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.000.000,00	40.600.000,00	70,00	
		Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1.112.771.479,00	1.056.278.253,00	94,92	
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatandan Perlengkapan Kantor	230.714.236,00	226.435.335,00	98,15	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	112.594.432,00	104.646.638,00	92,94	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	76.709.200,00	73.983.150,00	96,45	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	692.753.611,00	651.213.130,00	94,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1.302.694.750,00	1.292.198.807,00	99,19	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	1.302.694.750,00	1.292.198.807,00	99,19	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	337.052.000,00	317.471.763,00	94,19	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya	247.220.000,00	228.078.563,00	92,26	

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	39.754.000,00	39.443.200,00	99,22	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	33.428.000,00	33.300.000,00	99,62	

30. Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perdagangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 5.338.051.329,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 5.016.035.690,00 atau sebesar (93,97%), pada urusan Pilihan Perdagangan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.30
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan
Perdagangan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perdagangan		5.338.051.329,00	5.016.035.690,00	93,97	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	1.448.270.642,00	1.398.987.970,00	96,60	
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang	1.448.270.642,00	1.398.987.970,00	96,60	



	Komoditas				
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang dibina	1.448.270.642,00	1.398.987.970,00	96,60	
Jumlah Pengelola Sarana Perdaganganyang dibina					
Data Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan tingkat Provinsi Kepri					
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	2.817.882.697,00	2.622.806.873,00	93,08	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Koefisien harga barang Pokok dan Barang Penting antar waktu	2.817.882.697,00	2.622.806.873,00	93,08	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Koefesien harga barang Pokok danBarang Penting antar waktu	117.535.200,00	115.776.549,00	98,50	
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar yang dilaksanakan	2.700.347.497,00	2.507.030.324,00	92,84	
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	118.952.940,00	110.797.647,00	93,14	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi promosi	118.952.940,00	110.797.647,00	93,14	



	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina				
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Promosi	46.395.800,00	44.213.049,00	95,30	
	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Perdagangan Luar Negeri				
	Dukungan dan Fasilitasi Perdagangan LuarNegeri				
	Identifikasi Keterangan Perdagangan LuarNegeri				
	Fasilitasi BusinessTrade Centre				
	Pendataan EksporImpor Provinsi Kepri				
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Merk / Brand lokal yangdicitrakan didalam dan luarnegeri	26.711.000,00	23.055.246,00	86,31	
	Laporan Pemetaan Produk Unggulan Ekspor				
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah UKM Ekspor yangdibina	45.846.140,00	43.529.352,00	94,95	
	Jumlah UKM Potensial Ekspor yang dibina				
	Jumlah ASN yang dilatih				
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuaiStandar pada saat dilakukan Pengawasan	952.945.050,00	883.443.200,00	92,71	
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang disebarluaskan	919.580.000,00	850.580.000,00	92,50	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	919.580.000,00	850.580.000,00	92,50	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredardandan/atau Jasa diSeluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	33.365.050,00	32.863.200,00	98,50	
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai	Jumlah Produk yang diawasi sesuai denganperaturan perundang-undangan	33.365.050,00	32.863.200,00	98,50	



Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen					
---	--	--	--	--	--

31. Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perindustrian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 18.580.568.131,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 18.193.379.238,00 atau sebesar (97,92%), pada urusan pilihan Perindustrian tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.31
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perindustrian		18.580.568.131,00	18.193.379.238,00	97,92	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	13.825.908.392,00	13.590.153.515,00	98,29	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun	169.464.350,00	168.807.384,00	99,61	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	29.863.000,00	99,54	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.464.350,00	138.944.384,00	99,63	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	9.023.969.259,00	8.851.850.896,00	98,09	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran	8.602.761.259,00	8.443.132.896,00	98,14	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran	421.208.000,00	408.718.000,00	97,03	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	882.958.912,00	860.042.561,00	97,40	



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	84.851.900,00	84.791.230,00	99,93	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	46.040.000,00	46.038.000,00	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	743.067.012,00	720.213.331,00	96,92	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD yang dioperasikan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.008.405.000,00	2.990.294.625,00	99,40	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.200.000,00	60,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.800.000,00	286.400.000,00	95,53	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.706.605.000,00	2.702.694.625,00	99,86	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihar sesuai rencana kebutuhan	741.110.871,00	719.158.049,00	97,04	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	9.188.671,00	1.490.400,00	16,22	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	256.432.500,00	252.265.000,00	98,37	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	475.489.700,00	465.402.649,00	97,88	
PROGRAM PERENCANAAN DAN	Kontribusi Industri Pengolahan	4.698.868.139,00	4.550.486.053,00	96,84	



PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terhadap PDRB				
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Nilai Produktivitas Industri Pengolahan	4.698.868.139,00	4.550.486.053,00	96,84	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Industri	302.692.600,00	301.607.371,00	99,64	
	Jumlah Dokumen Manajemen Mutu				
	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Industri				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Pelaku Industri yang dibina	350.000.000,00	344.134.187,00	98,32	
Pembangunan Sumber Daya Industri					
	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi				
	Jumlah Peralatan				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi	2.891.382.734,00	2.761.077.115,00	95,49	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih	1.154.792.805,00	1.143.667.380,00	99,04	
	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi				
	Jumlah Bulan Pendataan				
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri	55.821.600,00	52.739.670,00	94,48	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi dan Pengawasan Industri	55.821.600,00	52.739.670,00	94,48	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Jumlah Industri yang terfasilitasi	29.563.200,00	29.418.120,00	99,51	

provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Perizinan Industri yang Menjadi Kewenangan Provinsi	26.258.400,00	23.321.550,00	88,82	

32. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi anggaran untuk Urusan Transmigrasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30.000.000,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 15.692.472,00 atau sebesar (52,31%), pada urusan Transmigrasi tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.32
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Urusan Transmigrasi		30.000.000,00	15.692.472,00	52,31	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		10.000.000,00	7.769.872,00	77,70	
	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan				
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah wilayah pencadangan yang memenuhi syarat	10.000.000,00	7.769.872,00	77,70	
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan yang dilaksanakan	10.000.000,00	7.769.872,00	77,70	



Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		10.000.000,00	7.922.600,00	79,23	
	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi				
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase persebaran penduduk yang mendapat penataan	10.000.000,00	7.922.600,00	79,23	
		Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi AntarPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi AntarPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	10.000.000,00	7.922.600,00	79,23	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		10.000.000,00	-	-	
	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan				
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang	10.000.000,00	-	-	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah fasilitasi Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman yang dilaksanakan	10.000.000,00	-	-	

33. Sekretariat Daerah

Unsur penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 320.044.976.012,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 310.859.797.743,32 atau sebesar (97,13%), pada unsur penunjang Sekretariat Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.33
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang
Sekretariat Daerah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Sekretariat Daerah		320.044.976.012,00	310.859.797.743,32	97,13	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	1.222.749.851,00	1.092.788.435,00	89,37	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	337.226.808,00	280.519.898,00	83,18	
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	230.951.810,00	209.921.351,00	90,89	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	79.015.450,00	53.690.110,00	67,95	
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan	27.259.548,00	16.908.437,00	62,03	
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	490.595.600,00	449.158.041,00	91,55	
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	38.593.800,00	34.032.480,00	88,18	
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	70.838.000,00	65.293.325,00	92,17	
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	381.163.800,00	349.832.236,00	91,78	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	394.927.443,00	363.110.496,00	91,94	
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi	248.353.220,00	238.368.360,00	95,98	
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi	69.766.225,00	62.700.363,00	89,87	



Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Samayang dievaluasi	76.807.998,00	62.041.773,00	80,78	
PROGRAM KESEJAHTER AANRAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	100.997.808.069,00	97.974.995.353,00	97,01	
Fasilitasi Pembinaan MentalSpiritual	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan MentalSpiritual yang Dihasilkan	94.326.073.589,00	91.761.602.273,00	97,28	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Frekuensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	77.831.453.340,00	76.243.255.400,00	97,96	
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Frekuensi Fasilitasi Kelembagaan BinaSpiritual	16.494.620.249,00	15.518.346.873,00	94,08	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat PelayananDasar yang Dihasilkan	6.503.073.480,00	6.082.216.977,00	93,53	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan yang dihasilkan	6.250.120.480,00	5.923.562.677,00	94,78	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang dihasilkan	206.523.000,00	122.745.000,00	59,43	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dihasilkan	46.430.000,00	35.909.300,00	77,34	
Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dihasilkan	168.661.000,00	131.176.103,00	77,78	



Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang dihasilkan	46.429.000,00	32.721.729,00	70,48	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dihasilkan	75.802.000,00	64.683.500,00	85,33	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dihasilkan	46.430.000,00	33.770.874,00	72,74	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	2.277.047.781,00	2.194.950.162,00	96%	
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum daerah yang difasilitasi penyusunannya	1.579.739.581,00	1.536.144.246,00	97%	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase produk hukum pengaturan yang difasilitasi	903.188.000,00	896.503.814,00	99%	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi	172.605.481,00	171.103.062,00	99%	
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan	197.266.000,00	179.781.932,00	91%	
Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	306.680.100,00	288.755.438,00	94%	



4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	697.308.200,00	658.805.916,00	94%	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penyelesaian masalah hukum yang difasilitasi	298.146.000,00	296.761.600,00	99%	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah sengketa yang	399.162.200,00	362.044.316,00	91%	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	1.053.063.650,00	947.762.343,00	90%	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	710.126.350,00	633.742.578,00	89.24%	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	289.148.700,00	274.034.194,00	94.77%	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi	140.000.000,00	117.743.410,00	84.10%	
	Pelaksanaan Pembangunan APBN				
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	280.977.650,00	241.964.974,00	86.12%	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	342.937.300,00	314.019.765,00	91.57%	
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	90.000.000,00	86.207.400,00	95.79%	
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	141.032.000,00	124.992.865,00	88.63%	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	111.905.300,00	102.819.500,00	91.88%	



PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	717.435.542,00	526.924.552,00	73,45%	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Rekomendasi dan kebijakan dibidang perekonomian yang disusun	351.287.940,00	293.703.798,00	83.61%	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan	81.299.340,00	60.690.180,00	74.65%	
	Kebijakan Ekonomi Makro Yang Disusun				
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Yang Disusun	269.988.600,00	233.013.618,00	86.30%	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi dan kebijakan bidang sumber daya alam yang disusun	171.455.230,00	117.485.692,00	68.52%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Energi dan Air yang disusun	82.145.790,00	51.976.992,00	63.27%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	33.212.440,00	31.389.100,00	94.51%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang disusun	56.097.000,00	34.119.600,00	60.82%	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD dan BLUD yang disusun	194.692.372,00	115.735.062,00	59.45%	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang disusun	1.666.000,00	1.638.000,00	98.32%	
Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan	122.324.372,00	53.409.681,00	43.66%	



Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang disusun				
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang disusun	70.702.000,00	60.687.381,00	85,84%	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	851.241.993,00	813.337.418,00	95,55	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio Nilai Belanjayang Dilakukan Melalui Pengadaan	561.177.293,00	538.929.457,00	96,04	
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun	48.400.000,00	39.506.042,00	81,62	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Proses Pemilihannya Diselesaikan Sesuai Perencanaan	478.915.086,00	468.280.915,00	97,78	
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun	33.862.207,00	31.142.500,00	91,97	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	234.064.700,00	227.799.155,00	97,32	
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Secara Elektronik	48.400.000,00	46.080.681,00	95,21	
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi Berbasis Web yang Dikembangkan dan/atau Dikelola oleh Biro PBJ	143.742.200,00	142.787.007,00	99,34	
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun	41.922.500,00	38.931.467,00	92,87	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah UKPBJ Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan	56.000.000,00	46.608.806,00	83,23	



PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	745.961.500,00	692.491.646,00	92,83%	
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang Disusun	213.196.980,00	186.571.459,00	87,51%	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang ditata kelembagaannya	118.843.600,00	102.020.296,00	85,84%	
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang ditata kelembagaannya	21.653.300,00	21.469.500,00	99,15%	
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen analisa jabatan	72.700.080,00	63.081.663,00	86,77%	
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja	532.764.520,00	505.920.187,00	94,96%	
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	147.014.640,00	144.744.050,00	98,46%	
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja	61.946.880,00	53.293.983,00	86,03%	
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dievaluasi pelaksanaan Budaya Kerjanya	22.419.000,00	21.420.000,00	95,54%	
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tatalaksana pemerintah yang dikelola	108.728.000,00	103.966.935,00	95,62%	
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil pembinaan pelayanan publik	192.656.000,00	182.495.219,00	94,73%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		212.179.667.626,00	206.616.547.834,32	97,38	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (Biro Umum)				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun (Biro Umum)	619.237.640,00	580.170.105,00	93,69	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan (Biro	139.700.300,00	138.208.664,00	98,93	



	Adpim)				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.808.500,00	17.729.400,00	77,73	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	85.000.000,00	77.093.447,00	90,70	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dikoordinasikan dan disusun (Biro Umum)	344.677.040,00	322.164.594,00	93,47	
	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang dihasilkan (Biro Adpim)				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Biro Adpim)	27.051.800,00	24.974.000,00	92,32	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (Biro Umum)	66.660.478.542,00	65.504.682.270,00	98,27	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Umum)	62.448.061.792,00	61.345.476.684,00	98,23	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Biro Umum)	3.359.351.250,00	3.314.413.500,00	98,66	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Biro Umum)	434.033.500,00	429.962.200,00	99,06	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekuensi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Biro Umum)	170.065.000,00	169.891.386,00	99,90	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang telah dikoordinasikan dan tersusun (Biro Umum)	45.000.000,00	41.402.000,00	92,00	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan	45.000.000,00	44.741.000,00	99,42	



Tanggapan Pemeriksaan	Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun (Biro Umum)				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang telah dikordinasikan dan tersusun (Biro Umum)	158.967.000,00	158.795.500,00	99,89	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik (Biro Umum)	1.218.153.500,00	1.187.976.788,00	97,52	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun (Biro Umum)	52.887.000,00	52.780.000,00	99,80	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Frekuensi Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Biro Umum)	605.178.000,00	588.898.709,00	97,31	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Peserta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Biro Umum)	212.648.500,00	211.481.100,00	99,45	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah direkonsiliasi dan disusun (Biro Umum)	44.277.000,00	42.552.000,00	96,10	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Frekuensi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Biro Umum)	303.163.000,00	292.264.979,00	96,41	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu (Biro Umum)	1.914.847.100,00	1.811.637.480,00	94,61	
	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (Biro Adpim)				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan (Biro	91.808.800,00	91.568.200,00	99,74	



	Umum)				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan (Biro Umum)	952.802.600,00	930.713.870,00	97,68	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Frekuensi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Biro Umum)	36.479.300,00	36.332.100,00	99,60	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Biro Umum)	284.322.000,00	246.203.859,00	86,59	
	Jumlah peserta pendidikan / pelatihan Terlaksananya pendidikan/ pelatihan (Biro Adpim)				
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Umum)	443.499.800,00	418.807.851,00	94,43	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Umum)	105.934.600,00	88.011.600,00	83,08	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Umum)	35.017.102.032,00	34.197.429.161,00	97,66	
	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (Biro Adpim)				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.400,00	17.067.600,00	85,34	
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Umum)	5.241.830.971,00	5.211.648.489,00	99,42	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Biro Umum)	808.332.650,00	802.027.800,00	99,22	
	Frekuensi peralatan rumah tangga (Biro Adpim)				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Biro Umum)	10.722.519.213,00	10.628.407.756,00	99,12	



	Frekuensi pemenuhan kebutuhan Bahan Logistik Kantor (BiroAdpim)				
Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Frekuensi PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan (Biro Umum)	578.759.085,00	535.393.400,00	92,51	
	Frekuensi pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak danPenggandaan (Biro Adpim)				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (BiroUmum)	152.818.100,00	150.707.900,00	98,62	
Fasilitasi KunjunganTamu	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu (Biro Umum)	10.785.188.003,00	10.714.605.191,00	99,35	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Umum)	6.276.519.710,00	5.718.039.279,00	91,10	
	Frekuensi pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah (Biro Adpim)				
Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD	Frekuensi Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Biro Umum)	313.674.500,00	305.024.318,00	97,24	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Frekuensi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Biro Umum)	117.460.400,00	114.507.428,00	97,49	
Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Umum)	25.241.985.730,00	23.932.959.132,00	94,81	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan yang diadakan (Biro Umum)	1.436.030.000,00	1.357.945.869,00	94,56	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (Biro Umum)	19.736.069.727,00	18.677.020.585,00	94,63	



Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan (Biro Umum)	3.663.438.559,00	3.503.199.568,00	95,63	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		406.447.444,00	394.793.110,00	97,13	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum)	41.586.269.218,00	40.432.502.408,25	97,23	
	Persentase terlaksananya kegiatan penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi (Biro Adpim)				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Biro Umum)	974.221.400,00	944.891.250,00	96,99	
	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Biro Adpim)				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Biro Umum)	8.414.677.299,00	7.636.330.173,00	90,75	
	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Biro Adpim)				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Biro Umum)	8.592.988.000,00	8.536.961.801,00	99,35	
	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan				
	Perlengkapan Kantor(Biro Adpim)				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Biro Umum)	23.604.382.519,00	23.314.319.184,25	98,77	
	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Biro Adpim)				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (Biro Umum)	22.534.620.271,00	22.004.642.039,07	97,65	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Biro Umum)	1.364.511.788,00	1.351.871.763,00	99,07	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Biro Umum)	7.876.635.767,00	7.479.706.712,00	94,96	
Pemeliharaan Mebel	Frekuensi Pemeliharaan Mebel (Biro Umum)	194.935.000,00	193.090.000,00	99,05	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Biro Umum)	6.213.115.525,00	6.140.989.450,00	98,84	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Biro Umum)	1.001.531.325,00	998.967.264,00	99,74	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Biro Umum)	5.776.196.466,00	5.733.597.173,38	99,26	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Biro Umum)	107.694.400,00	106.419.676,69	98,82	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu (Biro Umum)	2.682.789.568,00	2.528.498.686,00	94,25	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi PenyediaanGaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Biro Umum)	226.238.124,00	224.616.862,00	99,28	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi PenyediaanPakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum)	276.249.850,00	275.941.000,00	99,89	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Frekuensi Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	140.705.000,00	5.200.400,00	3,70	



Kepala Daerah					
Kepala Daerah (Biro Umum)					
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum)	2.039.596.594,00	2.022.740.424,00	99,17	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	7.366.214.690,00	7.169.057.113,00	97,32	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Biro Umum)	3.292.632.235,00	3.185.407.943,00	96,74	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Biro Umum)	2.433.991.940,00	2.360.389.265,00	96,98	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Biro Umum)	1.639.590.515,00	1.623.259.905,00	99,00	
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Biro Umum)	2.643.674.106,00	2.612.727.022,00	98,83	
	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				
	Biro Adpimi				
Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen penyiapan materi pimpinan yang dibuat (Biro Adpim)	245.600.000,00	244.513.050,00	99,56	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Biro Umum)	2.092.609.106,00	2.063.291.001,00	98,60	
	Frekuensi penayangan dan pemberitaan kegiatan KDh/WKDh pada media massa dan media informasi lainnya (Biro Adpim)				
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Frekuensi pemenuhan Dukungan Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi	305.465.000,00	304.922.971,00	99,82	

	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Biro Adpim)				
Fasilitasi Keprotokolan	Persentase terlaksananya kegiatan penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi (Biro adpim)	4.694.295.229,00	4.654.265.630,00	99,15	
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Frekuensi Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Biro Adpim)	2.189.912.833,00	2.175.023.963,00	99,32	
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Adpim)	1.729.876.590,00	1.706.395.460,00	98,64	
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Frekuensi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Biro Adpim)	774.505.806,00	772.846.207,00	99,79	

34. Sekretariat DPRD

Unsur penunjang Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat DPRD padatahun anggaran 2022 sebesar Rp 155.746.039.370,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 151.056.302.981,25 atau sebesar (96,99%), pada unsur penunjang Sekretariat DPRD tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.34
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Sekretariat DPRD		155.746.039.370,00	151.056.302.981,25	96,99	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		65.866.982.808,00	63.715.676.623,00	96,73	
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				



Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	1.266.765.161,00	1.167.050.500,00	92,13	
Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	346.165.161,00	280.800.000,00	81,12	
Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah				
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	600.000.000,00	568.877.750,00	94,81	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	220.600.000,00	217.437.250,00	98,57	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100.000.000,00	99.935.500,00	99,94	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen penganggaran daerah	322.439.900,00	282.979.607,00	87,76	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	322.439.900,00	282.979.607,00	87,76	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	11.352.440.000,00	10.677.273.225,00	94,05	
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1.355.933.000,00	775.201.087,00	57,17	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.541.507.000,00	4.536.232.920,00	99,88	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	2.286.000.000,00	2.259.125.000,00	98,82	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.169.000.000,00	3.106.714.218,00	98,03	
	Hubungan Masyarakat				
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	26.125.385.000,00	25.361.242.035,00	97,08	
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	356.400.000,00	333.897.000,00	93,69	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	200.000.000,00	199.666.700,00	99,83	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	25.568.985.000,00	24.827.678.335,00	97,10	
Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara	26.799.952.747,00	26.227.131.256,00	97,86	



	optimal				
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26.125.267.347,00	25.585.920.006,00	97,94	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	234.400.000,00	231.173.000,00	98,62	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	282.000.000,00	262.622.000,00	93,13	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	158.285.400,00	147.416.250,00	93,13	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		89.879.056.562,00	87.340.626.358,25	97,18	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.180.734.000,00	1.162.091.200,00	98,42	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	295.666.000,00	294.598.500,00	99,64	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239.187.500,00	233.594.600,00	97,66	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	274.246.000,00	270.586.400,00	98,67	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	75.000.000,00	74.790.000,00	99,72	
	Realisasi Kinerja SKPD				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296.634.500,00	288.521.700,00	97,27	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	42.652.936.817,00	41.559.426.713,00	97,44	



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41.210.200.817,00	40.187.005.613,00	97,52	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	867.736.000,00	809.472.000,00	93,29	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	203.000.000,00	197.627.600,00	97,35	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	174.000.000,00	172.384.700,00	99,07	
4.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	198.000.000,00	192.936.800,00	97,44	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang	204.793.100,00	126.795.456,25	61,91	
	pelaksanaan tugas dan fungsi				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	94.547.100,00	83.495.456,25	88,31	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33.250.000,00	27.700.000,00	83,31	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.996.000,00	15.600.000,00	20,26	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	25.007.888.137,00	24.969.089.321,00	99,84	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.824.489.137,00	1.800.803.200,00	98,70	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.783.399.000,00	14.769.649.206,00	99,91	



Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.400.000.000,00	8.398.636.915,00	99,98	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang diadakan	4.336.534.800,00	4.203.441.300,00	96,93	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	959.210.400,00	946.716.000,00	98,70	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.850.100.000,00	2.748.300.000,00	96,43	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	335.460.200,00	322.389.900,00	96,10	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	191.764.200,00	186.035.400,00	97,01	
4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	7.609.573.500,00	6.809.414.765,00	89,48	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.870.273.500,00	1.792.628.390,00	95,85	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.739.300.000,00	5.016.786.375,00	87,41	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik	7.228.130.975,00	7.143.563.630,00	98,83	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.295.052.000,00	3.271.550.845,00	99,29	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	502.970.000,00	498.675.550,00	99,15	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	346.116.175,00	332.740.900,00	96,14	
Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	3.083.992.800,00	3.040.596.335,00	98,59	

Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
Layanan Administrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi dprd	472.760.000,00	376.942.373,00	79,73	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	472.760.000,00	376.942.373,00	79,73	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya	1.185.705.233,00	989.861.600,00	83,48	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	102.705.233,00	97.724.100,00	95,15	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	650.000.000,00	573.077.500,00	88,17	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	433.000.000,00	319.060.000,00	73,69	

35. Perencanaan

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perencanaan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 33.614.122.893,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 31.653.336.382,00 atau sebesar (94,17%), pada urusan Perencanaan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.35
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perencanaan		33.614.122.893,00	31.653.336.382,00	94,17	
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	2.554.132.030,00	2.398.046.160,00	93,89	
5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	1.310.281.700,00	1.263.317.766,00	96,42	



Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	7.715.800,00	3.302.000,00	42,80	
	Jumlah laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau				
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah laporan Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota	129.747.600,00	128.346.200,00	98,92	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi publik RKPD Provinsi Kepulauan Riau	45.300.400,00	43.202.000,00	95,37	
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau	726.332.000,00	725.880.466,00	99,94	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022	401.185.900,00	362.587.100,00	90,38	
	Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepri Tahun 2023				
5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	602.533.300,00	564.570.400,00	93,70	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	282.293.900,00	268.942.200,00	95,27	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	148.836.900,00	138.451.300,00	93,02	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tersusunnya Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	171.402.500,00	157.176.900,00	91,70	



5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	641.317.030,00	570.157.994,00	88,90	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau	203.763.000,00	178.489.000,00	87,60	
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	212.535.900,00	184.125.600,00	86,63	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.476.030,00	94.791.800,00	96,26	
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota	126.542.100,00	112.751.594,00	89,10	
Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	4.965.759.020,00	3.859.584.373,00	77,72	
	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD				
5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.810.623.100,00	933.688.795,00	51,57	
	Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota				



	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	122.323.600,00	117.255.934,00	95,86	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	90.359.000,00	75.709.915,00	83,79	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Pemerintahan	377.618.300,00	356.439.718,00	94,39	
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	124.173.000,00	112.617.873,00	90,69	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	89.343.800,00	77.468.000,00	86,71	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	98.339.000,00	91.972.459,00	93,53	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Pembangunan Manusia	908.466.400,00	102.224.896,00	11,25	



	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia				
5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.125.157.500,00	1.046.046.678,00	92,97	
	Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	390.546.500,00	352.124.100,00	90,16	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	64.091.500,00	61.707.700,00	96,28	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	89.516.900,00	87.297.200,00	97,52	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota	299.879.200,00	284.394.600,00	94,84	



Daerah Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian				
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Perekonomian				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	116.504.300,00	109.752.300,00	94,20	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	67.096.900,00	55.043.800,00	82,04	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	9.946.600,00	9.470.100,00	95,21	
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang SDA				
5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.029.978.420,00	1.879.848.900,00	92,60	
	Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	444.664.000,00	406.405.500,00	91,40	



Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	408.903.700,00	391.576.400,00	95,76	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	616.407.720,00	554.098.100,00	89,89	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Infrastruktur	560.003.000,00	527.768.900,00	94,24	
Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	26.094.231.843,00	25.395.705.849,00	97,32	
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	194.371.236,00	174.014.853,00	89,53	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.830.610,00	99.163.953,00	90,29	
	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan				
	Dokumen Renjaan Renja Perubahan Barenlitbang				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi fisik dan keuangan barenlitbang yang tersusun	41.562.176,00	35.933.200,00	86,46	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	42.978.450,00	38.917.700,00	90,55	



4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.016.377.919,00	17.641.782.806,00	97,92	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.145.229.919,00	16.785.096.628,00	97,90	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	695.114.000,00	692.312.000,00	99,60	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan Barenlitbang yang disusun	32.976.200,00	31.134.110,00	94,41	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi pelaksanaan Akutansi SKPD	62.058.200,00	54.189.208,00	87,32	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Barenlitbang yang disusun	33.568.200,00	32.078.260,00	95,56	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terpenuhinya Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	15.276.200,00	15.145.000,00	99,14	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran Barenlitbang yang disusun	32.155.200,00	31.827.600,00	98,98	
5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	88.040.284,00	81.540.610,00	92,62	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	37.072.899,00	32.295.110,00	87,11	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi BMD	50.967.385,00	49.245.500,00	96,62	
	Terlaksananya Pemusnahan Aset Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan				
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	900.104.000,00	889.455.000,00	98,82	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang mengikuti Sertifikasi Pelatihan	4.580.000,00	4.515.000,00	98,58	



	Kompetensi				
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur perencanaan di seluruh Perangkat Daerah yang mengikuti Pelatihan/bimtek perencanaan	395.524.000,00	392.725.000,00	99,29	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	500.000.000,00	492.215.000,00	98,44	
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.544.653.550,00	2.371.694.338,00	93,20	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	58.740.100,00	57.375.100,00	97,68	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	154.378.000,00	138.609.000,00	89,79	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor dan Benda Pos	407.892.000,00	406.507.000,00	99,66	
	Pemenuhan BBM Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	223.367.000,00	222.875.000,00	99,78	
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	349.120.000,00	346.360.000,00	99,21	
Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material	62.026.300,00	61.276.300,00	98,79	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100.761.000,00	90.082.150,00	89,40	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	860.968.150,00	761.760.908,00	88,48	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Updating Data dan Informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	327.401.000,00	286.848.880,00	87,61	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	75.572.000,00	68.160.400,00	90,19	



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.650.289,00	232.898.800,00	97,18	
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.934.736.458,00	2.857.058.654,00	97,35	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.040.000,00	100.450.113,00	58,05	
Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.000.000,00	241.760.000,00	99,90	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan umum Kantor	2.504.696.458,00	2.499.848.541,00	99,81	
4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861.973.707,00	841.653.288,00	97,64	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.560.000,00	76.486.300,00	99,90	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	533.600.000,00	533.534.350,00	99,99	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.813.707,00	22.960.500,00	92,53	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	227.000.000,00	208.672.138,00	91,93	

36. Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah:

a. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi anggaran untuk Unsur Penunjang Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 858.452.764.141,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 843.842.695.483,56 atau sebesar (98,30%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 100%. Jumlah indikator program pada Unsur Penunjang Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian semua Indikator program memiliki kategori sangat tinggi, Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahandan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada unsur Penunjang Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.36.1
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang
Sekretariat Daerah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah		741.245.629.569,00	729.647.779.803,00	98,44	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	692.038.274.858,00	683.402.034.161,00	98,75	
	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD				
5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang	4.836.466.466,00	4.715.607.136,00	97,50	



	disusun				
Rencana Anggaran Daerah					
5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA dan PPAS	475.000.000,00	465.912.362,00	98.09	
5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	425.000.000,00	410.867.170,00	96,67	
5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	520.679.950,00	510.686.800,00	98.08	
5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	450.000.000,00	421.064.923,00	93.57	
5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	475.000.000,00	463.595.991,00	97.60	
5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	425.000.000,00	415.887.479,00	97.86	
5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	630.000.000,00	612.076.520,00	97.16	
5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Daerah	677.429.996,00	661.925.996,00	97.71	
5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan	150.000.000,00	149.643.700,00	99.76	
5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Provinsi	608.356.520,00	603.946.195,00	99.28	
5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan	Perentase tersedianya Keputusan	667.858.792,00	608.067.571,00	91.05	



Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota				
5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Tentang APBD Kab/Kota dan Perda Penjabaran APBD Kab/Kota	223.246.000,00	198.881.154,00	89.09	
5.02.02.1.02.03 Evaluasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Tentang	246.126.000,00	215.183.224,00	87.43	
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Perubahan APBD Kab/Kota dan Perda Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota				
5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Frekuensi penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah konsolidasian propinsi dan Kab/kota dan statistik keuangan pemerintahan daerah	198.486.792,00	194.003.193,00	97.74	
5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah	1.460.037.796,00	1.385.298.206,00	94.88	
5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Frekuensi Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	274.064.096,00	263.276.678,00	96.06	
5.02.02.1.03.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Frekuensi Penatausahaan pembiayaan daerah	95.086.000,00	94.255.115,00	99.13	
5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Frekuensi Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan	193.632.000,00	184.451.283,00	95.26	
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
5.02.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan	Frekuensi Koordinasi, pelaksanaan kerjasamadan	244.560.000,00	226.311.293,00	92.54	



Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank				
5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	459.319.700,00	440.271.677,00	95.85	
5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	193.376.000,00	176.732.160,00	91.39	
5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu	2.878.221.167,00	2.478.749.884,00	86.12	
5.02.02.1.04.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Frekuensi Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	279.748.392,00	270.146.163,00	96.57	
5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	200.000.000,00	177.117.400,00	88.56	
5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Frekuensi Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	640.039.000,00	632.942.430,00	98.89	
5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Perda tentang penjabaran pelaksanaan APBD Provinsi	442.680.000,00	372.680.188,00	84.19	
5.02.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP	150.000.000,00	144.256.800,00	96.17	



BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	350.000.000,00	291.255.980,00	83.22	
5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	147.067.500,00	134.179.994,00	91.24	yang realisasi tak maksimal.
5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Frekuensi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	668.686.275,00	456.170.929,00	68.22	
5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	681.312.678.183,00	673.526.781.301,00	98.86	
5.02.02.1.05.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	4.130.000.000,00	2.173.194.455,00	52.62	
5.02.02.1.05.06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (UPT Dana Bergulir)	Frekuensi Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	482.870.200	468.621.994,00	97.05	
5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Frekuensi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	21.790.800.000,00	18.252.778.838,00	83.76	
5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Frekuensi Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	709.200.000,00	-	0,00	
5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Frekuensi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	654.199.807.983	652.632.186.014,00	99.76	
5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola	883.012.454,00	687.530.063,00	77.86	



Keuangan Daerah					
5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Frekuensi Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000,00	362.458.189,00	72,49	Kegiatan terlaksana namun dikarenakan adanya perubahan Narasumber yang semula direncanakan narasumber
5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Frekuensi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	654.199.807.983	652.632.186.014,00	99,76	
5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola	883.012.454,00	687.530.063,00	77,86	
5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Frekuensi Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000,00	362.458.189,00	72,49	Kegiatan terlaksana namun dikarenakan adanya perubahan Narasumber yang semula direncanakan narasumber
5.02.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Frekuensi Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	383.012.454,00	325.071.874,00	84,87	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	3.207.348.604,00	2.864.577.481,00	89,31	
5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD tertib pelaporan BMD	3.207.348.604,00	2.864.577.481,00	89,31	
5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Keputusan Gubernur Tentang Standar Harga Satuan	508.568.500,00	481.249.300,00	71,71	
5.02.03.1.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Pergub Tentang Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	150.930.250,00	144.468.900,00	95,72	
5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Inventarisasi BMD	419.838.000,00	338.802.460,00	80,70	
5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang disertifikat	1.172.403.204,00	1.084.645.121,00	92,51	
5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dilakukan Penilaian	342.933.300,00	327.139.700,00	95,39	
5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian OPD	350.000.000,00	268.822.300,00	76,81	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah tercapai namun dikarenakan terdapat selisih antara



					harga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal.
5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Tahunan BMD	262.675.350,00	219.449.700,00	83,54	
5.02.01.1.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	46.000.006.107,00	43.381.168.161,00	94,31	
5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	616.484.400,00	518.689.657,00	84,14	
5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	293.309.000,00	239.740.691,00	81,74	
5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	166.459.900,00	144.685.426,00	86,92	
5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72.813.000,00	54.182.390,00	74,41	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah tercapai namun dikarenakan terdapat selisih antara harga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga
					rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal.
5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah per triwulan	83.902.500,00	80.081.150,00	95,45	
5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.936.958.025,00	27.341.745.727,00	97,87	
5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.326.215.525,00	18.826.793.027,00	97,42	
5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.343.424.000,00	8.302.438.000,00	99,51	
5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	60.390.800,00	80,52	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah tercapai namun dikarenakan terdapat selisih



SKPD					antaraharga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak
5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.936.958.025,00	27.341.745.727,00	97,87	
5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.326.215.525,00	18.826.793.027,00	97,42	
5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.343.424.000,00	8.302.438.000,00	99,51	
5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	60.390.800,00	80,52	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah tercapai namun dikarenakan terdapat selisih antaraharga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak
					waktu yang tidak mendukung
5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.711.363.607,00	4.343.212.871,00	76,05	
5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	24.391.500,00	81,31	
5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000,00	69.123.200,00	98,75	
5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.783.000,00	35.937.000,00	84,00	
5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.769.000,00	6.882.000,00	88,58	



5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi penyediaan dan perlengkapan kantor	4.256.000,00	4.162.500,00	97,80	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Bahan Logistik	197.699.100,00	193.272.846,00	97,76	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	40.788.800,00	40.627.600,00	99,60	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	93.908.000,00	93.614.600,00	99,69	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	124.333.000,00	122.230.000,00	98,31	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	58.270.000,00	97,12	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	4.070.000,00	88,48	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Bahan Logistik	197.699.100,00	193.272.846,00	97,76	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	40.788.800,00	40.627.600,00	99,60	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	93.908.000,00	93.614.600,00	99,69	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	124.333.000,00	122.230.000,00	98,31	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	58.270.000,00	97,12	



DAN PEMANFAATAN ASET)					
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	4.070.000,00	88,48	
Perengkapan Kantor(UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)					
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Bahan Logistik	197.699.100,00	193.272.846,00	97,76	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	40.788.800,00	40.627.600,00	99,60	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	93.908.000,00	93.614.600,00	99,69	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	124.333.000,00	122.230.000,00	98,31	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	58.270.000,00	97,12	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	4.070.000,00	88,48	
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)					dikarenakan terdapat selisih antara harga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal.
5.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Frekuensi Arsip Dinamis pada SKPD	537.554.032,00	515.173.517,00	95,84	
5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	1.532.507.334,00	1.453.169.159,00	94,82	



5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	346.275.150,00	326.513.600,00	94,29	
5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.103.170,00	722.636.451,00	95,95	
5.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Sistem Aset Tak Berwujud	200.000.000,00	176.895.756,00	88,45	
5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.129.014,00	227.123.352,00	97,42	
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.935.199.072,00	7.806.597.367,00	98,38	
5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Jasa Surat Menyurat	71.474.096,00	71.467.171,00	99,99	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.994.144,00	248.877.861,00	90,50	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.074.096,00	225.059.442,00	98,68	
5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.273.680,00	206.111.200,00	94,86	
5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.412.168.000,00	6.330.852.675,00	98,73	
5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.129.014,00	227.123.352,00	97,42	
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.935.199.072,00	7.806.597.367,00	98,38	
5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Jasa Surat Menyurat	71.474.096,00	71.467.171,00	99,99	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.994.144,00	248.877.861,00	90,50	



(UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)					
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.074.096,00	225.059.442,00	98,68	
5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.273.680,00	206.111.200,00	94,86	
5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.412.168.000,00	6.330.852.675,00	98,73	
5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.129.014,00	227.123.352,00	97,42	
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.935.199.072,00	7.806.597.367,00	98,38	
5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Jasa Surat Menyurat	71.474.096,00	71.467.171,00	99,99	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.994.144,00	248.877.861,00	90,50	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.074.096,00	225.059.442,00	98,68	
5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.273.680,00	206.111.200,00	94,86	
5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.412.168.000,00	6.330.852.675,00	98,73	
5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Reha- bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.000.000,00	168.670.600,00	96,94	

b. Badan Pendapatan Daerah

Alokasi anggaran untuk Unsur Penunjang Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 117.207.134.572,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 114.194.915.680,56 atau sebesar (97,43 %). pada Unsur Penunjang Keuangan Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.36.2
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		766.201.800	692.044.565	90,32	
	Persentase realisasi penerimaan dana transfer	766.201.800	692.044.565	90,32	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dibandingkan target tahun berjalan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	354.113.400	304.064.110	85,87	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran Belanja Daerah	354.113.400	304.064.110	85,87	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	281.932.600	272.979.026	96,82	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	281.932.600	272.979.026	96,82	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansidan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	130.155.800	115.001.429	88,36	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pengelolaan bahan tanggapan bahan pemeriksaan	130.155.800	115.001.429	88,36	



Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		11.928.277.899	11.180.441.359	93,73	
	Persentase Peningkatan				
	Realisasi Pajak Daerah				
	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan				
	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan				
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih				
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	7.133.976.499	6.632.206.036	92,97	
	2. Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih				
	3. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak				
	4. Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di Seluruh Kepri				
	5. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan				
	6. Survey Mutu Pelayanan				
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perhitungan Target Pajak dan Optimalisasi Pajak Daerah	1.141.747.900	1.096.399.213	96,03	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen analisa pengembangan pajak dan kebijakan pajak daerah	763.151.000	724.636.266	94,95	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1.445.081.100	1.430.346.098	98,98	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1.061.483.130	968.254.196	91,22	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Frekuensi pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	665.110.669	609.661.956	91,66	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	266.852.500	238.985.692	89,56	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	997.272.000	913.294.177	91,58	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen/ target penyelesaian	101.691.000	75.561.048	74,30	



	keberatan pajak daerah				
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	457.930.000	355.102.590	77,55	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi UPT PPD Bapenda, survey IKM dan Terwujudnya kerjasama Pembinaan Forum Kesamsatan	233.657.200	219.964.800	94,14	
UPTD PPD Batam Centre					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		2.118.062.300	2.068.131.908	97,64	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1.319.128.300	1.272.256.808	96,45	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	474.550.000	472.876.100	99,65	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	324.384.000	322.999.000	99,57	
UPTD PPD Tanjungpinang					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		857.002.800	844.720.611	98,57	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	155.060.000	148.669.111	95,88	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	510.250.300	506.571.400	99,28	
Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah dokumen pengendalian dan	191.692.500	189.480.100	98,85	
Pengawasan Pajak Daerah	pengawasan pajak daerah				
UPTD PPD Bintan					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		338.507.600	317.184.032	93,70	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	128.732.900	111.828.732	86,87	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	91.372.400	89.495.300	97,95	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	118.402.300	115.860.000	97,85	
UPTD PPD KARIMUN					



Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		381.972.400	357.538.217	93,60	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	117.465.000	112.432.989	95,72	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	126.337.900	110.291.228	87,30	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	138.169.500	134.814.000	97,57	
UPTD PPD Lingga					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		253.765.000	217.132.510	85,56	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	26.681.000	24.410.010	91,49	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	54.464.000	45.455.600	83,46	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	172.620.000	147.266.900	85,31	
UPTD PPD Natuna					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		368.312.500	315.359.195	85,62	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	131.236.000	107.805.501	82,15	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	103.536.600	83.562.574	80,71	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	133.539.900	123.991.120	92,85	
UPTD PPD Anambas					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		95.800.000	92.388.250	96,44	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	40.300.000	40.092.000	99,48	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	55.500.000	52.296.250	94,23	
UPTD PPD Batu Aji					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		211.306.700	171.971.900	81,38	



Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	17.400.000	17.400.000	100,00	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	157.989.700	147.864.900	93,59	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	35.917.000	6.707.000	18,67	
UPTD PPD Kijang					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		95.171.200	90.286.200	94,87	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	31.875.000	26.990.000	84,67	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	40.141.800	40.141.800	100,00	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	23.154.400	23.154.400	100,00	
UPTD PPD Tanjung Batu					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		74.400.900	73.522.500	98,82	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	27.395.900	27.252.500	99,48	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	47.005.000	46.270.000	98,44	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		104.512.654.873	102.322.429.757	97,90	
	Persentase Peningkatan Realisasi				
	Retribusi Daerah dan PAD lainnya				
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	287.746.669	246.116.982	85,53	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	87.544.669	84.140.594	96,11	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	45.689.000	37.493.888	82,06	



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.513.000	124.482.500	80,56	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.170.708.358	70.404.507.985	98,92	
	2. Jumlah Laporan Keuangan				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi gaji dan tunjangan ASN	35.127.272.001	34.622.830.493	98,56	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	36.003.246.357	35.744.278.897	99,28	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	40.190.000	37.398.595	93,05	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	49.959.400	35.351.200	70,76	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen dan rekonsiliasi dan penyusunan barang Barang milik daerah	49.959.400	35.351.200	70,76	Terdapat realisasi yang rendah karena adanya efisiensi pada rekening Belanja Perjalanan Dinas dan makan minum rapat
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengeluaran Retribusi, Analisis Strategi dan Pengembangan Kebijakan Retribusi Daerah	368.104.600	334.290.616	90,81	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Optimalisasi	233.002.600	218.539.299	93,79	
	Pengelolaan Potensi Retribusi Daerah				
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Strategi dan Pengembangan kebijakan Retribusi daerah	135.102.000	115.751.317	85,68	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356.178.100	335.575.444	94,22	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	49.750.000	49.750.000	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	175.692.000	155.385.444	88,44	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.736.100	130.440.000	99,77	



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.983.805.809	6.575.942.242	94,16	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.801.700	44.276.000	96,67	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.469.453.280	3.442.027.000	99,21	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	112.358.184	112.243.184	99,90	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	399.096.585	382.127.000	95,75	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	1.517.010.060	1.481.713.020	97,67	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.984.000	33.416.000	98,33	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi	195.970.000	156.423.500	79,82	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	1.210.132.000	923.716.538	76,33	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	823.417.050	810.381.000	98,42	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	45.890.000	45.886.000	99,99	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor upt	777.527.050	764.495.000	98,32	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.495.344.000	11.291.267.107	98,22	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	10.500.000	10.500.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.659.544.000	2.536.770.732	95,38	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	90.000.000	90.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi pemenuhan penyediaan jasa layanan umum kantor	8.735.300.000	8.653.996.375	99,07	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.777.297.535	6.673.602.987	98,47	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau	1.004.451.574	971.411.500	96,71	



an Dinas Operasi onal atau Lapangan	Lapangan				
Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	453.870.000	395.607.580	87,16	
Pemeliharaan/Rehabi litas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehab ilitasi sarana dan prasanran gedung kantor	5.318.975.961	5.306.583.907	99,77	
UPTD PPD Batam Centre					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	575.703.800	538.002.400	93,45	
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.078.800	7.115.000	88,07	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor	54.000.000	54.000.000	100,00	
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	38.895.000	33.913.300	87,19	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	186.145.000	176.033.000	94,57	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	269.895.000	250.014.100	92,63	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Frekuensi pemehuan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.000.000	5.064.000	84,40	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	1.000.000	1.000.000	100,00	
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	11.690.000	10.863.000	92,93	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.776.000	52.657.496	91,14	
Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.776.000	50.657.496	90,82	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.987.400	171.303.400	97,34	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	152.451.400	149.381.400	97,99	



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	23.536.000	21.922.000	93,14	
UPTD PPD Tanjungpinang					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.854.600	179.092.673	96,36	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.341.400	4.200.000	96,74	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	31.652.000	27.818.000	87,89	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	54.635.200	53.286.673	97,53	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	21.436.000	21.007.000	98,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	4.500.000	4.500.000	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	66.290.000	65.281.000	98,48	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.395.472	222.125.735	93,96	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.750.000	1.750.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	234.645.472	220.375.735	93,92	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.933.000	368.381.250	99,85	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	225.090.000	225.090.000	100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	11.843.000	11.415.000	96,39	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan	132.000.000	131.876.250	99,91	
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana gedung kantor				
UPTD PPD Bintan					



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.061.146	138.084.220	95,85	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.721.500	2.721.500	100,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	10.212.546	10.212.546	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	41.212.600	38.498.974	93,42	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	6.135.000	6.083.000	99,15	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.368.000	3.672.000	84,07	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi	7.822.000	7.424.000	94,91	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	71.589.500	69.472.200	97,04	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.417.750	102.002.930	77,03	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sum ber daya air dan listrik	130.417.750	100.002.930	76,68	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.460.000	332.030.930	99,27	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	124.280.000	123.420.850	99,31	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	31.880.000	31.610.000	99,15	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	178.300.000	177.000.080	99,27	
UPTD PPD Karimun					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.493.400	240.845.055	98,11	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9.907.400	9.822.000	99,14	



Bangunan Kantor	Bangunan Kantor				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	24.287.000	97,15	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	57.855.500	57.661.055	99,66	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	20.037.500	19.780.000	98,71	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.918.000	7.250.000	91,56	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	3.075.000	2.450.000	79,67	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	121.700.000	119.595.000	98,27	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.277.085	223.275.245	70,15	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.260.000	2.260.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	316.017.085	221.015.245	69,94	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.271.144	227.061.000	99,04	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	74.220.000	73.020.000	98,38	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	26.060.000	26.016.000	99,83	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	128.991.144	128.025.000	99,25	
UPTD PPD Lingga					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.150.800	348.149.747	94,82	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.895.500	6.456.000	93,63	



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	5.121.500	4.856.215	94,82	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	46.560.000	45.064.500	96,79	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetakan dan Penggandaan	110.869.800	97.003.200	87,49	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	2.900.000	2.900.000	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	194.804.000	191.869.832	98,49	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.172.000	56.185.673	65,20	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.172.000	55.185.673	64,79	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	174.625.915	149.371.623	85,54	
Urusan Pemerintahan Daerah	Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	51.200.000	42.289.000	82,60	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	32.204.000	15.890.000	49,34	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	91.221.915	91.192.623	99,97	
UPTD PPD Natuna					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.995.000	256.005.132	74,42	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.196.300	3.196.300	100,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	13.524.800	12.718.400	94,04	



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	22.876.900	21.114.800	92,30	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	67.375.000	41.226.500	61,19	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	237.022.000	177.749.132	74,99	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.560.000	56.229.857	68,94	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.560.000	54.229.857	68,16	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.690.000	176.518.000	82,60	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	72.340.000	72.318.000	99,97	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	14.350.000	13.800.000	96,17	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	127.000.000	90.400.000	71,18	
UPTD PPD Anambas					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.232.000	196.102.641	99,93	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.659.400	8.643.300	99,81	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	10.398.400	10.391.800	99,94	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	21.650.200	21.608.141	99,81	



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi penga daan barang Cetak dan Penggandaan	20.808.000	20.751.900	99,73	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ranPerundang-undangan	Frekuensi peme huhan Bahan Bacaan dan Pera turan Perundang undangan	1.200.000	1.200.000	100,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	3.840.000	3.840.000	100,00	
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	129.676.000	129.667.500	99,99	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.036.000	72.344.505	93,91	
Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.536.000	70.844.505	93,79	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.690.000	97.591.000	89,79	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	10.710.000	10.706.000	99,96	
Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	3.980.000	3.950.000	99,25	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasanran gedung kantor	94.000.000	82.935.000	88,23	
UPTD PPD Batu Aji					
Administrasi UmumPerangkat Daerah	Jumlah Pemenu han Administra si Umum Perang kat Daerah	517.288.400	466.289.905	90,14	
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Frekuensi peme nuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.438.000	3.438.000	100,00	
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	56.843.000	54.611.000	96,07	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100.931.000	97.136.905	96,24	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	268.626.400	232.482.000	86,54	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemehuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.632.000	1.560.000	95,59	



Facilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	1.610.000	1.610.000	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	84.208.000	75.452.000	89,60	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.310.000	140.089.818	75,19	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.750.000	1.750.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	184.560.000	138.339.818	74,96	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.610.000	151.403.250	99,86	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	47.630.000	47.423.250	99,57	
Dinas Operasional atau Lapangan					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.980.000	4.980.000	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	99.000.000	99.000.000	100,00	
UPTD PPD Kijang					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.200.500	126.643.700	95,80	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.495.200	4.494.200	99,98	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	58.121.300	52.824.500	90,89	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Cetak dan Penggandaan	8.375.000	8.375.000	100,00	
Facilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.800.000	93,33	



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	53.209.000	53.150.000	99,89	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.000.000	60.000.000	81,08	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000	58.000.000	80,56	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.614.000	160.530.000	99,95	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	77.410.000	77.326.000	99,89	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	17.204.000	17.204.000	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	66.000.000	66.000.000	100,00	
UPTD PPD Tanjung Batu					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.077.540	162.043.467	91,51	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.955.800	2.949.400	99,78	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	4.565.700	3.748.400	82,10	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	25.566.640	24.388.623	95,39	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	22.947.400	22.750.000	99,14	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	2.197.500	97,67	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi	1.704.000	1.560.000	91,55	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	117.088.000	104.449.544	89,21	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.315.400	33.540.942	97,74	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.583.400	1.580.000	99,79	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.732.000	31.960.942	97,64	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	112.895.000	112.752.600	99,87	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	38.990.000	38.982.600	99,98	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	5.005.000	4.870.000	97,30	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	68.900.000	68.900.000	100,00	

37. Kepegawaian

Unsur Penunjang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri. Alokasi anggaran untuk Urusan Kepegawaian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 17.298.026.280,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 16.496.155.641,00 atau sebesar (95,36%), pada Unsur Penunjang Kepegawaian tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.37
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kepegawaian		17.298.026.280,00	16.496.155.641,00	95,36	
Program Kepegawaian Daerah		2.251.425.310,00	1.969.306.624,00	87,47	
	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan				
	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi				
	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik				



5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan ASN	351.709.260,00	316.815.733,00	90,08	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tersedianya Jumlah Dokumen Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	184.228.460,00	163.882.985,00	88,96	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Tersedianya Jumlah SK Pemberhentian ASN	42.449.000,00	38.334.816,00	90,31	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Tersedianya Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	50.000.000,00	46.484.498,00	92,97	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	46.803.500,00	42.045.120,00	89,83	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian (Pelayanan Administrasi Kepegawaian bagi ASN, Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, dan kenaikan Gaji Berkala)	28.228.300,00	26.068.314,00	92,35	
5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang di mutasikan di promosikan sesuai kualifikasi	919.137.000,00	740.192.355,00	80,53	
Pengelolaan Mutasi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi ASN	478.760.500,00	341.420.502,00	71,31	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Tersedianya Pegawai difasilitasi Kenaikan Pangkatnya	126.667.200,00	114.503.366,00	90,40	
	Tersedianya ASN yang Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah				
Pengelolaan Promosi ASN	Tersedianya ASN yang difasilitasi Promosinya	313.709.300,00	284.268.487,00	90,62	
5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Pegawai yang dinilai kompetensinya	674.185.100,00	634.748.364,00	94,15	
Pengelolaan Assessment Center	Tersedianya Dokumen Profil Pemetaan Kompetensi Pegawai	399.705.000,00	369.053.991,00	92,33	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tersedianya Jumlah ASN yang difasilitasi Mengikuti Lanjutan Pendidikan	199.992.100,00	198.067.656,00	99,04	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tersedianya Jumlah Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional	74.488.000,00	67.626.717,00	90,79	
5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai yang dievaluasi kinerjanya	306.393.950,00	277.550.172,00	90,59	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.063.750,00	90.167.643,00	91,95	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Tersedianya Jumlah Pegawai yang diberikan penghargaan	133.807.000,00	126.009.325,00	94,17	



Pembinaan Disiplin ASN	Tersedianya Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN	74.523.200,00 15.046.600.970,00	61.373.204,00 14.526.849.017,00	82,35 96,55	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi	151.152.800,00	121.831.987,00	80,60	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	151.152.800,00	121.831.987,00	80,60	
5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai serata Administrasi melaksanakan Tugas	12.401.550.463,00	12.086.383.105,00	97,46	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.951.488.463,00	11.646.649.555,00	97,45	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi Pelaksanaan tugas	450.062.000,00	439.733.550,00	97,71	
5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian	35.000.000,00	15.900.000,00	45,43	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	15.900.000,00	45,43	
5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga, Perlengkapan Kantor dan Logistik	1.084.417.207,00	1.039.335.712,00	95,84	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.781.600,00	12.295.000,00	83,18	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.396.869,00	191.918.655,00	97,72	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor	27.735.100,00	26.788.000,00	96,59	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	88.212.638,00	75.219.884,00	85,27	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.835.000,00	20.360.000,00	81,98	

Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	122.536.000,00	105.890.800,00	86,42	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	594.879.000,00	591.922.373,00	99,50	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	15.041.000,00	14.941.000,00	99,34	
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya a Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	932.252.500,00	909.517.063,00	97,56	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.460.000,00	24.260.000,00	91,69	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	33.780.000,00	30.043.438,00	88,94	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000,00	46.812.000,00	97,53	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.012.500,00	808.401.625,00	98,11	
5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	442.228.000,00	353.881.150,00	80,02	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	418.678.000,00	332.761.150,00	79,48	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	23.550.000,00	21.120.000,00	89,68	

38. Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Penunjang Pendidikan Dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Alokasi anggaran untuk Urusan Pendidikan Dan pelatihan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 10.958.529.203,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 10.741.898.804,00 atau sebesar (98,02%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 94,38%. Jumlah indikator program pada Unsur Penunjang Pendidikan Dan pelatihan sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian semua Indikator program memiliki

kategori sangat tinggi, Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Unsur Penunjang Pendidikan Dan pelatihan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.01.38

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pendidikan dan Pelatihan		10.958.529.203,00	10.741.898.804,00	98,02	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	500.778.684,00	443.804.437,00	88,62	semula
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Teknisnya	164.043.000,00	152.794.324,00	93,14	
Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah ASN yang Mengikuti	164.043.000,00	152.794.324,00	93,14	
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengembangan Kompetensi (Banyaknya ASN yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)				
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsional nya	336.735.684,00	291.010.113,00	86,42	
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Jumlah Tenaga Pengembang yang Mengikuti Kompetensi)	66.796.684,00	52.490.260,00	78,58	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	269.939.000,00	238.519.853,00	88,36	



Kepemimpinan, dan Prajabatan	Fungsional, Kepemimpinan,				
	dan Prajabatan (Banyaknya ASN yang mengikuti Peningkatan Kompetensi)				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	10.457.750.519,00	10.298.094.367,00	98,47	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSPDM	5.218.000	4.518.000	86,58	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan BPSPDM yang disusun)	5.218.000,00	4.518.000,00	86,58	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	#####	#####	99,35	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	8.680.919.827,00	8.623.326.701,00	99,34	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Menerima Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pejabat Pengadaan	164.994.000	164.928.000	99,96	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik	680.565.257,00	600.105.141,00	88,18	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.110.000	5.110.000	100,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	181.589.300,00	166.819.900,00	91,87	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.297.000	3.297.000	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.807.957,00	58.139.332,00	95,61	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	52.670.000	51.000.000	96,83	



Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	28.500.000,00	28.051.500,00	98,43	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.591.000	287.687.409	82,53	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.484.935,00	243.205.300,00	96,32	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	252.484.935	243.205.300	96,32	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor	593.080.000,00	581.635.325,00	98,07	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL yang Menerima Honorarium Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.080.000	581.635.325	98,07	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM	80.488.500,00	80.375.900,00	99,86	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59.180.000	59.067.400	99,81	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21.308.500,00	21.308.500,00	100,00	

39. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian Dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Penelitian Dan Pengembangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.718.898.693,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 1.403.397.562,00 atau sebesar (81,65%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 119,69%. Jumlah indikator program pada urusan Penelitian Dan Pengembangan sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian semua Indikator program memiliki kategori sangat tinggi, Selengkapny pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut

rekomendasi DPRD pada urusan Penelitian Dan Pengembangan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.01.39
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Penelitian dan Pengembangan		1.718.898.693,00	1.403.397.562,00	81,65	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kemitraan	1.718.898.693,00	1.403.397.562,00	81,65	
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	343.525.000,00	280.056.800,00	81,52	
Fasilitasi,	Jumlah Fasilitasi Tim	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	Kebijakan
Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Pengorganisasian Kemitraan				
Pengelolaan Data Kemitraan dan Peraturan	Jumlah Fasilitasi Agenda Kemitraan	312.341.000,00	257.751.800,00	82,52	
	Terdokumentasinya hasil-hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Instansi Kemitraan di Provinsi Kepri				
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kajian Isu Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	29.834.000,00	20.955.000,00	70,24	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan	1.021.252.900,00	850.263.750,00	83,26	



Pembangunan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas				
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	395.000.000,00	326.415.280,00	82,64	
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Kajian Pemetaan Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) Provinsi Kepulauan Riau	325.752.900,00	284.327.550,00	87,28	
Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Eksemplar	300.500.000,00	239.520.920,00	79,71	
Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepri				
	Jumlah terbitan Eksemplar Buletin				
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi penerapan inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah yang terlaksana	354.120.793,00	273.077.012,00	77,11	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan Bidang Teknologi dan Inovasi	Tersedianya Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepri	140.430.449,00	116.985.317,00	83,30	
	Tersedianya Dokumen Jejaring Kelitbang dan Inovasi Provinsi Kepulauan Riau				
	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Provinsi Kepulauan Riau				
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	137.650.700,00	92.211.053,00	66,99	

	ditin daklanjutise-Provinsi KepulauanRiau				
	Terlaksananya Coaching DiseminasiJenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahyang Bersifat Inovatifyang ditindaklanj uti se-Provinsi KepulauanRiau				
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Data dan Informasi HAKI yang ditindak lanjuti se- Provinsi Kepulauan Riau (7 Kabupaten/Kota)	76.039.644,00	63.880.642,00	84,01	

40. Pengelolaan Perbatasan

Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Alokasi anggaran untuk Urusan Pengelolaan Perbatasan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 7.170.895.320,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 6.929.890.136,00 atau sebesar (96,64%), pada urusan penunjang Pengelolaan Perbatasan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.40
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang
Pengelolaan Perbatasan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan,Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pengelola an Perbatasa n		7.170.895.320,00	6.929.890.136,00	96,64	
Program PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.593.639.031,00	6.401.319.978,00	97,08	
Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.186.827.344,00	5.031.102.687,00	97,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4.952.236.844,00	4.801.784.687,00	96,96	



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.590.500,00	229.318.000,00	97,75	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.818.897,00	619.949.321,00	99,06	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.027.500,00	23.924.500,00	99,57	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.549.100,00	44.608.775,00	93,82	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.917.200,00	49.762.000,00	99,69	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.500.000,00	19.360.000,00	99,28	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitas Kunjungan Tamu	24.007.567,00	23.354.000,00	97,28	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.817.530,00	458.940.046,00	99,59	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.342.790,00	481.703.470,00	94,02	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebelir kantor yang diadakan	67.986.200,00	66.895.500,00	98,40	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	444.356.590,00	414.807.970,00	93,35	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.650.000,00	220.564.500,00	99,96	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	35.997.000,00	99,99	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.650.000,00	180.567.500,00	99,95	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	577.256.289,00	528.570.158,00	91,57	
Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelesaian Kerjasama, Renduk dan Renaksi Kawasan Perbatasan	194.516.489,00	170.632.292,00	87,72	
5.06.02.1.01.01 Koordinasi Integrasi	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi,	60.786.789,00	53.919.313,00	88,70	
dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				intergrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Penyusunan Renduk dan Renaksi Kawasan Perbatasan	133.729.700,00	116.712.979,00	87,28	Belum terintegrasinya usulan program/kegiatan pembangunan kawasan perbatasan
Pelaksanaan Kewilayah an Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayah an Perbatasan	210.310.600,00	193.238.493,00	91,88	
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perbatasan	138.310.600,00	126.704.018,00	91,61	Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dan sumberdaya di perbatasan LOKPRI di Provinsi Kepri
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	24.000.000,00	21.826.133,00	90,94	Belum adanya data yang komprehensif pemanfaatan kawasan perbatasan
Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Pulau Terluar yang Terfasilitasi Serta Penyusunan Kajian	24.000.000,00	22.538.210,00	93,91	Belum terpeliharanya batas wilayah negara secara komprehensif
Pembangunan Kawasan Perbatasan					
Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya,	Jumlah Dokumen Kajian Lokpri dan Pulau Kecil Terluar	24.000.000,00	22.170.132,00	92,38	



Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan					
Monitoring dan Evaluasi	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan Kawasan Perbatasan	172.429.200,00	164.699.373,00	95,52	
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	112.500.200,00	110.455.242,00	98,18	
dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				intergrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Penyusunan Renduk dan Renaksi Kawasan Perbatasan	133.729.700,00	116.712.979,00	87,28	Belum terintegrasinya usulan program/kegiatan pembangunan kawasan perbatasan
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	210.310.600,00	193.238.493,00	91,88	
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perbatasan	138.310.600,00	126.704.018,00	91,61	Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dan sumberdaya di perbatasan LOKPRI di Provinsi Kepri
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	24.000.000,00	21.826.133,00	90,94	Belum adanya data yang komprehensif pemanfaatan kawasan perbatasan
Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Pulau Terluar yang Terfasilitasi Serta Penyusunan Kajian	24.000.000,00	22.538.210,00	93,91	Belum terpeliharanya batas wilayah negara secara komprehensif
Pembangunan Kawasan Perbatasan					
Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Kajian Lokpri dan Pulau Kecil Terluar	24.000.000,00	22.170.132,00	92,38	

Monitoring dan Evaluasi	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan Kawasan Perbatasan	172.429.200,00	164.699.373,00	95,52	
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	112.500.200,00	110.455.242,00	98,18	

41. Badan Penghubung

Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung Penghubung dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah. Alokasi anggaran untuk Unsur Penunjang Penghubung pada tahun anggaran 2022 sebesar 5.469.035.519,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 5.296.945.145,00 atau sebesar (96,85%), pada Unsur Penunjang Penghubung tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.41
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang
Badan Penghubung Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Penghubung		5.469.035.519,00	5.296.945.145,00	96,85	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	3.572.530.032,00	3.504.717.561,00	98,10	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.325.900,00	16.891.634,00	97,49	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.325.900,00	16.891.634,00	97,49	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	2.505.729.517,00	2.469.230.531,00	98,53	



	tepat waktu				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.359.009.517,00	2.324.550.531,00	98,53	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.720.000,00	144.680.000,00	98,60	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.425.213,00	118.278.713,00	90,69	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	130.425.213,00	118.278.713,00	90,69	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.884.000,00	825.982.883,00	97,99	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	74.000.000,00	58.299.883,00	78,78	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	26.464.000,00	26.233.500,00	99,12	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	742.420.000,00	741.449.500,00	99,86	
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	1.896.505.487,00	1.792.227.584,00	94,50	
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi Pelaksanaa nPelayanan Penghubun g	1.896.505.487,00	1.792.227.584,00	94,50	
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan HasilPelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.024.199.067,00	1.022.470.086,00	99,83	
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan HasilPromosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	262.545.471,00	262.271.600,00	99,89	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	609.760.949,00	507.485.898,00	83,22	
--	---	----------------	----------------	-------	--

42. Pengawasan

Unsur Penunjang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran untuk Unsur Penunjang Pengawasan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 35.570.262.514,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 34.338.307.888,56 atau sebesar (96,54%), pada urusan Pengawasan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.42
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Pengawasan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Unsur Pengawasan					
Inspektorat Daerah		35.570.262.514,00	34.338.307.888,56	96,54	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		2.040.188.414,00	1.960.025.291,00	96,07	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %				
	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%				belum adanya penetapan sanksi bagi wajib lapor yang tidak melakukan pelaporan
	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau				pelaksanaan MCP KPK tidak terdapat penunjukan penanggungjawab yang jelas yang
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas				
	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan	943.431.216,00	917.882.099,00	97,29	



Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis bidang pengawasan yang ditetapkan	359.986.016,00	357.209.949,00	99,23	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang ditetapkan	583.445.200,00	560.672.150,00	96,10	
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan dan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	1.096.757.198,00	1.042.143.192,00	95,02	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang dilaksanakan	509.902.548,00	505.073.698,00	99,05	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	112.959.500,00	100.979.233,00	89,39	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	258.777.050,00	229.779.700,00	88,79	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	215.118.100,00	206.310.561,00	95,91	
Program Penyelenggaraan Pengawasan		5.482.688.964,00	4.970.520.193,00	90,66	
	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Hasil Pemeriksaan Inspektorat				
	Persentase Tindakan lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK				
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan				
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas				
	Rata-Rata Nilai Peer Review Antar Rban				
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang diterbitkan sesuai standar audit	3.652.166.048,00	3.503.704.861,00	95,93	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang diterbitkan	764.474.948,00	677.604.046,00	88,64	



Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang diterbitkan	706.685.000,00	667.320.128,00	94,43	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	16.874.200,00	16.779.540,00	99,44	
	Kinerja yang diterbitkan				
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang diterbitkan	127.135.000,00	126.200.928,00	99,27	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten / Kota	Jumlah Kab/ Kota yang di awasi	235.050.600,00	235.027.080,00	99,99	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama pengawasan internal yang diselenggarakan	1.250.000.000,00	1.229.113.184,00	98,33	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monev TLHP BPK dan APIP	551.946.300,00	551.659.955,00	99,95	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan	1.830.522.916,00	1.466.815.332,00	80,13	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	51.339.000,00	42.692.430,00	83,16	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan	1.779.183.916,00	1.424.122.902,00	80,04	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		28.047.385.136,00	27.407.762.404,56	97,72	
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD				
	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				
	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen perencanaan (sesuai urusan SKPD)	160.795.700,00	160.476.900,00	99,80	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	67.297.200,00	67.006.600,00	99,57	



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	93.498.500,00	93.470.300,00	99,97	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan hak keuangan ASN	20.388.574.996,00	20.129.146.177,00	98,73	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19.954.474.996,00	19.720.728.177,00	98,83	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	434.100.000,00	408.418.000,00	94,08	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	975.939.500,00	885.798.554,00	90,76	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	122.652.500,00	100.251.220,00	81,74	
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN Yang mengikuti Diklat	853.287.000,00	785.547.334,00	92,06	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	4.836.700.396,00	4.560.930.738,20	94,30	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100.986.000,00	99.642.500,00	98,67	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan	1.378.504.176,00	1.360.870.199,20	98,72	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60.800.000,00	48.000.000,00	78,95	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	635.657.480,00	624.585.500,00	98,26	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	337.232.600,00	331.557.503,00	98,32	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantoryang dibutuhkan	14.007.900,00	14.007.900,00	100,00	
Penyelenggaraa nRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.309.512.240,00	2.082.267.136,00	90,16	
Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang pemerintahan daerah	724.494.100,00	723.450.000,00	99,86	
Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.494.100,00	723.450.000,00	99,86	



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya barangmilik daerah	960.880.444,00	947.960.035,36	98,66	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	706.912.100,00	698.870.650,00	98,86	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	100.834.600,00	97.157.000,00	96,35	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	153.133.744,00	151.932.385,36	99,22	

43. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Alokasi anggaran untuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 35.248.085.092,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 34.678.892.795,00 atau sebesar (98,39%), pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.43
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Unsur Pemerintahan Umum		35.248.085.092,00	34.678.892.795,00	98,39	
Kesatuan Bangsa dan Politik		35.248.085.092,00	34.678.892.795,00	98,39	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	468.348.000,00	432.037.327,00	92,25	
8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila	468.348.000,00	432.037.327,00	92,25	



dan Karakter Kebangsaan	dan Karakter Kebangsaan				
8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	329.319.000,00	300.946.200,00	91,38	
	Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
	Jumlah Peserta Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan				
8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	139.029.000,00	131.091.127,00	94,29	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	308.985.100,00	307.042.737,00	99,37	
8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	308.985.100,00	307.042.737,00	99,37	
8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	93.987.400,00	93.986.400,00	100,00	
8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan aliran	90.934.000,00	90.817.681,00	99,87	
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kepercayaan di Provinsi Kepri				



8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi, sosial budaya, penyalahgunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama	124.063.700,00	122.238.656,00	98,53	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	15.740.898.980,00	15.710.226.114,00	99,81	
8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	15.740.898.980,00	15.710.226.114,00	99,81	
8.01.06.1.01. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama	Tersusunnya Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Kewaspadaan Dini	172.333.900,00	159.179.845,00	92,37	
8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Deseminasi pencegahan Kewaspadaan Dini serta penanganan Konflik Sosial di Daerah	96.881.000,00	91.511.800,00	94,46	
8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Persentase Hibah FKPD Provinsi Kepulauan Riau	13.761.522.880,00	13.760.889.600,00	100,00	
		155.516.000,00	145.252.669,00	93,40	
8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rapat Koordinasi Forkopimda	1.554.645.200,00	1.553.392.200,00	99,92	



Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	2.918.771.240,00	2.917.066.314,00	99,94	
8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan dan Lembaga Politik	2.918.771.240,00	2.917.066.314,00	99,94	
8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Kewaspadaan Dini serta penanganan Konflik di Daerah	123.159.000,00	121.766.400,00	98,87	
8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis Pengajuan Bantuan Keuangan Partai	70.000.000,00	69.968.225,00	99,95	
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik yang terlaksana				
8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rapat Kerja Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	2.725.612.240,00	2.725.331.689,00	99,99	



Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	5.686.063.996,00	5.466.202.296,00	96,13	
8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang ormas	5.686.063.996,00	5.466.202.296,00	96,13	
8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Terlaksananya pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan kebijakan/regulasi	129.832.257,00	128.581.857,00	99,04	
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
8.01.04.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Verifikasi Data Ormas dan LSM Penerima bantuan	121.031.739,00	121.031.739,00	100,00	
8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Hibah Ormas yang Terealisasi	5.435.200.000,00	5.216.588.700,00	95,98	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	10.125.017.776,00	9.846.318.007,00	97,25	
8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.921.409,00	304.744.922,00	97,70	
8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Badan Kesbangpol	181.021.359,00	175.448.334,00	96,92	
8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP dan SAKIP yang akuntabel	130.900.050,00	129.296.588,00	98,78	
8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	6.877.293.270,00	6.629.283.494,00	96,39	



8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.395.287.270,00	6.155.169.494,00	96,25	
8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	482.006.000,00	474.114.000,00	98,36	
8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1.053.983.481,00	1.045.837.732,00	99,23	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	frekuensi Bahan Logistik Kantor	73.038.134,00	71.017.967,00	97,23	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	53.372.908,00	53.113.600,00	99,51	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi makan dan minum kunjungan tamu	15.870.000,00	15.802.000,00	99,57	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	911.702.439,00	905.904.165,00	99,36	
8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	111.818.000,00	111.704.200,00	99,90	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	111.818.000,00	111.704.200,00	99,90	
8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	1.589.463.616,00	1.574.704.859,00	99,07	
8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	53.261.660,00	53.160.000,00	99,81	
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.850.000,00	74.850.000,00	100,00	
8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.461.351.956,00	1.446.694.859,00	99,00	
8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Barang Kantor	180.538.000,00	180.042.800,00	99,73	
8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	180.538.000,00	180.042.800,00	99,73	



Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				
---	--	--	--	--	--

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perumusan masalah sebagai isu strategis tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik yang bersumber dari tiga (3) aspek penting, yaitu: (1) Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2020, (2) rumusan isu strategis berdasarkan rancangan teknokratik RPJMD tahun 2021-2026, isu global dan nasional. Sehingga dapat dirumuskan isu strategis dalam pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022, sebagai berikut ini :

1. Kualitas Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia masih menjadi permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2020. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan manusia tahun 2020 baru mencapai sebesar 75,59, sedikit meningkat dari tahun 2019 sebesar 74,55. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,34%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 6,74%. Tentunya diperlukan peningkatan kesempatan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja. Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari sebesar 5,80% pada tahun 2019 menjadi 5,92% pada tahun 2020. Indeks gini menunjukkan peningkatan dari sebesar 0,337 pada tahun 2019 menjadi 0,34 pada tahun 2020. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penduduk miskin dan indeks gini pada tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak Pandemic Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020.

2. Penurunan Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar dipengaruhi oleh dampak Pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kepri

mencapai sebesar -3,80%. Sementara itu inflasi mengalami penurunan dari sebesar 2,03% menjadi 1,18%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pada hampir semua sektor PDRB.

3. Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 tergambarkan dari persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sebesar 46,5%; persentase jalan provinsi berkondisi baik sebesar 74,51%; persentase jembatan Provinsi berkondisi baik sebesar 87,35%; dan Jumlah. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda belum terealisasi pada tahun 2020. Terkait perumahan dan kawasan permukiman, luasan kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau tersisa 399,8 Ha yang belum tertangani. Untuk Persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman baru mencapai sebesar 92,68%. Cakupan pelayanan Sanitasi yang mencakup air limbah, persampahan dan drainase pada tahun 2020 masih belum mencapai target. Cakupan persampahan baru mencapai 83,84%, cakupan air limbah baru mencapai 59,99%; dan cakupan drainase baru mencapai 45,10%.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan perlu ada peningkatan, dapat dilihat dari Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) sebesar 71,43%, Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 96,16%, Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas 9,67%, Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis 85,71%, Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara 75%, Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut 97,06%, dan Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut 77,78%.

4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pencapaian tata kelola pemerintahan ditunjukkan dengan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri baru mencapai 65,83 pada tahun 2019. Pencapaian reformasi birokrasi didukung beberapa indikator seperti Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 82,89%, Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP, dan Nilai Keterbukaan informasi publik sebesar 114,12 pada tahun 2020.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah ” ***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.***”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
- b. Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- c. Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi guna mewujudkan visi diatas, 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa;
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

c. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 32 urusan dan unsur penunjang, dimulai dari urusan Pendidikan, Kesehatan, hingga urusan Program Rutin untuk setiap Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

a. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah;
- 2) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 3) Pengelolaan Pendidikan Khusus.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

- 2) Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
- 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)².

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan RSUD Provinsi di Tanjungpinang meliputi sebagai berikut:

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;



- 2) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
- 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
- 3) Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi;
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

a. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
- 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

b. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
- 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:



- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
- 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.

e. Program Penanganan Bencana

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- 2) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- 2) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.



c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan.

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

d. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota



- 2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

f. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

**b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

- 1) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;
- 3) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;



- 2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi.

b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan LIMBAH Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

j. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

a. Program Pengelolaan Hutan

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
- 2) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- 3) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- 4) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- 5) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- 6) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- 7) Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun

b. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:



- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.

b. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
- 2) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- 3) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi;
- 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi;
- 2) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional;
- 3) Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan;



- 4) Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas;
- 5) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 6) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.

19.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

20.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.

21.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.

22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

f. Program Pengembangan Umkm

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

b. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 3) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 4) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 5) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional;
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan program ini meliputi:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. Program Pengembangan Kebudayaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.

c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi.

e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

f. Program Pengelolaan Permuseuman

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Museum Provinsi.

26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi;
- 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi.

27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**a. Program Pengelolaan Arsip**

Kegiatan pada program ini meliputi :



- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi;
- 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi;
- 3) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota.

28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- 2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- 3) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi;
- 4) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;



2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pada program ini meliputi :

1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar;
- 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
- 2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
- 2) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

b. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;
- 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;
- 3) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri;
- 4) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

c. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.



33. PERENCANAAN

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

34. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

35. KEUANGAN

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;



- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

36. KEPEGAWAIAN

a. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi ::

- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
- 2) Mutasi dan Promosi ASN;
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN;
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

37. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pada program ini meliputi ::

- 1) Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

38. SEKRETARIAT DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD;
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran;
- 3) Peningkatan Kapasitas DPRD;



- 4) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
- 5) Fasilitasi Tugas DPRD.

39. PENGELOLAAN PERBATASAN

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pengelolaan Perbatasan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- 2) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan;
- 3) Monitoring dan Evaluasi.

40. INSPEKTORAT DAERAH

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pendampingan dan Asistensi.

41. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.



b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

42. PENGELOLAAN PENGHUBUNG

a. Program Pelayanan Penghubung

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

43. SEKRETARIAT DAERAH

a. Program Penataan Organisasi



Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- 2) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

b. Program Pengelolaan Perbatasan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- 2) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan;
- 3) Monitoring dan Evaluasi .

c. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
- 2) Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 3) Fasilitasi Kerjasama Daerah.

d. Program Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
- 2) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
- 3) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
- 2) Fasilitasi Bantuan Hukum.

f. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
- 2) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
- 3) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.



h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

44.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Selain program-program pembangunan, setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan beberapa kegiatan penunjang sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 10)Peningkatan Pelayanan BLUD;
- 11)Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 12)Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
- 13)Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
- 14)Fasilitasi Keprotokolan;
- 15)Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
- 16)Layanan Adminstrasi DPRD.

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditekankan untuk melaksanakan SPM sebagai urusan wajib pemerintahan dengan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan, ketentuan lebih lanjut SPM bidang urusan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Kesehatan, ketentuan lebih lanjut SPM urusan kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ketentuan lebih lanjut SPM Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ketentuan lebih lanjut SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sama dengan SPM PU di atas.



5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 pada SubBidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Sosial, ketentuan lebih lanjut SPM Bidang Urusan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Selain diatur kementerian terkait, penerapan SPM juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 khususnya bagi pemerintah daerah terkait dengan struktur, mekanisme, jenis, dan mutu pelayanan yang menjadi hak warga negara.

Setiap SPM memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Peraturan Pemerintah ini maksudkan agar terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi:

- a. Dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah, menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan, menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.
- b. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur.
- c. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat.



Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik, memperjelas tugas pokok pemerintahan daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2021. Untuk menjamin pelaksanaan SPM dapat dikawal dan berjalan dengan baik maka indikator SPM dituangkan dalam indikator program RPJMD 2016-2021, yang kemudian indikator-indikator tersebut dibagikan ke Organisasi Perangkat Daerah Pengampu sesuai kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada peraturan/keputusan menteri yang membidangi masing-masing urusan. Rencana pencapaian SPM kemudian dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di provinsi Kepulauan Riau. Capaian Kinerja Makro Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,79	76,46	0,884
2	Angka Kemiskinan	6,12	6,24	1,961
3	Angka Pengangguran	9,91	8,23	- 16,953
4	Pertumbuhan Ekonomi	180.952.442,66	190.163.695,64	5,09
5	Pendapatan Per-Kapita	130,12	141,68	8,884
6	Ketimpngan Pendapatan	0,43	0.432	5,231

Sumber : Badan Statistisk Provinsi Kepulauan Riau , 2022

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana



penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

- a. Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir.
- b. Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas.
- c. Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Data IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dan 2022 yang digunakan dalam dokumen ini bersumber dari Buku Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Tabel II.1 di atas, IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, IPM Kepulauan Riau Tahun 2022 mencapai 76,46, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,888 persen dibandingkan capai tahun 2021.



2.1.2 Angka Kemiskinan

Untuk mengukur angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, digunakan data persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau adalah jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Provinsi Kepulauan Riau dikali 100 persen. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Per September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 148,89 ribu orang (6,03 persen), berkurang sebanyak 2,79 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 151,68 ribu orang (6,24 persen)

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau menggunakan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari Sistem Informasi dan Manajemen Data dasar Regional yang dikelola oleh Bappenas. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022):



- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- Pengangguran adalah (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi BPS Provinsi Kepulauan Riau, dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Nilai TPT Provinsi Kepulauan Riau per Agustus 2022 sebesar 8,23 persen turun 1,68 persen poin dibandingkan dengan tahun 2021.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, digunakan data PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Tabel II.1 menunjukkan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau secara agregat mengalami peningkatan pada tahun 2021, yakni dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022

menjadi 5,09 persen, disbanding dengan tahun 2021 sebesar 3,43 persen.

2.1.5 Pendapatan per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa proxy yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah dan yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah.

Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 308,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp. 190,16 triliun. PDRB perkapita Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 141,68 juta.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau pada 2021 dan 2022 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun.



Pada tabel II.1 diatas menunjukkan Indeks Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau per September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau diukur oleh Gini Ratuoi sebesar 0,32. Angka ini turun sebesar 0,017 poin disbanding dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,342.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
'INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	82	Dinas Pendidikan	-
		Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	-
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar	0	Dinas Pendidikan	-



	peserta didik dari Pemerintah Daerah			
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			-
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11789	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8797	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	0	Dinas Pendidikan	-



	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	653	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	3367	Dinas pendidikan	-
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2315	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	0	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	12	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	1093	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	741	Dinas Pendidikan	-



	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1342	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	829	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	105	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat	56	Dinas Pendidikan	-



		tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	7	Dinas Pendidikan	-
		Jumlah tenaga laboratorium / bengkel/ workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	11	Dinas Pendidikan	-
		Jumlah tenaga laboratorium / bengkel/ workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	868	Dinas Pendidikan	-
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	577	Dinas Pendidikan	-



	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	9	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	540	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	323	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	230	Dinas Pendidikan	-
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	23	Dinas Pendidikan	-



		Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	84	Dinas Pendidikan	-
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	43	Dinas Pendidikan	-
		Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	13	Dinas Pendidikan	-
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	59	Dinas pendidikan	-
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan	1	Dinas Kesehatan	-



		alat kesehatan (SPA) sesuai standar			
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	Dinas Kesehatan	-
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	-
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	7	Dinas Kesehatan	-
		Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	51	Dinas Kesehatan	-
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim	26	Dinas Kesehatan	-



		penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			
		Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	8	Dinas Kesehatan	-
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11	Dinas Kesehatan	-
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	26	Dinas Kesehatan	-
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang	10	Dinas Kesehatan	-



		kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	53,15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan	-
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	614500	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	804801	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	250900	Dinas PUPR & Pertanahan	-



		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	17	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-



	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Jumlah SPALD Regional	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Total kapasitas SPALD Regional	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-



	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Tidak	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	896,45	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Panjang jalan yang dibangun	10,36	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Panjang jembatan yg dibangun	329	Dinas PUPR & Pertanahan	-



	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	6,25	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	2,3	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Panjang jalan yang dipelihara	0,48	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Panjang jembatan yang dipelihara	600	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	5	Dinas PUPR & Pertanahan	-
	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1357	Dinas PUPR & Pertanahan	-



		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	145	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1	Dina PUPR & Pertanahan	-
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-



		wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya			
		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-



		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1	Dinas PUPR & Pertanahan	-
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	-



		ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ruang dan Pertanahan	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1415	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Kawasan dan Pemukiman	-



	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Kawasan dan Pemukiman	-
	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Kawasan dan Pemukiman	-
	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Kawasan dan pemukiman	-
	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas Kawasan dan Pemukiman	-
	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	1186	Dinas kawasan dan Pemukiman	-
	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset	0	Dinas Kawasan & pemukiman	-



		properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Kawasan & Pemukiman	-



		Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq 10-15$ Ha	170,54	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	23,3	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	2	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	1409	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Kawasan & Pemukiman	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum &	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	74	Satuan Pamong Praja dan	-



	Perlindungan Masyarakat			Penanggulangan Kebakaran	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1717	Satuan Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-
		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	21	SATPOL PP & Penanggulangan Kebakaran	-
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	11	SATPOL PP & Penanggulangan Kebakaran	-
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	SATPOL PP & Penanggulangan Kebakaran	-
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	12	SATPOL PP & Penanggulangan Kebakaran	-



		Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-



		Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	0	Dinas Sosial	-



	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	1	Dinas Sosial	-
	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-



	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	6	Dinas Sosial	-
	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	78	Dinas Sosial	-
	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	11	Dinas Sosial	-



	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	700	Dinas Sosial	-
	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	700	Dinas Sosial	-
	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	23	Dinas Sosial	-
	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	Dinas Sosial	-



	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	6	Dinas Sosial	-
	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	700	Dinas Sosial	-



	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	15	Dinas Sosial	-
	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial	-



	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	140	Dinas Sosial	-
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	140	Dinas Sosial	-
	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	4	Dinas Sosial	-
	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	5	Dinas Sosial	-
	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	140	Dinas Sosial	-



	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	6	Dinas Sosial	-
	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial	-



	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0	Dinas Sosial	-



	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-



	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial	-
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	11	Dinas Sosial	-



		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial	-
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	200	Dinas Sosial	-
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	200	Dinas Sosial	-
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial	-
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial	-
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	200	Dinas Sosial	-
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan	91	Dinas Sosial	-



		sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			
'INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	97,25	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	7	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	60,75	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	28,86	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase penganggur yang dilatih	0,79	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	17,85	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase penyerapan lulusan.	26,3	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase LPK yang terakreditasi	50,79	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	13,862	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Data tingkat produktivitas total.	-	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	3,58	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	7321	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	95,01	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	49,54	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	0,058	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,71	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah perselisihan kepentingan	4	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah perselisihan hak	29	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah Perselisihan PHK	73	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	129	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	8	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.		Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian	40,4	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



		Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
		Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	13	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	5552	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	8614	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	41	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	1	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	11	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.-	13	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	0	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia	27,16	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



		(TKI) yang difasilitasi keulangannya.			
		Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	16,13	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	13725	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	13584	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	13654	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	5544	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	6238	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	4	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-
		Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	13862	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-



2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	40	DP3AP2 & KB	-
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	132	DP3AP2 & KB	-
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	DP3AP2 & KB	-
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	DP3AP2 & KB	-
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DP3AP2 & KB	-



		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	31	DP3AP2 & KB	-
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	2	DP3AP2 & KB	-
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	DP3AP2 & KB	-
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	2	DP3AP2 & KB	-
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DP3AP2 & KB	-



		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	7	DP3AP2 & KB	-
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)		DP3AP2 & KB	-
3	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	DKP2 & KH	-
		Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	DKP2 & KH	-
		Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	165,53	DKP2 & KH	-
		Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0	DKP2 & KH	-



		Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	1	DKP2 & KH	-
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1	DKP2 & KH	-
		Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1	DKP2 & KH	-
		Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	1	DKP2 & KH	-
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	0	DKP2 & KH	-
		Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	0	DKP2 & KH	-
4	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	-



				ruang dan Pertanahan	
		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan	-
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan	-
		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	56,79	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-



		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,27	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	58	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
		Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	20	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	45	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-



		atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi			
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	5	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-



6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100	Dinas PMD Kependudukan dan Catatan Sipil	-
7	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	1	Dinas PMD Kependudukan dan Catatan Sipil	-
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	1	Dinas PMD Kependudukan dan Catatan Sipil	-
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1682	Dinas PMD Kependudukan dan Catatan Sipil	-



		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	44	Dinas PMD Kependudukan dan Catatan Sipil	-
8	Pengendalian Penduduk & KB	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	DP3AP2 &KB	-
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,7	DP3AP2 &KB	-
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	11,4	DP3AP2 &KB	-
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	73,8	DP3AP2 &KB	-



		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	31	DP3AP2 &KB	-
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	63,65	DP3AP2 &KB	-
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,3	DP3AP2 &KB	-
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	DP3AP2 &KB	-
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	136,07	DP3AP2 &KB	-



		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	28,57	DP3AP2 &KB	-
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	14,35	DP3AP2 &KB	-
9	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	85,36	Dinas Perhubungan	-
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi-	66,67	Dinas Perhubungan	-
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa	96,16	Dinas Perhubungan	-



		lalulintas untu jaringan jalan provinsi			
10	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	81,41	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	81,41	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



		memanfaatkan jaringan intra pemerintah-			
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 te	72,88	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	62,79	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



		sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



		terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	81,4	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	1,04	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	81,4	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
11	Koperasi, Usaha kecil & Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-



		kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3,65	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	11,67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-



		lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-



		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12,07	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-



		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	29,93	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	57,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-



		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	5,96	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	6,57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	30,75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,94	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	8,8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-



		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0,42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	-
12	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Kegiatan pameran penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-



		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	71	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	13972	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Laporan realisasi penanaman modal	18220916755000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	304	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	182	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
13	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	67	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-



	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kekeloporan pemuda	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-



		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	78404	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
		Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
14	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	19	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	35	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	94,74	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	82,86	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
15	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



		sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
16	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	4	Dinas Kebudayaan	-



		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	17	Dinas Kebudayaan	-
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)-	0	Dinas Kebudayaan	-
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	454	Dinas Kebudayaan	-
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,	2	Dinas Kebudayaan	-



		penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)			
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	6	Dinas Kebudayaan	-
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Kebudayaan	-
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	0	Dinas Kebudayaan	-
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	46	Dinas Kebudayaan	-



		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Kebudayaan	-
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Dinas Kebudayaan	-
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Kebudayaan	-
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Kebudayaan	-
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1	Dinas Kebudayaan	-
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	8	Dinas Kebudayaan	-



		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	32	Dinas Kebudayaan	-
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan	-
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan	-
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Kebudayaan	-
17	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	13,755	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,008	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,022	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-



	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-



		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
18	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	33,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	4,044	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,285	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-



		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-



		disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			
'INDEKS CAPAIAN URUSAN PILIHAN					
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)-	1	Dinas Keluatan dan Perikanan	-
		Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	1221	Dinas Keluatan dan Perikanan	-
		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	100	Dinas Keluatan dan Perikanan	-
		Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	314	Dinas Keluatan dan Perikanan	-
		Jumlah kapal yang terdaftar	1221	Dinas Keluatan dan Perikanan	-



		Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan-	16	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
		Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	24,44	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
		Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	20	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
		Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	364	Dinas Kelautan dan Perikanan	-



		Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan-	16	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
		Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	63	Dinas Kelautan dan Perikanan	-
		Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance)	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	-



		terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku			
		Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	55	Dinas Keluatan dan Perikanan	-
		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	25	Dinas Keluatan dan Perikanan	-
2	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	501	Dinas Pariwisata	-
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	388	Dinas Pariwisata	-
		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	827721708767	Dinas Pariwisata	-



	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	195	Dinas Pariwisata	-
	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	358	Dinas Pariwisata	-
	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	3	Dinas Pariwisata	-
	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,8	Dinas Pariwisata	-
	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	758154	Dinas Pariwisata	-
	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	10	Dinas Pariwisata	-
	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Pariwisata	-



		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	42	Dinas Pariwisata	-
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	10,02	Dinas Pariwisata	-
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	53,6	Dinas Pariwisata	-
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	4	Dinas Pariwisata	-
3	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	91	DKP2&KH	-
		Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	50	DKP2&KH	-



		Dokumen pengawasan benih yang beredar	17	DKP2&KH	-
		Prasarana pertanian yang digunakan	74,19	DKP2&KH	-
		Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	70	DKP2&KH	-
		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	0	DKP2&KH	-
		Penerbitan izin usaha pertanian	25	DKP2&KH	-
		Persentase sarana pertanian yang digunakan	100	DKP2&KH	-
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	DKP2&KH	-
		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100	DKP2&KH	-
4	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-



	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	7	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	330	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	15	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	52	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	1	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-



	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	9	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	59	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	3	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-



		Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1	Dinas Energi & SDM	-
		Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1	Dinas Energi & SDM	-
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	1	Dinas Energi & SDM	-
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	1	Dinas Energi & SDM	-
		Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	0	Dinas Energi & SDM	-



		Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0	Dinas Energi & SDM	-
		Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	2	Dinas Energi & SDM	-
		Perda/Pergub terkait IUJP	2	Dinas Energi & SDM	-
		Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	0	Dinas Energi & SDM	-
		Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0	Dinas Energi & SDM	-
		Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0	Dinas Energi & SDM	-
		SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0	Dinas Energi & SDM	-



	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	2	Dinas Energi & SDM	-
	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	2	Dinas Energi & SDM	-
	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas Energi & SDM	-
	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang	0	Dinas Energi & SDM	-



		ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi			
		Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	34	Dinas Energi & SDM	-
		Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	1448	Dinas Energi & SDM	-
6	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	10,07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-



	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	51,69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	51,69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	124	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-



	Indeks Kinerja BPSMB	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-



		dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi			
		Jumlah barang beredar yang diawasi	152	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi-	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-



		Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani			
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	13,45	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
7	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	37,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-



		izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi			
		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
8	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	-		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-		



		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	-		
--	--	--	---	--	--

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	URUSAN PEMERINTHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INDEKS CAPAIAN URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	86,837	Dinas Pendidikan	-
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang	74,765	Dinas Pendidikan	-



		disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus			
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	2,0831	Dinas Kesehatan	-
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	54,286	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Dinas Kesehatan	-
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	Dinas Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	34,713	Dinas PUPR dan Pertanahan	-
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	18,005	Dinas PUPR dan Pertanahan	-



		erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	Dinas PUPR dan Pertanahan	-
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	53,336	Dinas PUPR dan Pertanahan	-
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0		-



		Rasio kemantapan jalan	80,618	Dinas PUPR dan Pertanahan	-
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	23,76	Dinas PUPR dan Pertanahan ⁴	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-
		Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	13,662	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-



		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	91,667	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	-
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	66,667	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		Persentase penanganan pra bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-



		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-



		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	Dinas Sosial	-
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTHAN WAJIB TIDAK BEERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	57,143	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	17,847	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4366392597,905	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,	7,344	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-



		Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).			
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	16,171	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-
		Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	8,217	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,26	DP3AP2 & KB	-
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	5,3324	DP3AP2 & KB	-



		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	29,4616	DP3AP2 & KB	-
3	Pangan	Persentase cadangan pangan	11,910	DKP2 & KH	-
4	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas PUPR dan Pertanahan	-
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	Dinas PUPR dan Pertanahan	-
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	91,493	Dinas PUPR dan Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	74,13	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-



		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		Pemanfaatan data kependudukan	41,86	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	62,5	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-



		Persentase peningkatan status desa mandiri	3,468	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,53	DP3AP2 & KB	-
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	42,261	DP3AP2 & KB	-
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	26,267	DP3AP2 & KB	-
9	Pehubungan	Rasio konektivitas Provinsi	44,25	Dinas Perhubungan	-
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,47	Dinas Perhubungan	-
10	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan	85,366	Dinas Komunikasi & Informatika	-



		akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	79,602	Dinas Komunikasi & Informatika	-
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	81,03	Dinas Komunikasi & Informatika	-
11	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	46,548	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	29,948	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-



12	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	-27,135	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
12	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,491	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,123	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
		Peningkatan prestasi olahraga	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
13	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



		melakukan evaluasi pembangunan daerah			
14	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	73,407	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
15	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	60,902	Dinas Kebudayaan	-
16	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	62,02	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	-
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,87	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	-
17	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	15,67	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	-



		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	-
INDEKS CAPAIAN URUSAN PILIHAN-					
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	99,549	Dinas Kelautan & Perikanan	-
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	99	Dinas Kelautan & Perikanan	-



2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	24332,936	Dinas Pariwisata	-
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	13,637	Dinas Pariwisata	-
		Tingkat hunian akomodasi	52,23	Dinas Pariwisata	-
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,578	Dinas Pariwisata	-
3	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2049,746	DKP2 & KH	-
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	60,088	DKP2 & KH	-
4	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-



		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,356	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
5	Energi dan Sumber Daya mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ⁶	-
6	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	24,032	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	82,353	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-



		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	-	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
		Tertib Usaha	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
		Persentase kinerja realisasi pupuk	4,159	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	59,868	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	13,45	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
7	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	0,771	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-



		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-



		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
8	Transmigrasi	-	-		

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINEJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	24,131	Badan Keuangan & Aset Daerah	-
		Rasio PAD	47,148	Badan Keuangan & Aset Daerah	-
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	62,045	Badan Keuangan & Aset Daerah	-
		Opini Laporan Keuangan	10	Inspektorat Daerah	-



		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Daerah	-
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Biro Pengadaan Barang & Jasa	-
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	50,609	Biro Pengadaan Barang & Jasa	-
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	36,333	Biro Pengadaan Barang & Jasa	-
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada	266,978	Biro Pengadaan Barang & Jasa	-



		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	85,703	Badan Kepegawain Daerah & Korpri	-
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,342	Badan Kepegawain Daerah & Korpri	-
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50,657	Badan Kepegawain Daerah & Korpri	-
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,6531	Badan Keuangan & Aset Daerah	-



		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	21.6831	Badan Keuangan & Aset Daerah	-
		Assets management	4	Badan Keuangan & Aset Daerah	-
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1.0324	Badan Keuangan & Aset Daerah	-
5	Transparansi dan Partisipasi publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	96,142	Badan Keuangan & Aset Daerah	-



		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	Badan Keuangan & Aset Daerah	-
--	--	---	-----	------------------------------	---

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau .

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e-performance adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{CAPAIAN KINERJA}}{\text{TARGET}} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan penacapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{CAPAIAN KINERJA}}{\text{TARGET}} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kerja

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 12 Sasaran dan 16 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur tahun 2022. Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel II.2
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,6 %
		Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah
		Indeks Gini	0,332 indeks
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	10,10 %
		Angka Kemiskinan	6,01 %
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 indeks
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	69,77 indeks
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	76,7 indeks
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20 indeks
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,80 %
9		Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio

	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145,27 Ha
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	41,33 Rasio
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Baik	63,25 %
12	Pembinaan Keagamaan , Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indek Pembangunan Kebudayaan	62,9 Indeks

2.3.2 Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan Perbandingan Tahun Sebelumnya

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Tahun 2022 yang ditetapkan pada bulan Januari. Berikut ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

SASARAN. 1***Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi***

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terlepas dari adanya kritik yang meragukan kemampuan indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan, namun sejauh ini indikator tersebut masih dianggap sebagai alat ukur yang sederhana dan 2026 salah satunya adalah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang indikator kinerja nya mencakup pertumbuhan ekonomi, Pendapatan PerKapita dan Indeks Gini tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagai koordinator merangkum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pendukung indikator Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita dan indeks Gini tersebut , tidak lepas juga dukungan dari semua elemen baik pemerintah daerah, akademisi, industry, komunitas, dan juga media.

➤ ***Pertumbuhan Ekonomi***

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP tahun 2022. RKP sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Substansi dari dokumen RKP Tahun

2022 yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2022.

Tema RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. mudah digunakan. Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan tahun 2022, perekonomian Kepulauan Riau mengalami peningkatan didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas usaha seiring terkendalinya kasus COVID-19. Perbaikan ekonomi tersebut diperkirakan ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan peningkatan kinerja ekspor. Perbaikan konsumsi rumah tangga pada tahun ini mulai terlihat pada triwulan II seiring meredanya kasus Covid-19 yang diikuti dengan pelonggaran mobilitas masyarakat terutama pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri serta relaksasi aturan kunjungan untuk wisatawan.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010. Berikut data PDRB Provinsi kepulauan Riau Tahun 2019-2022:

Tabel II.3
PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2021, Triwulan III-2022 dan Triwulan IV-2022 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw IV-2021*	Triw III-2022*	Triw IV-2022*	Triw IV-2021*	Triw III-2022*	Triw IV-2022*
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.215,60	2.379,50	2.476,49	1.368,72	1.400,74	1.439,81
B.	Pertambangan dan Penggalian	9.615,74	9.699,36	8.546,41	6.663,97	5.498,53	5.138,69
C.	Industri Pengolahan	30.714,37	31.434,40	34.324,18	19.941,70	19.645,41	21.283,19
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	724,29	829,65	884,29	433,74	487,71	513,31
F.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	69,65	84,62	76,83	54,45	65,74	59,52
F.	Konstruksi	13.706,28	14.813,79	17.190,05	8.436,74	8.660,72	9.950,77
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.923,31	6.787,61	6.912,16	3.564,24	3.770,69	3.812,82
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.123,40	1.584,11	1.751,44	747,26	903,12	979,71
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	981,18	1.254,89	1.620,55	727,20	903,38	1.165,60
J.	Informasi dan Komunikasi	1.828,21	2.076,25	2.269,27	1.526,99	1.728,68	1.887,11
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.793,96	2.040,71	2.106,45	1.187,78	1.285,79	1.312,39

L.	Real Estat	793,65	848,86	903,43	569,83	588,50	622,55
M,N.	Jasa Perusahaan	1,85	2,16	2,60	1,57	1,62	1,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.838,08	1.654,78	1.951,10	1.116,99	937,39	1.105,20
P.	Jasa Pendidikan	997,86	1.058,44	1.106,27	553,46	567,66	585,87
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	638,76	728,83	709,58	471,04	514,44	500,00
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	114,78	186,65	202,54	73,60	107,95	116,98
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		73.080,95	77.464,62	83.033,66	47.439,27	47.068,06	50.475,37
PDRB Tahun 2021 Harga Berlaku							275.622,85
PDRB Tahun 2021 Harga Konstan							180.952,44
PDRB Tahun 2022 Harga Berlaku							308.842,68
PDRB Tahun 2022 Harga Konstan							190.163,70

Capaian kinerja dari indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.4
Capaian Kinerja indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	109

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan perkapita berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pendapatan perkapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 80,07 juta pada tahun 2022 dengan capaian realisasi sebesar 87,24 juta dan capaian kinerja sebesar 109% atau dalam **Kategori Sangat Baik**

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pendapatan perkapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2022:

Tabel II.5
Perbandingan Realisasi Indikator Pendapatan Per Kapita Tahun
2021 -2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022*
1.	PDRB Perkapita (PDRB atas Harga Konstan dalam juta rupiah)	85,43 juta rupiah	87,24 Juta rupiah
2.	(PDRB PerKapita atas Harga Berlaku dalam juta rupiah)	130,12 juta rupiah	141,68 Juta Rupiah

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau PDRB Perkapita (PDRB atas Harga Konstan dalam juta rupiah) tahun 2022 sebesar 87,24 juta rupiah meningkat 1,881 juta rupiah dari tahun 2021. Kemudian PDRB PerKapita atas Harga Berlaku dalam juta rupiah Tahun 2022 sebesar 141,68 juta rupiah juga meningkat 11,56 juta rupiah dari tahun 2021.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pendapatan perkapita Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022 berdasarkan Target RPJMD:

Tabel II.6
Perbandingan Capaian Kinerja indikator Pendapatan Per Kapita Provinsi
Kepulauan Riau dengan Target RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan Per Kapita ADHK	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	109

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisis terhadap pendapatan perkapita dibandingkan dengan target RPJMD berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja pendapatan perkapita dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar

80,07 juta pada tahun 2022 dengan capaian realisasi sebesar 87,24 juta dan capaian kinerja sebesar 109%.

Berikut disampaikan PDRB perkapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2019-2021 :

Tabel II.7

Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah), 2019-2021

kab/kota	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
Karimun	40306.70	36056.42	35971.09
Bintan	90019.69	87223.78	85712.39
Natuna	194149.33	180061.12	175680.15
Lingga	32576.60	29589.22	29520.34
Kepulauan Anambas	282934.38	235179.04	227927.17
Batam	76586.31	88970.46	90292.84
Tanjungpinang	67574.41	61397.32	60077.95

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berikut disampaikan perbandingan PDRB perkapita Kepulauan Riau dengan capaian PDRB Nasional:

Tabel II.8

**Perbandingan PDRB Perkapita Kepulauan Riau dan Nasional
2020-2022**

Komponen	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Nasional			
- PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Nasional	57,3	62,3	71,0
- PDRB Per Kapita Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	123,46	130,12	141,68
- PDRB Per Kapita Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	85,01	85,43	87,24

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 87,24 Juta rupiah lebih meningkat sebesar 16,24 juta rupiah dari capaian PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku secara nasional.

Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian akan terlihat alur keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah.

Berikut ini adalah daftar program pembangunan Daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Program pembangunan tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Program Pemasaran Pariwisata;
- g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. i. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
- j. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;



- k. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- l. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- n. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- o. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- p. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- q. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- r. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- s. Program Pengelolaan Persampahan;
- t. Program Pengelolaan Hutan;
- u. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
- v. Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- w. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- x. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- y. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- z. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- aa. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- bb. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- cc. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- dd. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- ee. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- ff. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;



- gg. Program Pengembangan Ekspor;
- hh. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- ii. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- jj. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- kk. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- ll. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- mm. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- nn. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- oo. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- pp. Program Promosi Penanaman Modal;
- qq. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- rr. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- ss. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- tt. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- uu. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- vv. Program Pengelolaan Pelayaran;
- ww. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- xx. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- yy. Program Penyuluhan Pertanian;
- zz. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- aaa. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- bbb. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- ccc. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- ddd. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
- eee. Veteriner.

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan :

1. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan bidang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

a. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro anggaran Rp. 81.299.340 realisasi anggaran Rp. 60.690.180 (74.65%) . Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sbb :

b. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah untuk mengatasi masalah perekonomian diatas, seperti :

- Mengontrol laju inflasi
- Meningkatkan pendapatan daerah
- Menjaga stabilitas perekonomian daerah
- Membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah
- Membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah



- Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat.
- Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

c. Susunan keanggotaan TPID Provinsi berdasarkan lampiran III huruf a Keputusan Mendagri RI No.500.05-8135 Tahun 2017, terdiri atas :

1. Ketua : Gubernur
2. Pelaksana Harian Tugas : Sekretaris Daerah Provinsi
3. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi
4. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi
Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi
5. Anggota: Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

d. TPID ini dibentuk dengan tugas dan kewajiban :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;



4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota; dan/atau
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat:
 - a) Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut disampaikan capaian penyerapan anggaran indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022:

Tabel II.9
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	81.299.340	60.690.180	74.65%

➤ **Indeks Gini**

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan pulau yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti oleh pemerataan pendapatan masyarakatnya. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan indeks Gini. Semakin mendekati 1 maka nilai ketimpangan

semakin besar, sebaliknya semakin mendekati 0 maka nilai ketimpangan semakin kecil. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan melalui hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan.

Capaian kinerja dari indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.10
Capaian Kinerja indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	102%

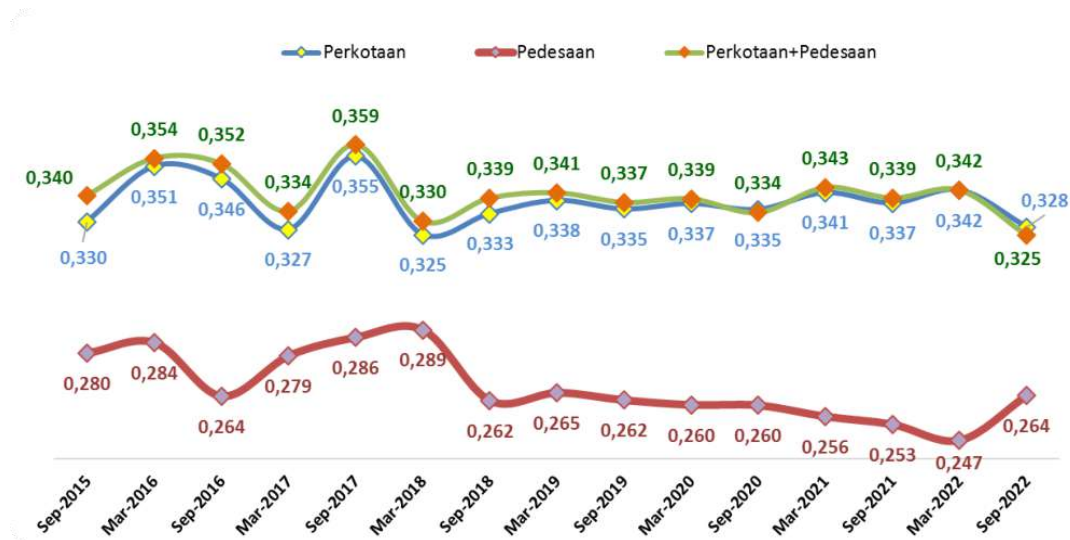
Pada September 2022 Gini Ratio tercatat sebesar 0,325, turun 0,017 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada Maret 2022 yang sebesar 0,342. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan pemerataan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode Maret 2022-September 2022. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $> 0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 0,325 September 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,253. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang.

Analisis terhadap capaian kinerja berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Indeks Gini Kepulauan Riau dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 0,332 pada tahun 2022 dengan capaian realisasi sebesar 0,325 dan capaian kinerja sebesar 102% atau dalam **Kategori Sangat Baik**.

Berdasarkan gambar 2.2 dapat dilihat tren Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret

2022-September 2022 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,014 poin yaitu dari 0,342 pada Maret 2022 menjadi 0,328 pada September 2022. Berbeda halnya dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami kenaikan pada periode Maret 2022-September 2022 yaitu sebesar 0,017 poin.

Gambar II.1



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2022:

Tabel II.11

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Gini Tahun 2021 -2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022*
1.	Indeks Gini	0,339	0,325

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar



0,325. Angka ini meningkat 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,339.

Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,325. Angka ini turun sebesar 0,017 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,342. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,328, turun 0,014 poin dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,342. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,264, naik 0,017 poin dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,247.

Selama periode Maret 2022-September 2022, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah mengindikasikan kenaikan, yaitu dari 20,02 persen pada Maret 2022 menjadi 20,53 persen pada September 2022. Berdasarkan daerah, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada periode Maret 2022-September 2022 mengalami kenaikan yaitu dari 19,94 persen pada Maret 2022 menjadi 20,39 persen pada September 2022. Kondisi yang berbeda terjadi di daerah perdesaan, dimana distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah menurun dari 24,82 persen menjadi 23,02 persen pada periode tersebut. Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,325 menurun 0,014 point dari tahun sebelumnya sebesar 0,339.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 berdasarkan Target RPJMD:

Tabel II.12
Perbandingan Capaian Kinerja indikator Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau
dengan Target RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	102%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gini Ratio Provinsi Kepri pada September 2022 tercatat sebesar 0,325, target RPJMD Tahun 2022 sebesar 0,332 lebih besar dibandingkan realisasi sebesar 0,007 point. Penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri sedikit menyempit pada periode Maret 2021 – Maret 2022 dengan capaian di tahun 2022 sebesar 102%.

Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih baik, dimana indeks gini nasional pada tahun 2022 sebesar 0,381 sedangkan indeks gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 0,325 lebih besar 0,056 dari kondisi nasional. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

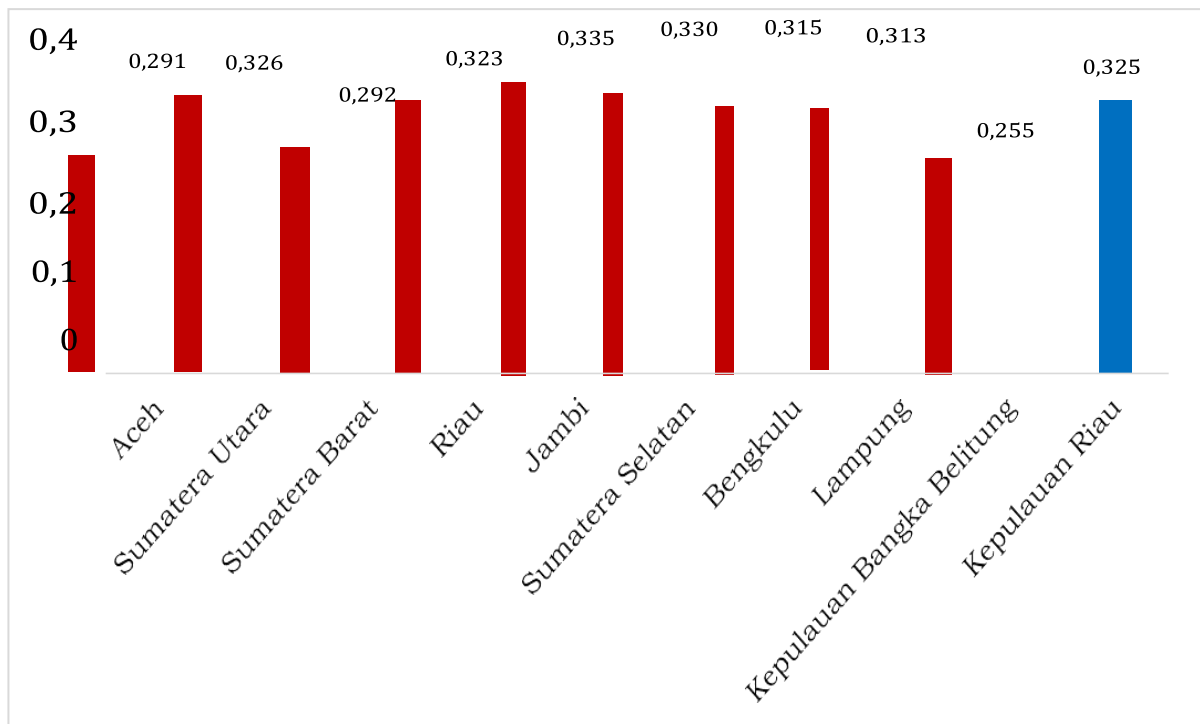
Gambar II.2
Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2022 September



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2022, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,325 pada September 2022 berada pada posisi ketujuh setelah Provinsi Riau, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.3



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian akan terlihat alur keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah.

Berikut ini adalah daftar program pembangunan Daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Program pembangunan tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang telah



ditetapkan. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Program Pemasaran Pariwisata;
- g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. i. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
- j. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- k. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- l. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- n. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- o. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- p. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- q. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- r. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- s. Program Pengelolaan Persampahan;
- t. Program Pengelolaan Hutan;



- u. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
- v. Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- w. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- x. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- y. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- z. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- aa. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- bb. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- cc. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- dd. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- ee. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- ff. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- gg. Program Pengembangan Ekspor;
- hh. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- ii. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- jj. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- kk. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- ll. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- mm. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- nn. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- oo. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- pp. Program Promosi Penanaman Modal;
- qq. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- rr. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;



- ss. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- tt. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- uu. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- vv. Program Pengelolaan Pelayaran;
- ww. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- xx. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- yy. Program Penyuluhan Pertanian;
- zz. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- aaa. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- bbb. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- ccc. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- ddd. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
- eee. Veteriner.

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan:

1. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan bidang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



3. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

4. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro anggaran Rp. 81.299.340 realisasi anggaran Rp. 60.690.180 (74.65%) . Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sbb :

- a. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah untuk mengatasi masalah perekonomian diatas, seperti :

- Mengontrol laju inflasi
- Meningkatkan pendapatan daerah
- Menjaga stabilitas perekonomian daerah
- Membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah
- Membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah
- Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat.
- Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- b. Susunan keanggotaan TPID Provinsi berdasarkan lampiran III huruf a Keputusan Mendagri RI No.500.05-8135 Tahun 2017, terdiri atas :

1. Ketua : Gubernur
2. Pelaksana Harian Tugas : Sekretaris Daerah Provinsi
3. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi
4. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
5. Anggota : Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan



daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu.

c. TPID ini dibentuk dengan tugas dan kewajiban :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota; dan/atau
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat:
 - a) Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut disampaikan capaian penyerapan anggaran indikator indeks gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022:

Tabel II.13
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	81.299.340	60.690.180	74.65%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

SASARAN. 2 **Menurunnya Angka Kemiskinan**

➤ **Angka Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan

ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran Menurunnya angka kemiskinan ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan evaluasi capaian sebagai berikut

Tabel II.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya angka Kemiskinan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Pengangguran / Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10.1	8,23	118,51

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 8,23 persen. Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT menjelaskan seberapa banyak jumlah pengangguran dalam setiap 100 angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.259.712 orang, naik 52.698 orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,67 persen poin.

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2022 adalah sebagai berikut Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah

angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja.

Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari :

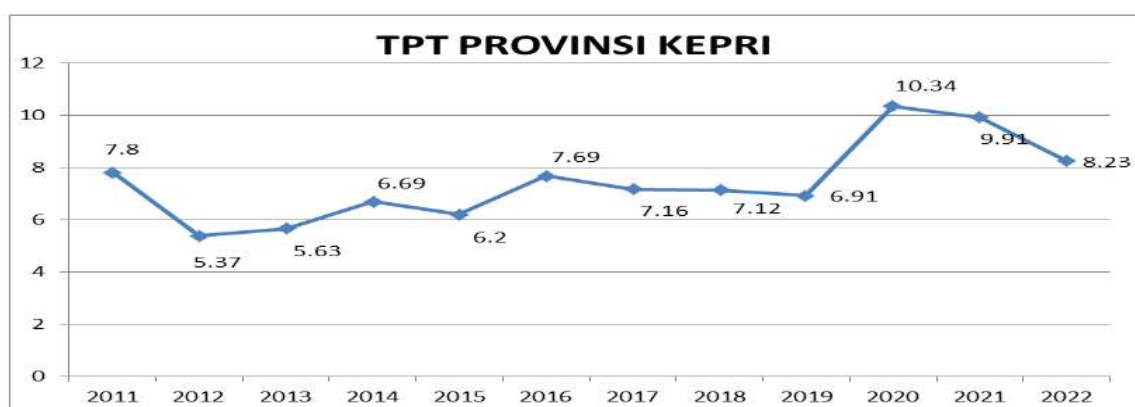
1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 103.715 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.259.712 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 8,23%.

Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 10,1 dan terealisasi sebesar 8,23 (**angka TPT semakin rendah semakin baik**) sehingga capaian kinerja adalah sebesar **118,51%** termasuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2021 adalah sebagai berikut :

Grafik II. 1
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2022



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau



Dalam Dua Belas tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,43 poin persen, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Adanya Pengaruh Covid -19 diberbagai sektor menyebabkan angka TPT Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 8,23 persen, turun 1,68 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Pada tahun 2022 masih terdapat sebanyak 29.557 orang (1,61 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2.040 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 ((3.437 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1966 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (22.114 orang)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah, TPT wilayah perkotaan cenderung berfluktuatif pada periode Tahun 2019-2022 dimana TPT perkotaan sebesar 7,79 persen sedang di pedesaan sebesar 4,51 persen. Tahun 2020 dengan kondisi Covid-19 TPT Perkotaan maupun pedesaan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,89 untuk perkotaan (naik sebesar 3,1 persen poin) dan TPT Pedesaan sebesar 5,41 (naik sebesar 0,91 persen poin) dari periode Agustus 2019. Pada Periode Agustus 2021, TPT perkotaan (10,45 persen) lebih tinggi hampir dua kali TPT di daerah

perdesaan (4,43 persen). Tahun 2022 TPT perkotaan (8,52 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (5,88 persen). TPT daerah perkotaan menurun sebesar -1,93 persen poin, sementara itu TPT daerah perdesaan meningkat sebesar 1,45 persen poin.



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 2022

Dibandingkan Agustus 2020, TPT tahun 2022 perkotaan turun sebesar -2,37 persen poin dan TPT pedesaan naik sebesar 0,47 persen poin. Namun jika dibandingkan Agustus 2021, TPT Tahun 2022 pada perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan dan kenaikan menjadi sebesar 8,52 persen poin dan 5,88 persen poin.

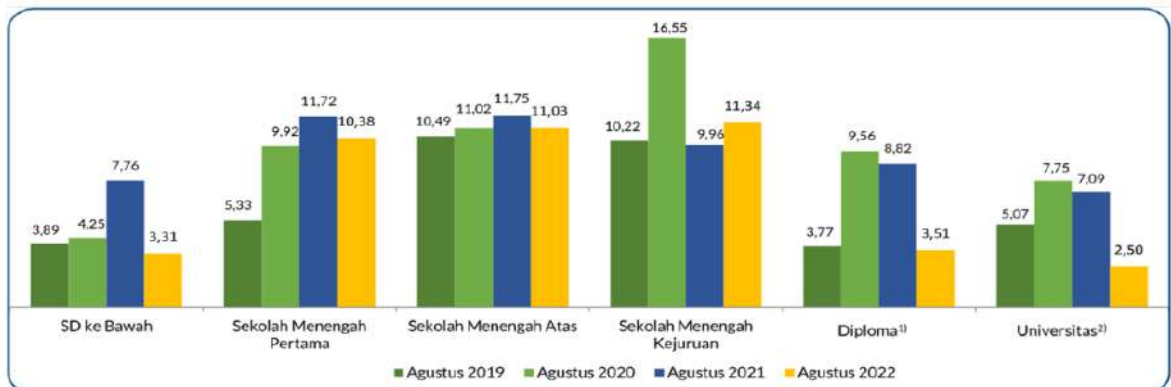
Tabel 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, 2011-2022

DAERAH	TAHUN											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	8.28	5.73	5.97	7.03	6.31	8.18	7.41	7.69	7.21	10.89	10.45	8,52
Perdesaan	5.46	3.49	3.71	4.76	5.58	4.54	5.39	2.77	3.93	5.41	4.43	5,88
TPT	7.80	5.37	5.63	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12	6.91	10.34	9.91	8,23
JENIS KELAMIN												
Laki-Laki	6.61	5.30	3.64	5.60	6.10	7.54	7.14	7.98	7.78	10.87	9.42	7,78
Perempuan	10.07	5.51	9.67	8.87	6.41	7.97	7.19	5.54	5.90	9.38	10.72	9.03
TPT	7.80	5.37	5.63	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12	6.91	10.34	9.91	8,23

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2022

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Tahun 2022, Pada Agustus TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 11,34 persen.

Grafikl II.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut tingkat Pendidikan
Tahun 2019-2022



Keterangan: ¹⁾ Diploma mencakup Diploma I/II/III
²⁾ Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan universitas yaitu sebesar 2,50 persen. Dibandingkan Agustus 2021, penurunan TPT pada Tahun 2022 terjadi pada hampir semua kategori pendidikan, dengan penurunan terbesar pada kategori tamatan universitas yaitu sebesar 4,59 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 1,38 persen poin.

TPT tertinggi kedua terdapat pada Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 11,03 persen, Dan tamatan SMP sebesar 10,38 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang kurang terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK, SMA dan SMP. Namun begitu, berdasarkan tren karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terdapat penyerapan tenaga kerja berpendidikan SD dan SMA dan Diploma Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari Tahun 2021 yaitu sebesar 23,44 poin, 7,78 persen, 1,45 persen. Dan selama proses pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 berdasarkan data

karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan kategori tamatan SMP jauh mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 18.38 menjadi 12.24, atau turun sebesar 6.14 persen poin dari tahun 2021. Berikut rincian TPT pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 :

Tabel II.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri Tahun 2022

No	Kab/ Kota	Realisasi 2022		
		Jumlah Penganggur Terbuka (Orang)	Angkatan Kerja	TPT
1	Tanjungpinang	5.829	110.559	5,27
2	Bintan	5.677	82,163	6,91
3	Batam	81.121	848.628	9,56
4	Karimun	7,496	109,039	6,87
5	Lingga	1,406	45,509	3,09
6	Natuna	1,685	40,612	4,15
7	Anambas	499	23,202	2,15
Total		103.715	1.259.712	8,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2021 terjadi di Kota Batam sebesar 11,64% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 1,27%.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini :



Tabel II.16
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri Tahun 2021-2022

No	Kab/ Kota	TPT		
		2021	2022	Perubahan 1 Tahun
1	Tanjungpinang	6,31	5,27	-1.04
2	Bintan	8,62	6,91	-1.71
3	Batam	11,64	9,56	-2,08
4	Karimun	7,20	6,87	-0,32
5	Lingga	4,23	3,09	-1.14
6	Natuna	5,15	4,15	-1.00
7	Anambas	1,27	2,15	0,88
Total		9.91	8.23	-1,68

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 maka Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari target RPJMD, di mana pada target RPJMD jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5%, sedangkan realisasi sebesar 8,23%, sehingga telah mencapai 91,13%. Perbandingan target RPJMD dengan capaian tahun 2026 disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target
RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2022	Target akhir RPJMD (2026)	%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8.23	7,50	91.13

Secara Nasional diketahui bahwa bila dibandingkan dengan 10 Provinsi lain di Sumatera, maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi

Kepulauan Riau termasuk tertinggi. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan TPT Nasional yakni 5,86%.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Agustus 2020 (persen)	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Perubahan Agt 2020-Agt 2021 (persen poin)	Perubahan Agt 2021-Agt 2022 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,59	6,30	6,17	-0,29	-0,13
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	-0,58	-0,17
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	-0,36	-0,24
Riau	6,32	4,42	4,37	-1,90	-0,05
Jambi	5,13	5,09	4,59	-0,04	-0,50
Sumatera Selatan	5,51	4,98	4,63	-0,53	-0,35
Bengkulu	4,07	3,65	3,59	-0,42	-0,06
Lampung	4,67	4,69	4,52	0,02	-0,17
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	5,03	4,77	-0,22	-0,26
Kepulauan Riau	10,34	9,91	8,23	-0,43	-1,68
DKI Jakarta	10,95	8,50	7,18	-2,45	-1,32
Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	-0,64	-1,51
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	-0,53	-0,38
D.I. Yogyakarta	4,57	4,56	4,06	-0,01	-0,50
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	-0,10	-0,25
Banten	10,64	8,98	8,09	-1,66	-0,89
Bali	5,63	5,37	4,80	-0,26	-0,57
Nusa Tenggara Barat	4,22	3,01	2,89	-1,21	-0,12
Nusa Tenggara Timur	4,28	3,77	3,54	-0,51	-0,23
Kalimantan Barat	5,81	5,82	5,11	0,01	-0,71
Kalimantan Tengah	4,58	4,53	4,26	-0,05	-0,27
Kalimantan Selatan	4,74	4,95	4,74	0,21	-0,21
Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71	-0,04	-1,12
Kalimantan Utara	4,97	4,58	4,33	-0,39	-0,25
Sulawesi Utara	7,37	7,06	6,61	-0,31	-0,45
Sulawesi Tengah	3,77	3,75	3,00	-0,02	-0,75
Sulawesi Selatan	6,31	5,72	4,51	-0,59	-1,21
Sulawesi Tenggara	4,58	3,92	3,36	-0,66	-0,56
Gorontalo	4,28	3,01	2,58	-1,27	-0,43
Sulawesi Barat	3,32	3,13	2,34	-0,19	-0,79
Maluku	7,57	6,93	6,88	-0,64	-0,05
Maluku Utara	5,15	4,71	3,98	-0,44	-0,73
Papua Barat	6,80	5,84	5,37	-0,96	-0,47
Papua	4,28	3,33	2,83	-0,95	-0,50
Indonesia	7,07	6,49	5,86	-0,58	-0,63

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh



pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya masih perlu dioptimalkan. Secara absolut, jumlah pengangguran di Kota Batam turun sekitar 81.121 orang. Sehingga, angka TPT Kota Batam menurun dari Agustus 2020 menjadi 11,64 persen pada Agustus 2021. Dari Tabel diatas dapat diketahui tingkat pengangguran terbuka Tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Kota Batam sebesar 11,64 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,15 %. Namun secara keseluruhan dapat tergambar bahwa terjadi penurunan TPT di hampir kerseluruhan kabapten/kota kecuali kepulauan Anambas yang sedikit mengalami kenaikan dari 1,27 menjadi 2.15. pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Penduduk bekerja naik sebanyak 68.578 orang dan pengangguran turun sebanyak 15.880 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta komponennya secara absolut mengalami kenaikan, namun secara kualitas indikator ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 68,94 persen mengalami kenaikan 0,67 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk usia kerja maupun sebagai penganggur. Peningkatan nilai TPAK diikuti dengan naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Demikian juga TPT berdasarkan Jenis kelamin Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 7,78 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 9,03 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021 , yaitu berturut-turut sebesar 1,64 persen poin dan 1,69 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (8,52 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (5,88 persen). TPT daerah perkotaan menurun sebesar 1,93 persen poin, sementara itu TPT daerah perdesaan meningkat sebesar 1,45 persen poin.

Adapun target yang ditetapkan dapat tercapai dikarenakan adanya kondisi perekonomian yang semakin membaik pasca berkurangnya dampak eksternal yaitu covid-19 yang secara internasional dan nasional sangat berdampak kepada perekonomian sehingga sangat berpengaruh kepada kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS Tahun 2022 secara umum permasalahan yang dihadapi perusahaan selama pandemic covid-19 berangsur membaik dimana adanya penurunan angka pengangguran yang disebabkan oleh dampak covid-19, Sementara Tidak Bekerja, karena COVID-19, Penduduk Bekerja Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19.

TPT di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan TPT tahun 2021, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 29.557 orang, mengalami penurunan sebanyak 179.949 orang atau sebesar 85,89 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari orang pengangguran karena COVID-19; 2.040 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 3.437 orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19; 1.966 orang dan 22.114 penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 128.530 orang.
2. Berdasarkan data BPS Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti



bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja. Berdasarkan table **Dampak Covid-19 terhadap penduduk Usia Kerja** penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 29.557 orang, mengalami penurunan sebanyak 179.949 orang atau sebesar 85,89 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Apabila dilihat dari komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, sebanyak 2.040 orang merupakan pengangguran karena COVID-19; 3.437 orang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19; 1.966 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan 22.114 orang penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.

Tabel 2.19
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Tahun di Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2022

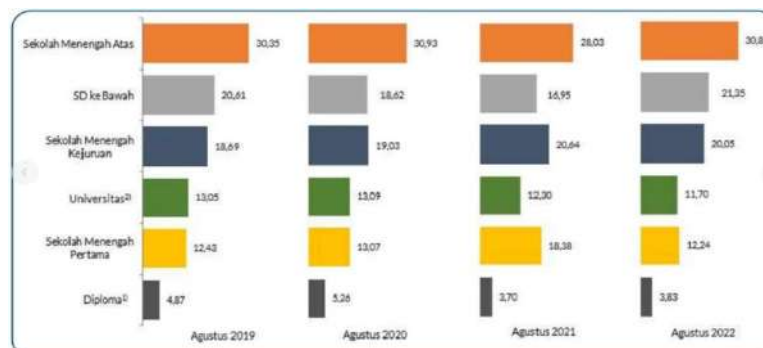
Status Keadaan ketenagakerjaan	2021		2022		Persen poin
	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubaha n 2021 - 2022	
a. Pengangguran ₂ Karena Covid-19	42.210	41275	2040	-39.235	-95,06
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	8.587	5889	3437	-2.452	-41,64
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	12.586	11.698	1966	-9732	- 83,19
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami	225.184	150.644	22.114	-128.530	- 85,32

Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19					
Total					
Penduduk Usia Kerja (PUK) terdampak covid	288.567	209.506	29.557	-179.949	-85,89
Total	1.710.594	1.767.979	1.827.295	-59.316	3,36
Persentase terhadap PUK	16,87	11,85	1,62	-10,23	1,61

Sumber : Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

3. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2022 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 356,312 orang (30,82 persen) dan Sekolah Dasar sebanyak 246,846 orang (21,35 persen). Kemudian disusul tamatan sekolah Menengah kejuruan sebesar 20,05 persen Dalam tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.155 997 orang, meningkat sebanyak 68.578 orang dari Agustus 2021.

Grafik II.3
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2019 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik prov. Kepri, Tahun 2022

4. Adanya perubahan kondisi tenaga kerja selama Tahun 2022 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut
 - a. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2022 masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 25,01 persen dan sektor Perdagangan sebesar 17,61 persen. berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2021 - Agustus 2022, lapangan pekerjaan yang



mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (43,71 persen poin) dan Jasa Pendidikan (26,70 persen poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami kenaikan utamanya pada Informasi dan Komunikasi, L Real, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (43,71) Estat (49,03persen poin) dan jasa lainnya (34,38 persen poin).

Tabel II.20
Karakteristik Penduduk Bekerja Provinsi Kepulauan Riau
menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020 –2022

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022		Perubahan Ags 2020–Ags 2022		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen poin ¹⁾	orang	persen poin ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Pekerjaan Utama										
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	91014	8,95	97868	9,00	97868	9,00	-894	-0,98	-7748	-7,92
B. Pertambangan dan Penggalian, D. Pengadaan Listrik dan Gas, E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23770	2,34	19905	1,83	19905	1,83	-8472	-35,64	-4607	-23,14
C. Industri Pengolahan	231405	22,76	271944	25,01	271944	25,01	66447	28,71	25908	9,53
F. Konstruksi	69780	6,86	72193	6,64	72193	6,64	12794	18,33	10381	14,38
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	176060	17,32	192183	17,67	192183	17,67	25149	14,28	9026	4,70
H. Transportasi dan Pergudangan	69674	6,85	65834	6,05	65834	6,05	3565	5,12	7405	11,25
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80509	7,92	81992	7,54	81992	7,54	37323	46,36	35840	43,71
J. Informasi dan Komunikasi, L Real Estat	12759	1,26	16053	1,48	16053	1,48	11165	87,51	7871	49,03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	17523	1,72	18051	1,66	18051	1,66	-274	-1,56	-802	-4,44
M,N. Jasa Perusahaan	23945	2,36	28141	2,59	28141	2,59	7046	29,43	2850	10,13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	62793	6,18	65463	6,02	65463	6,02	-3144	-5,01	-5814	-8,88
P. Jasa Pendidikan	65819	6,47	72063	6,63	72063	6,63	-12998	-19,75	-19242	-26,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24791	2,44	30449	2,80	30449	2,80	-5838	-23,55	-11496	-37,75
R,S,T,U. Jasa Lainnya	66758	6,57	55280	5,08	55280	5,08	7528	11,28	19006	34,38
Jumlah	1016600	100,00	1087419	100,00	1155997	100,00	133397	—	68578	—

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

- b. Kondisi ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota selama pandemi covid menunjukkan kurang terserapnya tenaga kerja akibat minimnya kesempatan kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2022 masih merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukan penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 2,08 persen dari



tahun 2021. Kondisi ini disebabkan beberapa peningkatan produktifitas disektor formal dan informal. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja seiring dengan meningkatnya penduduk yang bekerja disektor formal dan sektor informal dimana pada tahun 2022 pekerja di sektor formal bertambah sebesar 31.580 orang atau perubahan sebesar 4.48 persen dan sektor informal kenaikan sebesar 9,66 persen atau bertambah sebesar 36.998 dari tahun 2021.

- c. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2022 jumlahnya mencapai 916.885 (79,32 persen). Dibandingkan dengan Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,64 persen poin. Sementara itu dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) berkurang sebanyak 19.628 orang (-7,59 persen) yaitu dari 258.740 orang pada Agustus 2021 menjadi 239.112 (20,68 %) orang pada Agustus 2022. DAPAT dilihat table berikut :

Tabel II.21
Karakteristik Penduduk Bekerja
Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2021-2022

NO	Karakteristik	2021 (org)	2022 (org)	Perubahan 2021-2022	persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	828.679	916.885	88.206	10,64
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	258.740	239.112	- 19.628	-7,59

Sumber, Bursa Resmi Statistik Tahun 2022

A. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mengatasi TPT (Tingkat pengangguran terbuka), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan program dan kegiatan pelatihan berbasis inkubasi bisnis dan juga wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan serta mengembangkan model pelatihan yang ada ke arah membangun jiwa wirausaha. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan mendorong siswa SMK yang mengikuti pemagangan, sehingga ketika lulus nanti mereka siap bekerja. Diharapkan nantinya lulusan SMK maupun BLK mampu mengisi pasar kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan atas dasar permintaan, bukan penawaran. Di samping itu, untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi ibu rumah tangga untuk menjadi pelaku ekonomi
2. Meningkatkan pelatihan-pelatihan berbasis kemasyarakatan.
3. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dinas terkait.

Adapun program yang dilaksanakan di Tahun 2022 untuk mendukung kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada 2, yaitu:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan dan Produktivitas

Tabel II.22
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pendukung Target Indikator
Angka Pengangguran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Efesiensi	Ket
1	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	10,1	8,23	118,51	5,247,503,800	5,096,582,817	97,12%	Efesiensi

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Hasil analisis Sasaran Strategis menurunnya angka kemiskinan dengan indikator Angka Pengangguran Terbuka (TPT) diketahui dari target yang telah ditetapkan yakni 10,1 terealisasi sebesar 8,23 (angka TPT semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 81,48% Kinerja dalam hal ini termasuk dalam **kategori kinerja Baik**. Demikian juga realisasi anggaran yang mendukung indikator angka Pengangguran adalah **Pertama Program Pelatihan dan Produktivitas** dengan anggaran sebesar Rp. 5.182.342.800 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.045.297.449 (97,35 persen). **Kedua Program Penempatan Tenaga Kerja** Rp. 65.161.000 dengan realisasi sebesar Rp. 51,285,368 (98,71 persen). Untuk kedua program tersebut dalam pencapaian target indikator angka pengangguran sebesar Rp. 5.247.503.800 dengan realisasi Rp. 5,096,582,817 atau sebesar 97,12 persen. Realisasi anggaran tersebut termasuk kategori **Sangat Tinggi (ST)**.

2. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pembangunan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kondisi perekonomian makro, dimana pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan utama di bidang ketenagakerjaan baik menyangkut optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Masalah pokok penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi.
2. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri.

Sedangkan masalah yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Belum terpenuhinya dukungan anggaran dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan

Sedangkan permasalahan masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yaitu :

- ✓ Masih terbatasnya tempat uji kompetensi (TUK) beserta sumber daya pendukungnya.
- ✓ Belum optimalnya produktifitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.
- ✓ Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.
- ✓ Minimnya SDM fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- ✓ Sistem, mekanisme, dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.
- ✓ Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih



minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.

- ✓ Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- ✓ Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga berdampak terhadap pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan.
- ✓ Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
- ✓ Masih belum berfungsinya BLK secara maksimal.
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap lulusan BLK belum optimal terpenuhi
- ✓ Terbatasnya alokasi dana pelayanan perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada

➤ **Angka Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan

perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2022 akan dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel II.23
Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kemiskinan	6,01%	6,03%	99,67%

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (148.890 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.469.154 orang) dengan nilai persentase 6,03%.

Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dengan target 6,01% dapat tercapai sebesar 6,03% sehingga capaian kinerja sebesar 99,67% atau dalam kategori kinerja relatif **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel II.24
Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
A	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,17	0,42	250,00%
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,79	9,20	1163,80%



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
		Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	36,92	116,73%
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	KK	150	465	310,00%
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KK	60	60	100,00%
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	1.000	11.638	1163,80%
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	KK	39.996	46.686	116,73%
		Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00%
a	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	400	5.917	1479,25%



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	300	3.921	1307,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	300	1.800	600,00%
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	KK	39,996	46.686	116,73%
		Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra	lok	7	7	100,00%
b	Subkegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00%
c	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	190	380,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	125	250,00%

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	150	300,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	20	100,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	0	0,00%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	40	200,00%

Berikut Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin dari tahun 2021-2022 dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah:

Tabel II.25
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Dari Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Persentase Penduduk Miskin	5,75% (137.750 org)	6,03% (148.890 org)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu bertambah 11.140 orang atau (0,28%).



Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Kenaikan angka kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada awal September 2022 lalu. Karena harga BBM naik, ongkos produksi naik, harga barang naik, pengeluaran masyarakat naik. Kenaikan harga paling terasa pada beberapa bahan pokok, antara lain beras, daging ayam, telur ayam, cabai merah hingga minyak goreng.

Selain faktor kenaikan BBM, kenaikan angka kemiskinan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor situasi pasca pandemi Covid-19 sehingga kegiatan perekonomian belum berjalan seperti sebelumnya. Dengan demikian, penurunan pendapatan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pada lapisan bawah.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperbarui data penduduk miskin.
2. Integrasi penyaluran bansos, di banyak tempat, berbagai bentuk Bantuan Sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan basis data Bantuan Sosial, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan oleh pemerintah daerah yang belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata namun kondisi ekonominya memburuk akibat kenaikan BBM dan situasi pascapandemi Covid-19. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah ialah menggandeng bank-bank pemerintah dan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada penerima bantuan.



3. Meningkatkan anggaran bantuan sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat kenaikan BBM dan dampak situasi pasca pandemi Covid-19.
4. Meningkatkan anggaran bantuan modal usaha bagi penduduk miskin secara umum untuk meningkatkan kemandiriannya.



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)							
		Kegiatan (output)							
A	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,17	0,42	250,00%	5.643.752.928	5.596.350.933	99,16%
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,79	9,20	1163,80%			
		Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	36,92	116,73%			
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	KK	150	465	310,00%	5.643.752.928	5.596.350.933	99,16%
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KK	60	60	100,00%			



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)							
		Kegiatan (output)							
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	1.000	11.638	1163,80%			
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	KK	39.996	46.686	116,73%			
		Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00%			
a	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	400	5.917	1479,25%	2.852.554.883	2.815.991.474	98,72%
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	300	3.921	1307,00%			



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)							
		Kegiatan (output)							
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	300	1.800	600,00%			
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	KK	39,996	46.686	116,73%			
		Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra	lok	7	7	100,00%			
b	Subkegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	1	1	100,00%	277.655.103	272.322.014	98,08%
c	Subkegiatan Fasilitas Bantuan	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	190	380,00%	2.513.542.942	2.508.037.445	99,78%



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)							
		Kegiatan (output)							
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	125	250,00%			
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	50	150	300,00%			
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	20	100,00%			
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	0	0,00%			
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme Kube	KK	20	40	200,00%			

A. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas *efisiensi sumber daya biaya* dan *sumber daya manusia*. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.5.596.350.933,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.5.643.752.928,00 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0,84%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, sama halnya pada level kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya hanya 0,84%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH sebagai pendamping program untuk memastikan program berjalan dengan baik.

B. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 3 Sub kegiatan. Adapun pencapaian program/kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

➤ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5,643,752,928,- dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 5,596,350,933,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 99,16%, yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Keluaran yang dicapai :

- Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 465 KK.
- Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 60 KK.
- Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 11.638 KK.
- Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial sebanyak 46.686 KK.

Kenaikan angka kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada awal September 2022 lalu. Karena harga BBM naik, ongkos produksi naik, harga barang naik, pengeluaran masyarakat naik. Kenaikan harga paling terasa pada beberapa bahan pokok, antara lain beras, daging ayam, telur ayam, cabai merah hingga minyak goreng.

Selain faktor kenaikan BBM, kenaikan angka kemiskinan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor situasi pascapandemi Covid-19 sehingga kegiatan perekonomian belum berjalan seperti sebelumnya. Dengan demikian, penurunan pendapatan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pada lapisan bawah.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperbarui data penduduk miskin.
2. Integrasi penyaluran bansos

Di banyak tempat, berbagai bentuk Bantuan Sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan basis data Bantuan Sosial, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan oleh pemerintah daerah yang belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata namun kondisi ekonominya memburuk akibat kenaikan BBM dan situasi pascapandemi Covid-19. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah ialah menggandeng bank-bank pemerintah dan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada penerima bantuan.

3. Meningkatkan anggaran bantuan sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat kenaikan BBM dan dampak situasi pascapandemi Covid-19.
4. Meningkatkan anggaran bantuan modal usaha bagi penduduk miskin secara umum untuk meningkatkan kemandiriannya.

Tabel II.25
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase Penduduk Miskin	6,01%	6,03%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian target RPJMD 2021 s.d 2026, terdapat ketidapencapaian target penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepri sebesar 0,02%.

Tabel II.26
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kategori Perkotaan dan Perdesaan
September 2021 - September 2022

Daerah/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
<u>Perkotaan</u>		
September 2021	119.310	5,37
Maret 2022	122.600	5,68
September 2022	119.520	5,46
<u>Perdesaan</u>		
September 2021	18.440	10,45
Maret 2022	29.080	10,68
September 2022	29.370	10,63
<u>Total</u>		
September 2021	137.750	5,75
Maret 2022	151.680	6,24
September 2022	148.890	6,03

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2021 – September 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan selalu mengalami kenaikan, sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan pada Maret 2022 dan kembali menurun pada September 2022. Meskipun jumlah penduduk miskin di perdesaan selalu mengalami kenaikan pada periode September 2021 – September 2022, namun persentasenya turun 0,05 persen bila dibandingkan Maret 2022.

Adapun Persentase Penduduk Miskin pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.27
Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota
Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	P0	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Karimun	6,87	0,78	0,13	16.440	239.301
2	Bintan	6,44	0,91	0,16	10.670	165.683
3	Natuna	5,32	1,06	0,25	4.320	81.203
4	Lingga	14,05	2,53	0,64	12.700	90.391
5	Kepulauan Anambas	7,51	0,92	0,22	3.290	43.808
6	Kota Batam	5,19	0,76	0,17	82.590	1.591.329
7	Kota Tanjungpinang	9,85	1,64	0,44	21.670	220.000
Kepulauan Riau		6,03	0,886	0,186	148.890	2.469.154

Keterangan :

P0 = Persentase Kemiskinan

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (14,05%) dan yang paling sedikit di Kota Batam (5,19%). Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2022 paling besar adalah di Kota Batam (82.590 Jiwa) dan yang paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas (3.290 Jiwa). Di samping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2022 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (2,53%) dan yang paling sedikit di Kota Batam (0,76%). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2022, yakni paling besar adalah di Kabupaten Lingga (0,64%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Karimun (0,13%).

Tabel II.28
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Se-Indonesia Semester II
Tahun 2022

No	PROVINSI	SEMESTER 2 (SEPTEMBER)
1	BALI	4,53
2	KEP. BANGKA BELITUNG	4,61
3	DKI JAKARTA	4,61
4	KALIMANTAN SELATAN	4,61
5	KALIMANTAN TENGAH	5,22
6	KEP. RIAU	6,03
7	SUMATERA BARAT	6,04
8	BANTEN	6,24
9	MALUKU UTARA	6,37
10	KALIMANTAN TIMUR	6,44
11	KALIMANTAN BARAT	6,81
12	RIAU	6,84
13	KALIMANTAN UTARA	6,86
14	SULAWESI UTARA	7,34
15	JAMBI	7,70
16	JAWA BARAT	7,98
17	SUMATERA UTARA	8,33
18	SULAWESI SELATAN	8,66
19	JAWA TIMUR	10,49
20	JAWA TENGAH	10,98
21	SULAWESI TENGGARA	11,27
22	LAMPUNG	11,44
23	DI YOGYAKARTA	11,49

No	PROVINSI	SEMESTER 2 (SEPTEMBER)
24	SULAWESI BARAT	11,92
25	SUMATERA SELATAN	11,95
26	SULAWESI TENGAH	12,30
27	NUSA TENGGARA BARAT	13,82
28	BENGKULU	14,34
29	ACEH	14,75
30	GORONTALO	15,51
31	MALUKU	16,23
32	NUSA TENGGARA TIMUR	20,23
33	PAPUA BARAT	21,43
34	PAPUA	26,80
INDONESIA		9,57

Sumber: <https://kepri.bps.go.id>

Berdasarkan Persentase Kemiskinan *Update* per September 2022, Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat terendah ke-6 se-Indonesia (6,03%).

SASARAN. 3

Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan kondisi lingkungan hidup Indonesia. IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. Dokumen ini

menggambarkan kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan pada 34 provinsi termasuk Provinsi Kepulauan Riau yang pengukurannya dilakukan pada tahun 2022. Kualitas air diukur pada sungai prioritas nasional di 34 provinsi, kualitas udara diukur pada kawasan-kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran di kabupaten/ kota, sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan indeks tutupan lahan.

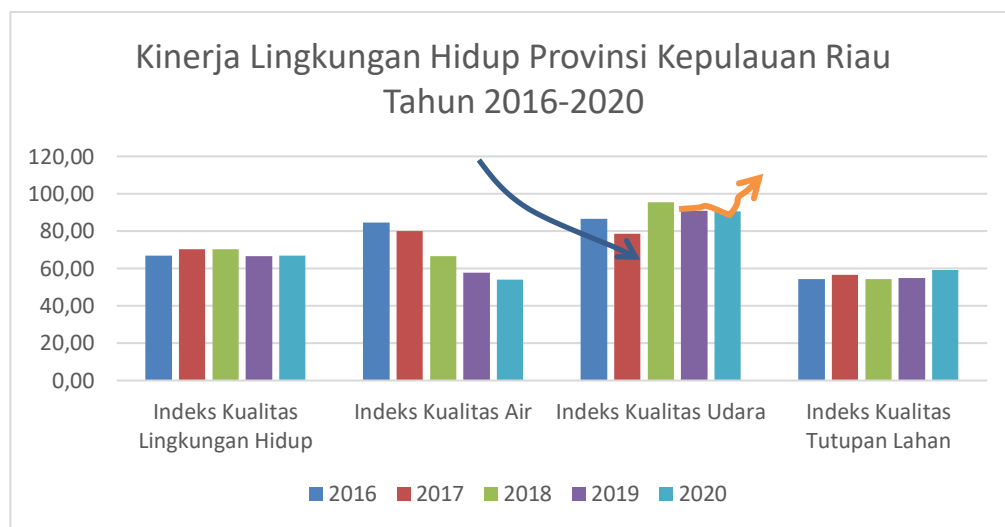
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan cara mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan sebagai indikator. Penggabungan parameter ini dimungkinkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara.

Lingkungan hidup berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan untuk kelestarian pembangunan. Selama 5 tahun belakangan kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Riau terus menunjukkan penurunan kualitas. Ukuran kualitas lingkungan hidup menunjukkan angka yang terus menurun, baik dari air, udara maupun dari tutupan lahan. Berikut disajikan kinerja urusan lingkungan hidup.

Tabel II.29
Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,97	70.19	70.34	66.50	67,00
2.	Indeks Kualitas Air	84.67	80.00	66.67	57.85	54,00
3.	Indeks Kualitas Udara	86.61	78.60	95.47	90.83	90,59
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54.31	56.53	54.24	54.75	59,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021



Grafik 3.4 Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Tabel II.29. menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan mengalami tren yang cenderung bergerak turun setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2020 kembali menguat secara komposit. Namun demikian, Indeks kualitas air secara konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2016-2020 meskipun di saat yang bersamaan indeks kualitas udara juga ikut terus naik secara signifikan.

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- 1) Adanya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan.



- 2) Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 3) Belum optimalnya penanganan limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/ *sludge oil* yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam dan Kabupaten Bintan dikarenakan keterbatasan anggaran.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan amanat Gubernur Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 742 Tahun 2018 Tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak mendapat anggaran.
- 5) Minimnya penanganan dan sarana/prasarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) di Provinsi Kepulauan Riau.
- 6) Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga banyak sampah rumah tangga dan sejenisnya yang mencemari laut, khususnya dalam radius 0-12 mil laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
- 7) Pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya, dan juga banyaknya kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi kendaraan.

Sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, terutama indeks kualitas air, walaupun tidak begitu signifikan.

Berikut dapat dilihat capaian kinerja Lingkungan Hidup Dasar dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 :

Tabel II.30
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

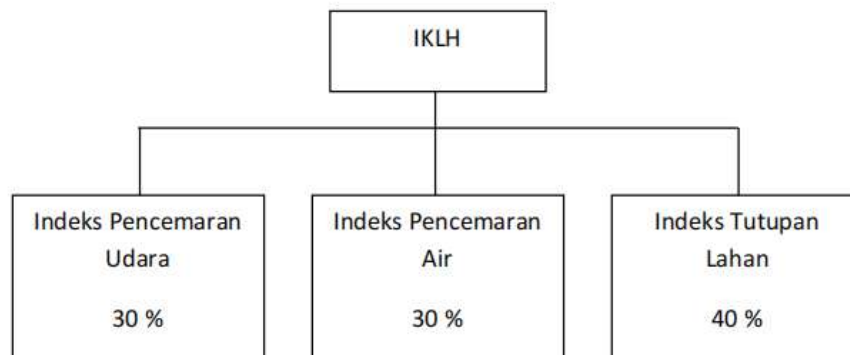
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,73	74,13	106,31
2.	Indeks Kualitas Air Laut	76,75	85,56	111,48
3.	Indeks Kualitas Air	56,70	56,79	100,16
4.	Indeks Kualitas Udara	88,25	90,27	102,29
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,08	58,00	98,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2022

Analisis terhadap capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat digambarkan yaitu meningkatnya kualitas air laut, kualitas air bersih dan udara sedangkan kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan. Hasil analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 dengan target sebesar 69,73 dapat tercapai yaitu sebesar 74,13 sehingga capaian kinerja sebesar 106,31% atau dalam kategori kinerja Baik.

Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ini disebabkan karena meningkatnya indeks kualitas air laut dan air bersih serta kualitas udara, tentu saja hal ini tidak terlepas dengan terlaksananya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada Tahun 2022. Capaian kinerja dibidang lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan formula penjumlahan dari indeks kualitas air laut, indeks kualitas air bersih, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

Struktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 (tiga) indikator, hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat).



Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$$

Secara umum indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sudah tercapai dengan sangat baik.

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO_3 , dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO_2 dan NO_2 ; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

IKLH Kabupaten/ Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
IKLH Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
IKLH Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

Berikut realisasi serta capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2022

Tabel II.30
Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

Indikator kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,80	73,19	104,85	69,73	74,13	106,31
Indeks Kualitas Air Laut	76,10	75,68	99,44	76,75	85,56	111,48
Indeks Kualitas Air	56,60	55,15	97,43	56,70	56,79	100,16
Indeks Kualitas Udara	88,14	90,91	103,14	88,25	90,27	102,29
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,07	60,39	102,23	59,08	58,00	98,17

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2021 dengan target 69,80 terealisasi sebesar 73,19 dengan persentase capaian 104,85%, artinya naik sebesar 3,39 poin, sedangkan pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 106,31% dari target sebesar 69,74 dengan capaian sebesar 74,13 naik 4.40 point. Adapun perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022 sebagai berikut:



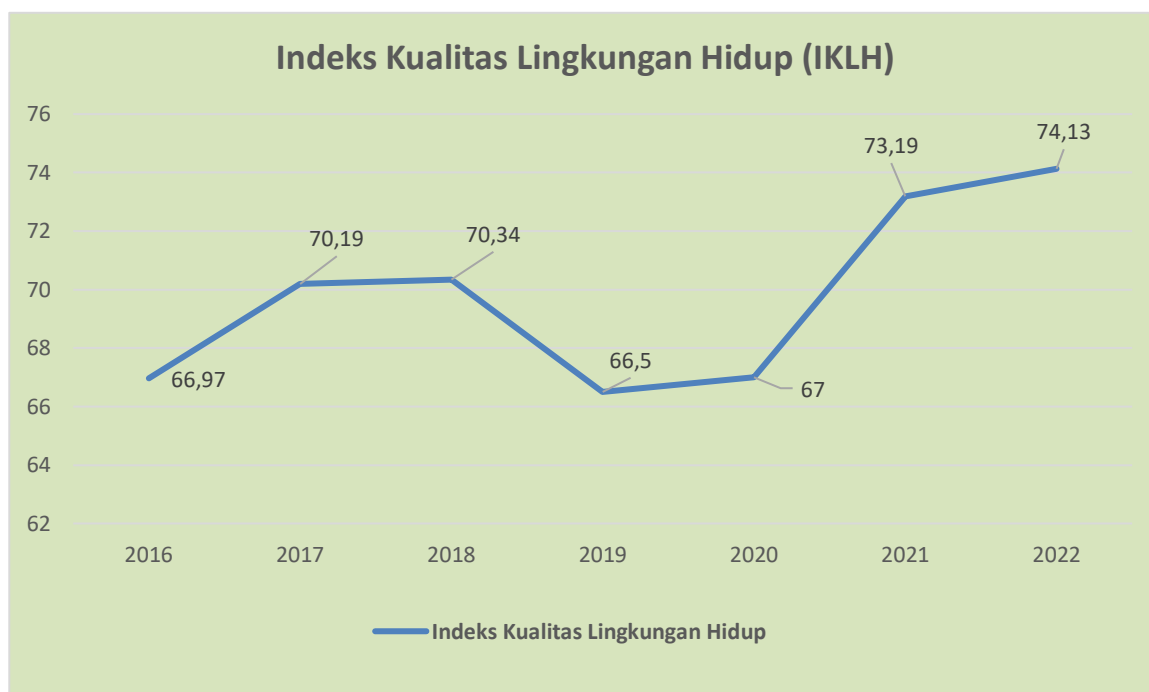
Tabel II.31
Evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2022

No	Indikator kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,97	70.19	70.34	66.50	67,00	73,19	74,13
2	Indeks Kualitas Air Laut					69,82	75,68	85,56
3	Indeks Kualitas Air	84.67	80.00	66.67	57.85	50,00	55,15	56,79
4	Indeks Kualitas Udara	86.61	78.60	95.47	90.83	90,80	90,91	90,27
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54.31	56.53	54.24	54.75	58,16	60,39	58,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2016 realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,97, pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,19, lalu pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 70,34, tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi 66,50 dan tahun 2020 kembali meningkat sedikit menjadi 67,00 kemudian pada tahun 2021 meningkat cukup signifikan yaitu 73,19 dan kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 menjadi 74,13 indeks.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2016-2022 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini :

Grafik II.4
Pencapaian Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2016-2022



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan sebesar 73,19 sedangkan sampai dengan tahun 2022 meningkat menjadi 74,13 maka ada peningkatan sebesar 1,28. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dengan indeks IKLH Provinsi Kepulauan Riau maka IKLH Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional.

Berikut realisasi serta capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Tabel II.32
Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Nasional
dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Indikator kinerja	IKLH Nasional			IKLH Provinsi Kepulauan Riau		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,22	72,42	104,62	69,73	74,13	106,31

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara Nasional yaitu sebesar 72,42 dari target yang ditetapkan yaitu 69,22 sedangkan capaian IKLH Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,13 dari target yang ditetapkan sebesar 69,80. Capaian secara Nasional naik 3,2 poin, sedangkan capaian Provinsi Kepulauan Riau naik 4,40 poin.

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 74,13 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional yaitu sebesar 72,42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, selain itu IKLH juga merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan secara nasional karena terdapat 42 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi terhadap indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti *Car Free Day* (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 34 provinsi yang dipantau dan dievaluasi, ada 27 provinsi yang meningkat mutunya, salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau, selain itu ada juga Provinsi yang menurun Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yaitu sebanyak 6 provinsi. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat (*landbase pollution*). Pada data Indeks Kualitas Lahan, terdapat 145 kab/kota yang meningkat nilai IKL-nya, sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 116 kab/kota. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 148.689,35 ha secara nasional.

Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Riau, masih terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Masih terdapatnya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Kejadian ini terjadi pada setiap tahun memasuki musim utara, hal ini diduga disebabkan

oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan *tank cleaning* secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan tersebut dengan baik di perairan Provinsi Kepulauan Riau sehingga limbah B3 dimaksud menyebabkan kerusakan pada kawasan pesisir di Kota Batam dan Kabupaten Bintan.

2. Dampak dari tumpahan minyak dan bahan-bahan kimia beracun berbahaya (B3) yang sifatnya destruktif terhadap lingkungan hidup perairan.
3. Belum teratasinya kerusakan ekosistem laut dan pesisir laut yang berada di sekitar Pulau Bintan dan Pulau Batam sehingga sangat merugikan terhadap sektor pariwisata dan nelayan.
4. Belum optimalnya penanganan limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam dan Kabupaten Bintan dikarenakan keterbatasan anggaran
5. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Belum optimalnya pelaksanaan amanat Gubernur Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 742 Tahun 2018 Tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak mendapat anggaran.
7. Minimnya penanganan dan sarana/prasarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dari kementerian, instansi vertikal yang ada di daerah, aparat keamanan dan juga masyarakat.
2. Peran aktif dari seluruh semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu penanganan Limbah B3

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja:

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Anggaran

Pagu Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 mengalami rasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri pagu anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rp. 300.000.000,- terealisasi Rp.270.563.068 (90,38%) pada sub kegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan pagu Rp. 100.000.000,-, terealisasi Rp. 90.950.000,- (90,95%).
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan pagu Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 179.612.968,- (89,81%).

Tabel II.33
Realisasi dan Capaian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Program	Indikator	satuan	Target Kinerja		Pagu	Realisasi Anggaran
				Target	Realisasi		
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	76,75	85,56	Rp. 300.000.000,-	Rp.270.563.068
		Indeks Kualitas Air	Indeks	56,7	56,79		
		Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88,25	90,27		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,08	58,00		
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	1	1	Rp. 300.000.000,-	Rp.270.563.068
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Laporan hasil Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut	Laporan	1	1	Rp. 100.000.000,-	Rp. 90.950.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim	Laporan	1	1	Rp. 200.000.000,-	Rp. 179.612.968,-

**SASARAN. 4*****Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif***

Reformasi Birokrasi direncanakan dan ditata secara sistematis dalam sebuah Grand Design. Grand Design Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres tersebut dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997 dan kemudian pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah internal birokrasi pemerintahan. Sehingga proses reformasi yang terjadi saat ini mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi menguat. Birokrasi dituntut untuk menjadi *public servant*, artinya tugas birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang melayani birokrat. Masyarakat menuntut manajemen yang baik dan transparan sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, kuat dan antisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, program reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan adalah: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tatalaksana; 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6. Penguatan Pengawasan; 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; serta 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II. 34
Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Antisipatif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	69.77	67,77	100.00

Indeks reformasi birokrasi dari table diatas menunjukkan bahwa sudah menunjukkan capaian yang maksimal. Dari target 69,77 pada Tahun 2022 tercapai 100 persen.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Reformasi Birokrasi semenjak tahun 2012 sampai saat ini dan terus berupaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik dengan berkomitmen melaksanakan perubahan pada 8 area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Sistem Pengawasan dan Pelayanan Publik.

Dinamika pembaharuan dan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),

atau yang kita kenal sebagai Reformasi Birokrasi, merupakan upaya pembaharuan terutama pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (Business Process) dan sumber daya manusia aparatur.

Tabel II.35

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan kondisi akhir RPJMD (2026)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	%
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	72.17	69,77	96,67

Berdasarkan tabel diatas nilai Reformasi Birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak sampai pada target jangka menengah dikarenakan menurut hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan reformasi birokrasi.

Berbagai rekomendasi yang telah disampaikan oleh Tim Evaluator pada hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi keseluruhan unit kerja, khususnya dalam pembangunan budaya kinerja
2. Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum semua memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi
3. Proses deregulasi kebijakan belum berjalan secara komprehensif dengan mengidentifikasi, merevisi dan mencabut regulasi yang menghambat kinerja birokrasi sekaligus

- memetakan kebutuhan peraturan yang dapat mendorong tercapainya kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan
4. Telah menyusun proses bisnis dan Standar Operating Procedure (SOP) di level pemerintah daerah maupun di level OPD, namun perlu dipastikan hasil dari penyusunan tersebut dapat menjadikan proses kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih efektif dan efisien untuk mencapai kinerja yang diharapkan
 5. Telah melakukan transformasi digital dalam proses bisnis utama, administrasi dan pelayanan publik namun belum dilakukan evaluasi untuk mengukur kesesuaian dengan arsitektur SPBE yang ada dan kebermanfaatan dari aplikasi-aplikasi maupun sistem yang telah dibangun
 6. Penguatan sistem manajemen SDM masih belum optimal, antara lain belum dimanfaatkannya seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Di samping itu, hasil asesmen pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
 7. Kualitas implementasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal sehingga belum mendorong pelaksanaan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja
 8. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan telah dilakukan, namun hasilnya belum dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan

Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Area Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan



budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini, yaitu:

- Telah dilaksanakan Internalisasi *Core Values* BerAKHLAK.
- Telah dilakukan penguatan tugas dan fungsi Agen Perubahan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Telah dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pendampingan dan penggunaan **aplikasi SIREMBO** (Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi).
- Telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN, RPJMD, *Road Map* RB Nasional dan memprioritaskan pencapaian *outcome* dalam upaya pelayanan kepada masyarakat

2. Area Deregulasi Kebijakan

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi (***right function***) dan tepat ukuran (***right sizing***).

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini dengan melakukan sinkronisasi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, kebijakan dengan sistematika dan struktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip legal drafting, prosedural, transparan dan partisipatif, dan mudah diakses dan informatif, diantaranya yaitu:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Deregulasi Kebijakan melalui proses evaluasi dari Kemendagri

dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yaitu 8 Peraturan Daerah dan 83 Peraturan Kepala Daerah dengan hasil “Harmonisasi” tanpa ada Regulasi Daerah yang dibatalkan atau dihapus.

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan fasilitasi, harmonisasi, evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh produk hukum Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

No	Kebijakan(ProdukHukum)	Jumlah	Deregulasi	
			Usulan	Realisasi
1	Peraturan Daerah	8	8	8
2	PeraturanKepala Daerah	83	83	83

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi penataan dan penguatan organisasi, dengan melakukan penguatan pengelolaan data, informasi, dan kearsipan:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Penyederhanaan Birokrasi 100% sesuai model Kementerian

SEBELUM PENYEDERHANAAN			SESUDAH PENYEDERHANAAN		
ADMINISTRATOR	PENGAWAS	JUMLAH	ADMINISTRATOR	PENGAWAS	JUMLAH
226 jabatan	659 jabatan	*) 885 jabatan	214 jabatan	239 jabatan	*) 453 jabatan
25,54%	74,46%	100%	47,25%	52,75%	100%

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2021.

4. Area Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini dengan melakukan penguatan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen yang terintegrasi menghasilkan keterpaduan proses bisnis dan data infrastruktur secara terpadu, diantaranya yaitu:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.
- Telah disusun Standar Operasional Prosedur sesuai Peta Proses Bisnis oleh Perangkat Daerah.
- Pemerintah Provinsi, telah melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan SPBE, membentuk Tim Koordinator SPBE, melakukan penilaian mandiri terkait indeks SPBE, menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE, dan kebijakan tentang Pedoman Manajemen Keamanan



Informasi SPBE serta Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.

- Mengikuti Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator.

5. Area Penguatan Sistem Manajemen SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan.

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini, yaitu pada sistem manajemen SDM aparatur, dengan melakukan penempatan dan jenjang karir SDM menggunakan model merit sistem, dan tata kelola yang profesional di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adapun uraiannya sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang membangun Sistem Karir ASN melalui *Assesment Center* dengan memperhatikan Potensi, Kompetensi dan Kinerja Individu untuk masuk kedalam *Talent Pool* sebagai bagian dari rencana Suksesi Pengisian seluruh Jabatan.
- Penempatan seluruh **JPT** telah dilaksanakan berdasarkan hasil assesmen melalui seleksi terbuka dan penyesuaian jabatan (*job fit*) sebanyak **42 jabatan**.
- Melaksanakan Assesmen secara bertahap kepada seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk tahun 2022 hingga Triwulan II, sudah melaksanakan assesmen sebanyak **245 pegawai** dari target **500 pegawai**.



- Telah dilakukan Diklat Perencana Untuk Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- Telah dilakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) Kepulauan Riau Tahun 2022.
- Inovasi di bidang SDM yaitu **Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA Kepri)** yang telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja; **Aplikasi E-Disiplin** yang terintegrasi dengan Tunjangan Kinerja; **Aplikasi Sistem Informasi Layanan Aparatur Terpadu (SILAT)**;
- Kenaikan kelas jabatan bagi Kepala Bidang Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan inovasi pertama di Indonesia, dimana kelas jabatan Kepala Bidang yang sebelumnya berada di kelas jabatan 11 menjadi kelas 12.

TARGET JABATAN PELAKSANA YANG AKAN DI ASSESSMENT	PEJABAT PELAKSANA YANG SUDAH DI ASSESSMENT
235	98

6. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan melakukan penguatan e-kinerja untuk peningkatan indeks kinerja

Capaian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini yaitu:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran program prioritas dengan 16 indikator dan berpedoman pada RPJMD.
- Penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah telah dituangkan ke dalam *cascading*;



- Telah melaksanakan evaluasi implementasi AKIP oleh APIP atau Tim Satgas AKIP terhadap 43 Perangkat Daerah;
- Telah melakukan reviu LKjIP Provinsi Kepulauan Riau;
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen dalam pencapaian target IKU Gubernur antara lain:
 - Rasio Elektrifikasi mendukung program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan slogan “KEPRI TERANG”.
 - Angka kemiskinan menurun mendukung program penanganan infrastruktur dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu, dan beasiswa.

KONDISI SEBELUM s/d 2021	KONDISI SETELAH TINDAK LANJUT s/d 2022
☐ Penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah terhamonisasi ☐ Pemetaan program/kegiatan disusun melalui crosscutting daerah ☐ Pencapaian sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah terintegrasi dan terkomunikasi	☐ Penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah telah di tuangkan ke dalam cascading ☐ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan rapat perencanaan penentuan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah yang mendukung kebijakan pembangunan crosscutting ☐ telah melaksanakan evaluasi implementasi AKIP oleh APIP atau Tim Satgas AKIP terhadap 43 Perangkat Daerah ☐ Telah melakukan reviu LKjIP Provinsi Kepulauan Riau

7. Area Penguatan Sistem Pengawasan

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini, yaitu:

- Telah disusun register risiko pada seluruh Perangkat Daerah.
- Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan aplikasi SP4N LAPOR diseluruh Perangkat Daerah;
- Aplikasi Whistle Blowing System akan segera dibangun;



- Telah dilaksanakan penanganan gratifikasi melalui:
 - Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Gratifikasi sejak tahun 2018. Tata cara Pelaporan Gratifikasi telah disosialisasikan secara bertahap;
 - SE Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Tahun 2021 (Nomor: 700/862/It-Prov-SET/2021 tanggal 10 Mei 2021);
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 539 /KPTS-3/I/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1890 /KPTS-3/X/2021 tentang Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Melaksanakan penguatan satgas SPIP unit kerja;
- Penerapan SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berada pada Level 3 sejak tahun 2017, tahun 2020 dan telah dilaksanakan penilaian maturitas pada beberapa Perangkat Daerah strategis. Penataan dan Implementasi SPIP terus diupayakan dan berkelanjutan;
- Penanganan Benturan Kepentingan diupayakan melalui penandatanganan Pakta Integritas pada Seluruh Perangkat Daerah di tiap jenjang jabatan;
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan monitoring dan evaluasi pada pembangunan Zona Integritas di 5 Unit Pelayanan Publik. Dan telah mengusulkan 2 UPP untuk diusulkan menjadi WBK yaitu DPMPTSP dan UPT PPD SAMSAT Tanjungpinang.

8. Area Pelayanan Publik.

Bertujuan terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan melakukan pengintegrasian semua



layanan dalam satu aplikasi, diikuti dengan pengembangan unit layanan terpadu dan informasi publik dengan bertransformasi dan terintegrasi pada Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Publik (SIAPP).

Capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada area ini, yaitu:

- Telah dilakukan evaluasi dan Pengembangan aplikasi untuk pelayanan internal dan eksternal. Satu Inovasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan nama ***“Proses Izin Dengan Jarimu”*** dengan **Aplikasi SiJEMPOL BERHASIL** masuk dalam **TOP 5 Terpuji Kategori Replikasi Inovasi Pelayanan Publik KIPP Tahun 2021**.
- Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari Kemen PANRB Tahun 2021 mendapat nilai indeks **4,21** kategori **A- (Sangat Baik)**.
- Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari Ombudsman RI Tahun 2021 dengannilai **87,51** kategori **Kepatuhan Tinggi Zona Hijau**.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dengan nilai **83,69** mutu pelayanan **B (Baik)**.

Dengan demikian, kecepatan, ketetapan dan kemudahan dalam pemberian layanan publik prima semakin handal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam berbagai keperluan pengguna jasa layanan, sesuai dengan peta bisnis yang dilaksanakannya.

Berikut Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, 2021 dan tahun 2022:

TAHUN	Reformasi Birokrasi		
	Nilai	Kategori	Predikat
2020	68.57	B	Cukup Baik
2021	68.66	B	Cukup Baik
2022	?	B	Cukup Baik

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai dari tahun sebelumnya.

Tabel II.36
EVALUASI KEMENPAN RB

N O	Komponen Penilaian	Bob ot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20	12,9 4	13,0 3
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	6,19	6,98
	III. Reform	30	19,8 4	19,0 1
	Total Komponen Pengungkit	60	38,9 7	39,0 2
N O	Komponen Penilaian	Bob ot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
	I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,29	8,31
	II. Kualitas Pelayanan Publik	10	8,1	9,28
	III. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,3	8,13
	IV. Kinerja Organisasi	10	5	5,03
	Total Komponen Pengungkit	40	29,6 9	30,7 5

Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + hasil)	100	68,6 6	69,7 7
--	------------	-------------------	-------------------

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, berikut kami sampaikan beberapa hal:

1. Secara konsisten melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai dan melakukan survey kepada seluruh pegawai secara berkala terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja dan pemahaman reformasi birokrasi
2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis. Disamping itu, perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan agar disesuaikan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja
3. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan
4. Mereviu proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya mendukung proses kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih efektif dan efisien
- 5.



Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada

5. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil asesmen pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai
6. Memastikan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari pusat hingga unit-unit kerja secara merata dan optimal, sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi
7. Membangun SPIP lebih efektif dengan menerapkan manajemen resiko, sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan, kepentingan, Whistle blowing System, dan pengaduan masyarakat secara baik yang akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas; dan
8. Mengevaluasi efektivitas dan efesiensi penggunaan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan internal dan eksternal, serta secara periodic melakukan survey kepuasan untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan.



Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik perlu mendapat perhatian dan ditata ulang atau diperbaharui, serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian hasil Reformasi Birokrasi ini, pemerintah menetapkan 9 (sembilan) percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu: Penataan Struktur Organisasi Pemerintah; Penataan Jumlah dan Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka; Peningkatan Profesionalisasi PNS; Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi; Peningkatan Pelayanan Publik; Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja program Aparatur; Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; dan Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.

Namun seiring dengan perkembangan terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Terdapat tujuh permasalahan di dalam birokrasi yakni Budaya kerja yang masih feodalistik, organisasi yang gemuk, overlapping kebijakan, kompetensi SDM yang kurang, overlapping kewenangan, pola pikir yang bersifat rule based dan pelayanan yang masih buruk. Disamping permasalahan birokrasi terdapat juga permasalahan dalam pelayanan publik yaitu rendahnya responsivitas, rendahnya sosialisasi informasi, rendahnya aksesibilitas, struktur dan kelembagaan birokrasi, cenderung inefisiensi, profesionalitas SDM yang masih rendah dan sarana prasarana kurang memadai.

Sebagai saran strategi optimalisasi dari pelayanan publik maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah :



1. Mengidentifikasi kembali jenis-jenis pelayanan yang dibutuhkan dan dievaluasi
2. Melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan yang sudah berlangsung dan menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten
3. Penguatan kapasitas, baik SDM, sistem dan sarana prasarana layanan
4. Melaksanakan SKM secara rutin
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik (konsep Collaborative Government)
6. Menyerahkan tugas-tugas sektor publik kepada manajer profesional
7. Menetapkan secara eksplisit standar dan ukuran kinerja
8. Menegaskan pentingnya “hasil” daripada “proses” sehingga hasil harus terus menerus dikendalikan
9. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan mendesentralisasikan tugas-tugas ke bawah dan ke unit lain di luar.

Ini adalah strategi-strategi yang digunakan untuk mencegah permasalahan yang muncul di birokrasi dan juga pelayanan publik.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis di reformasi birokrasi adalah sebanyak satu program 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program/kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analysis Jabatan			
1.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	118.843.600	102.020.296	
2.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	21.653.300	21.469.500	
3.	Penataan Analysis Jabatan	72.700.080	63.081.663	
B.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	147.014.640	144.744.050	
2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	61.946.880	53.293.983	
3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	22.419.000	21.420.000	

4.	Pengelolaan tatalaksana pemerintahan	108.728.000	103.966.935	
5.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	192.656.000	182.495.219	
	TOTAL	745.961.500	692.491.646	92,83%

Berdasarkan uraian tabel anggaran diatas terlihat bahwa terdapat efesiensi dalam pengelolaan anggaran, hal ini terlihat dari tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja, yang mampu menghemat anggaran belanja sebesar 7,17 persen sehingga dapat dikatakan efesiensi berhasil dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan dimana pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan pada Bidang Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 DALAM BIDANG REFORMASI BIROKRASI :

1. Peringkat 2 dalam Penilaian Kompetensi Pegawai BKN Award;
2. Peringkat 3 atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja BKN Award;
3. Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Ketepatan Waktu dalam Melaporkan SPM seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah nya tahun 2021 dari Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Realisasi Belanja APBD Tertinggi di tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri;
5. Penghargaan UPTD PPD Samsat Batam Centre BP2RD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai kategori sangat Baik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2021 dari Kementerian PANRB;
6. Penghargaan kategori Unit Penyelenggara Pelayanan PublikDPMPSTSP kategori Sangat Baik di lingkup Pemerintah Daerah tahun 2021 dari Kementerian PAN-RB

SASARAN. 5***Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter***

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan umur harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

c. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi: $IPM \geq 80$
2. tinggi: $70 \leq IPM < 80$
3. sedang: $60 \leq IPM < 70$
4. rendah: $IPM < 60$

Tabel 3.44
Capaian Kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,7	76,46	99%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 72,36 pada tahun 2012 menjadi 76,46 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu

berada pada status IPM “tinggi” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 persen per tahun.

Analisis terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 76,7% pada tahun 2022, sebab capaian realisasi sebesar 76,46% dan capaian kinerja sebesar 99% atau dalam **Kategori Baik**.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2022:

Tabel II.37

Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 -2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022*
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,79	76,46

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. IPM Kepulauan Riau tahun 2022 mencapai 76,46, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan capaian tahun 2021.

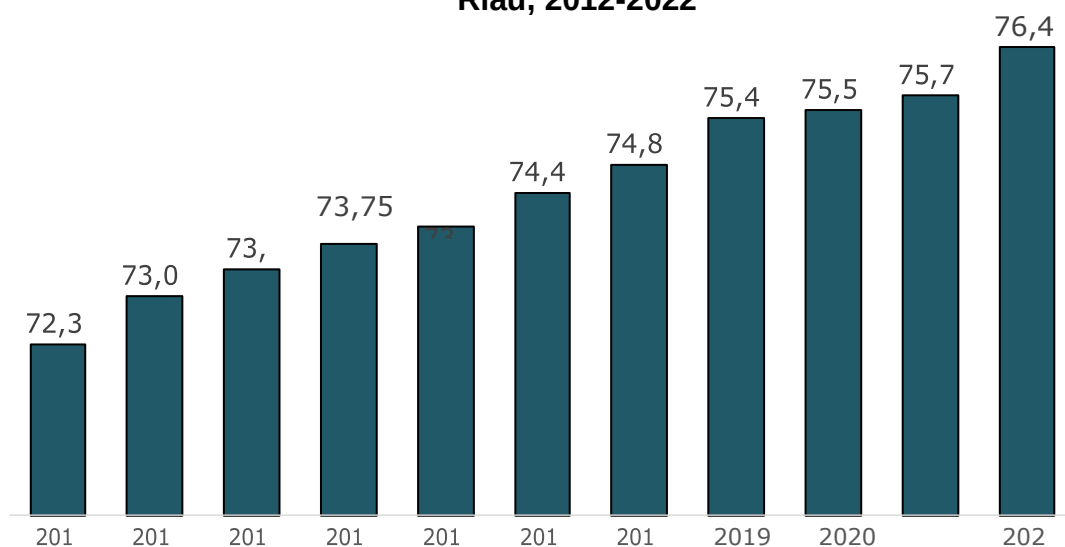
Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata- rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 72,36 pada tahun 2012 menjadi 76,46 pada tahun

2022. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM “tinggi” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 persen per tahun.

Pandemi COVID-19 telah memberikan ketidakpastian ekonomi dan pukulan terhadap dunia kerja. Berkurangnya permintaan pasar mendorong pengusaha mengambil langkah preventif dengan mengurangi jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan menurunnya tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memengaruhi kesehatan masyarakat dan mengancam akses masyarakat terhadap pendidikan terutama pada kelompok rentan. Namun demikian, pada tahun 2022, kondisi perekonomian sudah mulai pulih, tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat meningkat dibandingkan kondisi tahun 2019 (sebelum Pandemi COVID-19). IPM Kepulauan Riau tahun 2022 tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun 2021 dan tumbuh 0,43 persen dibandingkan tahun 2019. Peningkatan IPM Kepulauan Riau tahun 2022 didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 (kondisi sebelum Pandemi COVID-19), pembangunan manusia Kepulauan Riau tahun 2022 meningkat. Gambar 3.8 menunjukkan perkembangan IPM satu dekade terakhir, sedangkan perkembangan dimensi pembentuk IPM ditunjukkan oleh Tabel 3.46.

Gambar II.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan**Riau, 2012-2022**

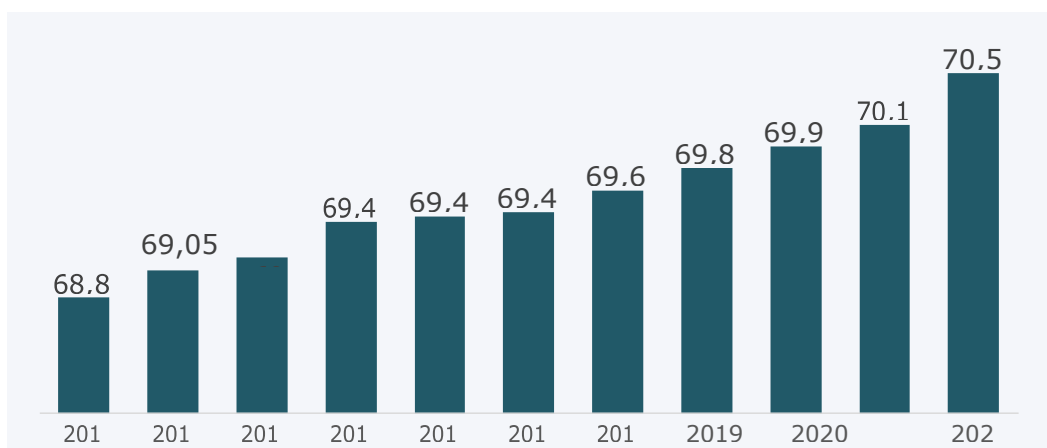
Tabel II.38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut
Komponen, 2012-2022

Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	69,96	70,12	70,50
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37
Pengeluaran riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan	Rp 000	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469
IPM		72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Selama satu dekade

terakhir, UHH Kepulauan Riau terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tersebut, UHH telah meningkat sebesar 1,65 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2022, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kepulauan Riau mencapai 70,50 tahun yang artinya bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50 tahun.

Gambar II.7 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau, 2012-2022



Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama satu dekade terakhir, HLS Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 1,09 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,88 persen per tahun, sementara RLS meningkat sebesar 0,79 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,80 persen per tahun.

Gambar II.8 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kepulauan Riau, 2012-2022



Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) penduduk Kepulauan Riau mencapai Rp14,469 juta per tahun. Dimensi standar hidup layak tahun 2022 mulai meningkat kembali, bahkan dibandingkan kondisi tahun 2019 (sebelum Pandemi COVID-19) pengeluaran riil per kapita per tahun Kepulauan Riau meningkat. Selama satu dekade terakhir, pengeluaran riil per kapita Kepulauan Riau telah meningkat sebesar Rp. 1,729 juta per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,28 persen per tahun.

Gambar II.9. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kepulauan Riau, 2012-2022



Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022 berdasarkan Target RPJMD:

Tabel II.39
Capaian Kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,7	76,46	99%

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Capaian pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target RPJMD maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99% dengan target RPJMD sebesar 76,7% dan realisasi sebesar 76,46%.

Peningkatan IPM juga terjadi di semua kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Secara umum, tidak terjadi perubahan baik dalam peringkat maupun kategori status pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Lingga (66,57), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Batam (81,67) yang sekaligus menjadikan Kota Batam sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kepulauan Riau dengan status pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM $\geq$ 80).

Selama periode 2012 hingga 2022, disparitas IPM antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau konsisten menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya gap antara IPM yang tertinggi dengan yang terendah, yaitu dari 19,07 poin di tahun 2012 menjadi 15,10 poin di tahun 2022. Dilihat dari kecepatan capaian IPM, pada tahun 2022 Kabupaten Karimun tercatat sebagai kabupaten dengan peningkatan IPM

tercepat, yaitu sebesar 0,95 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Lingga (0,74%) dan Kota Tanjungpinang (0,71%).

Tabel II.40
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran riil per kapita per tahun (Rp. 000)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	71,53	12,59	8,48	12.304	72,65
Bintan	70,76	13,27	8,70	14.739	74,99
Natuna	65,76	13,92	8,96	14.834	73,47
Lingga	62,92	12,61	7,12	12.134	66,57
Kep. Anambas	67,73	12,89	7,38	12.137	69,61
Batam	73,62	13,32	11,17	18.506	81,67
Tanjungpinang	72,49	14,14	10,49	15.864	79,64

Dari sisi indikator penyusunnya, bila dibandingkan antar kabupaten/kota, Kota Batam memiliki umur harapan hidup saat lahir tertinggi di Kepulauan Riau, yaitu 73,62 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 62,92 tahun. Sementara itu, Kota Tanjungpinang tercatat memiliki harapan lama sekolah tertinggi sebesar 14,14 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,59 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah, Kota Batam adalah yang tertinggi dengan RLS sebesar 11,17 tahun dan di posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Lingga dengan RLS sebesar 7,12 tahun. Pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) atas dasar harga konstan 2012 tertinggi tercatat di Kota Batam sebesar Rp18,506 juta per tahun, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Lingga sebesar 12,134 juta per tahun.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau tahun Tahun 2022 berdasarkan capaian IPM secara nasional:

Tabel II.41
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Nasional dan Kepulauan Riau, 2022

Dimensi/Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014 2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indeks Pembangunan Manusia 72,29 72,91 (IPM) Nasional		66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94		
Indeks Pembangunan Manusia 75,79 76,46 (IPM) Kepri		-	-	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59		

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Dari tahun 2021-2022 IPM Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dimana IPM secara nasional sebesar 72,91 atau dalam kategori “tinggi”. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional pada Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi sebesar 3,55 poin dan dalam kategori “tinggi”.

Terdapat sedikit perubahan pada peringkat dan status capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi. Peringkat Kalimantan Tengah bertukar dengan Kalimantan Utara. Peringkat Kalimantan Tengah turun dari urutan ke-21 menjadi urutan ke-22, sementara Kalimantan Utara meningkat dari urutan ke-22 menjadi urutan ke-21. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Papua (61,39), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,65).

Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan

70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kendala yang di hadapi pada tahun 2022 dalam rangka Peningkatan Angka Patisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yaitu:

1. Masih adanya pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memenuhi standar 10T dan pemeriksaan yang belum adekuat sehingga belum mampu melakukan pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dalam pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil, saat ini dibuat kebijakan pelayanan kesehatan ibu hamil 6 kali (K6) dengan pemeriksaan oleh dokter minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama dan 1 (satu) kali pada trimester kedua disertai dengan pemeriksaan kehamilan menggunakan USG oleh dokter. Saat ini cakupan K6 Provinsi Kepulauan Riau masih belum sesuai dengan yang diharapkan, salah satunya karena belum meratanya distribusi alat USG dan dokter terlatih USG.
2. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau – pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

3. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.
4. Masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan spesialis seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis lainnya. Dokter spesialis banyak terdistribusi di daerah perkotaan sedangkan di daerah DTPK seperti Kabupaten Kepulauan Anambas masih minim.
5. Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan berupa pelatihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, salah satunya karena adanya keterbatasan anggaran dan adanya efisiensi anggaran Dekonsentrasi Program Pembinaan Kesehatan Keluarga.
6. Sistem manual rujukan maternal neonatal yang belum berjalan dengan baik;



7. Pelaksanaan Audit Maternal Perital (AMP) di kabupaten/ kota belum optimal, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan.
8. Program kesehatan reproduksi calon pengantin yang belum berjalan optimal.
9. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
10. Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
11. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah .

Beberapa solusi yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Melakukan kegiatan AMP sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama.
2. Membenahi sistem manual rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi, melakukan penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggungjawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk.
3. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan

komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.

4. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya.
5. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDI, dll) untuk pemerataan SDM dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
6. Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan – bidan di wilayah kerja puskesmas.
7. Penguatan peran lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
8. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).



Adapun program/kegiatan yang terus dilakukan guna meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai berikut :

1. OJT Orientasi Dokter Dalam Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas Melalui Blended Learning .
2. OJT Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita Untuk Penatalaksanaan Balita Sakit dan/ atau Masalah Gizi
3. Pertemuan Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan AMPSR, Orientasi Sistem Informasi Matneo, MPDN, dan Ekohort
4. Pembinaan Surveilans Kelainan Bawaan
5. Monitoring Evaluasi Program KIA Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB
6. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penurunan AKI dan AKB
7. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah,
8. Tetap meneruskan Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
9. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Adapun Sumber daya anggaran dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) dalam capaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) serta kendala yang di hadapi pada tahun 2022 dalam rangka Peningkatan Angka Patisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yaitu:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	961,848,100	922,744,092	95,93	

Tabel II.42

Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	343,849,050,681	332.123.887.540	96,59
<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>	183.690.074.285	177.004.165.941	96,36
<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan</i>	146.924.996.066	142.125.535.790	96,73
<i>Pengelolaan Pendidikan Khusus</i>	13.233.980.330	12.994.185.809	98,18
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	795.960.700	766.615.950	96,31
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	795.960.700	766.615.950	96,31

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

SASARAN_6***Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan***

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. dengan mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia yaitu:

“Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha / industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035.

10 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar :

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal)

2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah
3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata
6. Membangun sekolah / lingkungan belajar masa depan
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi
9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik Angka Partisipasi Sekolah adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel II.43
Capaian Sasaran Meningkatkan akses dan mutu Pendidikan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
1.	Angka Partisipasi Sekolah	100	84,54	100	84,54

**Sumber Data BPS*

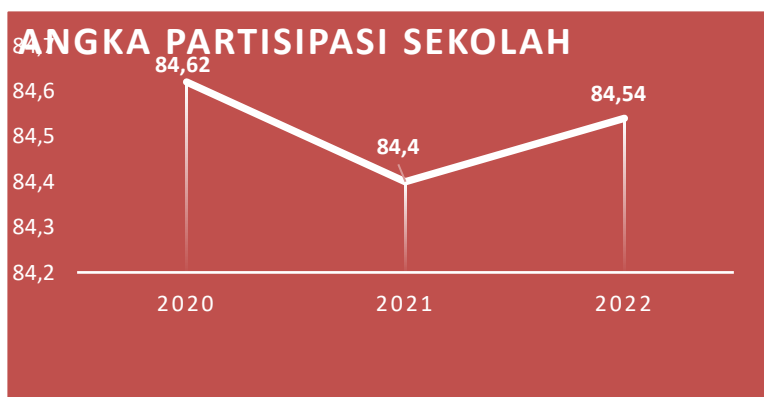
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 84,54 atau 84,54% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan **Kategori Kinerja Baik**, Capaian 84,54% merupakan hasil dari perhitungan Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah (75.328) dibagi Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun (89.103) dikali 100%. Ini berarti bahwa sekitar 84,54% Penduduk usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemenuhan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Menengah sebesar 100%. Dengan belum mencapai nya target APS 100% menandakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau masih ada sekitar 15% belum atau tidak sedang sekolah pada usia 16-18 Tahun. Kondisi ini mesti dicarikan jalan keluar agar terjadi peningkatan sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai, meskipun saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih mencanangkan wajib belajar 9 Tahun.

Tabel II.44
Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Tahun
2022,2021 dan
Tahun 2022

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2022
Kepulauan Riau	84,62	84,40	84,54

**Sumber Data BPS*

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada tahun 2021 sebesar 84,40% mengalami penurunan 0,22 % dibandingkan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2020 yaitu 84,62%. Penurunan di Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di tahun 2021 imbas dari pandemi Covid 19 yang terjadi, sehingga Tingkat partisipasi anak sekolah menurun. Meskipun belum mencapai target realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Tahun 2022 sebesar 84,54% mengalami kenaikan sebesar 0,016% dibandingkan realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Tahun 2021. Capaian ini menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang sudah meningkat setiap tahunnya. **Program Pemberian Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada tahun 2022 yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah. Meski belum mencapai target, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK).**



Grafik II.10 Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Adapun program/kegiatan yang terus dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melalui Pelaksanaan guna meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai berikut :

1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah,
2. Tetap meneruskan Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2020s/d 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.45

**Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
Menurut Kabupaten/Kota**

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota (Persen)		
	16-18		
	2020	2021	2022
Kepulauan Riau	84,62	84,40	84,54
Kabupaten Karimun	76,49	76,91	77,41
Kabupaten Bintan	87,31	90,36	90,42
Kabupaten Natuna	77,57	77,55	77,59
Kabupaten Lingga	80,11	79,06	79,11
Kabupaten Kepulauan Anambas	87,28	78,30	83,64
Kota Batam	84,68	79,88	82,16
Kota Tanjungpinang	78,86	85,83	88,44

Sumber: BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2022 mencapai angka 90,42% atau 0,02% lebih tinggi di bandingkan Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 88,44%. Pencapaian angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan di bandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi, ini berarti Penduduk usia 16-18 Tahun di Kabupaten Bintan terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal.

Perbandingan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.46
Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Nasional

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2022
Kepulauan Riau	84,62	84,40	84,54
Nasional	72,72	73,09	73,15

"Sumber data BPS"

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK usia 16-18 tahun di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih tinggi 15,5% di bandingkan capaian secara nasional. Ada beberapa kendala yang di hadapi pada tahun 2022 dalam rangka Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam;
2. Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
3. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.

Beberapa hal yang di lakukan Dinas Pendidikan terkait penanganan kendala tersebut di atas yaitu :

- a. Dinas Pendidikan secara konsisten untuk memerikan Bantuan transportasi, baik laut dan darat,
- b. Menyediakan kelas jauh bagi peserta didik yang jauh jaraknya dengan sekolahnya.

- c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana seperti Ruang Kelas Belajar, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan pemetaan kebutuhan Sarana dan Prasarana dan akan dilakukan program ketuntasan sesuai arahan Kemendikbudristek.
- d. Pemetaan bagi siswa yang tidak mampu, sehingga bisa masuk sekolah dengan gratis.

Dukungan terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 2 (Dua) Program pembangunan untuk urusan pendidikan yaitu :

1. **Program Pengelolaan Pendidikan** ,Pagu Program sebesar 343,849,050,681,- dengan realisasi Rp.332.123.887.540,- atau 96,59%,

yang di tunjang oleh 3 Kegiatan yaitu :

- 1) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas* pagu sebesar Rp. 183.690.074.285 dengan realisasi Rp. 177.004.165.941,- atau 96,36%.
- 2) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan* pagu sebesar Rp. 146.924.996.066 dengan realisasi Rp.177.004.165.941,- atau 96,73%.
- 3) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus* pagu sebesar Rp. 13.233.980.330,- dengan realisasi Rp. 12.994.185.809 atau 98,18%.

2. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini di tahun 2022 hanya menjalankan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi pagu Rp. 795.960.700 realisasi 766.615.950 atau 96,31%.

Data alokasi belanja Dinas Pendidikan Tahun 2022 berdasarkan Program terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.47

Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	343,849,050,681	332.123.887.540	96,59
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	183.690.074.285	177.004.165.941	96,36
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	146.924.996.066	142.125.535.790	96,73
Pengelolaan Pendidikan Khusus	13.233.980.330	12.994.185.809	98,18
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	795.960.700	766.615.950	96,31
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	795.960.700	766.615.950	96,31
Program Pengembangan Kurikulum	19.974.000	9.663.102	48,38
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	9.987.000	-	0
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	9.987.000	9.987.000	96,76

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

Pemerataan tenaga pendidik dengan hadirnya P3K di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu menutup lobang lobang kekurangan tenaga pendidik, terutama di sekolah yang berada di pulau pulau. Tahun 2022 sebanyak 680 P3K tersebar di Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel II.48

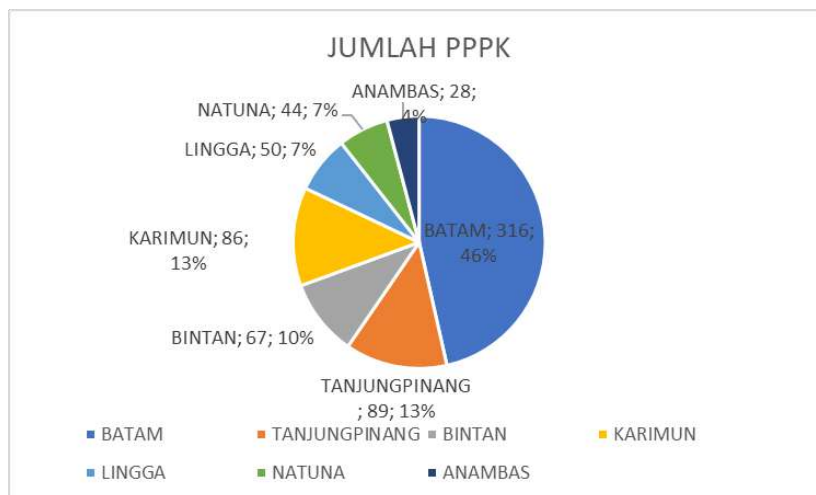
Jumlah P3K di Provinsi Kepulauan Riau

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PPPK
KOTA BATAM	316
KOTA TANJUNGPINANG	89
KABUPATEN BINTAN	67
KABUPATEN KARIMUN	86
KABUPATEN LINGGA	50
KABUPATEN NATUNA	44
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	28

TOTAL	680
--------------	------------

Data Olahan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Grafik II.11 Penyebaran P3K di Provinsi Kepulauan Riau



Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya :

a. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bidang pendidikan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dibanding Tahun 2021. Kenaikan ini terkait usaha pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19. Anggaran yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK bersumber selain dari APBD juga berasal dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran yang tersedia dalam pemberian bantuan biaya personil bagi peserta didik diharapkan mampu menekan angka Putus Sekolah peserta didik hingga bisa mencapai angka partisipasi sekolah secara maximal.

Dengan adanya anggaran bidang pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang indikatornya salah satunya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK, dan juga Peningkatan anggaran sebagai upaya dalam meningkatkan Mutu dan akses layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2022 anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengalami rasionalisasi anggaran, rasionalisasi anggaran ini sesuai dengan hasil evaluasi Kemendagri terhadap belanja belanja yang belum menggambarkan efektifitas anggaran.

Penganggaran ditahun 2022 dalam mendukung peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung seperti Penambahan Ruang kelas baru mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di tahun 2021 hanya dapat membangun Ruang Kelas baru sebanyak 7 ruang sedangkan di tahun 2022 penambahan ruang kelas baru sebanyak 143 ruang yang tersebar untuk jenjang Sekolah menengah Atas, sekolah menengah kejuruan dan Pendidikan khusus.

b. Sumberdaya Manusia

Pelaksanaan Program/kegiatan Subkegiatan telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi, tim penilai, pemberi masukan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan pendidikan.

Jumlah sumberdaya manusia pada Dinas Pendidikan pada tahun 2022 berkurang karena adanya memasuki masa pensiun dan mutasi, namun demikian komitmen pelayanan

tetap dilaksanakan, ini terbukti dengan adanya Cabang Dinas di Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan dalam mengurus administrasi kependidikan. Secara umum dengan Sumberdaya Manusia yang ada saat ini berpengaruh terhadap peningkatan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Perhatian terhadap SDM perlu ditingkatkan khususnya dalam kreativitas dan inovasi agar dapat menjamin kelangsungan Pelayanan pada Dinas Pendidikan.

c. Waktu Pelaksanaan

Mulai dari awal pelaksanaan kegiatan, sebagian besar tidak mengalami kendala dan dapat berjalan sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sudah mulai terpenuhi meskipun tidak secara keseluruhan, akan tetapi pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi pendidikan tetap berjalan dengan baik seperti pengurusan legalisir ijazah, Pengurusan Pindah rayon dan pengurusan administrasi tenaga pendidik (Guru).

**Penigkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Tahun 2022
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan**





PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK OLEH GUBERNUR KEPULAUAN RIAU





Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya (DAK) SMAN 1 SERASAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya
(DAK) SMAN 1 SMAN 1 BUNGURAN TENGAH TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



SMAN 1 PULAU TIGA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



SASARAN. 7***Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak***

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki

kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2022 masih menggunakan data tahun 2021, dikarenakan data IPG Tahun 2022 baru dikeluarkan oleh BPS Pada Agustus 2023. Capaian dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut :

Tabel II.49
Capaian Kinerja Meningkatnya
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	93,49	100,31%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan diskripsi capaian terpisah antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data disajikan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

IPG digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kepri dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan, Berikut evaluasi realisasi indikator indeks pembangunan gender Tahun 2017-2021 :

Tabel II.50
Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,96	92,97	93,10	93,31	93,49

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,96, pada Tahun 2018 meningkat menjadi 92,97, pada Tahun 2019 menjadi 93,10, pada tahun 2020 naik kembali sebesar 93,31 dan pada tahun 2022 menjadi 93,49 jauh diatas target yang sudah ditetapkan yaitu 93,20.

Berikut rincian IPG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022:

Tabel II.51
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut
Kabupaten/Kota
Tahun 2017 - 2021

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				
		2021	2020	2019	2018	2017
1	KEPULAUAN RIAU	93.49	93.31	93.10	92.97	92.96
2	Karimun	91.00	91.25	90.91	91.48	91.35
3	Bintan	93.53	93.12	93.10	92.79	92.58
4	Natuna	91.95	91.67	91.72	91.62	91.31
5	Lingga	89.73	89.25	89.26	89.29	89.73
6	Kepulauan Anambas	90.30	90.27	90.16	90.12	89.97
7	Kota Batam	94.51	94.43	94.42	94.22	94.21
8	Kota Tanjung Pinang	97.14	96.79	96.77	96.47	96.46
9	INDONESIA	91.27	91.06	91.07	90.99	90.96

Sumber BPS 2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurung waktu 5 tahun terakhir

mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya bahkan capaiannya melebihi capaian IPG Nasional Tahun 2022.

IPG Tahun 2022 (93,49) menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya (93,31). kenaikan IPG Tahun 2022 dapat dilihat pada tiga komposit pendukung IPG antara lain : Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Pengeluaran Perkapita.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2021 HLS penduduk laki-laki sebesar 12,85 tahun dan penduduk perempuan sebesar 13,15 tahun. Hal ini menunjukkan hampir tidak ada ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah di Provinsi Kepri antara perempuan dan laki-laki atau juga menunjukkan bahwa hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Indonesia. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.52
Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2020	2021	2020	2021
KEPULAUAN RIAU	12,84	12,85	12,97	13,15
Karimun	12,19	12,35	12,85	12,92
Bintan	12,99	13,13	13,82	14,02
Natuna	13,75	13,76	13,99	14
Lingga	12,86	12,87	12,11	12,35
Kepulauan Anambas	12,78	12,81	12,93	13,01
Kota Batam	13,05	13,06	13,18	13,19
Kota Tanjung Pinang	14,03	14,04	14,31	14,6

Sumber BPS 2022

Dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Indikator pembentuk IPG selanjutnya adalah Rata-rata Lama sekolah (RLS), seperti halnya pembentuk indikator IPM. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (1) *partisipasi sekolah* (2) *jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki* (3) *ijazah tertinggi yang dimiliki* (4) *tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki*. Selama periode 2020 - 2021 capaian RLS penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan. Kondisi ini ditunjukkan oleh capaian yang mengalami kesenjangan. Untuk melihat capaian rata-rata lama sekolah secara rinci menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.53
Rata – Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2020	2021	2020	2021
KEPULAUAN RIAU	10,25	10,30	9,98	10,06
Karimun	8,48	8,49	7,81	7,82
Bintan	8,94	8,95	8,33	8,56
Natuna	9,13	9,14	8,63	8,83
Lingga	7,2	7,38	6,42	6,67
Kepulauan Anambas	7,44	7,65	6,72	6,85
Kota Batam	11,33	11,34	10,97	11,04
Kota Tanjung Pinang	10,43	10,44	10,25	10,26

Sumber BPS 2022

Pada indikator Pengeluaran Perkapita, penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan capaian penduduk perempuan. Pada tahun 2020 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi untuk penduduk laki laki penduduk perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki. Untuk melihat lebih rinci capaian pengeluaran perkapita di provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.54
Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
di Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2020	2021	2020	2021
KEPULAUAN RIAU	20 222	20 212	12 462	12 362
Karimun	18 308	18 307	9 722	9 615
Bintan	21 437	21 341	12 400	12 319
Natuna	21 035	21 049	11 520	11 521
Lingga	17 764	17 693	9 860	9 808
Kepulauan Anambas	17 017	17 083	9 097	9 173
Kota Batam	26 443	26 356	17 361	17 304
Kota Tanjung Pinang	18 740	18 644	15 037	14 984

Sumber BPS 2022

Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2022 disajikan seperti pada tabel di bawah:

Tabel II.55
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target
akhir RPJMD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20	93,49	100,31%

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 maka Provinsi Kepulauan Riau masih diatas target pada akhir periode RPJMD

(2022), di mana pada akhir periode RPJMD jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 93,20, namun terealisasi sebesar 93,49 atau dengan capaian 100,31%.

Jika di bandingkan secara nasional dengan daerah lain, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 berada pada urutan ke- 6. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Indonesia :

Tabel II.56
Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se Indonesia
Tahun 2022

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE-INDONESIA		
RANGKING	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2021
	INDONESIA	91.27
1	D I YOGYAKARTA	94.88
2	DKI JAKARTA	94.84
3	SULAWESI UTARA	94.61
4	SUMATERA BARAT	94.34
5	BALI	94.01
6	KEPULAUAN RIAU	93.49
7	MALUKU	93.19
8	SULAWESI SELATAN	92.85
9	NUSA TENGGARA TIMUR	92.63
10	JAWA TENGAH	92.48
11	SUMATERA SELATAN	92.35
12	ACEH	92.23
13	SULAWESI TENGAH	91.91
14	BANTEN	91.83
15	JAWA TIMUR	91.67
16	BENGKULU	91.16
17	SUMATERA UTARA	90.73
18	SULAWESI TENGGARA	90.68
19	NUSA TENGGARA BARAT	90.53

20	LAMPUNG	90.37
21	MALUKU UTARA	89.75
22	SULAWESI BARAT	89.57
23	JAWA BARAT	89.36
24	KEP. BANGKA BELITUNG	89.11
25	KALIMANTAN SELATAN	88.86
26	KALIMANTAN TENGAH	88.79
27	JAMBI	88.62
28	RIAU	88.38
29	GORONTALO	87.50
30	KALIMANTAN UTARA	87.30
31	KALIMANTAN BARAT	86.95
32	KALIMANTAN TIMUR	85.95
33	PAPUA BARAT	83.00
34	PAPUA	80.16

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebesar 93,49 jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,27, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun beberapa program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi (IPG) antara lain:

1) *Memberikan Pemahaman kepada perempuan untuk menjadi perempuan yang cerdas.*

Pembangunan karakteristik gender di Kepulauan Riau yang tentunya wajib mendapatkan perhatian penuh dari berbagai pihak, mengingat isu gender merupakan isu dengan lintas sektoral serta lintas disiplin ilmu yang beragam serta memiliki

makna yang kuat dalam pembangunan, untuk itu upaya Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan Kegiatan yang dilakukan dari dana APBD tahun 2022 yaitu **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**. Kegiatan ini ialah kegiatan yang memberikan kontribusi kepada para perempuan untuk melanjutkan sekolah (Paket C). pada tahun 2022 18 orang perempuan mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan sekolah Paket C. dengan anggaran sebesar Rp. 203.879.010,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.872.716,- atau 98,03%. Adapun rincian program / kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di tabel bawah ini :

Rincian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		FISIK
						Rp	%	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mengikuti sekolah perempuan	203.879.010	199.872.716	98,03	100

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian program / kegiatan / sub kegiatan ini ialah :

- a. Belum optimalnya capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 25 orang, namun besaran anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 203.879.010,- Hal ini diakibatkan oleh 2 (dua) kali refocusing anggaran. Sehingga anggaran tersebut hanya cukup untuk mengakomodir 18 orang peserta sekolah perempuan di Provinsi Kepri.



2) Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan

Kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD tahun 2022 antara lain **Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** Rp. 897.760.016,- dengan Realisasai Rp. 887.305.786,- (98,84%), **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi** Rp. 1.717.402.622,- dengan Realisasi Rp. 1.667.369.137,-(97,09%). Selanjutnya kegiatan **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota** Rp. 409.350.900,- dengan Realisasi Rp. 400.484.795,- (97,83%). Dan terakhir kegiatan **Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi** Rp. 1.872.163.302,- dengan Realisasi Rp. 1.842.636.220,- (98,42%). Adapun rincian program / kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di table bawah ini :

Rincian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		FISIK
						Rp	%	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Industri Rumahan yang ditingkatkan kapasitasnya	897.760.016	887.305.786	98,84	100

2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang ekonomi	1.717.402.622	1.667.369.137	97.09	100
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang terlatih untuk peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	409.350.900	400.484.795	97,83	100
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan keterampilan / life skill	1.872.163.302	1.842.636.220	98,42	100

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian program / kegiatan / sub kegiatan ini ialah :

- a. Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya perempuan untuk bekerja pada sector formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi.
- b. Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi.

Kebijakan pembangunan nasional telah menetapkan kesetaraan gender merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan

Indeks Pemberdayaan Gender. Saat ini perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan serta capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di mana saat ini laki-laki sebesar 10,30 tahun dan perempuan sebesar 10,06 tahun. Inilah menjadi salah satu inisiasi peningkatan Life skill perempuan dan sekolah perempuan di Provinsi Kepulauan Riau.

➤ ***Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya***

- Dalam upaya mencapai sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 103 orang, dengan rincian 42 org pegawai PNS, 26 Org pegawai PTT dan 35 Org pegawai THL dengan struktur organisasi terdiri dari 1 org Kepala Dinas, 6 orang pejabat Eselon III, 4 org Pejabat Eselon IV atau 14 orang pejabat fungsional yang disetarakan. Pegawai PTT dan THL dilingkungan Dinas P3AP2KB disamping berada di Dinas, juga berada di UPTD PPA, Workshop dan Puspaga (Pusat Pembelian Keluarga) dalam upaya pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak, peningkatan keterampilan dan penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga.





➤ **Kendala yang dihadapi**

- Masih terjadi kesenjangan kesenjangan di berbagai macam bidang akibat situasi masa pandemi Covid-19 seperti: Kehilangan Pekerjaan, Pendapatan Menurun, Tingkat Stress meningkat, pekerjaan rumah tangga meningkat dan juga tanggungjawab mengajar anak sekolah secara daring, Produktivitas Usaha Menurun dengan meningkatnya beban yang bertambah berlipat-lipat, Menjadi tulang punggung keluarga karena pasangan meninggal atau sakit dan harus isolasi mandiri dan Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender. Hal ini menjadi kendala untuk optimalnya pelaksanaan peningkatan life skill perempuan.
- Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas.

➤ **Solusi**

- Salah satu upaya dilakukan pemerintah selain meningkatkan life skill perempuan adalah mendorong perempuan terlibat dalam perekonomian dan membangun jejaring sosial.
- Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan support system dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	93,20	93,49	100,31	5.100.555.850,00	4.997.668.654,00	97,98	Efisien

SASARAN. 8***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat***

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat maka ditetapkan indikator kinerja yaitu Prevalensi stunting.

Gizi baik merupakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas karena berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas belajar, kemampuan kognitif dan intelektualitas seseorang. Gizi baik juga merupakan penanda keberhasilan pembangunan dan terpenuhinya hak azasi manusia terhadap pangan dan kesehatan. Perbaikan gizi masyarakat merupakan sarana untuk memutus rantai kemiskinan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan di tingkat masyarakat, keluarga dan individu.

Sektor kesehatan khususnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat merupakan salah satu fokus dalam pembangunan sesuai dengan RPJMD Kepulauan Riau 2021 – 2026 dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah daerah Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Kesehatan merupakan tanggung jawab semua elemen, baik

pemerintah daerah, lintas program, lintas sektor, akademisi, praktisi, komunitas, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, hal ini akan menjadi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel II.57

**Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

NO	Indikator Kinerja	Target)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	15,8	15,4	102,6

Stunting adalah Keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya (-2 SD Median) dimana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan eye contact, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat.

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi

badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin

Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U - 3 SD <- 2 SD). Untuk data prevalensi stunting didapat melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan RI. Per tahun 2022, capaian prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dari hasil data SSGI sebesar 15,4%. Namun untuk rincian perhitungan capaian tersebut tidak dipublikasikan.

Berdasarkan data SSGI 2022, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terendah nomor 4 se-Indonesia setelah Bali, DKI Jakarta dan Lampung dalam hal prevalensi stunting. Untuk pengukuran kinerja, maka capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori **sangat baik** karena sudah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 102,6 %.

Berikut disampaikan capaian indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 - 2022 :

Tabel II.58
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2022

NO	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022
1.	Prevalensi Stunting	17,6	15,4

Dilihat data tabel diatas prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 17,6% mengalami penurunan sebesar 2,2% dimana prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar

15,4%. Sementara itu prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,2 %. Sementara itu prevalensi stunting di Provinsi pada tahun 2022 dibandingkan dengan prevalensi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,4%. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan prevalensi pada akhir tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 8,2%.

Perbandingan target dan realisasi prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.59
Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2022

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
1.	Prevalensi stunting	2018	21.35	23.6
		2019	20.85	16.8
		2020	20.35	7.2
		2021	20	17.6
		2022	15.8	15.4

Sementara itu capaian pada prevalensi stunting pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target nasional maka sudah diatas target yang ditetapkan. dimana pada tahun 2022 prevalensi stunting di Kepulauan Riau sebesar 15,4% dibawah target nasional 18,4%.

Tabel II.60
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	18,4	15,4	119,5

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 di bandingkan dengan target nasional maka persentase *stunting* Provinsi Kepulauan Riau sangat baik karena sudah melampaui target dengan capaian nasional sebesar 119,5 % atau dalam kategori **sangat baik**.

Berikut jumlah prevalensi stunting di 7 kabupaten Kota se- Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2022 sebagai berikut

Tabel II.61
Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

NO	Kabupaten Kota	2021	2022
1.	KARIMUN	17,6	13,3
2.	BINTAN	20	17,8
3.	NATUNA	17,8	18
4.	LINGGA	25,4	18,9
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14
6.	BATAM	17,5	15,2
7.	TANJUNGPINANG	18,8	15,7
8.	PROVINSI	17,6	15,4

Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Lingga dengan capaian 18,9 % dan terendah di Kabupaten Karimun 13,3%. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami kenaikan prevalensi sebesar 0,2%. Penurunan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 7,7% disusul dengan lingga (6,5%) dan karimun (4,3%).

Berikut disampaikan prevalensi stunting di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2021 – 2022 :

Tabel II.62
Persentase Stunting di Indonesia Tahun 2021-2022

NO	Kabupaten Kota	2021	2022
1.	BALI	10,9	8
2.	DKI JAKARTA	16,8	14,5
3.	LAMPUNG	18,5	15,2
4.	KEPULAUAN RIAU	17,6	15,4
5.	DI YOGYAKARTA	17,3	16,4
6.	RIAU	22,3	17
7.	dst		
8.	INDONESIA	24,4	21,6

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa secara nasional prevalensi stunting di Indonesia menurun dari tahun 2021 sebesar 24,4% menjadi 21,6% pada tahun 2022. Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan stunting dari tahun 2021 17,6% menjadi 15,4% pada tahun 2022, angka ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi provinsi terendah prevalensi stunting ke 4 se Indonesia selama 2 tahun berturut-turut.

Untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berusaha mencapai sasaran dengan melibatkan seluruh stakeholder baik dari lintas program maupun lintas sektor. Adapun OPD yang mendukung dalam penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 901 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu Provinsi Kepulauan Riau juga telah berusaha memaksimalkan penggunaan sumber daya anggaran untuk

mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.63
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,4	102,6	1,888,809,330	96,02	+6,58

Di lihat dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dari target 15,4 tercapai 102,6% pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, maka untuk tingkat efisiensi sebesar positif 6,58%.

Tabel II.64
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran Tahun 2022-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022		
		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	113,6	89,97	+23,63	102,6	96,02	+6,58

Persentase tingkat efisiensi pada tahun 2022 mencapai +6,58%, sedangkan persentase efektifitas pada tahun 2021 sebesar +23,63%. Jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran tahun 2022 sebesar Rp. 1,888,809,330,-mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana anggaran



dukungan untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar Rp. 2,785,791,500,-.

Walaupun dari segi anggaran untuk sasaran tersebut menurun akan tetapi prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau terus bergerak menurun, hal ini dikarenakan penurunan stunting dipengaruhi oleh upaya dalam jangka panjang. Penurunan ini telah berada di atas target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keberhasilan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil dari peran aktif lintas program dan lintas sektor. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau dapat diturunkan dan mencapai target kinerja ditetapkan karena peran dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam Penanganan stunting sesuai yang diamanatkan pada perpres 72 tahun 2021. Penanganan stunting telah menysasar sektor sensitif yaitu penanganan diluar kesehatan dengan melibatkan OPD terkait dimana sektor ini memberikan kontribusi 70% dalam upaya penurunan stunting. Adapun hal-hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PU dan Dinas Perkim terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
- Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PP dan KB terkait layanan kesehatan dan KB
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
- Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.



- Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
- Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya

Upaya spesifik :

- Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
- Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping
- Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting
- Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit
- Distribusi dan Pemberian PMT bagi Ibu Hamil dan Balita gizi kurang
- Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (Follow up)
- Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
- Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI
- Pemberian tablet Fe kepada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun.
- Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA
- Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita
- Sosialisasi Gerakan KADARZI, Gizi Seimbang melalui media massa dan elektronik.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan

stunting di kedepankan melalui perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita. Sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah.

➤ **Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Jumlah total anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2022 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Rp. 80,940,668,237.00.- (Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Tabel II.65
Realisasi Keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 yang Menunjang Persentase Balita Pendek (stunting) Pada
anak balita
Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	961,848,100	922,744,092	95.93	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	672,383,530	623,036,366	92.66	
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	254,577,700	253,230,100	99.47	
			Total Anggaran	1,888,809,330	1,799,010,558	96.02	Efisien

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” melalui pelaksanaan Program/kegiatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting per tahun 2022 sebesar Rp. 1,888,809,330.- dengan realisasi sebesar Rp. 1,799,010,558,- atau 96,02 %.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 seperti pelacakan kasus gizi buruk, pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader dalam hal komunikasi antar pribadi dalam penurunan stunting, pelatihan manajemen balita sakit dan tata laksana balita gizi buruk, pelatihan USG bagi dokter di Puskesmas, peningkatan kapasitas kader posyandu, pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, pembudayaan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), pencapaian imunisasi dasar lengkap bagi anak, penanggulangan kecacingan dan sebagainya. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan : Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” melalui pelaksanaan Program/kegiatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting per tahun 2022 sebesar Rp. 1,888,809,330.- dengan realisasi sebesar Rp. 1,799,010,558,- atau 96,02 %.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 seperti pelacakan kasus gizi buruk, pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader dalam hal komunikasi antar pribadi dalam penurunan stunting, pelatihan manajemen balita sakit dan tata laksana balita gizi buruk, pelatihan USG bagi dokter di Puskesmas, peningkatan kapasitas kader posyandu, pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, pembudayaan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), pencapaian imunisasi dasar lengkap bagi anak, penanggulangan kecacingan dan sebagainya.

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pelacakan Balita Stunting



Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu

SASARAN. 9**Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar**➤ **Rasio Elektrifikasi**

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari atas ribuan pulau, sehingga masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia karena rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah perdesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan. Merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat ditambah seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. Namun pelaksanaan penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), selaku lembaga resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mengelola masalah kelistrikan di Indonesia, sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik secara keseluruhan.

Berikut dapat dilihat capaian kinerja Percepatan Infrastruktur Dasar dengan indikator Rasio Elektrifikasi tahun 2022:

Tabel II.66

**Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Rasio Elektrifikasi Tahun 2022**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 Rasio

Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2022 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga

listrik (baik dari PLN maupun Non PLN) sebesar 650.793 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 675.631 RT= 96,32%.

Hasil analisis Rasio Elektrifikasi pada tahun 2022 dengan target sebesar 95,5 Rasio dapat tercapai sebesar 96,32 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 101 Rasio atau dalam kategori **kinerja Sangat Baik**.

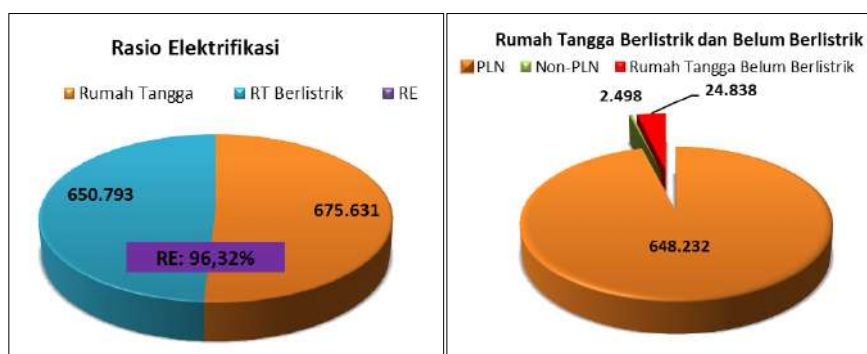
Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti Program Bantuan Penyambungan Listrik PLN bagi Rumah Miskin, Program Listrik Pedesaan Tahun 2022, program melistriki daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) program merangkai pulau-pulau dengan kelistrikan, serta adanya program penambahan pembangunan kelistrikan Non PLN di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan kegiatan, yaitu:

1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan melakukan pengadaan dan pemasangan instalasi listrik baru kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berlistrik, pengadaan pembangkit tenaga disel (Genset) di pulau-pulau yang belum berlistrik.
2. Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi antara lain dalam pemanfaatan Energi Baru

Terbarukan khususnya Pemasangan *Solar Home system* (SHS).

Capaian kinerja dibidang kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut :

Grafik II.12
Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2022



Untuk kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.67
Data Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE (%)
			PLN	Non-PLN	LTSH E	Jumlah		
1	BINTAN	58.866	57.705	214	-	57.289	1.577	97,32
2	KARIMUN	83.237	80.155	274	-	80.429	2.808	96,63
3	NATUNA	24.932	24.667	-	-	24.667	265	98,94
4	LINGGA	30.944	27.416	152	-	27.568	3.376	89,09
5	KEP. ANAMBAS	15.203	14.554	46	-	14.600	603	96,03

6	BATAM	369.796	351.961	1.812	63	353.836	15.960	95,68
7	TANJUNGPINANG	92.653	92.404	-	-	92.404	249	99,73
Total Provinsi Kepri		675.631	648.232	2.498	63	650.793	24.838	96.32%

Grafik II.12

Rasio Elektrifikasi

Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Keterangan:

1. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik PLN berdasarkan Data Unit Layanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN berdasarkan wilayah yang mendapatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Komunal baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut realisasi serta capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022 :

Tabel II.68
Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

Indikator kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Elektrifikasi	94,50%	94,50%	100	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 Rasio

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2021 dengan target 94,50% terealisasi sebesar 94,50% dengan persentase capaian 100%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 96,32 Rasio dari target sebesar 95,5 Rasio dengan persentase capaian sebesar 101 Rasio.

Adapun perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel II.69
Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

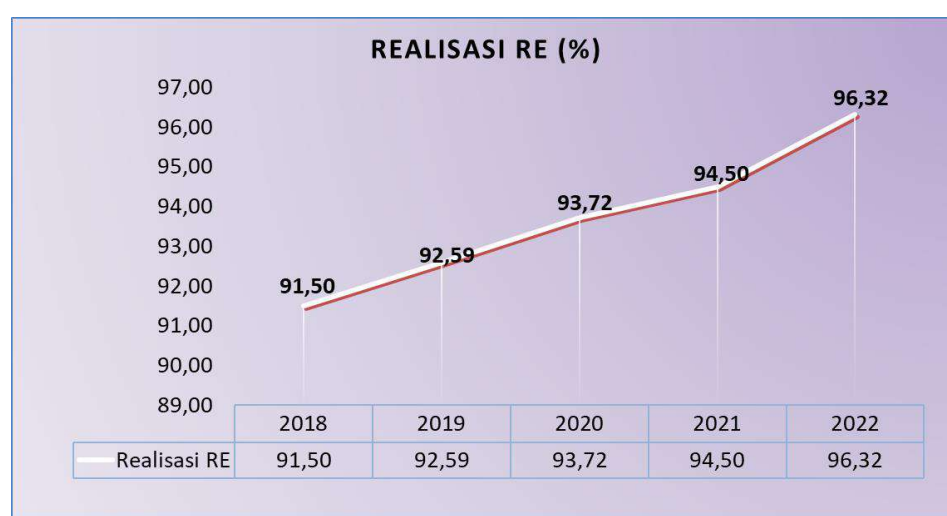
No	Indikator kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (RT)	523.931	539.421	628.596	635.593	650.793
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	572.581	582.570	670.701	672.614	675.631
3	Rasio Elektrifikasi	91,50%	92,59%	93,72%	94,50%	96,32 Rasio

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2018 ke tahun 2022. Pada tahun 2018 realisasi rasio elektrifikasi sebesar 92,50%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 92,59%, lalu pada tahun 2020 meningkat kembali

menjadi 93,72%, tahun 2021 juga meningkat menjadi 94,5 Rasio, tahun 2022 kembali meningkat menjadi 96,32 Rasio.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2018-2022 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini :

Grafik II.13
Pencapaian Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2018-2022



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Rasio Elektrifikasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 Rasio Elektrifikasi sebesar 91,50% sedangkan sampai dengan tahun 2022 meningkat menjadi 96,32 Rasio maka ada peningkatan sebesar 4,82 Rasio.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-

pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD serta jenis sumber energi primer yang terbatas.

2. Untuk rasio desa berlistrik, selain kendala diatas adalah masalah mobilisasi material ke lokasi pembangkit yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero), serta tanah/jalur yang akan dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Menggunakan pembangkit yang kecil, tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.
2. Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja:

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Anggaran

Pagu Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022

mengalami rasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri pagu anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Rp. 8.081.192.888,- terealisasi Rp. 7.906.454.263,29 (97,84%) pada sub kegiatan :

- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu dengan pagu Rp. 1.705.405.863,-, terealisasi Rp. 1.631.220.943,- (95,65%).
- Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan pagu Rp. 47.438.000,-, terealisasi Rp. 33.039.400,- (69,65%).
- Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan

Perdesaan dengan pagu Rp. 6.170.672.025,-, terealisasi Rp. 6.091.280.836,29 (98,71%).

- Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan pagu Rp. 157.677.000,-, terealisasi Rp. 150.913.084,- (95,71%).
- 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi pada Sub Kegiatan sebagai Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi dengan pagu Rp. 2.754.313.630,-, terealisasi Rp. 2.742.121.590,63,- (99,56%).

➤ **Pengurangan Luas Kawasan Kumuh**

A. Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar ditetapkan indikator kinerja yaitu Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pengurangan luas Kawasan kumuh pada tahun anggaran 2022 dapat dilakukan dengan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat itu sendir. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi. Keseuaian standar teknis dan kelayakan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, antara lain :

1. Bangunan Gedung;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Pemenuhan kesesuaian standar teknis dan kelaikan fungsi yang di capai pada tahun anggaran 2022 dalam pencegahan dan/atau pengurangan luas kawasan kumuh, sebagaimana disampaikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.68
Capaian Kesesuaian Standar Teknis dan Kelaikan Fungsi
Tahun 2022

No	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan	Jumlah Target Awal	Satuan	Capain Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	2.125	Unit	750
		Tingkat Kepadatan Bangunan	-	Ha	0
		Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis	476	Unit	0
2	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	12.830,28	Meter	4.084
		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	42.501,05	Meter	3.085
3	Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1.216	KK	16
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	2.051	KK	16
4	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	28,10	Ha	0
		Ketidaktersediaan Drainase	11.056,47	Meter	334

No.	Kriteria Kekumuhan	Indikator Kekumuhan	Jumlah Target Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
		Kualitas Konstruksi Drainase	49.744,98	Meter	650
5	Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	338	KK	0
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1.595	KK	0
6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	3.232	KK	0
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.865	KK	36
7	Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.977	Unit/KK	699
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3.659	Unit/KK	0

Sumber Data diolah dari Data Kotaku

Lokasi pencegahan dan pengurangan luas kawasan kumuh yang dicapai dan/atau dijangkau pada tahun anggaran 2022 berada pada 3 (tiga) lokasi, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.69
Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2022

No.	Lokasi Kumuh / Kelurahan	Alokasi Anggaran (Rp)	Luas Capaian Kumuh (Ha)
1	2	3	4
1	Baloi Permai – Kota Batam	2.035.529.336,00	6,08
2	Batu Merah – Kota Batam	169.982.226,00	0,51
3	Sagulung Kota – Kota Batam	1.898.300.932,00	5,67
4	Sungai Harapan – Kota Batam	590.679.920,00	1,76
5	Dompak – Kota Tanjungpinang	633.043.808,00	1,89
6	Kampung Bulang – Kota Tanjungpinang	657.769.142,00	1,96

No.	Lokasi Kumuh / Kelurahan	Alokasi Anggaran (Rp)	Luas Capaian Kumuh (Ha)
1	2	3	4
7	Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang	335.590.172,00	1,00
8	Tanjung Uban Kota – Kabupaten Bintan	1.483.425.168,00	4,43
Jumlah		7.804.320.704,00	23,30

Evaluasi Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel II.70
Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145.27 Ha	147.24 Ha

Hasil evaluasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2022 dengan target 145.27 Ha terealisasi sebesar 147.24 Ha, sehingga penurunan Luasan kumuh yang ditargetkan Tahun 2022 sebesar 25.27 Ha dapat tertangani sebesar 23.30 Ha. Sehingga capaian kinerja Indikator Pengurangan Luas Kawasan Kumuh sebesar 92,20% atau dalam kategori **kinerja sangat memuaskan**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2021 dan tahun 2022:

Tabel II.71
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	381,45 Ha	66,87%	147.24 Ha	92.20%

Pengurangan Luas Kawasan Kumuh merupakan pengurangan Luas Total kawasan kumuh Kewenangan Provinsi dikurangi Luas kawasan kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani pada tahun n. Evaluasi terhadap Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2022 dapat digambarkan dengan formulasi Luas Total kawasan kumuh Kewenangan Provinsi sebesar 170,54 Ha dikurangi Luas kawasan kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani pada tahun 2022 sebesar 147.24 Ha.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

Berdasarkan capaian realisasi kinerja Tahun 2022 maka indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.72
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	255,09 Ha	381,45 Ha	145.27 Ha	147.24 Ha

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Pada Tahun 2021 Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi sebesar 18.43 Ha sedangkan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 23.30 Ha. Adapun Penanganan Kumuh pada setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.73
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Pada Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

KOTA/KAB	NOMOR SK TERAKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	KEWENANGAN PROVINSI (10-15Ha)	PENANGANAN KUMUH PER TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
BINTAN	435/IX/2014	BINTAN UTARA	TANJUNGPINANG KOTA	13,6	1,48				
		1	1	13,6	1,48	0	0	0	0
LINGGA	17/KPTS/II/2017	LINGGA	PANGKALAN LANTAU	10,02					
LINGGA	17/KPTS/II/2017	SINGKEP BARAT	MAROK TUA	13,3					
		2	2	23,32	0	0	0	0	0
BATAM	KPTS.290/HK/IX/2019	BULANG	PANTAI GELAM	12,38					
BATAM	KPTS.290/HK/IX/2019	BULANG	TEMBOYONG	14,88					
BATAM	KPTS.290/HK/IX/2019	BULANG	BATU LEGONG	12,18					
BATAM	KPTS.290/HK/IX/2019	SAGULUNG	SAGULUNG KOTA	10,7	1,90				
BATAM	KPTS.290/HK/IX/2019	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	11,67	2,04				
BATAM	KPTS.290/HK/IX/2019	SEKUPANG	SUNGAI HARAPAN	12,6	0,59				
BATAM	KPTS.290/HK/IX/2019	SEKUPANG	TANJUNGPINANG	10,84					
BATAM	KPTS.290/HK/IX/2019	BATUAMBAR	BATU MERAH	14,6					
		8	8	99,85	4,52	0	0	0	0
TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	TANJUNGPINANG TIMUR	11,79	7,11				
TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	BUKIT BESTARI	DOMPAK	11,16	1,08				
TANJUNGPINANG	594 Tahun 2019	TANJUNGPINANG TIMUR	KAMPUNG BULANG	10,82	9,1				
		3	3	33,77	17,29	0	0	0	0
TOTAL		14,00	14,00	170,54	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Tahun 2022 terdapat di Kelurahan Tanjunguban Kota, Kelurahan Sagulung Kota, Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan Sungai Harapan, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Dompok dan Kelurahan Kampung Bulang.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional

Penanganan permukiman kumuh dilakukan pada lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, berdasarkan penilaian indikator dan kriteria kumuh yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dapat dilihat perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dengan target nasional pada tabel berikut :

Tabel II.74
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Target Nasional Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Provinsi	Capaian
1	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	10.000 Ha	147.24 Ha	1,47%

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024, salah satunya menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 10.000 ha).

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dinilai atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan. Penanganan Kawasan kumuh

berdasarkan RPJMD 2021-2026 seluas 170,54 Ha. Pada Tahun anggaran 2022 ditargetkan Pengurangan Luasan Kawasan kumuh sebesar 25.27 Ha, sehingga berkurang menjadi 145.27 Ha, realisasi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh pada tahun 2022 sebesar 23.30 Ha atau sebesar 92,20% dari target di tahun 2022. Pendekatan penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan memperhatikan tingkat kekumuhan dan tipologi permukiman. Peningkatan Penanganan Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2022 antara lain di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Bintan.

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori **sangat memuaskan**. Dukungan program/kegiatan/subkegiatan penunjang capaian kinerja Pengurangan Luasan Kawasan kumuh pada tahun anggaran 2022 Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari rincian sebagai berikut :

Tabel II.75
Program/Kegiatan Penunjang Capaian Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran				Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi	
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	145.27 Ha	147.24 Ha	92.20%	1.372.943.274,00	1.292.304.000,00	94,13%	-	-
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.372.943.274,00	1.292.304.000,00	94,13%		

	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.372.943.274,00	1.292.304.000,00	94,13%		
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	145.27 Ha	147.24 Ha	92.20%	6.431.377.430	6.424.568.416	99,89%	-	-
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				6.431.377.430	6.424.568.416	99,89%		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				6.431.377.430	6.424.568.416	99,89%		

G. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Pagu Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan pengurangan luas Kawasan kumuh adalah Rp 7.804.320.704,00 atau sebesar 3,54% dari total pagu APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sejumlah Rp220.358.678.160,00.

2. Sumber Daya Manusia

Di lingkungan internal jumlah Sumber Daya Manusia/Personil terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yang terdiri dari 35 ASN, 22 PTT dan 38 THL sedangkan dari eksternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis,

dan fasilitasi untuk pembinaan pencegahan kelompok agar potensi Kawasan permukiman kumuh tidak bertambah dan menjadi Kawasan Kumuh.

3. Waktu Pelaksanaan

Indikator kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikategorikan tercapai dengan baik berdasarkan capaian kinerja 92,20% dan sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang telah direncanakan.

SASARAN. 10

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

Infrastruktur merupakan syarat dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah lemah, itu hanya berarti bahwa perekonomian daerah itu berjalan dengan cara yang tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi dan sulitnya penduduk untuk mengakses layanan publik adalah beberapa dampak dari buruknya ketersediaan infrastruktur. Hasil akhirnya kesejahteraan menjadi rendah (tidak tumbuh).

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro memiliki hubungan timbal balik. Pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier, sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada.

Hingga saat ini kondisi infrastruktur di Kepulauan Riau secara makro sudah cukup baik, namun terdapat permasalahan pada pemerataan infrastruktur yang tersedia. Ketidakmerataan

infrastruktur itu dapat diidentifikasi dari tingginya ketimpangan kesejahteraan antar-Kabupaten/Kota.

Ketimpangan antarwilayah untuk mengejar perkembangan kebutuhan ekonomi dan sosial berdampak pada kesejahteraan yang rendah. Banyak kajian menyatakan bahwa untuk kasus Indonesia lambatnya pengembangan infrastruktur dihambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur, sementara swasta memiliki keengganan yang tinggi untuk berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

Saat ini kondisi pembangunan di perkotaan dan perdesaan dimana terjadi ketimpangan yang sangat besar, kondisi infrastruktur merupakan salah satu komponen yang dapat dilihat. Pembangunan ekonomi selalu dipusatkan di daerah perkotaan yang lebih maju dan lebih siap infrastrukturnya daripada daerah perdesaan. Kondisi ini dapat diamati di provinsi Kepulauan Riau, Terciptanya konektivitas atau keterhubungan antar wilayah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menyatukan suatu negara. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak akan lagi tercipta karena pembangunan tidak berfokus di wilayah tertentu dan tanpa diskriminasi pada daerah yang dianggap terbelakang. Dengan konsep perspektif regional ini maka pembangunan antar wilayah tidak lagi berdiri sendiri namun ada konektivitas diantaranya. Konektivitas tersebut diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah satu dengan yang lain dan meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah. Pembangunan ini akan meningkatkan dan meratakan pembangunan, minimal pembangunan secara ekonomi, dan memangkas angka kemiskinan.

1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Indikator Rasio Konektivitas Provinsi merupakan gabungan indikator kinerja angkutan darat , angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP) dan Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Tabel II.76
Data Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) - Tanjungpinang

Tabel 11.78
Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

NO	Lintas Penyeberangan
1	Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun
2	Dabo - Tanjung Pinang
3	Tanjung Balai Karimun - Kundur
4	Tanjung Balai Karimun - Mengkapan Sei. Selari
5	Dabo - Penarik
6	Dabo - Kuala Tungkal
7	Tanjung Uban - Tambelan
8	Tambelan - Sintete
9	Tanjung Uban - Matak
10	Matak - Midai
11	Midai - Penagi
12	Penagi - Subi

13	Subi - Serasan
14	Serasan - Sintete
15	Telaga Punggur - Dabo
16	Telaga Punggur - Kuala Tungkal
17	Telaga Punggur - Mengkapan Sei Selari
18	Tanjung Balai Karimun - Telaga Punggur

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2022 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	Rasio konektivitas = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ - IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) - IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) : - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) : - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <u>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau:</u> 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

	3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <u>Bobot Trayek atau Lintas :</u> 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
--	---

No	Trayek/Lintas	Tahun 2022		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	16	18	0,5	70%	24

(jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)		(IK1 x bobot angkutan jalan)		Persentase Akhir IK1	
IK1	$= \frac{6 \times 1}{10} = 0,6$	X	30%	=	18%

(jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi)		IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan		Persentase Akhir IK2	
IK2	$= \frac{18 \times 0,5}{24} = 0,38$	X	70%	=	26,25%

Rasio Konektivitas = IK1 + IK2 = 18% + 26,25% = 44,25%

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 ditetapkan sebesar adalah 41,33%

maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 107% sehingga capaian kinerja dalam kategori **kinerja sangat baik**. Tingkat Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.79
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Konektivitas	41,33%	44,25%	107

2. Capaian Indikator Tahun Sebelumnya

Berikut data capaian sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau dengan indikator sasarannya yaitu rasio konektivitas tahun sebelumnya tabel berikut :

No	Trayek/Lintas	Tahun 2021		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	14	14	0,5	70%	24

Dihitung dengan menggunakan rumus rasio konektivitas di atas maka didapatkan rasio sebagaimana pada table berikut:

Tabel II.80
Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2021

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Rasio Konektivitas	38,42%	38,42%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat peningkatan capaian realisasi atas indikator kinerja rasio konektivitas dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Pada Tahun 2021 realisasi rasio konektivitas sebesar 38,42 %, sehingga tingkat capaian pada tahun 2021 adalah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu mencapai persentase sebesar 100% atau dalam kategori sangat baik.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun 2021 dan tahun 2022 dapat tergambar pada table berikut:

Tabel 11.81
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas
Tahun 2021 dan Tahun 2022

TAHUN	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
2021	Rasio Konektivitas	38,42	38,42	100%
2022	Rasio Konektivitas	41,33	44,25	107%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah dengan Nasional

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan sasaran “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas” dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Sedangkan pada tingkat Nasional menetapkan indikator kinerja rasio konektivitas nasional (khususnya angkutan darat) pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 22,46%.

Tabel 11.82
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas
Tingkat Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

TAHUN	Indikator kinerja	Realisasi (rasio)
Nasional	Rasio Konektivitas	22,46
Provinsi Kepulauan Riau	Rasio Konektivitas	44,25
Tingkat Capaian Provinsi dibanding Nasional		197%

4. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Target Indikator Kinerja

Di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau” dengan indikator kinerjanya “rasio konektivitas”. Berdasarkan RPJMD tersebut sampai dengan tahun 2026 target rasio konektivitas ditetapkan sebesar 65% pada tahun 2022 telah tercapai 41,33% atau sudah tercapai 63,58% dari target akhir RPJMD

Tabel II.83
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target akhir RPJMD

No	Indikator kinerja	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas	65 %	41,33%	63,58%

Keberhasilan dalam mencapai target indikator yang ditetapkan tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan untuk mencapai target tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun anggaran 2022 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau. Maka Dinas Perhubungan telah membuat Rencana Kerja

Tahun 2022 dengan merencanakan melaksanakan program/kegiatan yaitu:

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatannya:
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatannya:
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; dan
 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek, aspek pertama yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dengan capaian sebesar 100%, sedangkan aspek yang kedua yaitu

kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dari jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 70.260.061.344,- dengan capaian realisasi keuangan Rp 65.394.916.987,- atau sebesar 93,08%. Realisasi Keuangan ini dibawah target yang ditetapkan dikarenakan pada 31 Desember 2022 terdapat pekerjaan yang belum diajukan pembayarannya sehingga terjadi tunda bayar. Secara rinci capaian realisasi keuangan program dan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja rasio konektivitas tahun 2022 sebagaimana tergambar pada table berikut:

Tabel II.84
Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Pendukung

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,627,000,406	1,610,878,002	99.01
1	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>	1,351,696,406	1,337,412,254	98.94
2	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	137,504,000	136,755,875	99.46
3	<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	68,834,000	68,830,573	99.99
I	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	68,633,069,938	63,784,038,985	92.93
II	<i>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</i>	92,462,500	92,106,760	99.62
2	<i>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern</i>	7,720,351,000	7,567,426,713	98.02

3	<i>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</i>	246,591,500	246,362,581	99.91
4	<i>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	60,573,655,938	55,878,142,931	92.25
JUMLAH		70,260,061,344	65,394,916,987	93.08

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 juga tidak lepas dari dukungan sumberdaya manusia yang tersedia sesuai struktur organisasi yang ada. Sebagian besar pegawai dari pimpinan sampai dengan tingkat staff memiliki andil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan antara yaitu Kepala Dinas yang melakukan pembinaan, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencapaian indikator. Pada tingkat Kepala Bidang (1 orang) dan Kepala Seksi (3 orang) pada Bidang LLAJ yang dibantu oleh staff-staff yang ada sebagai pelaksana Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai target penyediaan trayek angkutan jalan.

Pada Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kepelabuhanan (1 orang Kepala Bidang dan 3 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan prasarana pelabuhan (pelabuhan penyeberangan dan Bidang Angkutan Perairan (1 orang Kepala Bidang dan 3 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan angkutan penyeberangan dan lintas penyeberangannya.

Kedua bidang ini saling berkoordinasi kedalam maupun keluar (Kementerian Perhubungan) yang dibantu oleh staff-staff yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja penyediaan lintas angkutan penyeberangan.

Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori **sangat baik**.

SASARAN. 11***Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir***

Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang perekonomian masyarakat. Salah satu Infrastruktur penting untuk pendukung Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir adalah Infrastruktur Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa antar wilayah. *Jalan kondisi Baik* dapat didefinisikan sebagai jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam

menunjang segala kebutuhan manusia baik itu dalam kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat. Pekerjaan terkait infrastruktur jalan merupakan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau (Dinas PUPP). Untuk mendukung sasaran strategis dari Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir, Dinas PUPP menetapkan Indikator kinerja sesuai RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 yaitu Persentase Jalan Kondisi Baik dengan target awal perencanaan 61,75%.

Untuk tahun 2022, target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis adalah 63,25%, setelah dilakukan survey kondisi jalan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPP, capaian realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 76,55% dengan persentase sebesar 121,03%.

Jalan kondisi Baik merupakan salah satu sasaran yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026. Untuk mencapai sasaran **Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir**, ditetapkanlah indikator kinerja berupa *Persentase Jalan Kondisi baik*. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel II.85
Capaian Kinerja Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Tahun 2022
(Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2022)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	63,25	76,55	121,03

Untuk menghitung capaian kinerja persentase jalan berkondisi baik tahun 2022 adalah membandingkan kondisi kemandapan ruas jalan berkondisi baik dengan panjang ruas jalan sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau No 1863 tahun 2016 dengan Panjang ruas jalan 896,45 Km.

Tabel II.86
Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik

Jalan Berkondisi Baik Tahun 2022 (A)	Total Jalan Provinsi Sesuai SK Gubernur Kepulauan Riau (B)	Capaian Kinerja jalan Berkondisi Baik Tahun 2022 (B/A*100)
686,199 KM	896,45 KM	76,55%

Dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun 2022 ada peningkatan kinerja sebesar 0,17% dari 76,38% ke 76,55%. Analisis penyebab keberhasilan kinerja dikarenakan pekerjaan kegiatan pendukung indikator kinerja sebagian besar telah selesai dilaksanakan dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja pun bertambah. Namun untuk target kinerja, adanya perubahan target kinerja dari RPJMD dan Renstra lama (2016-2021) dengan RPJMD dan Renstra baru (2021-2026) dikarenakan adanya penyesuaian dan peralihan dari Renstra lama ke Renstra baru.

Tabel II.87
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	Target Sesuai RPJMD dan Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi Kinerja %
1	Persentase Jalan Kondisi baik (%)	75,00 (RPJMD dan Renstra Lama Tahun 2021)	76,38%	101,84%
		63,25% (RPJMD dan Renstra Baru Tahun 2022)	76,55%	121,03%

Perbedaan target dari renstra lama ke baru yang targetnya menurun dikarenakan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan di RPJMD dan Renstra terbaru (2021-2026). Berikut ini merupakan perbandingan realisasi dengan target akhir di RPJMD dan Renstra 2021-2026.

Tabel II.88
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan kondisi akhir RPJMD
(2026)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	%
1	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	69,25	76,55	110,54

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Target Akhir RPJMD adalah 69,25% sedangkan Realisasi Tahun 2022 adalah 76,55 % sehingga Capaian Kinerja sebesar 110,54 %. Persentase jalan kondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Analisis terhadap Persentase jalan provinsi berkondisi baik Tahun 2022 dapat digambarkan jumlah jalan provinsi berkondisi baik yakni 686,199 KM dibagi dengan jumlah jalan provinsi yakni 896,45 KM dengan persentase 76,55%.

Hasil analisis jalan provinsi berkondisi baik dengan target sebesar 63,25 % dapat tercapai sebesar 76,55% sehingga capaian kinerja sebesar 121,03% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut evaluasi capaian indikator kinerja persentase jalan Provinsi berkondisi baik dari Tahun 2017-2022:

Tabel II.89
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase jalan kondisi baik (%)	67,97	67,30	69,73	70,31	71,49	73,64	73,24	74,51	75	76,38	63,25	76,55

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase jalan provinsi kondisi baik dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2017 realisasi persentase jalan provinsi kondisi baik adalah sebesar 67,30% dimana persentase jalan kondisi baik terus meningkat dari tahun 2017-2022 secara berturut-turut dengan

persentase 67,30% (2017), 70,31% (2018), 73,64% (2019), 74,51% (2020), 76,38% (2021) dan 76,55% di (2022)

Dari capaian kinerja tahun 2022 dan tahun sebelumnya, tabel dibawah ini merupakan jalan kondisi baik per kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

Tabel II.90
Perbandingan Kondisi Jalan Baik Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Panjang Jalan (Km)		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2018		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2019		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2020		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2021		Jalan Berkondisi Baik Tahun 2022	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Tanjungpinang	70,23	50,10	71,34	51,56	73,42	52,03	74,09	55,99	79,73	57,46	81,81
Batam	112,35	104,81	93,29	110,63	98,47	116,48	103,68	117,35	104,45	102,85	91,54
Bintan	139,10	129,93	93,41	130,71	93,97	131,17	94,30	132,55	95,29	130,80	94,03
Karimun	143,72	109,03	75,86	112,31	78,15	112,81	78,49	116,96	81,38	116,12	80,80
Lingga	236,72	128,62	54,33	138,35	58,44	138,61	58,55	141,55	59,80	131,66	55,62
Anambas	51,00	25,51	50,02	28,76	56,39	28,76	56,39	29,09	57,04	46,07	90,32
Natuna	143,33	82,26	57,39	87,86	61,30	88,05	61,43	91,19	63,63	101,25	70,64
TOTAL	896,45	603,32	70,31	660,17	73,64	667,91	74,51	684,67	76,38	686,20	76,55

Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 10,153 km melalui Program penyelenggaraan jalan provinsi. Namun kondisi rusak yang masih harus diperbaiki sepanjang 210.25 km, sehingga masih membutuhkan jumlah anggaran perbaikan yang masih sangat besar. Realisasi kinerja tahun 2022 meningkat dari 2021 dikarenakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja tahun 2022 berhasil terlaksana walaupun sempat adanya refofusing anggaran di pertengahan tahun namun tetap berhasil meningkatkan kinerja



sehingga melewati target dari yang telah ditetapkan dan kegiatan yang dijalankan di tahun 2022 telah terlaksana sehingga capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan kondisi baik terpanjang pada tahun 2022 berada di Kabupaten Lingga sepanjang 131,66 km dan yang terpendek berada di Kabupaten Anambas dengan panjang 46,07 km. Jika dilihat lebih lanjut untuk kondisi jalan kondisi baik dari tahun 2018-2022, jalan kondisi baik terpanjang di Tahun 2021 berada di Kabupaten Lingga (141.55 Km), Tahun 2020 berada di Kabupaten Lingga (138.61 km), 2019 berada di Kabupaten Lingga (138.35 km) dan 2018 juga berada di Kabupaten Lingga (603,32 Km) Untuk Kabupaten Lingga, panjang jalan kondisi baik memperlihatkan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2018-2022 karena Kabupaten Lingga memang memperoleh alokasi anggaran untuk meningkatkan kondisi jalan pada periode waktu tersebut mengingat Kabupaten Lingga memiliki ruas jalan provinsi yang paling panjang, yang membutuhkan alokasi anggaran setiap tahun untuk meningkatkan panjang jalan kondisi baik.

Untuk menunjang pencapaian kinerja, alokasi anggaran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Untuk mendukung tercapainya sasaran **Pembangunan antar pulau dan pesisir**, alokasi anggaran yang memadai perlu dianggarkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran yang dimaksud.



Gambar II. 6 Dokumentasi Peningkatan Jalan Trans Batubi – Kelarik, Natuna (DAK)



Gambar II.7 Dokumentasi Peningkatan Jalan Kerandin – Belungkur Kabupaten Lingga (DAK)



Gambar II.8 Pemeliharaan Berkala Jln Toapaya Km. 46 Kab. Bintan (DAK)

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator di anggarkan di Program Penyelenggaraan jalan dan kegiatan penyelenggaraan

jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2022. Beberapa pekerjaan yang mendukung sasaran yang dimaksud berada pada sub kegiatan pembangunan jalan, pelebaran jalan menambah lajur, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan dan penanggulangan bencana/tanggap darurat. Berikut adalah program/kegiatan penunjang keberhasilan kinerja yang dilaksanakan di tahun 2022. Sebagian besar pekerjaan yang telah dianggarkan di tahun 2022 telah selesai dikerjakan semuanya dan juga analisis efektifitas dan efisiensi sumber daya.

Tabel II.91
Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian
Indikator Kinerja Tahun 2022

Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI					
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN					
Peningkatan Jalan Kerandin - Belungkur, Kabupaten Lingga (DAK)	7.568.499.000	7.568.499.000	100,00	100,00	0,00
Pembangunan Jalan Sp. Rantau Panjang, Kabupaten Lingga	1.453.966.596	1.453.966.000	100,00	100,00	0,00
Pembangunan Jalan Sp. Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga	1.468.713.000	1.468.162.000	99,96	100,00	0,04
Peningkatan Jalan Trans Batubi - Kelarik, Kab. Natuna (DAK)	9.719.879.000	9.215.709.000	94,81	100,00	5,19
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	20.211.057.596	19.706.336.000	97,50	100,00	2,5
SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENAMBAH LAJUR					
Peningkatan Jalan Simp. BNI - Underpass, Kota Batam (Lanjutan)	4.000.000.000	3.848.812.000	96,22	100,00	3,78
Peningkatan Jalan Simp. Franky - Simp. BNI, Kota Batam (Lanjutan)	6.000.000.000	5.769.454.000	96,16	100,00	3,84
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	10.000.000.000	9.618.266.000	96,18	100,00	3,82
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN					

Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Efisiensi (%)
2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Berkala Jln Toapaya Km. 46, Kab. Bintan (DAK)	10.176.157.000	9.514.204.000	93,50	100,00	6,50
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	10.176.157.000	9.514.204.000	93,50	100,00	6,50
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN					
Overlay Jalan Pada Ruas Jalan Sp. Sei Kecil - Sp. Sakera Segmen 1	199.981.314	199.860.000	99,94	100,00	0,60
Overlay Jalan Pada Ruas Jalan Sp. Sei Kecil - Sp. Sakera Segmen 2	199.981.314	199.874.000	99,95	100,00	0,05
Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Muka Kuning – Tg Piayu, Kota Batam	150.000.000	149.973.000	99,98	100,00	0,02
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	549.962.628	549.707.000	99,95	100,00	0,05
SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA/TANGGAP DARURAT					
Penanggulangan Pasca Bencana di Ruas Jalan Musai - Sp. Kerandin, Kab. Lingga	1.977.691.476	1.977.691.000	100,00	100,00	0,00
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	1.977.691.476	1.977.691.000	100,00	100,00	0,00
TOTAL ANGGARAN	42.914.868.700	41.366.204.000	96,39	100,00	3,61

Untuk mencapai sasaran, organisasi membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang tersedia tentunya perlu dikelola dengan baik agar sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat dilihat dari besaran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya terkait. Dari tabel diatas, terlihat efisiensi anggaran sebagian besar pekerjaan tidak sampai lebih dari 10% yang artinya dari anggaran yang diberikan, hampir seluruhnya terealisasi dan terpakai untuk pekerjaan terkait sehingga anggaran yang telah diberikan tidak banyak yang menjadi SILPA dan dari efektivitas pekerjaan, sebagian besar telah selesai dengan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir. Dari tabel diatas juga, kesimpulan yang

dapat diambil secara umum adalah bahwa efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 menunjukkan kecenderungan meningkat karena berhasil menambah jalan kondisi baik dari tahun sebelumnya.

Pencapaian target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program kinerja;
2. Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD;
3. Melaksanakan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan;

Berikut ini adalah perbandingan total anggaran pendukung capaian kinerja antara tahun 2021 dan 2022.

Tabel. II.92
Perbandingan Persentase Penambahan Anggaran Pendukung Kinerja
Panjang Jalan Berkondisi Baik Pada Tahun 2021 dan 2022

No	Program	Tahun	Anggaran	Persentase penambahan Anggaran dari tahun sebelumnya
1	Program Penyelenggaraan Jalan	2021	Rp. 56.999.603.533	-21,83%
2	Program Penyelenggaraan Jalan	2022	Rp. 44.556.794.700	

Dari tabel diatas, Persentase penambahan anggaran menurun dikarenakan untuk tahun 2022 pekerjaan pendukung capaian kinerja jalan berondisi baik tidak sebanyak 2021, namun untuk keseluruhan tidak terlalu mempengaruhi capaian kinerja dikarenakan capaian kinerja di tahun 2022 naik dari tahun 2021.

SASARAN. 12***Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat***

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi. Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa,

mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022, pembangunan kebudayaan kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada di provinsi Kepulauan riau dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 52,12 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 51,12. Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (14,64), dimensi pendidikan (73,61), dimensi ketahanan sosial budaya (73,53), dimensi warisan budaya (37,81), dimensi ekspresi budaya (22,74), dimensi budaya literasi (66,78), dan dimensi kesetaraan gender (56,53). Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2021 Dimensi ketahanan sosial budaya memiliki nilai paling tinggi, sementara dimensi ekonomi budaya memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge-based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait kebudayaan.

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya, Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.93
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,90	52,12	82,86

Dari tabel diatas Capaian IPK provinsi kepulauan riau sebesar 52,12 sedangkan target yang di tetapkan sebesar 62,90 sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas . Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di provinsi kepulauan riau masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal

Hasil Analisis indeks pembangunan kebudayaan dengan target sebesar 62,90% hanya dapat tercapai sebesar 52,12% sehingga capaian kinerja sebesar 82,86% atau dalam kategori **baik**

Tahun	Nasional	KEPULAUAN RIAU RPJMD
2018	53.74	58.83
2019	55.91	60.90
2020	54.65	59.24
2021	51.90	52.12

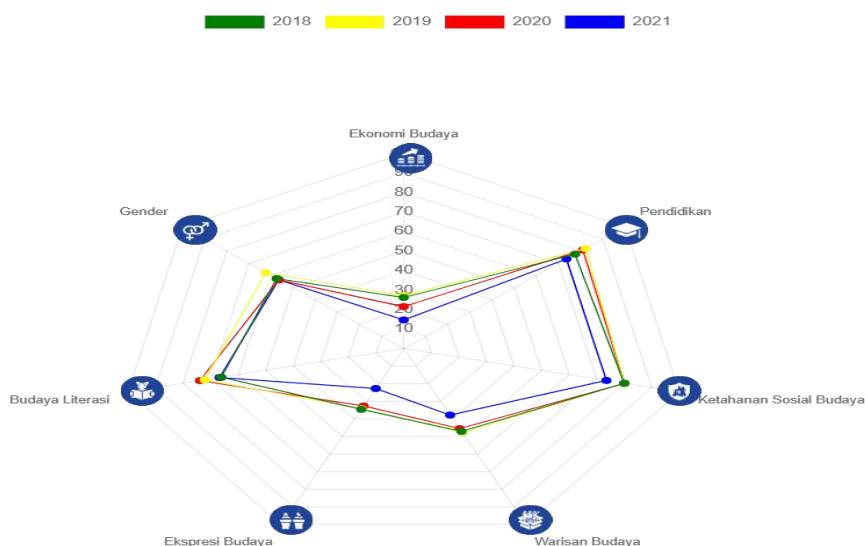
Sumber data IPK direktorat kebudayaan ,bapennas ,Bps nasional

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2021 s/d 2022:

Tabel II.94
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan
Kebudayaan

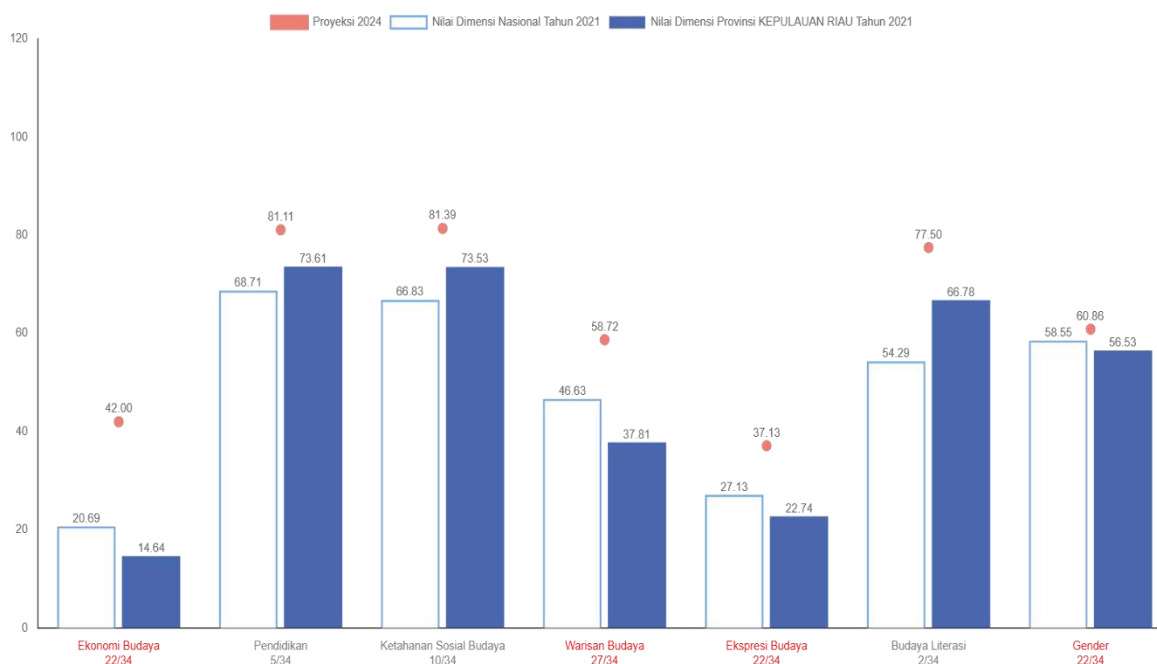
No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
1	Indeks pembangunan kebudayaan	59,24	62,90	52,12	82,86	66,90	77,90

Jika dilihat dari table diatas Skor IPK Provinsi : 52,12 • Di atas skor IPK Nasional (51,90) • Peringkat 16 dari 34 Provinsi Capaian IPK 2021 Provinsi Kepulauan Riau: 59,24 (ada penurunan sebesar 7,12 poin) Dimensi dengan skor tertinggi ada pada Dimensi Pendidikan, sedangkan yang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya. pada Tahun 2022 Target akhir RPJMD yang ditetapkan oleh dinas kebudayaan sebesar 66,90%, jika kita bandingkan target yang ditetapkan tahun 2022 dengan realisasi capaian hanya sebesar 52,12 % masih ada 77,90 % capaian ini merupakan kewajiban dinas kebudayaan untuk menyelesaikan sampai dengan Akhir RPJMD



Dimensi		Nilai indeks	
		Nasional	Kepulauan Riau
Ekonomi Budaya		20,69	14,64
Pendidikan		68,71	73,61
Ketahanan Sosial Budaya		66,83	73,53
Warisan Budaya		46,63	37,81
Ekspresi budaya		27,13	22,74
Budaya Literasi		54,29	66,78
Gender	58,55	56,55	
Total		51,90	52,12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 6 Lima dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka nasional adalah dimensi pendidikan, pada posisi ke-3, dimensi ketahanan sosial budaya pada posisi ke-4, dimensi budaya literasi . 4 dimensi lainnya berada di bawah angka nasional, yaitu : dimensi ekonomi budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender.



➤ **Analisis IPK 2022 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekonomi Budaya**

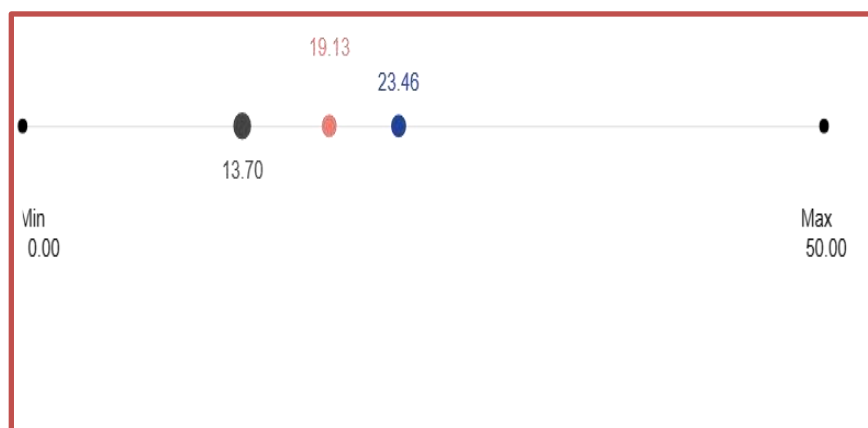
Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas (persen)



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

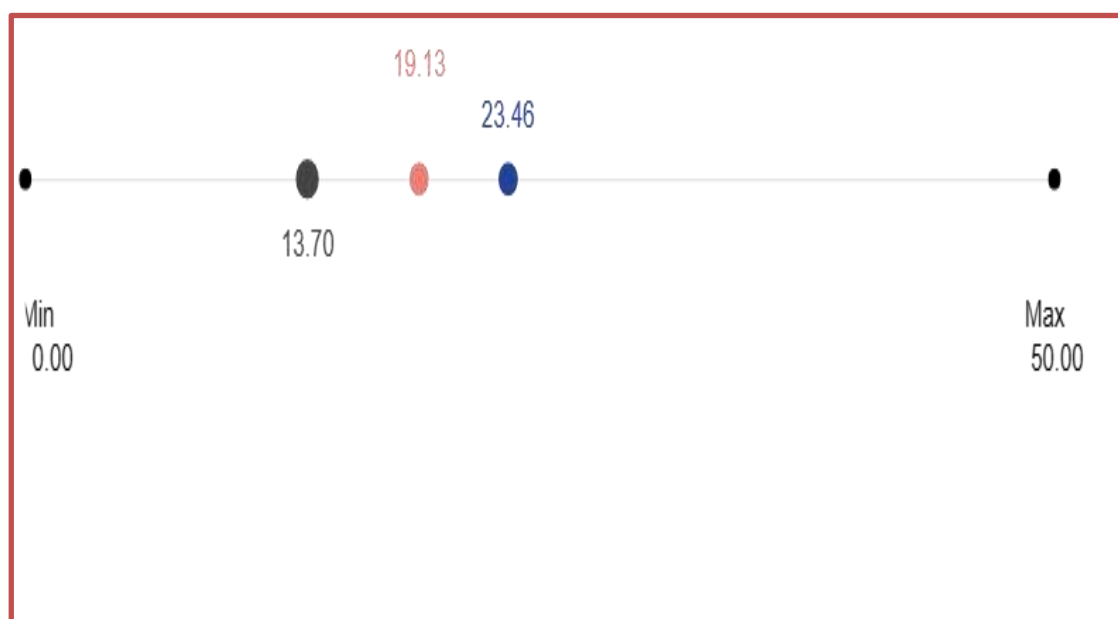
➤ **Analisis IPK 2022 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Warisan Budaya**

- Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

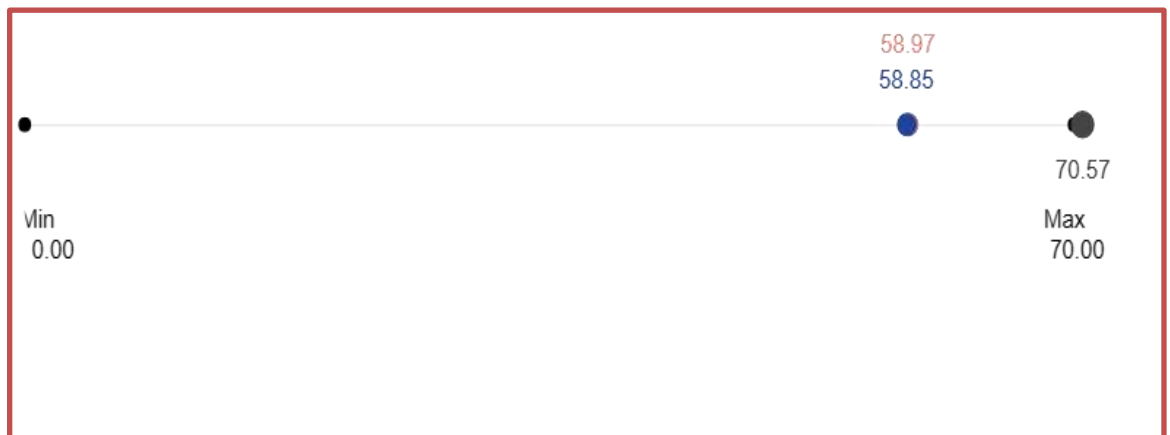


Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

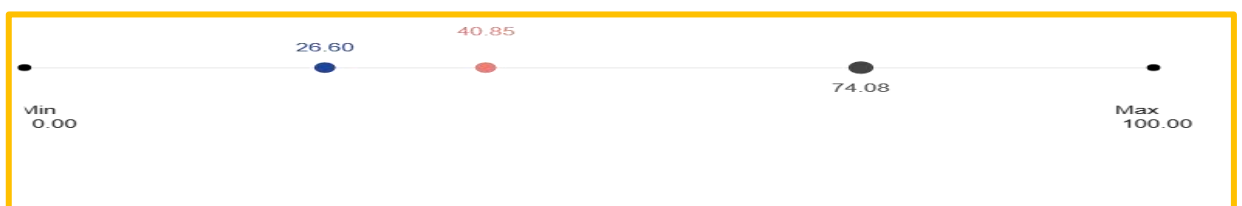
- Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri



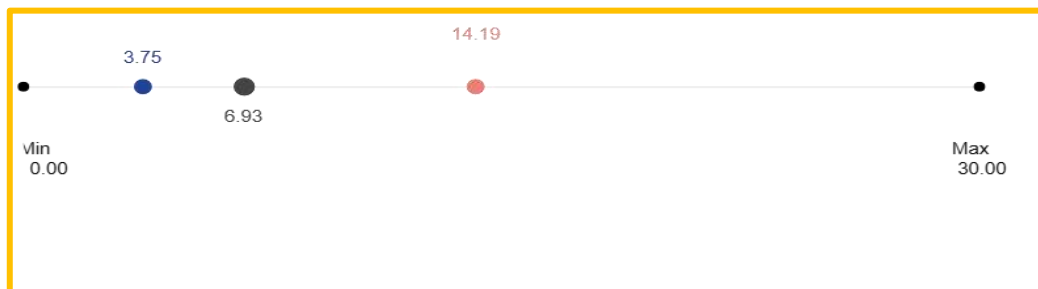
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun



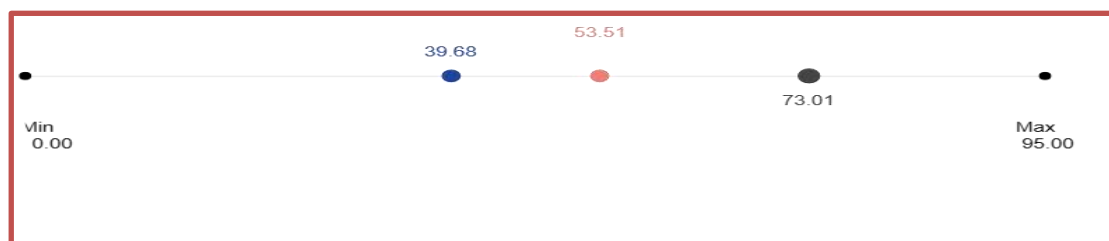
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional



Sumber Data :

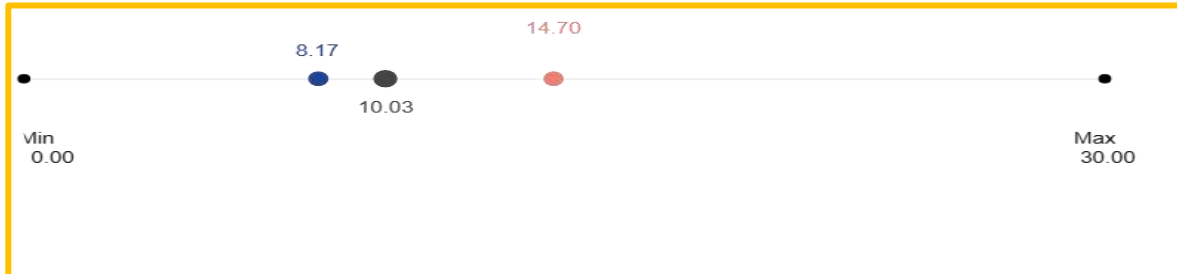
Susenas MSBP,



BPS Nasional Kepri

➤ **Analisis IPK 2022 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekpresi Budaya**

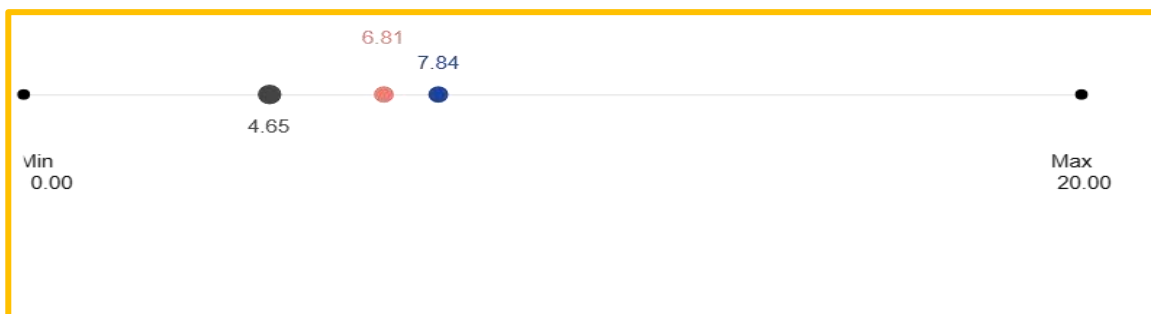
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun



terakhir

Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

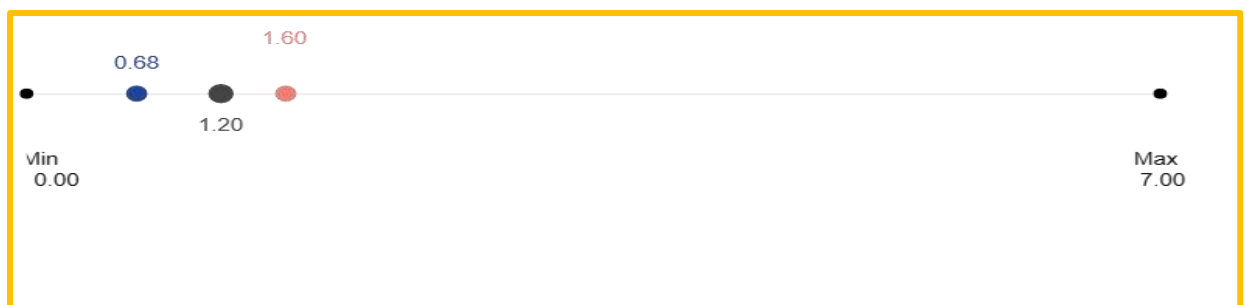
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif



mengikuti kegiatan organisasi

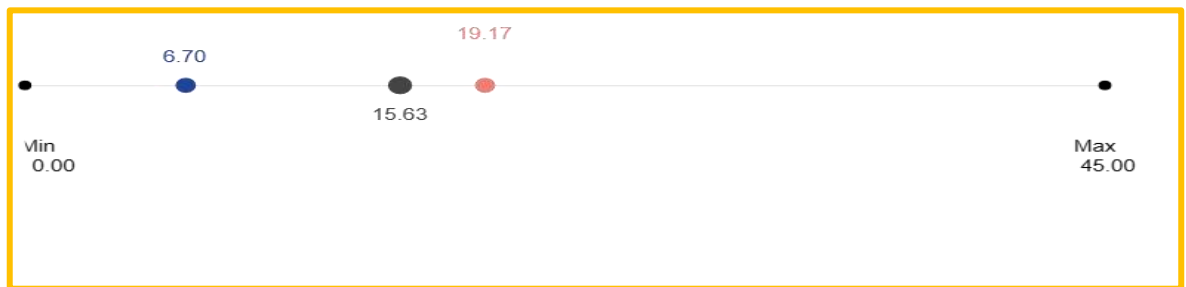
Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat



Sumber Data : Susenas MSBP, BPS Nasional Kepri

- Analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan yang dapat dilihat dalam pencapaian indeks pembangunan Kebudayaan sebagai berikut :
 - a. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Kualitas Budaya
 - b. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
 - c. Adanya Program-Program terkait Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
 - d. Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam pembangunan kebudayaan
 - e. Peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya , contohnya antusiasme dan partisipasi masyarakat (masyarakat umum dan dari sekolah) yang tinggi dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
 - f. Adanya dukungan dari stakeholder kebudayaan yang lain dalam pelaksanaan program kegiatan, seperti Berhasilnya sinergi antara Dinas Kebudayaan dengan lembaga terkait seperti instansi vertikal Kebudayaan (BPNB), lembaga non pemerintahan/LSM dan komunitas/penggiat kebudayaan dan seni serta masyarakat umum dalam upaya penyadaran pelestarian, hingga pengembangan kebudayaan dan seni.

- g. Peran aktif guru dan siswa SD dan SMP yang melestarikan seni budaya di Provinsi Kepulauan Riau .
- h. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut atau pun solusi Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

➤ **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 17.335.070.424 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 8.132.734.800 dan Belanja Langsung Rp 9.202.335.624. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 17.040.930.929,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 9.839.975.575,00 dan Belanja Langsung Rp 7.200.955.354,00.

1.3.1 Target Belanja Dinas Kebudayaan

Tabel II.95
Target Belanja Dinas Kebudayaan APBD Perubahan
Tahun 2022

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.839.975.575,00	57,74
Belanja Langsung	Rp. 7.200.955.354,00	42,26
Total	Rp.17.040.930.929	100

1.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 Dinas Kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.96
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Rp.2.163.487.714	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran

2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu"	Rp.3.968.980.528	100	Semua belanja langsung dalam rangka mewujudkan satu sasaran
---	--	------------------	-----	---

Tabel II.97
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran strategis	kinerja				Anggaran			Ket
		indikator	target	realiasi	% capaian	Target	Realisasi	% efesiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas destinasi wisata berbasis budaya	Indeks Pembangunan kebudayaan	62,90	52,12	82,86	5.539.892.396	5.285.593.019	95,41	efisien
2	Meningkatnya Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu								

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa indicator indeks Pembangunan kebudayaan yang telah ditetapkan target nya sebesar 62,90 hanya tercapai sebesar 52,12 % ini dapat dilihat dari dimensi ekonomi budaya yang masih cenderung rendah yang menandakan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di provinsi kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada

kehidupan sosial cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ini terkait Penyerapan anggaran belanja langsung dalam pencapaian sasaran startegis pada tahun 2022 sebesar 95,41 % (Rp 5.285.593.019) dari total anggaran (Rp 5.539.892.396) terdapat 5 program 7 kegiatan 12 sub kegiatan yang mendukung indicator indeks pembangunan kebudayaan, pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang merupakan program pendukung dimensi ekonomi budaya masih perlu di tingkatkan karena untuk ekonomi budaya masih cenderung rendah , Solusi untuk kedepan dalam peningkatan dimensi ekonomi budaya yaitu komitmen dari kepala daerah untuk menyediakan Pendanaan melalui dana APBD untuk bidang kebudayaan yang lebih optimal dan Mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif. ditetapkan setiap tahun nya oleh Dinas Kebudayaan sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian indicator setiap tahunnya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

2.3.4 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan program prioritas. Oleh Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud

pertanggungjawaban kinerja Pemprov Kepulauan Riau kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

➤ **REALISASI ANGGARAN**

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 12 sasaran mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau:



NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA				ANGGARAN			
		Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Percepatan Pemulihan dan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,6 %	5,09 %	106 %	81.299.340	60.690.180	74.65%	Efisien
		Pendapatan Per Kapita	80,07 Juta Rupiah	87,24 Juta Rupiah	109 %	81.299.340	60.690.180	74.65%	Efisien
		Indeks Gini	0,332 indeks	0,325 indeks	102 %	81.299.340	60.690.180	74.65%	Efisien
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	10,10 %	8,23 %	118,51 %	5,247,503,800	5,096,582,817	97,12%	Efisien
		Angka Kemiskinan	6,01 %	6,03 %	99,67 %	5.643.752.928	5.596.350.933	99,16 %	Efisien
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 indeks	74,13 indeks	106,31 %	300,000,000	270,563,068	90.38%	Efisien
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	69,77 indeks	69,77 %	100 %	745,961,500	692,491,646	92,83%	Efisien
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	76,7 indeks	76,46 indeks	99 %	344,810,898,781	333,046,631,632	96,59 %	Efisien
6	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	84,54 %	84,54 %	343,849,050,681	332,123,887,540	96.59%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,20 indeks	93,49 indeks	100,31 %	5.100.555.850,00	4.997.668.654,00	97,98	Efisien
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	15,80 %	15,40 %	102,6 %	1,888,809,330	1,799,010,558	95,25%	Efisien
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	95,5 Rasio	96,32 Rasio	101 %	10,835,506,518	10,648,575,853,9	98,3%	Efisien
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	145,27 Ha	147.24 Ha	92,20 %	1,372,943,274	1,292,304,000	94.13%	Efisien



10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	41,33 Rasio	44,25 Rasio	107 Rasio	70,260,061,344	65,394,916,987	93.08%	Efisien
11	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Presentase Jalan Kondisi Baik	63,25 %	76,55 %	121,03 %	42,914,868,700	41,366,204,000	96.39%	Efisien
12	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,9 Indeks	52,12	82,86	5,539,892,396	5,285,593,019	95.41%	Efisien

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Tugas pembantuan pada pemerintah provinsi mencakup tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. Pada tahun 2022 Provinsi Kepulauan Riau hanya melaksanakan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, dan tidak memberikan tugas pembantuan kepada kabupaten/kota. Tiga urusan pemerintahan yang memperoleh Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat yaitu; (1) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, (2) urusan pertanian, serta urusan kelautan dan perikanan.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah

Terdapat 3 (tiga) kementerian yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang pertama yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dana Tugas Pembantuan yang diterima sebesar Rp 11.157.408.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 11.149.055.573,00 (99,93%) dan realisasi kinerja sebesar 100%. Program yang dilaksanakan yaitu: Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional untuk aktivitas Dukungan Teknis, dan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat; dan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk aktivitas Layanan Umum.

Kementerian Pertanian RI, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menerima Dana Tugas Pembantuan tahun 2022 sebesar Rp 8.617.553.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.534.871.534 (87,44%) dan realisasi kinerja sebesar 100,00%. Program yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan meliputi: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah; Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan; Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan; Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan meliputi: Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan; Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan; Peningkatan Produksi Pakan Ternak; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak; Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.
- c. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan meliputi Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- d. Pelaksanaan dari sebanyak 20 kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan, sebanyak 17 kegiatan dapat mencapai target kinerja output, dan 3 kegiatan belum mencapai target kinerja. Selengkapnya Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan sebesar Rp2.245.779.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.236.839.589,00 (99,61%) dan realisasi kinerja sebesar 100%. Program yang dilaksanakan yaitu: Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan,

dengan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan; dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

Pelaksanaan dari sebanyak 2 kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan, semuanya sebanyak 2 kegiatan dapat mencapai target kinerja output. Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dana Tugas Pembantuan yang diterima tahun 2022 Rp 11.149.055.573,00 (99,93%) dan realisasi kinerja sebesar 100%. Program yang dilaksanakan yaitu: Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional untuk aktivitas Dukungan Teknis, dan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat; dan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk aktivitas Layanan Umum.

Kementerian yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kementerian Pertanian RI, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menerima Dana Tugas Pembantuan tahun 2022 sebesar Rp 8.617.553.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.534.871.534 (87,44%) dan realisasi kinerja sebesar 100,00%.

Kemernterian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan sebesar Rp2.245.779.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.236.839.589,00 (99,61%) dan realisasi kinerja sebesar 100%

Tugas Pembantuan dari Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Kab/Kota untuk tahun anggaran 2022 tidak ada.

3.3.1 Target Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan atas pelaksanaan penugasan program/kegiatan adalah 100% secara fisik adapun terkait realisasi keuangan menyesuaikan dengan harga yang berlaku di lapangan.

3.3.2 Realisasi

Adapun realisasi dari target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau

No	PROGRAM	KEGIATAN/OUTPUT	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Output			Anggaran		
				TARGET	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi (Rp)	REALISASI ANGGARAN (RP)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
	Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	73,75 km	73,75	100,00	10.508.850.000,00	10.508.849.950,00	100,00
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	729,5 m	729,5	100,00			
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	2	100,00	648.558.000,00	640.205.623,00	98,71
Jumlah / Rata-rata						100,00	11.157.408.000	11.149.055.573	99,93

Keterangan: OM = Operations and Maintenance



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

No	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Kinerja Output			Anggran		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit			100,00	1.108.936.000	536.932.689	48,42
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit			0			
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Sarana Pengembangan Kawasan	Unit	7	7	100,00	690.000.000	679.989.649	98,55
		Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Sarana Pengembangan Kawasan	Unit	2	0	100,00	360.000.000	332.629.600	92,40
3	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	70	70	100,00	100.000.000	90.782.300	90,78



4	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Koordinasi	Kegiatan	60	60	100,00	1.178.000.000	1.125.990.080	95,58
5	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	Koordinasi Sarana Pengembangan Kawasan	Kegiatan	2	2	100,00	462.000.000	459.560.500	99,47
				Unit	1	1	100,00			
		Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Koordinasi Sarana Pengembangan Kawasan	Kegiatan Ha	1	1	100,00	101.375.000	96.794.300	95,48
6	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	1	1	100,00	482.278.000	446.502.266	92,58
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	Sarana Pengembangan Kawasan	Ha	5	5	100,00	384.150.000	369.821.300	96,27
		Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Koordinasi	Kegiatan	3	3	100,00	44.200.000	43.709.000	98,89



		Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Sarana Pengembangan Kawasan	Rekomendasi Ha	100 1	100 1	100,00 100,00	291.245.000	246.079.800	84,49
8	Program Dukungan manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	2	2	100,00	93.700.000	92.940.600	99,19
9	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lambaga	14	14	100,00	90.000.000	89.486.500	99,43
10	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Penyidikan dan Pengujian Produk	Sampel	1	1	100,00	50.000.000	45.312.700	90,63
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan	1	1	97,48	295.630.000	259.284.580	87,71
		Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Koordinasi	Kegiatan	25	25	100,00	1.311.730.000	1.140.327.370	86,93
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	5910	5761	57,90			
			Bantuan Hewan	Ekor	1	1	100,00			
		Peningkatan Kesehatan	Sertifikasi Lembaga	Lembaga	17001	9844	100,00			



		Masyarakat Veteriner	Penyidikan dan Pengujian Produk	Sampel	1000	1000	100,00	290.000.000	285.792.100	98,55
11	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	5	5	100,00	475.464.000	430.712.100	90,59
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	25	25	100,00			
12	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Orang	6	6	100,00	258.815.000	236.465.200	91,36
			Pelayanan Publik Lainnya	Layanan	6	6	100,00			
13	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1641	1641	100,00	550.030.000	525.758.900	95,59
Jumlah / Rata-rata							95,01	8.617.553.000	7.534.871.534	87,44



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Kinerja Output			Anggran		
					Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Bantuan Peralatan / Sarana	unit	2	2	100,00	1.162.405.000,00	1.154.791.397,00	99,35
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	unit	3	3	100,00	1.083.374.000,00	1.082.048.192,00	99,88
Jumlah / Rata-rata							100,00	2.245.779.000,00	2.236.839.589,00	99,61

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Urusan Pertanian

Kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau secara umum berjalan dengan baik, namun ada indikator yang capaiannya kurang dari 100%, yaitu pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan output layanan disebabkan target pemerintah pusat terlalu tinggi karena ternak sapi di Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas tidak di vaksin; dan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena Operasional Penandaandan Pendataan Ternak (Pengadaan Aplikator Eartag sebanyak 304 unit) yang tidak terlaksana.

3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuani.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib pemerintahan dengan memperhatikan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya melakukan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan yang salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Ada 6 (enam) urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, adapun penjelasan lebih detil di bawah akan disampaikan berdasarkan jenis pelayanan, target dan realisasi SPM, alokasi anggaran, dukungan personil, dan permasalahan serta solusi.

A. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan di tingkat provinsi terdiri atas:

- a. Pendidikan menengah; dan
- b. Pendidikan khusus.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian SPM pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 untuk jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 89.440 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 1.730 siswa.

3. Realisasi

Tabel 4.1

Realisasi Capaian Target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Persentase %
1	PENDIDIKAN MENENGAH	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	82.697	100 %
2	PENDIDIKAN KHUSUS	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILITAS YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	1.807	100
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	REALISASI	PERSENTASE %
1	PENDIDIKAN MENENGAH	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	76.119	85,43 %
2	PENDIDIKAN KHUSUS	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILITAS YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	1.351	74,76 %

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

2. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pendukung Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sebesar **Rp. 343.629.540.681** terdiri dari:

- APBD/DAK Provinsi Kepri Rp. 159.899.832.459
- BOS Rp. 183.729.708.222

1. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan penerapan SPM bidang pendidikan menengah dan khusus didukung oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari:

- Tenaga Pendidik pada Sekolah Menengah berjumlah 5.803 orang yang terdiri dari 1.872 PNS, 653 PPPK dan 3278 Non ASN;
- Tenaga Pendidik pada Sekolah Pendidikan Khusus sebanyak 236 orang, terdiri dari 50 orang PNS, 3 orang PPPK dan orang 184 Non PNS.

2. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang pendidikan tahun 2022 yaitu sebesar 85.43 persen yang berarti bahwa dari 82.697 orang penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berusia 16 s/d 18 tahun, sejumlah 76.119 orang yang mendapat layanan dasar Pendidikan Menengah.

Sedangkan untuk layanan dasar Pendidikan Khusus sebesar 74.76 persen, yang berarti bahwa dari 1.807 orang penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berkebutuhan khusus berusia 4 s/d 18 tahun, sejumlah 1.351 orang yang mendapat layanan dasar Pendidikan Khusus.

Tabel 4.2

Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH ORANG TERLAYANI	CAPAIAN 2022	PAGU ANGGARAN SPM	REALISASI ANGGARAN SPM
1	PENDIDIKAN MENENGAH	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	82.697	76.119	85.43%	330.185.097.651	318.886.421.594
2	PENDIDIKAN KHUSUS	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILITAS YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	1.807	1.351	74.76 %	13.444.443.030	13.247.218.193

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

3. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM

Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data.
- b. Sulitnya menentukan kriteria penerima serta belum terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dengan data yang dibutuhkan.
- c. Keterbatasan anggaran serta masih adanya refocusing anggaran.
- d. Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi.

2. Target Pencapaian

Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau Bidang Kesehatan adalah 100%.

Tabel 4.3
Realisasi Capaian Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	PERSENTASE %
1	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	8.349	100 %
2	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI.	JUMLAH PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	12.895	100 %
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	REALISASI	PERSENTASE %
1	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU	8.349	100 %

	BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	BERPOTENSI BENCANA PROVINSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN		
2	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI.	JUMLAH PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	12.895	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran 2022 di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai berikut:

APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp. 80.940.668.237,-** (delapan puluh miliar Sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Anggaran APBN untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tidak ada.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1.	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	RP. 128.629.000,-	RP. 123.249.194,-	96%
2.	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI	RP. 405.118.419,-	RP. 3.881.553.474,-	96%

4. Dukungan Personil

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Dukungan Personil

NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH SDM TERSEDIA
1	2	3
I.	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	
1	DOKTER	156
2	PERAWAT	264
3	BIDAN	134
4	TENAGA KESMAS	-
5	TENAGA KESWAN	27
6	TENAGA PENYULUH	25
II.	PENANGGULANGAN KLB	-
A	DILUAR FASILITAS YANKES TGC PROVINSI OLEH TGC	-
1	DOKTER	156
2	TENAGA KESMAS EPID	80
3	TENAGA KESMAS KESLING	330
4	TENAGA KESMAS ENTOMOLOGI	17
5	TENAGA LABORATORIUM	423
6	TENAGA PENYULUH	168
B	DI FASYANKES	-
1	DOKTER	1272
2	PERAWAT	3119
3	PETUGAS RADIOLOGI	168
4	PETUGAS LABORATORIUM	423

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

6. Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR TAHUN 2022			PENDANAAN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	8.349	8.349	100	128.629.000	123.249.194	96%

2	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI	12.895	12.895	100	4.051.118.41 9	3.881.533.4 74	96%
---	---	--------	--------	-----	-------------------	-------------------	-----

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

7. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih adanya masyarakat yang tertutup dan tidak melaporkan segera atas penyakit yang berpeluang menjadi KLB ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penanganan terlambat dilakukan.
- 2) Anggaran yang tersedia untuk penanganan KLB lebih berfokus kepada penanganan COVID-19 padahal masih terdapat 24 jenis penyakit berpeluang KLB lainnya yang masuk dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang harus didukung anggaran penanggulangan.
- 3) Dengan adanya dampak pada kinerja daerah dan sumber anggaran penanganan KLB, menyebabkan Kepala Daerah cukup sulit untuk menetapkan suatu kasus penyakit tertentu naik menjadi status KLB.
- 4) Terlambatnya penerimaan data akibat keterlambatan pengiriman hasil sampel terduga KLB yang dikirim BKPK Kementerian Kesehatan RI.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan minimal yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencakup :

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

2. Target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri yang daerah pelayanannya mencakup Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dan didukung dengan pembangunan infrastrukturnya oleh pemerintah provinsi kepulauan riau dalam bentuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Dalam hal Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini belum teridentifikasi kebutuhan terkait pengelolaan air limbah domestik secara regional. Pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang hingga saat ini dilakukan secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga belum teridentifikasi kebutuhan terhadap Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Tabel 4.6

Realisasi Capaian Target SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	PERSENTASE %
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA.	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	249.899 JIWA	100 %
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA.	JUMLAH RUMAH YANG DILAYANI OLEH SPALD REGIONAL PROVINSI DALAM SATU KELURAHAN/ DESA	0	0 %
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	REALISASI	PERSENTASE %
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA.	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	133.285	53,34 %
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA.	JUMLAH RUMAH YANG DILAYANI OLEH SPALD REGIONAL PROVINSI DALAM SATU KELURAHAN/ DESA	0	0 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota bersumber dari APBD Tahun 2022 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp.2.358.021.410,00**, namun dikarenakan ada beberapa paket pekerjaan yang terkena rasionalisasi pada saat penyesuaian anggaran di APBD-P, sehingga total anggaran di APBD-P menjadi **Rp.1.349.004.472,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7

Realisasi Pekerjaan Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO.	PEKERJAAN	NILAI	KETERANGAN
1.	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL PULAU BINTAN	RP. 776.666.993,00	SUDAH DILAKSANAKAN 100%
2.	PERENCANAAN OPTIMALISASI JARINGAN PERPIPAAN SPAM SWRO TANJUNGPINANG (PELABUHAN- GUDANG MINYAK)	RP. 139.258.380,00	SUDAH DILAKSANAKAN 100%
3.	OPTIMALISASI JARINGAN PERPIPAAN SPAM SWRO TANJUNGPINANG (PELABUHAN- GUDANG MINYAK)	RP. 1.295.598.581,00	SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN ANGGARAN PADA APBD-P, MAKA DILAKUKAN RASIONALISASI TERHADAP KEGIATAN TERSEBUT.
4.	PENGAWASAN OPTIMALISASI JARINGAN PERPIPAAN SPAM SWRO TANJUNGPINANG (PELABUHAN- GUDANG MINYAK)	RP. 93,500,000,00	SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN ANGGARAN PADA APBD-P, MAKA DILAKUKAN RASIONALISASI TERHADAP KEGIATAN TERSEBUT.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau

4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Jumlah PNS sebanyak 7 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

a) S2 : 1 orang

b) S1 : 6 orang

B. Jumlah PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 4 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

a) S1 : 4 orang

5. Hasil Capaian

Tabel 4.8

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022.

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	REALISASI
1.	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	133.285 JIWA
2.	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH YANG DILAYANI OLEH SPALD REGIONAL PROVINSI DALAM SATU KELURAHAN/ DESA	0 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun anggaran 2022 sebesar 53,34% dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah penduduk di Wilayah Pelayanan = 249.899 jiwa

Jumlah penduduk terlayani = 133.285 jiwa

Capaian = $\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk di Wilayah Pelayanan}} \times 100\% = \mathbf{53,34\%}$

Dalam hal Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini pengolahan air limbah domestik di kabupaten bintan dan kota tanjungpinang dilakukan

secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga di tingkat Provinsi belum ada realisasi terkait hal tersebut.

6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

- a) Belum tersedianya data mutu layanan capaian SPAM air minum dari Tirta Kepri yang mengurangi nilai capaian SPM
- b) Belum konsistensinya prioritas anggaran terkait SPM (adanya refocusing anggaran untuk kegiatan SPM) yang berpengaruh terhadap capaian SPAM Air minum.
- c) Belum tersedianya pengumpulan data terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang berupa data BNBA. Namun saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menggunakan data DTKS sebagai data dasar.
- d) Pengumpulan data yang belum tersedia mengakibatkan langkah-langkah penerapan selanjutnya terkendala seperti perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan.

B. Solusi

- a) Perlunya menyediakan dokumen rencana induk sistem penyelenggaraan air minum sebagai bagian integrasi secara menyeluruh dalam pengelolaan dan penyediaan air minum.
- b) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Kepri khususnya untuk Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan.
- c) Intervensi terhadap perusahaan daerah Perumda Tirta Kepri baik dari sisi kebijakan anggaran maupun peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.
- d) Perlunya koordinasi stakeholder terkait terutama Biro Pemerintahan sebagai leader dalam penyelenggaraan SPM di Daerah. Sehingga dalam menjalankan rencana aksi SPM lebih terarah dan efisien.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman

1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum serta jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Sesuai ketentuan tersebut, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan rakyat terdiri atas:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dengan target 100%.
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi dengan target 100%.

3. Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Dukungan Anggaran Bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	
				APBD	APBN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	150.000.000	N/A
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	150.000.000	N/A

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

4. Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau disampaikan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DUKUNGAN PERSONIL	
				PNS	NON PNS
1	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	7	9
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI	7	9

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

5. Hasil Capaian

Sebelum tahun 2022 tidak ada Surat Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana. Demikian juga dengan program-program strategis provinsi yang mengharuskan adanya relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi. Pada tahun 2022 dilakukan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi berupa:

- Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.

Hasil capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.11

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET DAERAH 2022	REALISASI SPM 2022
1	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI	100	100
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- Tidak adanya Surat Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana sebagai dasar pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Tidak adanya Program Pemerintah yang mengharuskan dilakukannya Relokasi.
- Tidak tersedianya data Kawasan kumuh kewenangan Provinsi dengan status ilegal yang dapat dilakukan relokasi.

Solusi yang dilakukan terkait kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau terkait kejadian bencana di Kabupaten/Kota serta kemungkinan penetapan status tanggap darurat bencana oleh Gubernur.
- Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan program strategis daerah yang mengharuskan dilakukannya relokasi.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait relokasi Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi dengan status kepemilikan ilegal.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah 100% sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 4.12

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI.	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA DAN PERKADA DI PROVINSI	100%	SETIAP TAHUN	JUMLAH BARANG, JASA DAN SUMBER DAYA MANUSIA	100%	SETIAP TAHUN	INDIKATOR MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR BERUPA JUMLAH BARANG

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

3. Hasil Capaian

Capaian kinerja indikator SPM bidang trantibum adalah 100%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13
Capaian Kinerja Indikator SPM Bidang Trantibum

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA / PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI	5	12	42 %	12	12	100 %	92 %	SEDANG

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran pada tahun 2022 adalah **Rp. 2.083.448.800.**

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Satuan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepri Tahun 2022 sebanyak 160 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.14

Dukungan Personil Satuan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran

a. Berdasarkan Status Pegawai

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)
1	PNS	41
2	PTT	82
3	THL	37

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

b. Berdasarkan Latar belakang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS	PTT	THL
1	PASCA SARJANA			
2	SARJANA (S1/D4)	7	22	1
3	DIPLOMA (III/II/I)			
4	SLTA		60	29
5	SMP			6
6	SD			1

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

6. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal adalah:

1. Standar Sarana Prasarana Satpol PP belum terpenuhi dikarenakan minimnya anggaran.
2. Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP belum terpenuhi karena sedikitnya anggota Satpol PP yang sudah mengikuti diklat PPNS hanya berjumlah 2 (dua) orang.
3. Belum adanya kebijakan daerah terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
4. Pengumpulan data terkait jumlah dan identitas lengkap penerima layanan dasar masih terkendala.
5. Pengumpulan data terkait jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia masih terkendala.
6. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar belum sepenuhnya dipahami.

b. Solusi

Solusi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan SPM adalah:

1. Melakukan pengintegrasian penerapan SPM pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja)
2. Menyusun peraturan gubernur terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3. Perlu guidance/pelatihan per urusan pada setiap tahapan penerapan SPM.

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti skala Provinsi;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti skala provinsi;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti skala provinsi;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Dalam Panti skala provinsi;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi .

2. Target Pencapaian SPM di Daerah

Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian SPM bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15

**TARGET CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET	REALISASI
	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		
1	PERSENTASE (%) PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	2022	DINAS SOSIAL PROV.
2	PERSENTASE (%) ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	2022	DINAS SOSIAL PROV.
3	PERSENTASE (%) LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	2022	DINAS SOSIAL PROV.
4	PERSENTASE (%) GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	2022	DINAS SOSIAL PROV.
5	PERSENTASE (%) KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH PROVINSI	100%	2022	DINAS SOSIAL PROV.
6	JUMLAH PEKERJA SOSIAL/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DISEDIAKAN DI DALAM PANTI	6 ORANG	2022	DINAS SOSIAL PROV.
7	JUMLAH TENAGA KESEHATAN (DOKTER, PSIKIATER, PEKSOS MEDIS) YANG DISEDIAKAN DI DALAM PANTI	6 ORANG	2022	DINAS SOSIAL PROV.

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 78 orang penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 78 orang populasi

penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.

- *Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 715 orang Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 715 orang Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti

- *Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 140 orang Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 140 orang Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.

- *Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 11 orang tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dari 11 orang Populasi Populasi tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang membutuhkan rehabilitasi sosial di dalam panti.

- *Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 200 orang korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 200 orang Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang

membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi.

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah 100% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16

**REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN		
		INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI SKALA PROVINSI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	2022	100 %	100%	100%
		PERSENTASE (%) PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI				
2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI SKALA PROVINSI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	2022	100%	100%	100%
		PERSENTASE (%) ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI				
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI SKALA PROVINSI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	2022	100%	100%	100%
		PERSENTASE (%) LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI				
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN PENGEMIS DI DALAM PANTI SKALA PROVINSI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR GELANDANGAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	2022	100%	100%	100%
		PERSENTASE (%) GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN		
		INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
5	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DAERAH PROVINSI	2022	100%	100%	100%
		PERSENTASE (%) KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH PROVINSI				
6		JUMLAH PEKERJA SOSIAL/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DISEDIAKAN DI DALAM PANTI	2022	6 ORANG	6 ORANG	100%
7		JUMLAH TENAGA KESEHATAN (DOKTER, PSIKIATER, PEKSOS MEDIS) YANG DISEDIAKAN DI DALAM PANTI	2022	6 ORANG	6 ORANG	100%
NILAI RATA-RATA CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL PROVINSI KEPRI (%)						100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
ALOKASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	RP. 132.523.877
2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	RP. 866.807.858
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	RP. 133.181.088
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	RP. 22.575.200

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)
5	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	RP. 791.532.990
JUMLAH		RP. 1.946.621.013

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

Jumlah pegawai pendukung penerapan SPM di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebanyak 18 orang dengan perincian:

- a) PNS/ CPNS : 14 orang
- b) PTT Provinsi : 4 orang

Jumlah tenaga PNS sebanyak 14 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut:

- a) S 2 : 3 orang
- b) S 1 : 9 orang
- c) SLTA : 2 orang

6. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani;
- 2) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- 3) Tidak adanya Panti Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memberdayakan panti milik masyarakat yang kemudian difasilitasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Daerah, terkait dengan kewenangan provinsi untuk pelayanan dasar PPKS di dalam Panti, harus memiliki Panti Sosial.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas sektor serta lintas daerah dengan masalah penanganan PPKS;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3) Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS;
- 4) Pengusulan pembangunan Panti Sosial milik pemerintah. Saat ini pentusulan tersebut masih dalam tahap proses.

G. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2026. Untuk menjamin pelaksanaan SPM dapat dikawal dan berjalan dengan baik maka indikator SPM dituangkan dalam indikator program RPJMD 2021-2026, yang kemudian indikator-indikator tersebut dibagikan ke Organisasi Perangkat Daerah Pengampu sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan pendukung jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah untuk meningkatkan Persentase Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan SMA/SMK:



Tabel 4.18
Program Kegiatan Bidang Pendidikan

PROGRAM	KEGIATAN / SUB. KEGIATAN		PAGU
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS		183.361.182.085
	1	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	15.938.283.936
	2	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	10.484.136.200
	3	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	1.969.636.600
	4	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM FISIKA	5.606.991.600
	5	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KIMIA	4.736.383.902
	6	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER	1.436.882.600
	7	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	4.214.395.800
	8	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1.058.914.600
	9	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	6.003.052.581
	10	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	2.294.873.600
	11	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	2.235.626.600
	12	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	764.134.600
	13	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	217.800.000
	14	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG LABORATORIUM KIMIA	337.985.600
	15	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG LABORATORIUM KOMPUTER	247.350.600
	16	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG LABORATORIUM BAHASA	142.165.000
	17	REHABILITASI RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	170.122.000
	18	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	8.378.816.700
	19	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	189.572.000
	20	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	8.035.871.200
	22	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS	6.231.533.929
	23	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	267.610.000
	24	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	78.628.000
	25	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH ATAS	432.030.000
	26	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	101.888.384.437
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		146.544.872.066
	1	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	29.680.550.255
	2	PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA	8.241.552.607

	3	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM	1.366.900.000
	4	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1.893.480.000
	5	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.774.462.414
	6	REHABILITASI RUANG PRAKTIK SISWA	769.287.000
	7	PENGADAAN MEDEL SEKOLAH	4.316.375.200
	8	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	130.177.700
	9	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	18.274.900.000
	10	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	2.448.797.200
	11	PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	374.400.000
	12	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	310.894.905
	13	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	900.035.000
	14	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	74.063.059.785
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI		279.043.500
	1	PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	279.043.500

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Program dan kegiatan Pendukung jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus untuk meningkatkan Persentase Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB:

Tabel 4.20

Program dan kegiatan Pendukung jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus

PROGRAM	KEGIATAN		PAGU
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS		12.927.525.830
	1	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	1.174.441.200
	2	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	370.621.400
	3	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	219.924.600
	4	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	230.793.100

	5	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.454.642.000
	6	PEMBANGUNAN KANTIN SEKOLAH	324.253.650
	7	PENGADAAN MEDEL SEKOLAH	309.796.200
	8	PENGADAAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	579.798.200
	9	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	128.497.800
	10	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	356.493.680
	11	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	7.778.264.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI		516.917.200
	1	PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	516.917.200

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

2. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21

Program Kegiatan Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	PERSEN
			2 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN	PERSEN

				LUAR BIASA (KLB)	
			3	PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	PERSEN

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22

Program Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI FISIK (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	902.033.927,00	886.689.529,00	100
2			PERBAIKAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN	204.695.620,00	183.070.210,00	100
3			PEMBINAAN TEKNIS SDM DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SPAM PROVINSI	97.468.800,00	63.159.000,00	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	PEMBINAAN TEKNIS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	144.806.125,00	92.095.756,00	100
TOTAL				1.349.004.472,00	1.222.648.942,00	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23
Program Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI KEUANGAN (RP.)	REALISASI FISIK (%)
1	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	150.000.000	149.445.861	100
2			IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI	150.000.000	148.844.600	100

Sumber : Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau

5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Jenis pelayanan dasar : pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi,
- Indicator pencapaian : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi

Tabel 4.24
Program Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN	PAGU	REALISASI	%
1	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	KASUS	878.844.200	862.083.750	98.09
2	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERBITAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	KASUS	264,517,300	263.681.300	99.68
3	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI	DOKUMEN	0	-	0.00%
4	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DOKUMEN	89.413.572	88.748.070	99.26
5	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSIA HAK ASASI MANUSIA	ORANG	222.607.308	216.427.652	97.22
6	KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	DOKUMEN	0	-	0.00
7	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	UNIT	-	-	0.00
8	PENYUSUNAN SOP KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	DOKUMEN	33,793,570	29.080.200	86.05
9	PENYEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERKADA	LAPORAN	4.700.000	-	0.00
1	SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	LAPORAN	-	-	0.00
2	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	LAPORAN	264,517,300	264.297.300	99.92
3	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	LAPORAN	50.542.000	35.369.400	69.98
1	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	LAPORAN	274.513.550	270.006.582	98.36
2	PEMBERKASAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN OLEH PPNS PENEGAK PERDA, DUKUNGAN PELAKSANAAN	DOKUMEN	-	-	

	SIDANG DITEMPAT, PENGUATAN SEKRETARIAT BERSAMA PPNS				
			2.083.448.800	2.029.694.254	

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

6. Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25
Program Kegiatan Bidang Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI FISIK (%)
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK MENTAL, SPIRIUAL, DAN SOSIAL	RP. 132.523.877	RP. 130.520.149	100
		REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	RP. 290.641.556	RP. 278.261.270	100
			PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL SPRITUAL DAN SOSIAL	RP. 576.166.302	RP. 565.161.181	100
		REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK MENTAL, SPIRIUAL, DAN SOSIAL	RP. 133.181.088	RP. 133.003.376	100
		REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	PEMULANGAN KE DAERAH ASAL	RP. 22.575.200	RP. 22.543.200	100
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	PENYEDIAAN PERMAKINAN	RP. 338.013.000	RP. 337.214.650	100
			PENYEDIAAN SANDANG	RP. 178.505.390	RP. 177.882.490	100
			PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	RP. 275.014.600	RP. 270.111.200	100
JUMLAH				RP.1.946.621.013	RP.1.914.697.516	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta bahan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dengan ini Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan LPPD Tahun 2022 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Perbaikan sistem pelaporan melalui E-LPPD membantu memudahkan ketercapaian monitor terhadap perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome yang *diupdate* Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kontrol Tim Penyusun dan Pereviu menjadi lebih baik, walaupun belum sampai menyentuh pada IKK Output yang berjumlah 497 IKK.

Hingga H-1 penyampaian LPPD ini beberapa OPD masih melakukan *update* data karena hasil reviu dari APIP masih menemukan beberapa IKK yang tidak sesuai dengan teknis pengisian maupun data yang tidak tepat dan ada beberapa IKK yang perlu diperbaiki secara sistem karena dipandang belum terlalu tepat. Kedisiplinan OPD dalam mengisi IKK pun masih perlu dilakukan pembinaan karena hal yang sudah seharusnya menjadi tugas dan fungsinya belum terdata dengan baik.

Pada tahun 2022 tentunya disadari masih banyak kekurangan dan permasalahan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan



evaluasi dan pembinaan yang sekaligus akan menjadi prioritas utama yang harus diatasi di tahun yang akan datang demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tanpa menafikan beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama ini diucapkan terima kasih dan hal tersebut merupakan hasil kerjasama dan koordinasi dari berbagai elemen yang meliputi; pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang menjadi penggerak roda pembangunan, sehingga harapan keberhasilan yang telah diperoleh dapat terus ditingkatkan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, didalam menjalankan dan mengemban tugas serta amanah dalam pengabdian kepada masyarakat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.